

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN**

#### **A. Pendekatan Metode Penelitian**

Sebagaimana fokus studi ini, adalah mencoba untuk mengkonstruksikan proses transformasi dan mobilitas sosial ekonomi orang Gu-Lakudo dari konteks ekonomi subsisten di pedesaan pada ekonomi komersial di perkotaan. Dalam proses tersebut melibatkan “aktor sosial” dalam melakukan internalisasi terhadap nilai-nilai kehidupan dari konteks yang tradisional pada kemodernan. Dari hasil internalisasi itu, kemudian menghasilkan suatu bentuk “pengetahuan baru” yang digunakan sebagai instrumen praksis bagi mereka ketika melakukan tindakan individu dan inter-aksi sosial.

Adapun tindakan individu dan kolektivitas masyarakat yang menjadi instrumen berlangsungnya proses inter-aksi sosial, pada hakekatnya dibimbing oleh “suatu sistem pengetahuan” yang bersifat konstruktif dan secara dialektis berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, maka yang menjadi problem mendasar adalah pengetahuan tersebut memerlukan upaya “pemaknaan secara interpretatif”. Konsekwensi logisnya terhadap para peneliti—yang datang dari luar komunitas masyarakat tersebut—agar bisa memasuki wilayah pengetahuan mereka untuk menangkap berbagai fenomena sosialnya, merupakan suatu problem metodologis. Karena untuk berupaya memahami secara mendalam dan sistematis tindakan para aktor yang terlibat dalam suatu konteks sosial tertentu, adalah memerlukan instrumen metode penelitian yang lebih tepat dan fungsional untuk mengakses data-data yang diperlukan. Artinya, untuk memahami makna tindakan sosial dari individu dan motif seperti apa yang mempengaruhinya, merupakan suatu hal yang cukup rumit dan membutuhkan hubungan inter-aksi sosial yang berlangsung secara intens antara peneliti dengan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konteks sosial tertentu.

Oleh karena itu, untuk memahami berbagai makna tindakan subyektif individu dan kolektivitas orang Gu-Lakudo, maka secara metodologis digunakan “pendekatan kualitatif”. Ada

beberapa argumen pemikiran metodologis yang tentu saja mendasari metode pendekatan dalam penelitian ini.

*Pertama*, dengan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini cenderung menelusuri bagaimana suatu setting sosial terbentuk. Dalam hal ini berkaitan dengan fenomena kehidupan orang Gu-Lakudo sejak di daerah asalnya hingga setelah mereka melakukan urbanisasi ke kota Bau-Bau. Namun, konsekwensinya mendorong peneliti untuk memahami fenomena sosial mereka melalui gambaran yang utuh dan lebih mendalam. Menurut Denzin dan Lincoln (1994), penelitian memerlukan pemahaman sebagai suatu proses inter-aktif yang intens dan dibentuk oleh sejarah atau riwayat pribadi (*biographic*), gender, kelas sosial, etnisitas, dan orang-orang yang berada dalam *setting* sosial tersebut.

*Kedua*, melalui teknik pendekatan kualitatif tersebut, dimaksudkan untuk memotret secara detail tentang fenomena empirik dan dinamika kehidupan sosial komunitas masyarakat yang sedang diteliti (Jary and Jery, 1987). Penekanannya adalah bagaimana suatu realitas sosial terbentuk dan berkaitan dengan tindakan sosial individu. Ini memerlukan suatu hubungan yang intim antara peneliti dengan obyek yang sedang diteliti.

*Ketiga*, penelitian tentang rangkaian fenomena sosial orang Gu-Lakudo tersebut, tidaka hanya mengarah pada kajian sosiologi ekonomi, tetapi juga masuk pada konteks sosiologi agama. Ini berkaitan dengan peranan nilai-nilai keagamaan dalam mendorong proses transformasi sosial ekonomi mereka. Artinya, orientasi paham beragama menurut Islam memainkan peranan penting dalam membentuk “etos ekonomi perdagangan” yang mereka kembangkan. Oleh karena itu, secara metodologis penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi keagamaan. Studi keagamaan dimaksud adalah berkaitan dengan konteks sosial agama yang bersifat empirik. Menurut Suprayogo dan Tobroni (2003), bahwa studi keagamaan berarti meneliti fenomena sosial yang ditimbulkan oleh ajaran agama dan juga bagaimana sikap masyarakat terhadap agama yang dianutnya. Adapun fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama, seperti struktur dan pranata sosial serta perkembangan dinamika kehidupan masyarakatnya.

## **B. Kerja Lapangan dalam Penelitian**

Sejak *desain* awal dipersiapkan, penelitian ini telah diformulasikan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Konsekwensinya adalah memerlukan rangkaian data primer

yang diakses melalui observasi dan wawancara mendalam. Namun, penggunaan data-data kuantitatif juga tetap diporsikan sesuai dengan keperluan dalam penelitian.

Memang dalam kerja penelitian ini, adalah memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Yang konteks empiriknya, memerlukan kerangka pemikiran analitis yang cenderung bersifat multi-varian dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan untuk memahami secara mendalam dan utuh tentang bagaimana fenomena keberhasilan orang Gu-Lakudo dalam melakukan transformasi sosial ekonomi pada beberapa kota di Sulawesi Tenggara,

Oleh karena itu, maka tidak hanya memerlukan penggunaan kerangka analisis sosiologi ekonomi, tetapi juga membutuhkan perspektif *sosio-historis* dan *kultural-religious*.<sup>1</sup> Tujuannya adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana proses awal perubahan orientasi paham keagamaan orang Gu-Lakudo; (2) tumbuhnya etos ekonomi perdagangan mereka; (3) dorongan melakukan urbanisasi; (4) mulai mengembangkan perdagangan; dan (5) bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan aktivitas ekonomi.

Akibatnya, ketika peneliti mulai mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian lapangan, maka langkah-langkah yang dilakukan, tidak hanya sekedar berkaitan dengan prosedur yang bersifat teknis dalam proses pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan dalam proses penelitian. Tetapi juga secara formal perlu mengikuti prosedur yang bersifat administratif, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga di Kecamatan Gu-Lakudo. Karena itu, langkah-langkah penelitian lapangan yang telah dilakukan adalah sebagaimana yang dideskripsikan berikut ini.

Bulan Juni 2007, dimulai dengan pengurusan izin penelitian pada Badan Riset Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Kemudian pengantar yang sudah dikeluarkan sebagai persyaratan untuk turun lapangan, ditujukan ke Kantor Kesbang Kabupaten/Kota, sebagaimana

---

<sup>1</sup>Taufiq Abdullah, misalnya, membagi kajian agama dalam tiga kategori, yaitu: (1) agama sebagai doktrin; (2) struktur dan dinamika masyarakat yang dibentuk sistem nilai agama; dan (3) sikap masyarakat terhadap doktrin agama yang dianutnya. Yang pertama mengarah pada substansi ajaran agama dan kecenderungan reflektif pemikiran para penganutnya terhadap doktrin yang dikandungnya. Pada kategori kedua meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. Dan yang ketiga, mencoba menganalisis bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap penganutnya. Sementara itu, Middleton membedakan studi agama dengan keagamaan. Dalam studi agama, penekanannya lebih pada materi agama itu sendiri, misalnya: ritus, mitos, dan magis. Sedangkan kajian keagamaan, adalah berkaitan dengan gejala sosial yang mumbentuk realitas kehidupan masyarakat penganutnya. Karenanya, baik menurut metode pendekatan Abdullah dan maupun Middleton, dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kehidupan beragama *komunitas urban* Gu-Lakudo terkait dengan aktivitas mereka dalam mengembangkan ekonomi perdagangan. Namun demikian, dengan penekanan-penekanan pada aspek-aspek tertentu, sesuai dengan konteks pembahasan yang dilakukan. Lihat juga Nor Huda, *Pendekatan Sejarah Sosial-Intelektual Dalam Mengkaji Pemikiran Islam*, dalam Nor Huda dan Toto Suharto (Editor), *Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008.

tujuan penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pengantar penelitian yang dikeluarkan, juga ditujukan pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, termasuk berbagai institusi lain yang terkait dengan obyek utama dalam pencarian data lapangan.

Namun, penelitian lapangan baru mulai dilakukan pada bulan Juli 2007 di kota Bau-Bau. Adapun, mengapa kota tersebut yang dijadikan sebagai fokus penelitian—dengan porsi penggunaan waktu yang lebih lama (7 bulan)—karena yang menjadi tujuan awal migrasi orang Gu-Lakudo, adalah kota Bau-Bau. Kemudian mereka berkiprah pada pengembangan usaha ekonomi perdagangan, sehingga mencapai “keberhasilan” yang cukup fenomenal. Oleh karena itu, kota Bau-Bau menjadi *basis* dan *sentral* pengembangan usaha perdagangan mereka di Sulawesi Tenggara.

Selama bulan pertama dalam kerja penelitian lapangan, peneliti tidak langsung melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena kehidupan sosial ekonomi orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau. Terutama para pedagang yang berdagang di pasar Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli. Atau pun mereka yang menyebar di sekitar kota Bau-Bau dengan memfokuskan usaha perdagangan pada bangunan pertokoan yang mereka bangun. Tetapi pada tahap ini, difokuskan untuk melakukan penjejakkan secara *sosio-kultural* dan *religius*, sebagai upaya adaptasi peneliti terhadap lingkungan sosial budaya dan keagamaan yang menonjol di kota Bau-Bau. Oleh karena itu, maka dilakukan langkah-langkah sistematis untuk mulai masuk pada obyek dan konteks penelitian, agar data-data lapangan bisa diakses.

Pada awalnya, peneliti berkunjung ke STAIN dan Unidayan Bau-Bau. Informasi yang didapat dari para akademisi di Sekolah Tinggi Agama Islam itu, adalah berkaitan dengan kecenderungan kosmologi kehidupan orang Gu-Lakudo. Termasuk gambaran umum tentang tokoh agama dan para pedagangnya yang perlu dijadikan sebagai informan kunci untuk mendapatkan rangkaian data primer dalam penelitian lapangan. Sedangkan di Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau, peneliti mendapatkan berbagai masukan terkait dengan aktivitas perdagangan orang Gu-Lakudo, yang memang perkembangannya selama tiga dekade ini dapat kategorikan cukup fenomenal.

Langkah berikutnya, peneliti mulai melakukan observasi lapangan dan memasuki lokasi perdagangan para pedagang di kota Bau-Bau, baik di tiga pasar utama (Nugraha, La

Elangi, dan Mall Umna) maupun pertokoan. Tujuannya untuk mengamati secara langsung bagaimana mobilitas dan penguasaan segmen usaha perdagangan di kota Bau-Bau. Termasuk mengamati bagaimana perkembangan usaha perdagangan orang Tionghoa, Bugis-Makassar, Wakatobi, dan orang Buton,

Selanjutnya, peneliti memasuki konteks kehidupan sosial keseharian orang Gu-Lakudo, yang mengkonstruksikan hubungan secara dinamis antara: *rumah*, *pasar*, dan *masjid*. Dengan kecenderungan mereka yang demikian ini, maka peneliti pun perlu mengikuti irama rutinitas keseharian mereka dalam pelaksanaan “ritual keagamaan” di masjid agung kota Bau-Bau. Namun, sebagai konsekwensinya adalah pada setiap waktu shalat, peneliti perlu menyempatkan diri untuk ikut berjama’ah dengan mereka di *masjid*. Efek positifnya terhadap langkah berikutnya, semakin membuka ruang penelitian bagi peneliti untuk mulai melakukan “kontak person”, baik dengan para tokoh agamanya maupun dengan kalangan pedagangnya. Dalam proses selanjutnya telah mengantarkan saya pada alur komunikatif yang lebih terbuka dan bersifat personal dalam pencarian data lapangan.

Dengan demikian, maka peneliti dapat menentukan kategori informan kunci untuk mendapatkan serangkaian data primer dari orang Gu-Lakudo. Mereka adalah: (1) murid generasi awal Abdul Syukur; (2) tokoh agama dan masyarakat mereka di Bau-Bau dan Lakudo; (3) beberapa orang pedagang Gu-Lakudo; dan (4) tokoh masyarakat Buton dan Bugis-Makassar. Dari hasil wawancara tersebut, dapat memberikan gambaran yang lebih *komprensif* berkaitan dengan fenomena kehidupan orang Gu-Lakudo, sejak di daerah asalnya hingga mereka melakukan urbanisasi ke kota Bau-Bau.

Adapun sistematisasi penggambarannya adalah berkaitan dengan latar kehidupan mereka sebelum datangnya H. Abdul Syukur, tumbuhnya etos ekonomi mereka, dorongan mereka untuk melakukan migrasi, dan mengembangkan usaha perdagangan. Namun, yang lebih mendasar adalah terkait dengan bagaimana orang Gu-Lakudo memformulasikan nilai-nilai keagamaan dalam Islam yang mereka anut dan pahami untuk diaktualisasikan dalam pengembangan ekonomi perdagangan.

Selanjutnya, peneliti mencari data-data (*primer* dan *sekunder*) pada tiga pasar kota Bau-Bau dan instansi pemerintah yang terkait. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan konstruktif tentang profil perdagangan di kota tersebut, khususnya di pasar Karya

Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli dengan penguasaan segmen usaha dagang menurut kategori etnisitas.

Kecuali itu, untuk dua bulan terakhir dari proses penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dilanjutkan dengan pengambilan data di pasar Laino (*Raha*), Mall Mandonga dan pasar sentral Wua-Wua (*Kendari*). Apa yang dapat diharapkan dari pencarian data di dua kota ini untuk mendapat gambaran tentang seberapa banyak pedagang Gu-Lakudo yang berdagang di tiga pasar tersebut. Namun yang juga lebih mendasar untuk dikonsepsikan adalah bagaimana mereka melakukan perluasan pasar perdagangan, sehingga mereka membentuk jaringan sistem perdagangan lokal pada tiga kota di Sulawesi Tenggara (Bau-Bau, Raha, dan Kendari).

Setelah selesai penelitian lapangan, maka sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti ketika di Bau-Bau tentang keberadaan orang Gu-Lakudo di sekitar pasar Tanah Abang, Jakarta. Karena itu, peneliti mencoba melacak keberadaan orang Gu-Lakudo di sekitar pusat kegiatan ekonomi perdagangan *mega-politan* di Indonesia tersebut. Ternyata, mereka juga sudah masuk dalam struktur ekonomi perdagangan di level nasional, meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit dibanding dari etnik lain di Indonesia. Mereka menggeluti bidang usaha jasa pengiriman barang (*expedisi*) dan penginapan, serta usaha perdagangan kecil-kecilan. Namun, keberadaan mereka cukup bermakna dan strategis bagi kebanyakan pedagang Gu-Lakudo yang datang dari Bau-Bau, Raha, dan Kendari. Karena pengiriman barang belanjaan mereka sudah tidak mengalami kesulitan dalam proses pengiriman. Selain itu, bagi mereka juga tersedia penginapan dengan tarif yang cukup ekonomis. Ini artinya, dengan keberadaan mereka di Jakarta telah berfungsi sebagai “simpul jaringan” dalam pengembangan usaha perdagangan mereka pada level lokal di Sulawesi Tenggara.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses penelitian ini, secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Karena itu, untuk pencarian data lapangan penekanannya lebih pada penemuan data-data *primer*. Namun, kebutuhan terhadap rangkaian data *sekunder* tetap diperlukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan variasi data lapangan. Dengan demikian, keberadaan data kuantitatif hanya untuk mendukung data-data kualitatif, yang memang menjadi representasi dari tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian.

Bagi kebanyakan peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, konsekwensinya dituntut untuk memposisikan diri secara mandiri dan sekaligus mengoptimalkan perannya sebagai “instrumen utama” dalam penelitian. Artinya, peneliti kualitatif berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data lapangan, dan sekaligus melakukan analisis data, hingga menyajikan laporan hasil penelitian. Karena itu, dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik (*varian*) pengumpulan data lapangan, yang secara metodik sudah bersifat elementer, seperti: observasi, wawancara, analisis kesejarahan dan budaya lokal. Selain itu, data penelitian juga dikumpulkan melalui berbagai dokumen resmi, baik dari pemerintah daerah maupun kalangan swasta, yang tentu saja memiliki keterkaitan secara mendasar dengan kebutuhan data-data lapangan yang ingin ditemukan dalam proses penelitian

### ***1. Pengamatan (Observation)***

Dalam proses penelitian lapangan dengan menggunakan pengamatan secara terbuka (*open observation*), merupakan salah satu varian ketika seorang peneliti menggunakan metode kualitatif. Meskipun rangkaian data yang diperoleh melalui catatan lapangan, baik kualitas maupun validasinya dapat dikategorikan masih rendah. Namun demikian, pengamatan atau observasi, menurut Patricia A. Adler dan Peter Adler dalam *Handbook of Qualitative Research* (Denzin dan Lincoln, 1994), memiliki kelebihan tersendiri jika dikombinasikan dengan metode lain. Karena observasi langsung yang dilakukan peneliti, kalau digabung dengan perangkat pengumpulan data yang lain, maka memungkinkan untuk menghasilkan temuan-temuan yang mendalam dan memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga dapat mengukuhkan konsistensi penelitian dan validasi temuan lapangan. Inilah sebabnya, metode observasi dalam pengumpulan data secara kualitatif, tetap diperlukan. Manfaatnya, adalah untuk memotret secara langsung tentang kondisi umum dan obyektif lapangan, serta bagaimana intensitas dari para “aktor sosial” yang berperan aktif dalam konteks realitas kehidupan yang sesungguhnya.

Tugas awal peneliti—menurut Adler dan Adler—adalah memilih setting pengamatan atau observasi yang tepat. Karena bagi seorang peneliti yang sedang melakukan pengamatan, adalah perlu mengawali langkah pengamatannya dengan cara mencari jalan masuk pada setting sosial yang hendak dipotretnya. Pada tahap ini, peneliti perlu memfokuskan diri untuk memilih karakteristik dan hubungan antar unsur-unsur yang sebelumnya ditetapkan sebagai objek penelitian. Dalam antropologi etnografi (Supradley, 1980), menyatakan bahwa tahap-tahap observasi bagaikan semacam pipa cerobong yang mengarahkan dan memfokuskan perhatian

peneliti pada unsur-unsur dalam setting sosial, yang secara teoretis dan sekaligus empiris bersifat esensial. Inilah sebabnya, menurut Adler dan Adler, dari kalangan sosiolog terkemuka, seperti Georg Simmel dan Erving Goffman dalam berbagai studi mereka, cenderung mengandalkan metode observasi partisipan. Kaitannya dengan hasil penggunaan metode observasi tersebut, Georg Simmel berkesimpulan bahwa interaksi antar-manusia yang terkritalisasi (*sosiasi*) itulah yang menjadi landasan keteraturan sosial. Karena jejaring persinggungan dari berbagai relasi sosial dengan manusia lain, yang justru melahirkan masyarakat. Sedangkan Erving Goffman yang terkenal dengan konsep pemikiran sosiologi dramaturginya, adalah memfokuskan perhatiannya pada pola-pola inter-aksi. Pengamatannya terfokus pada bagaimana manusia membangun citra-dirinya dan membawa pencitraan itu pada orang lain, melalui tindakan, inter-aksi, dan jalinan hubungan sosial.

Terkait dengan proses penelitian ini, maka sebelum peneliti melakukan wawancara dengan para informan untuk mendapatkan serangkaian data primer, terlebih dulu dilakukan observasi lapangan. Meskipun bukan pengamatan terlibat atau observasi partisipan. Karena bentuk pengamatan terlibat memerlukan tahapan pelaksanaan yang bersifat sistematis dengan menggunakan waktu yang panjang. Namun demikian, dengan observasi langsung tersebut dapat mendekatkan peneliti pada obyek penelitian dalam proses pencarian data-data lapangan, khususnya data primer. Yang tentu saja berkaitan dengan fenomena sosial kehidupan keseharian orang Gu-Lakudo. Ini dilakukan, terkait dengan aktivitas perdagangan mereka di pasar, kompleks pertokoan, dan lingkungan pemukiman mereka, termasuk dalam kaitannya dengan rutinitas kehidupan beragama mereka pada berbagai masjid di kota Bau-Bau.

Kecuali itu, selain peneliti melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian, juga mengembangkan percakapan bebas dengan para pedagang, tokoh masyarakat dan agama, serta ikut shalat berjama'ah di Masjid, atau pun menghadiri acara keluarga orang Gu-Lakudo. Dengan metode observasi tersebut, bagi peneliti dapat memberikan gambaran umum tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Meskipun masih perlu didukung dengan metode lain untuk mendapatkan data-data lapangan yang lebih rinci dan mendalam.

Untuk mendukung kerja peneliti dalam melakukan *observasi* lapangan maka disertai dengan pemotretan (pengambilan gambar) terhadap berbagai obyek penting dalam proses penelitian. Misalnya bangunan pasar, masjid, daerah asal orang Gu-Lakudo, dan dermaga tambatan perahu layar H. Abdul Syukur. Dengan menggunakan metode tersebut, telah



mengarahkan peneliti pada pengembangan penelitian lebih lanjut. *Pertama*, makin memudahkan peneliti untuk mengakses data-data yang diperlukan pada komunitas orang Gu-Lakudo. *Kedua*, peneliti juga dilibatkan dalam penyelesaian masalah internal mereka, baik di kota Bau-Bau maupun di Gu-Lakudo. *Ketiga*, memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pemetaan terhadap penguasaan segmen usaha dagang menurut kategori etnik pada tiga pasar utama di kota Bau-Bau (Karya Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli), serta fenomena umum perkembangan usaha perdagangan di kota tersebut.

## **2. Wawancara dengan Informan**

Dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka untuk mengakses data-data *primer* dari para informan kunci, penggunaan teknik wawancara menjadi tumpuan utamanya. Menurut Fontana dan Frey, dalam *Handbook of Qualitative Research* (Denzin dan Lincoln, 1994) bahwa wawancara merupakan suatu cara yang paling umum dan efektif digunakan untuk memahami manusia yang lain. Karena itu, maka dalam studi sosiologi menempatkan metode pengumpulan data lapangan dengan menggunakan wawancara sebagai prioritas utama. Argumennya, adalah bahwa ketika seorang peneliti menggunakan teknik wawancara sama artinya dengan melakukan inter-aksi. Sedangkan studi sosiologi membahas berbagai inter-aksi sosial. Metode wawancara mengandung suatu “seni bersosialisasi” yang mempertemukan dua manusia yang saling berinter-aksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status (Benney dan Hughes dalam Denzin dan Lincoln, 1994).

Namun demikian, penerapan teknik wawancara bagi para peneliti adalah memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam kaitannya dengan kesiapan awal pengetahuan peneliti tentang konteks sosial budaya masyarakat yang sedang diteliti. Karena itu, para ilmuwan sosial menekankan beberapa hal yang menjadi prasyarat utama yang perlu dipersiapkan sebelumnya, misalnya: (1) memahami akses masuk ke lokasi penelitian; (2) perlunya menemukan informan kunci yang tepat; (3) pencitraan diri peneliti terhadap para subyek penelitiannya; dan (4) menciptakan hubungan yang harmonis dengan para informannya.

Bagi seorang peneliti sosial harus memiliki kemampuan yang spesifik untuk masuk dan sekaligus melibatkan dirinya pada akses ke lokasi penelitian. Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan peneliti untuk memahami konteks sosial budaya kelompok masyarakat yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap orang-orang miskin di jalan-jalan kota, maka perlu mengikuti alur perjalanan mereka, karena boleh jadi mereka tidak memiliki

tempat tinggal yang menetap. Ini terkait dengan kemampuan peneliti dalam melakukan adaptasi terhadap subyek penelitian yang nantinya dijadikan sebagai informan.

Dengan kemampuan yang dimiliki seorang peneliti untuk masuk pada akses lokasi penelitian, maka dapat mengantarkannya pada sosok informan kunci dalam proses penelitiannya. Yang oleh para ilmuwan sosial menyebutnya sebagai “orang dalam” yang dapat dikategorikan memiliki peran-sentral dalam komunitas masyarakatnya. Karena dengan posisinya yang demikian itu, dapat memberikan informasi penelitian secara representatif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fenomena sosial yang menonjol dalam komunitasnya.

Namun, kemampuan seorang peneliti untuk masuk pada akses lokasi penelitian dan menemukan informan kunci, belum bisa menjamin kesuksesan penelitiannya, jika tidak disertai dengan pencitraan diri secara positif terhadap para informannya, agar tidak kontras dengan keberadaan mereka. Para ilmuwan sosial memberikan contoh, ketika wawancara berlangsung dengan informan, tidak seharusnya peneliti mencitrakan diri bagaikan seorang dosen yang sedang membimbing mahasiswanya. Karena itu, maka keputusan tentang bagaimana sebaiknya seorang peneliti mencitrakan diri selama penelitian berlangsung adalah merupakan suatu hal yang penting karena bisa menimbulkan kesan yang mendalam bagi para informan. Dengan demikian, dapat menentukan sukses-tidaknya penelitian yang dilakukan.

Kemampuan peneliti mempersiapkan rangkaian tahapan dalam proses wawancara dan langkah-langkah sistematis yang dilewati, maka seorang peneliti dapat meraih kepercayaan dari komunitas masyarakat yang ditelitinya. Sebab, jika hal ini yang terbangun, maka boleh jadi bisa terjalin hubungan yang harmonis antara peneliti dengan para informannya. Keharmonisan hubungan peneliti dengan informannya menjadi “pintu masuk” untuk mewujudkan suatu proses penelitian yang lebih kaya dan cenderung mendalam. Dan sebagai akibat positifnya, adalah mengantarkan peneliti untuk mengumpulkan data-data empirik yang diperlukan.

Terkait dengan urgennya penggunaan metode wawancara dalam proses penelitian lapangan untuk mengakses rangkaian data primer, maka Jack Douglas (1985), dalam *Handbook of Qualitative Research* (Denzin dan Lincoln 1994), menawarkan “model wawancara kreatif” bagi para peneliti kualitatif. Salah satu unsur penting yang terkandung dalam wawancara kreatif adalah memposisikan para informan sebagai subyek penelitian yang sesungguhnya. Artinya, memiliki kebebasan untuk berekspresi dan mengemukakan berbagai hal yang terkait dengan data lapangan yang ingin ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara menjadi prioritas utamanya. Guba dan Lincoln, dalam *Handbook of Qualitative Research* (Denzin dan Lincoln, 1994), memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif yang difokuskan pada berlangsungnya “proses” terhadap suatu konteks sosial, adalah untuk mengkonstruksikan suatu kejadian, orang, perasaan, motivasi, dan harapan. Dengan demikian, penggunaan wawancara untuk mengakses data penelitian menjadi sesuatu yang urgen. Yang dalam hal ini memiliki relevansi yang kuat dengan konteks “masa lalu” dan “masa kini” terhadap proses perubahan orientasi kehidupan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Namun tentu saja, sebelum masuk pada tahapan wawancara, peneliti terlebih dulu melakukan berbagai persiapan. Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh para ilmuwan sosial dalam proses penelitian kualitatif. Persiapan tersebut, memang dianggap perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian lapangan, yang dimulai di kota Bau-Bau dan Lakudo, kemudian kota Raha dan Kendari, hingga berakhir di Jakarta.

*Pertama*, penjajakan dan pemetaan terhadap “posisi informan kunci”. Tujuannya, adalah untuk mengetahui dengan jelas, apakah seorang informan dapat diposisikan sebagai tokoh masyarakat dan agama, pedagang, atau profesi lain dalam komunitas orang Gu-Lakudo. Dengan teknik ini, sekaligus juga untuk memetakan keberadaan mereka di kota Bau-Bau, dan khususnya generasi awal yang menjadi murid KH. Abdul Syukur.

*Kedua*, untuk melancarkan proses pengambilan data melalui teknik ini, maka peneliti merumuskan instrumen wawancara bagi semua kategori informan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Ketiga*, peneliti juga melakukan wawancara bebas dengan para informan tertentu, baik dari orang Gu-Lakudo sendiri maupun dari luar komunitas mereka. Hal ini dilakukan untuk lebih mengakses data-data penelitian secara variatif dan juga mendalam. *Keempat*, dalam pendokumentasian hasil wawancara, dilakukan dengan cara menyiapkan *tape-recorder* yang disertai dengan catatan lapangan.

Dengan metode pengumpulan data *primer* dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, kemudian didukung dengan data sekunder, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang cukup representatif berkaitan dengan keberadaan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara. Terutama bagaimana mereka melakukan transformasi sosial ekonomi dari konteks ekonomi subsisten di pedesaan pada ekonomi pasar modern di perkotaan. Pada awalnya

mereka mulai di kota Bau-Bau setelah melakukan urbanisasi pada akhir tahun 1960-an, dan kemudian melakukan perluasan pasar ke kota Raha dan Kendari.

### **3. Penggunaan Dokumen**

Selain mengakses data-data *primer*, peneliti pun berupaya menemukan data-data *sekunder* yang diperlukan melalui dokumen-dokumen resmi, baik yang ada pada instansi pemerintah kota Bau-Bau, seperti: Bappeda, Perindag, Depag, Sahbandar, dan instansi lain. Sedangkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan yang bersumber dari non-pemerintah, didapat dari tiga pasar utama kota Bau-Bau (Laelangi, Karya Nugraha, dan Mall Umna Rijoli).

Dengan serangkaian dokumen resmi yang didapatkan dari berbagai instansi pemerintah kota Bau-Bau, adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana visi pembangunan ekonomi pemerintah kota tersebut (*Bappeda*); (2) perkembangan perdagangan (*Perindag*); (3) dukungan transportasi laut (*Sahbandar*); dan (4) intensitas naik haji orang Gu-Lakudo (*Depag*). Adapun dokumen yang didapat dari tiga pasar di kota Bau-Bau (Laelangi, Nugraha, dan Mall Umna Rijoli), untuk memahami komposisi perdagangan menurut kategori etnik, khususnya berkaitan dengan orang Gu-Lakudo.

### **D. Alur Pemikiran Analisis Penelitian**

Berdasarkan rangkaian konsep pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini, adalah untuk menganalisis proses transformasi dan mobilitas sosial ekonomi orang Gu-Lakudo. Sebagai salah satu etnik lokal yang ada di Sulawesi Tenggara, sebelum terjadi perubahan orientasi paham keagamaan, mereka hanya terfokus pada aktivitas ekonomi subsisten di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Pada masa ini, orang Gu-Lakudo cenderung menjalani kehidupan yang bersifat tribal di selat Buton. Menurut tokoh agama dan masyarakat mereka, pada masa itu orang Gu-Lakudo menjalani kehidupan yang jahilyah.

Namun, setelah menerima paham pembaruan Islam yang diajarkan oleh Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary, kemudian dapat menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka. Selanjutnya, mereka terobsesi untuk melakukan urbanisasi dan migrasi desa-kota pada akhir tahun 1960-an dan mulai ikut mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau. Pada dekade inilah mereka mulai melakukan transformasi ekonomi dari konteks ekonomi subsisten di daerah asal mereka pada ekonomi modern yang berbasis perdagangan.

Seiring dengan berlangsungnya proses pembangunan di masa Orde Baru, intensitas usaha perdagangan orang Gu-Lakudo terus berkembang. Kalau sebelumnya, mereka hanya mengembangkan perdagangan pakaian jadi dan barang kelontong, tetapi setelah memasuki tahun 1990-an, mereka mulai melakukan diversifikasi usaha dagang. Selanjutnya, mereka juga melakukan perluasan pasar perdagangan ke kota Raha dan Kendari, bahkan keluar Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, maka orang Gu-Lakudo berhasil mengembangkan usaha perdagangan di perkotaan, terutama di kota Bau-Bau. Dan yang menarik untuk dianalisis adalah bahwa orientasi paham keagamaan yang mereka anut cenderung memainkan peranan penting dalam pengembangan usaha perdagangan mereka. Sehingga, keberadaan institusi masjid dan pasar bagi orang Gu-Lakudo, tidak terposisi secara dikotomis, tetapi memiliki hubungan yang bersifat fungsional. Aktivitas peribadatan mereka di masjid dan orientasi naik haji, menjadi simbol keberagaman mereka. Sebaliknya, mobilitas usaha perdagangan mereka di pasar menjadi simbol keunggulan daya kompetitif mereka sebagai salah satu etnik lokal di Sulawesi Tenggara.

Dengan demikian, maka alur pemikiran analisis yang dikembangkan dalam studi ini, adalah dimulai dari latar sosial budaya dan keagamaan serta konteks kehidupan sosial ekonomi orang Gu-Lakudo, di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Lalu mereka menerima pembaruan orientasi paham keagamaan dari H. Abdul Syukur. Selanjutnya, berlangsung proses pembelajaran dalam pengembangan usaha perdagangan. Karena Abdul Syukur sendiri adalah seorang pedagang antar-pulau, sehingga pengetahuan dan pengalaman dagangnya diajarkan pada orang Gu-Lakudo. Setelah itu, Abdul Syukur mendorong mereka untuk melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* desa-kota. Karena itu, orang Gu-Lakudo terobsesi meninggalkan daerah asal mereka untuk datang ke Bau-Bau dan mulai mengembangkan usaha perdagangan, meskipun masih dalam usaha kecil.

Konsekwensi logisnya, maka dalam penelitian ini diperlukan juga pendekatan kesejarahan dan pemikiran keagamaan dalam Islam. Hal ini untuk merefleksikan bagaimana konteks kehidupan sosial masa lalu orang Gu-Lakudo. Adapun pemikiran kesejarahan, adalah lebih berorientasi pada analisis sejarah sosial suatu masyarakat, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial, seperti: Clifford Geertz, Sartono Kartodirdjo, Taufik Abdullah, dan Kuntowijoyo, terkait dengan konteks Indonesia. Sedangkan pemikiran keagamaan, adalah

merujuk pada konsep *agama profetik* dan *transformatif*, seperti yang dikonsepsikan Kenneth Boulding<sup>2</sup> kemudian digunakan oleh Kuntowijoyo (1991)<sup>3</sup> untuk menganalisis bagaimana fenomena sosial budaya keagamaan masyarakat muslim di Indonesia.

## E. Keterbatasan dalam Penelitian

Penelitian ini, agaknya tidak terlalu berlebihan jika dikategorikan memiliki keluasan konteks dan varian pemikiran analisisnya. Meskipun basis pemikirannya sosiologi, tetapi juga memerlukan penguatan dari varian pemikiran ekonomi, budaya, agama, dan kesejarahan. Selain itu, adalah keluasan lokasi penelitiannya, yang meliputi: Gu-Lakudo, Bau-Bau, Raha, Kendari, dan Jakarta. Dengan demikian, maka akses terhadap kebutuhan data-data *primer* melalui para informan dan data-data *sekunder*, memerlukan suatu kerja lapangan yang efektif.

Karena itu, maka untuk mengakses data-data lapangan yang lebih utuh dan bervariasi, peneliti harus melakukan penelitian lapangan secara berpindah-pindah. Meskipun yang menjadi fokus utamanya adalah kota Bau-Bau, sebagai basis pengembangan usaha dagang mereka di Sulawesi Tenggara. Demikian juga untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena kehidupan sosial orang Gu-Lakudo yang mengintegrasikan sistem nilai keagamaan dan aktivitas ekonomi, memerlukan suatu sintesis pemikiran keilmuan (sosiologi, ekonomi, dan agama).

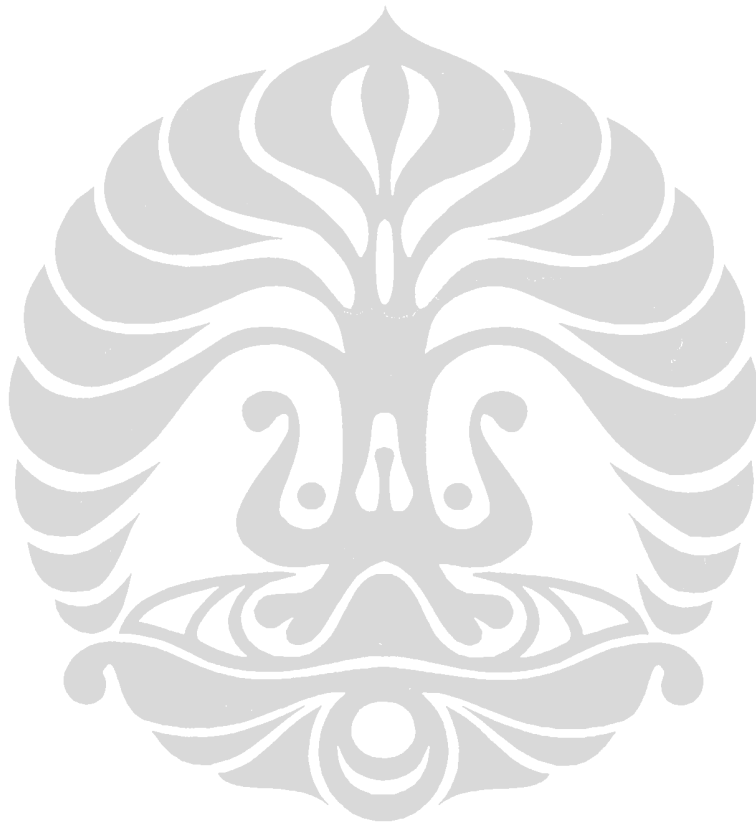
Namun, hal itu dilakukan untuk mencoba memahami bagaimana proses transformasi sosial ekonomi orang Gu-Lakudo yang berbasis pada perdagangan dan digerakkan oleh

---

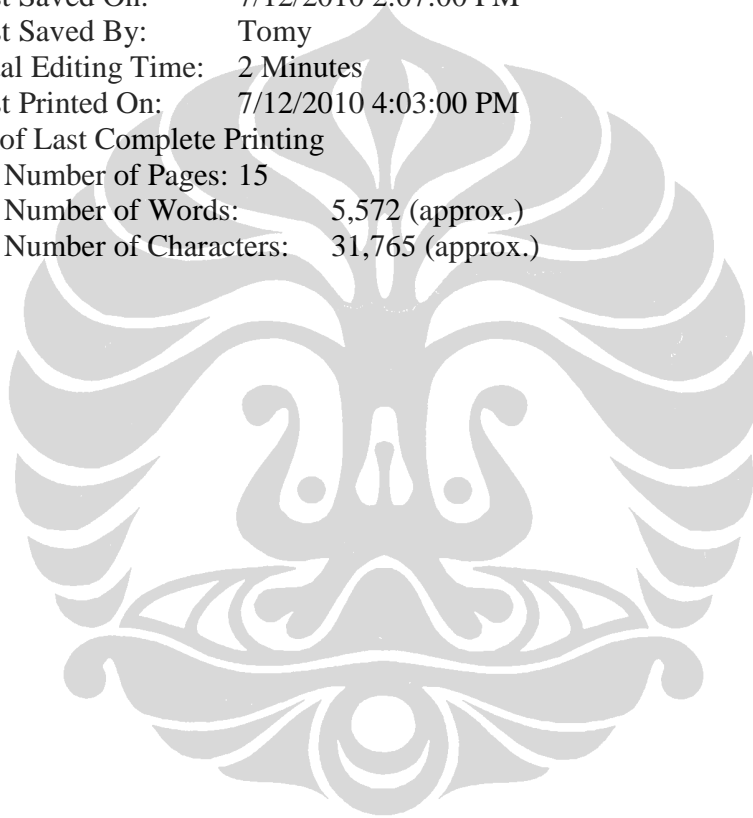
<sup>2</sup>Dalam pemikiran filsafat sosial dan ekonomi Kenneth Boulding, menurut Dawam Rahardjo, membedakan antara “agama profetik” dengan “agama kependetaan”. Yang menunjuk pada dinamika kesejarahan dalam perkembangan agama-agama besar dunia, seperti: Yahudi, Kriesten, dan Islam, yang telah menggerakkan perubahan-perubahan besar dalam proses transformasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiganya bersifat profetik. Namun, setelah agama-agama besar tersebut melembaga, justru menjadi rutinitas, stagnan dan cenderung konservatif. Lihat juga Dawam Rahardjo, *Ilmu Sejarah Profetik dan Analisis Transformasi Masyarakat*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991, h. 17-31.

<sup>3</sup>Kuntowijoyo mensintesis konsep *profetik* dan *transformasi* untuk menganalisis bagaimana fenomena dinamika perkembangan *sosio-historis* dan *kultural* keagamaan. Dan terkait dengan konteks masyarakat Indonesia—khususnya umat Islam—untuk mendorong proses transformasi sosialnya, adalah diperlukan pemikiran paradigmatis “ilmu sosial profetik”. Argumen epistemologis Kuntowijoyo, bahwa transformasi masyarakat memerlukan arah tujuan pencapaian yang jelas, untuk apa dilakukan, dan juga oleh siapa yang melakukan. Dalam kaitan inilah, menurut Kuntowijoyo, peranan ilmu-ilmu sosial profetik yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa? Karenanya, ilmu-ilmu sosial profetik mengarahkan proses perubahan berdasarkan “cita-cita etik kemanusiaan” (humanisasi, emansipasi, liberasi, dan transendensi) yang merujuk atau derivasi dari ayat Al-Qur’an: “*Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah*” (QS. 3:110). Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991, h. 478-486.

pemahaman mereka terhadap orientasi paham keagamaan dalam Islam. Akibatnya, pelaksanaan penelitian ini memiliki kerumitan tersendiri, yang juga disertai dengan berbagai keterbatasan peneliti, sehingga begitu banyak hambatan yang dilewati dalam proses penyelesaiannya. Meskipun demikian, hasil kerja suatu penelitian perlu dituntaskan hingga pada tahapan penulisan sebagai bentuk pertanggung-jawaban ilmiah, khususnya di dunia akademik.



Filename: BAB III  
Directory: D:\Lutfi\Lutfi  
Template: C:\Documents and Settings\Tomy\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 2:06:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 2:07:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 2 Minutes  
Last Printed On: 7/12/2010 4:03:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 15  
Number of Words: 5,572 (approx.)  
Number of Characters: 31,765 (approx.)





## BAB IV

### DAERAH ASAL ORANG GU-LAKUDO

#### A. Kondisi Wilayah Muna Selatan

Secara geografis, Sulawesi Tenggara merupakan “provinsi kepulauan” di kawasan Tengah Indonesia. Wilayah pemerintahannya, meliputi sebagian kecil dari daratan pulau Sulawesi di bagian Tenggara. Namun, yang lebih dominan adalah gugusan pulau-pulau kecil hingga rangkaian pulau-pulau terkecil.<sup>1</sup> Dengan demikian, maka Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak *etnik* lokal.<sup>2</sup> Terkait dengan kondisi wilayahnya yang berbentuk kepulauan tersebut, menyebabkan keterisolasian pada berbagai daerah pedesaan, termasuk daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian selatan pulau Muna. Sehingga, berakibat pada tidak lancarnya hubungan desa-kota. Namun demikian, dengan berlangsungnya pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, telah membuka keterisolasian wilayah, melancarkan hubungan desa-kota, dan sekaligus juga mendorong berlangsungnya *urbanisasi* dan *migrasi*.

Adapun daerah asal orang Gu-Lakudo, berada di wilayah bagian selatan pulau Muna, yang lebih tepatnya adalah berada di bagian timur pulau tersebut. Secara geografis posisi daerah mereka dikelilingi teluk Lakudo dan terhalang oleh tanjung Wamengkoli dari arah selat Buton. Namun demikian, letak geografisnya tetap berhadapan dengan selat Buton. Oleh karena itu, ketika orang Gu-Lakudo datang ke Bau-Bau, mereka bisa melakukan perjalanan laut dari daerah asalnya dengan menggunakan perahu layar atau kapal motor. Tetapi, setelah terbangunnya pelabuhan ferry di Wamengkoli—yang menghubungkan penyeberangan dari wilayah bagian selatan pulau Muna dengan kota Bau-Bau, maka semakin memudahkan kelancaran transportasi. Orang Gu-Lakudo dan masyarakat Muna selatan pada umumnya, dari daerah asal mereka untuk ke kota Bau-Bau atau sebaliknya, menggunakan sarana penyeberangan laut tersebut.

---

<sup>1</sup>Provinsi Sulawesi Tenggara, pada awal terbentuknya tahun 1963 hanya terdiri dari empat Daerah Otonom Tk. II/Kabupaten (Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka). Namun, dalam perkembangannya telah mengalami pemekaran wilayah, yang awalnya dua wilayah pemerintahan Kota (Kendari dan Bau-Bau). Selanjutnya, pemekaran kabupaten (Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, dan Buton Utara).

<sup>2</sup>Etnik lokal yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti: Tolaki, Mekongga, Wawonii, Muna, Kulisusu, Buton, Wakatobi, Morunene, Kabaena, Gu-Lakudo, Bajo, dll. Karenanya, provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki banyak etnik lokal, ketimbang propinsi lain di Sulawesi, misalnya Sulawesi Selatan.

Kecuali itu, sekitar 85 km jaraknya dari kota Raha—ibu kota kabupaten Muna—atau satu setengah jam perjalanan darat untuk sampai di daerah Gu-Lakudo. Selanjutnya, 20 km perjalanan ke pelabuhan *fery* Wamengkoli untuk melakukan penyeberang ke kota Bau-Bau. Dengan demikian, maka kalau kita melakukan perjalanan darat dari kota Raha menuju pelabuhan *fery* Wamengkoli, kita dapat melewati daerah asal orang Gu-Lakudo, yang sekarang ini sudah menjadi kecamatan Lakudo.

Sebagaimana letak geografisnya, daerah asal orang Gu-Lakudo di Muna selatan, posisinya berada di teluk Lakudo. Karena itu, maka meskipun jarak permukiman mereka dengan pelabuhan *fery* Wamengkoli sekitar 20 km, pada dasarnya daerah mereka juga berada di pesisir pantai. Karena daerah asal orang Gu-Lakudo dikelilingi oleh laut yang membentuk sebagai teluk. Sementara itu, posisi pelabuhan *fery* yang menghubungkan dengan pelabuhan kota Bau-Bau, adalah berada di tanjung Wamengkoli yang berhadapan dengan selat Buton.

Wilayah Muna selatan—terutama pada bagian timur—yang menjadi daerah asal orang Gu-Lakudo, merupakan suatu daerah permukiman masyarakat yang dikenal sangat tandus. Karena memang di sepanjang wilayah tersebut hanya memiliki hamapran lahan yang berbatu-batu dan tanah kapur. Dengan struktur datarannya yang bergelombang dan berbukit, serta hamparan ilalang yang tampak sejauh mata memandang. Oleh karena itu, masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan. Potensi sumber daya alam yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakatnya, hanyalah pada sektor kelautan. Hal ini mendorong mereka untuk mengembangkan perdagangan berbagai hasil laut ke Bau-Bau, Makassar, dan Surabaya.

Meskipun kondisi wilayahnya terkenal tandus, tetapi sejak masa silam di daerah Muna selatan telah menjadi permukiman masyarakat yang membentuk perkampungan, baik untuk orang Gu-Lakudo sendiri maupun berbagai *sub-etnik* lokal lainnya. Namun, dalam proses perkembangannya sejak pasca kemerdekaan hingga memasuki dekade awal pembangunan Orde Baru (1970-an—1980-an), wilayah Muna selatan masih mengalami kondisi “keterisolasian”.<sup>3</sup> Meskipun pada dekade tersebut sudah banyak orang Gu-Lakudo yang melakukan *migrasi*, tetapi

---

<sup>3</sup>Pada dekade awal proses berlangsungnya pembangunan Orde Baru, tahun 1970-an hingga 1980-an, pada umumnya daerah-daerah pedesaan di Sulawesi Tenggara—baik yang menghubungkan antar-kampung/desa maupun desa-kota—masih mengalami kondisi keterisolasian. Karena jalur jalan yang mendukung sarana transportasi darat belum terbangun. Demikian juga sarana transportasi laut yang menghubungkan desa-kota masih sangat terbatas. Kondisi keterisolasian ini yang juga dialami oleh masyarakat yang ada di wilayah Muna selatan ketika itu.

daerah asal mereka pun masih cenderung terisolasi. Kondisi keterisolasian di wilayah Muna selatan mulai terbuka, setelah memasuki dekade 1990-an.

*Pertama*, karena jalur jalan beraspal yang mendukung kelancaran transportasi darat yang melintasi daratan pulau Muna dari utara ke selatan telah dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kedua*, sarana transportasi laut yang dapat menghubungkan wilayah Muna selatan bagian timur dengan kota Bau-Bau, melalui pelabuhan *fery*, juga sudah terbangun.

Kelancaran transportasi darat dan laut yang menghubungkan kota Raha dengan kota Bau-Bau tersebut, tentu saja berdampak positif bagi masyarakat yang ada di wilayah Muna selatan. Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, misalnya, semakin meningkatkan mobilitas usaha perdagangan mereka untuk melakukan ekspansi pasar perdagangan, khususnya ke kota Raha. Karena didukung oleh jalur jalan atau transportasi darat yang menghubungkan daerah asal orang Gu-Lakudo dengan ibu kota kabupaten Muna tersebut.

Ini berbeda dengan yang dialami generasi awal orang Gu-Lakudo. Kondisi wilayah mereka yang tandus, kemudian belum didukung dengan sarana jalan yang tidak memadai, maka masyarakat yang ada di daerah ini mengalami keterpencilan. Akibatnya, ketika mereka melakukan perjalanan antar-kampung dan desa, atau pun desa-kota, mengalami banyak hambatan, baik melalui jalan darat maupun laut. Demikian pula akses mereka terhadap pengembangan sumber daya ekonomi, juga cukup terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum terbangunnya prasarana jalan yang mendukung transportasi darat. Adapun jalur jalan yang menghubungkan daerah asal orang Gu-Lakudo dengan kampung atau desa yang ada di sekitarnya, hanya menggunakan jalur-jalur jalan setapak yang sudah ada sejak masa kerajaan dan kolonial Belanda.

Bagi generasi awal orang Gu-Lakudo yang melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*, misalnya, mereka mengatakan bahwa akses mereka terhadap hubungan desa-kota pada tahun 1970-an sangat terbatas. Kalau mereka ke kota Bau-Bau, orang Gu-Lakudo hanya menggunakan perahu kecil yang didayung oleh beberapa orang, seperti penjelasan dari salah seorang tokoh masyarakatnya.

Pada masa lalu, hubungan daerah kami Gu-Lakudo dengan Bau-Bau sangat sulit dan terbatas. Sebelum kami tinggal menetap di kota ini, kalau kami berkeinginan untuk datang ke Bau-Bau, maka kami hanya menggunakan sampan kecil yang harus kami dayung sendiri bersama teman, dua atau tiga orang. Supaya kami bisa sampai waktu

pagi di kota, maka sejak tengah malam kami sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Tapi dengan perkembangan sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan yang lalu. Sekarang kita tinggal memilih saja, mau naik *fery* atau motor laut (*speed*) di pelabuhan Wamengkoli, kita cepat sampai ke Bau-Bau” (H. Baharuddin, wawancara 3 Nopember 2007).

Dengan penjelasan singkat dari salah seorang tokoh masyarakat orang Gu-Lakudo di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa sebelumnya kondisi wilayah mereka yang terpencil, karena memang berada di teluk Lakudo. Sarana transportasi laut yang mereka gunakan—misalnya untuk ke Bau-Bau—sangat terbatas yang hanya menggunakan perahu kecil yang didayung sendiri tanpa menggunakan mesin.

Namun, setelah berlangsungnya proses pembangunan dan industrialisasi di masa Orde Baru, maka berbagai prasarana jalan yang menunjang kelancaran transportasi darat dan laut mulai dibangun. Misalnya, ruas-ruas jalan beraspal yang melintas di sepanjang pulau Muna—dari utara ke selatan, hingga melewati pemukiman masyarakat Gu-Lakudo—sudah lama terbangun. Demikian halnya pelabuhan *fery* yang menunjang transportasi darat dan laut serta menghubungkan antara daratan di bagian selatan pulau Muna dengan kota Bau-Bau, juga sudah terbangun.

Kalau kita melakukan perjalanan dari kota Bau-Bau, misalnya, hanya sekitar 20 menit waktu yang digunakan dalam perjalanan laut sudah sampai di pelabuhan Wamengkoli, melalui penyeberang *kapal fery*. Lalu kita melanjutkan perjalanan darat sekitar 45 menit untuk sampai di daerah asal orang Gu-Lakudo. Namun, sejauh mata memandang, kita menyaksikan bukit-bukit batu kapur dan hamparan ilalang yang tumbuh di tanah kering yang tandus. Adapun pepohonan dan tanaman masyarakat yang tampak, hanya kayu keras dan pohon kelapa lokal yang ditanam masyarakat, meskipun dalam pertumbuhannya menjadi kerdil.

Potret daerah asal orang Gu-Lakudo di wilayah Muna selatan, adalah seperti yang tampak pada gambar berikut ini, yang menunjukkan daerah berbatu-batu dan tanah berkapur. Karena itu, sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai pengembangan pertanian dan perkebunan masyarakatnya.

*Gambar 1.4.*

Potret daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian selatan pulau Muna.



**Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Lakudo (2008).**

Pemandangan tersebut, menjadi suatu kenyataan bahwa di sepanjang wilayah Muna selatan, merupakan daerah yang tandus. Misalnya, pada bagian timurnya, sebagai daerah orang Gu-Lakudo, bukannya terbentang hamparan “hutan yang lebat” yang tumbuh di atas tanah subur, seperti pada umumnya daerah lain di Sulawesi Tenggara. Kecuali yang tampak terlihat di sepanjang perjalanan darat dan mata memandang adalah hamparan batu kapur yang gersang.

Dengan demikian, maka bagi kebanyakan komunitas masyarakat yang memang sejak lama bermukim di wilayah tersebut, sangat tidak memungkinkan untuk mengembangkan potensi pertanian atau perkebunan. Tentu saja sebagai penyebabnya, adalah topografi wilayah mereka yang berbatu-batu dan tandus. Karena dengan topografi yang berbukit-bukit dan juga mengandung batu kapur, kemudian ditambah dengan kondisi keterisolasian wilayah, agaknya telah mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dengan kondisi wilayah mereka yang cukup tandus dan gersang, mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang cenderung *primitif-tribal*.

Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, dengan pola kehidupan mereka yang cenderung primitif tersebut, juga diakui oleh salah seorang tokoh masyarakatnya. Yang memberikan penjelasan tentang bagaimana fenomena kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama orang Gu-Lakudo pada masa silam.

Di sini (maksudnya di Gu-Lakudo) pada masa silam kehidupan masyarakatnya boleh dikatakan setengah *primitif*. Pada waktu saya masih kecil, saya sudah ingat—sebelum datang H. Abdul Syukur—mereka menganut kepercayaan yang *animisme*.

Setiap rumah penduduk, pasti ada sesajen yang telah disiapkan untuk penyembahan terhadap roh halus para leluhur. Belum dikatakan mampu dalam suatu keluarga, kalau belum ada tempat sesembahan yang disiapkan. Dan orang di sini menyebutnya, “sariga”. Sariga itu dibuat dari kayu, bentuknya segi empat sebesar meja, yang dibungkus dengan kain putih dan di dalamnya ditaruhkan berbagai jenis sesajen untuk dijadikan sebagai sarana penyembahan (H. Ahmad Hamzah, wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008).

Selain kehidupan mereka yang setengah *primitif*, juga cenderung menjalani kehidupan yang bersifat *tribal* di selat Buton, sebelum datangnya H. Abdul Syukur di daerah mereka. Tentang kecenderungan yang demikian ini, sebagaimana penjelasan dari salah seorang tokoh masyarakat Buton.

Pada masa lalu, sebelum datangnya H. Abdul Syukur di Lakudo, orang Gu menjalani kehidupan yang keras di selat Buton. Ketika itu di Kota Bau-Bau, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa saja memasuki rumah orang dan mengambil berbagai macam barang yang diinginkan tanpa disadari dan diketahui oleh pemilik rumah. Kalau toh yang punya rumah terbangun pada waktu tengah malam, mereka sudah jauh meninggalkan pantai Bau-Bau (HD, Wawancara 10 Juni 2007).

Selain orang Gu-Lakudo, berbagai komunitas *sub-etnik* lokal lain, seperti orang Bombonawulu, Baruta, Tolandona, Wadiabero, Mawasangka, yang bermukim di wilayah Muna selatan. Karena memang sejak masa kekuasaan kesultanan Buton, wilayah tersebut sudah berkembang menjadi permukiman masyarakat dalam bentuk kampung (*kadie*). Meskipun di masa itu masih cukup terisolasi, yang disebabkan oleh belum terbukanya jaringan transportasi darat yang menghubungkan antar kampung/desa dan juga desa-kota.

Tetapi, dengan berlangsungnya pembangunan selama pemerintahan Orde Baru melalui pembukaan berbagai jaringan jalan darat yang menghubungkan antar-kampung dan desa serta kecamatan, maka nuansa keterisolasianya menjadi terbuka. Dengan kondisi perkembangan wilayah yang demikian ini, maka sebagai implikasi positifnya semakin mendorong mobilitas penduduk yang bermukim di wilayah itu untuk melakukan aktivitas ekonomi yang menunjang kehidupan mereka, yang cenderung berorientasi perdagangan.

Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, awalnya mereka tidak membentuk perkampungan di pesisir pantai seperti yang bisa kita saksikan sekarang ini. Tetapi sebelumnya, mereka bermukim

di sekitar perbukitan yang berbatu-batu yang berjarak 3 kilometer dari pesisir pantai. Sedangkan di sepanjang pesisir pantainya, yang ketika itu banyak ditumbuhi oleh pohon cemara yang rindang,<sup>4</sup> hanya berfungsi sebagai pelabuhan nelayan tradisional. Dijadikan sebagai area permukiman masyarakat, setelah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan yang dipadukan dengan perdagangan hasil laut dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya mulai berkembang.

Kecenderungan yang demikian ini, semakin marak dengan kehadiran H. Abdul Syukur yang memang berprofesi sebagai seorang pedagang dan juga penyebar syiar Islam. Kemudian menarik minat warga masyarakat mereka yang sebelumnya tinggal di perbukitan yang penuh dengan bebatuan untuk turun ke pantai dan membangun “permukiman baru”. Dalam perkembangan selanjutnya, daerah asal orang Gu-Lakudo menjadi sebuah kampung yang ciri-khas kehidupan masyarakatnya yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi perdagangan, baik ketika di daerah mereka sendiri atau di wilayah perkotaan setelah melakukan migrasi.

Oleh karena itu, meskipun di wilayah Muna selatan tersebut terkenal begitu tandus, tetapi penyebaran penduduk yang bermukim di daerah ini juga terus bertambah. Berlangsungnya dinamika penambahan penduduk semakin menonjol, dengan terjadinya kerusuhan Ambon pada tahun 1998. Dari berbagai etnik lokal yang telah melakukan perantauan selama puluhan tahun dan berhasil mengembangkan usaha perdagangan di Ambon—termasuk orang Gu-Lakudo—setelah terjadinya kerusuhan, terjadi arus eksodus secara besar-besaran. Mereka pulang kampung, dengan tujuan selain menyelamatkan diri dari kerusuhan, juga untuk menata kembali usaha dagang mereka yang sudah puluhan tahun mereka kembangkan di Ambon.

Menurut data kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa penduduk Lakudo sampai akhir tahun 2006 berjumlah 23.325 jiwa, yang terdiri dari 12.109 laki-laki dan 11.216 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, menyebar

---

<sup>4</sup>Orang Lakudo menyebut “pohon cemara” yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai di daerah permukiman mereka yang sebelumnya berada di perbukitan, mereka menyebutnya “pohon gu”. Dari penyebutan inilah, kemudian orang Lakudo menamakan tempat permukiman mereka sebagai “Kampung Gu”. Wawancara dengan H. Ahmad Hamzah di Lakudo, 8 Pebruari 2008.

secara tidak merata dalam 12 desa/kelurahan. Selain itu, memiliki 7.573 jiwa usia yang non-produktif dan 15.752 jiwa usia produktif, serta 13.696 penduduk usia 15 tahun ke atas.<sup>5</sup>

## B. Administrasi Pemerintahan Wilayah Gu-Lakudo

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara geografis letak daerah asal orang Gu-Lakudo—baik ketika masih berada di sekitar perbukitan maupun setelah di pesisir pantai—adalah berada di bagian selatan pulau Muna. Namun demikian, sejak masa kesultanan Buton dan kerajaan Muna hingga terbentuknya daerah otonom di Sulawesi Tenggara, daerah tersebut tidak masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten Muna. Melainkan termasuk atau menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten Buton, dengan ibu kotanya Bau-Bau.

Daerah Gu-Lakudo dan pada umumnya wilayah Muna selatan, memang sejak masa silam sudah masuk dalam wilayah pemerintahan Buton. Hal ini terbentuk dimulai pada dekade kekuasaan kesultanan Buton, penerapan pemerintahan kolonial Belanda dalam bentuk *distrik*, hingga pasca kemerdekaan. Ketika terbentuknya daerah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1963, dengan berdasarkan UU NO. 29 tahun 1959, awalnya hanya terdiri dari empat kabupaten (Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka).

Terkait dengan perkembangan pemerintahannya yang mengalami perubahan bentuk, maka struktur pemerintahan Gu-Lakudo pun terus berubah. Di masa kekuasaan kesultanan Buton (1511-1960), misalnya, didukung 72 daerah penyangga yang disebut dengan *kadie*. Karena itu, wilayah Gu-Lakudo merupakan salah satu daerah penyangga dari kesultanan Buton yang juga dikenal dengan sebutan *kadie*. Yang dalam sistem dan struktur pemerintahannya, adalah dipimpin oleh seorang bangsawan (*kaomu*) yang diutus dari pusat pemerintahan kesultanan, dengan jabatan *Lakina Lakudo* (AM. Zahari: 1977, h. 94 ; JW. Pim Schoorl, 2003, h. 270).

Sebagai wilayah penyangga pemerintahan kesultanan, *kadie* memiliki “otonomi terbatas”. Dalam pengertian, bahwa selain bebas mengurus dirinya sendiri, tetapi juga harus menunjukkan kesetiaan kepada pusat pemerintahan di keraton Buton (Zuhdi, 1999). Namun, setelah mendapat pengaruh dan juga kontrol yang kuat dari pemerintah kolonial Belanda, maka berbagai daerah penyangga kekuasaan kesultanan Buton dilebur menjadi “pemerintahan *distrik*”.

---

<sup>5</sup>Data kependudukan tersebut, adalah hanya orang Gu-Lakudo yang menetap tinggal di daerah asal mereka di kecamatan Lakudo. Sementara itu, yang menetap tinggal di kota Bau-Bau sebagai *kaum urban*, peneliti mengalami “kesulitan” tersendiri untuk melacaknya.



Demikian juga daerah Gu-Lakudo, menjadi pemerintahan *distrik* yang dipimpin oleh seorang kepala *distrik*.<sup>6</sup> Artinya, secara administratif pemerintahan, Gu-Lakudo disebut sebagai *distrik* Gu.

Dalam perkembangannya, setelah memasuki masa kemerdekaan yang kemudian diikuti dengan terbentuknya daerah otonom untuk Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1963,<sup>7</sup> yang didukung oleh empat kabupaten: Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka. Oleh karena itu, dengan mengalami proses perubahan sistem pemerintahan, maka secara administratif daerah asal orang Gu-Lakudo terbentuk sebagai kecamatan Gu. Yang dalam perkembangan kewilayahan dan perubahan pemerintahan kabupaten Buton, daerah asal mereka dimekarkan kembali menjadi tiga wilayah pemerintahan kecamatan (Gu, Lakudo, dan Sangiawambulu).

Inilah sebabnya, ketika orang Gu-Lakudo mulai terobsesi melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* sekitar tahun 1960-an, kota utama yang menjadi tujuan mereka adalah kota Bau-Bau sebagai ibu kota Kabupaten Buton. Meskipun setelah itu, ada juga di antara mereka yang melanjutkan perantauan ke daerah lain, seperti: Sulawesi Tengah, Ambon, Papua, Timor-Timur, Kalimantan, Sumatera, dan bahkan hingga Malaysia.

Dalam bentuk pemerintahannya yang terakhir, wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Lakudo, terdiri dari 9 desa dan 3 kelurahan. Adapun desa-desanya, adalah: Waara, Madongka, Nepa Mekar, Matawine, Mone, Moko, Wajogu, Metere, dan Lolibu. Sedangkan wilayah kelurahannya, adalah: Boneoge, Wanepa-nepa, dan Lakudo.

### **C. Latar Sosial Budaya Orang Gu-Lakudo**

Pulau Muna dan pulau Buton di Sulawesi Tenggara, merupakan dua pulau kecil yang dengan konstruksi kehidupan sosial budaya masyarakatnya, lebih terkonsentrasi pada konteks kehidupan pesisir, ketimbang pelosok daratan atau pegunungan. Karena itu, akar budaya mereka pun membentuk basis kehidupan sosial masyarakat pantai atau pesisir. Demikian pula halnya

---

<sup>6</sup>Kepala *Distrik*, sebagaimana halnya Lakina *Kadie*, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kesultanan, dan mendapat restu dari pemerintah kolonial Belanda, juga berasal dari kaum bangsawan (*kaomu*) orang Buton. Hal ini sebagaimana ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Martabat Tujuh, sebagai konstitusi dasar dalam penataan sistem pemerintahan kesultanan Buton. AM. Zahari, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

<sup>7</sup>Sebelum Sulawesi Tenggara terbentuk sebagai propinsi tersendiri pada tahun 1963 sesuai dengan amanat UU NO. 29 tahun 1959 adalah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan ibu kotanya Makassar. Sedangkan Sulawesi Tenggara sendiri (Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka) merupakan wilayah kabupaten dengan ibu kotanya Bau-Bau.

orang Gu-Lakudo. Proses awal berlangsungnya mobilitas sosial mereka lebih cenderung “melintasi laut” ketimbang daratan.

Berkaitan dengan penyebutan terhadap orang Gu-Lakudo, adalah menunjuk pada dua pengertian. *Pertama*, sebagai suatu daerah atau pun wilayah permukiman. *Kedua*, merupakan salah satu *sub-etnik* lokal Muna-Buton. Terkait dengan daerah atau wilayah permukiman penduduk atau masyarakat, karena pada masa silam di sepanjang kampung Gu-Lakudo banyak ditumbuhi “pohon cemara yang rindang”. Adapun keberadaan pohon cemara tersebut, dalam tradisi lisan orang Gu-Lakudo, mereka menyebutnya sebagai “pohon gu” (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008).

Inilah sebabnya—menurut H. Ahmad Hamzah—daerah asal mereka, awalnya disebut sebagai “Kampung Gu”. Sedangkan sebagai salah satu *sub-etnik* lokal, adalah menunjuk pada identitas mereka yang berasal dari kampung/daerah Gu-Lakudo. Karena memang di Sulawesi Tenggara, terutama wilayah kepulauan (Buton, Wakatobi, dan Muna) memiliki banyak etnik lokal dan bahkan *sub-etnik* lokal yang membentuk komunitas-komunitas masyarakat. Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, secara *etnisitas* mereka dapat dikategorikan sebagai *sub-etnik* Muna.

Karena letak daerah asal mereka berada di daratan pulau Muna selatan pada bagian timur. Di wilayah Muna selatan ini, kalau kita melakukan pendekatan secara *etnografis* memang bukan hanya didiami oleh orang Gu-Lakudo; tetapi juga oleh *sub-etnik* Muna yang lain, misalnya: Bombonawulu, Baruta, Boneoge, Mawasangka, dll. Selain itu, berdasarkan dialektika kebahasaan yang digunakan oleh orang Gu-Lakudo dan berbagai *sub-etnik* lokal lainnya yang bermukim di wilayah Muna selatan, adalah menggunakan “rumpun bahasa Muna”, dan bukan bahasa Buton (*Wolio*). Meskipun pada masa silam, daerah mereka masuk dalam wilayah kekuasaan kesultanan Buton.<sup>8</sup> Karena itu, maka sejak berabad-abad lamanya mereka dituntut

---

<sup>8</sup>Pada masa silam, kesultanan Buton menerapkan sistem pemerintahan “Teo-Demokrasi” yang berbentuk *Monarchi-Konstitusional*. Adapun konstitusi kenegaraannya yang dikonsepsikan secara tertulis, disebut Undang-Undang Martabat Tujuh, yang mengatur struktur pemerintahan, misalnya: pembatasan terhadap kekuasaan mutlak seorang Sultan, keberadaan Perdana Menteri dengan Dewan Menterinya, perangkat pemerintahan yang ditempatkan pada berbagai wilayah kekuasaan kesultanan—termasuk di Gu-Lakudo—hingga membentuk suatu jaringan sistem pemerintahan yang selanjutnya tersistematisasi dalam struktur Dewan Kesultanan Buton. Dan uraian tentang konsepsi Undang-Undang Martabat Tujuh tersebut, dapat disimak dalam A.M. Zahari, *Fiy Darul Butuni*, Dan sebelum penelitian disertasi ini dilakukan, penulis juga secara intens melakukan kajian sejarah kebudayaan Buton dan Muna, misalnya: *Sultan Buton Muhammad Idrus—Umara dan Ulama Cendekia*, makalah untuk Lembaga Penelitian Asia Timur-Jauh Perancis, di Jakarta, 1990; *Islam dalam Budaya Muna—Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, diterbitkan oleh Umitoha, Makassar, 1997; dan *Kesultanan Buton: Kerajaan Islam Butuuni Teo-Demokrasi—Studi Sosio-Historis dan Kultural Perkembangan Peradaban Islam Klasik Buton*, makalah untuk dipresentasikan dalam Simposium Internasional di Bau-Bau, 2004.

untuk melakukan proses adaptasi terhadap sistem nilai budaya Buton. Dan terintegrasinya kedua *sub-kultur* tersebut, yang kemudian menjadi latar *sosio-historis* dan *kultural* komunitas *urban* orang Gu-Lakudo.

Dengan demikian, maka dari latar *sosio-kultural* orang Gu-Lakudo, dapat dikategorikan sebagai salah satu “sub-etnik lokal” yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang mengintegrasikan “dua karaktersitik nilai-nilai budaya” dalam struktur kehidupan sosial masyarakat mereka, dalam hal ini Muna dan Buton. Argumen yang dapat dikemukakan bahwa pertautan antara orang Gu-Lakudo dengan *sub-kultur* Muna, selain terkait dengan daerah asal mereka yang memang berada di daratan pulau Muna, juga dari segi dialektika kebahasaan, mereka menggunakan rumpun bahasa daerah itu. Sedangkan keterkaitannya dengan sistem nilai budaya Buton, karena memang sejak masa silam wilayah Gu-Lakudo merupakan salah satu daerah penyangga (*kadie*) dari politik kekuasaan kesultanan Buton.

Oleh karena itu, maka sebagaimana dalam konstruksi sosial budaya masyarakat Muna dan Buton, orang Gu-Lakudo juga menganut sistem keluarga yang luas (*extended family*). Dalam satu keluarga, tidak hanya terdiri dari ayah sebagai kepala rumah tangga dan juga pencari nafkah; ibu yang berperan menjadi pengelola kesejahteraan keluarga; serta anak sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga. Tetapi, meliputi rumpun keluarga besar, misalnya: kakek dan nenek, paman dan bibi, kemanakan, hingga sepupu dekat. Bahkan dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang juga disertai dengan kehadiran jajaran keluarga jauh yang dianggap dekat, karena terjadinya kedekatan hubungan komunikatif dengan keluarga itu.

Dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang luas ini, adalah berkaitan dengan konsep pengakuan sosial terhadap “garis keturunan” baik dari pihak ayah maupun ibu. Terbangunnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan seperti itu, juga disebabkan oleh adanya pertalian perkawinan kakek-nenek mereka di masa lampau. Kemudian menyebabkan munculnya pengakuan terhadap “hubungan sedarah”. Dengan kecenderungan seperti ini semakin diperkuat oleh jalinan komunikasi antar-sesama anggota keluarga yang berlapis itu. Sebagai implikasi sosio-kulturalnya, maka meskipun konstruksi hubungan sedarah tersebut sudah cukup jauh, tetapi dapat terjalin kembali dalam bentuk kekerabatan.

Sebagaimana konsepsi ikatan pertalian hubungan kekeluargaan dan kekerabatan orang Muna pada umumnya, maka dalam masyarakat Gu-Lakudo pun mengkonsepsikan “jalinan

hubungan kekeluargaan dan kekerabatan” yang diistilahkan sebagai *bhasitie*.<sup>9</sup> Ungkapan dalam bahasa Muna tersebut—juga bahasa Gu-Lakudo dan berbagai *sub-etnik* lain di wilayah Muna selatan—adalah menunjuk pada suatu konsep sosial budaya yang justru secara sosiologis mengkonstruksikan kehidupan sosial yang bersifat kolektivitas. Karena hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang terjalin dengan baik, maka dapat menjadi kekuatan perekat (*kohesi sosial*) bagi kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada konsep pemikiran teoretik Emile Durkheim, adalah sebagai bentuk “solidaritas mekanik” yang masih mencitrakan kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional.

#### **D. Potensi SDA dan Kehidupan Sosial Ekonomi**

Keberadaan daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian selatan pulau Muna seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu wilayah yang tandus, berbatu-batu, dan gersang. Sehingga, sangat tidak mendukung untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk menjadi sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, baik orang Gu-Lakudo maupun berbagai *sub-etnik* lokal lainnya yang bermukim di wilayah itu, tidak memungkinkan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi yang mengandalkan basis pertanian dan perkebunan.

Dengan kondisi yang demikian itu, mendorong mereka untuk mencari sumber kehidupan lain di daerah pesisir. Atau, melakukan penangkapan ikan sebagai nelayan tradisional. Karena itu, sebelum orang Gu-Lakudo termotivasi melakukan migrasi untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau, sumber kehidupan mereka masih terkonsentrasi pada aktivitas ekonomi bertahan hidup (*subsisten*). Dalam pengertian, bahwa dari bentuk-bentuk usaha kehidupan perekonomian yang mereka lakukan, hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kecenderungan seperti ini, tentu saja menjadi fenomena umum dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di berbagai daerah di Indonesia, sebelum berlangsungnya proses pembangunan.

Oleh karena itu, dengan kondisi alam di daerah mereka yang demikian itu, tentu saja tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman produktif secara ekonomis. Adapun tanaman yang bisa tumbuh, hanyalah ubi-ubian dan pohon kelapa di sekitar wilayah pesisir pantai. Namun untuk di

---

<sup>9</sup>Lihat juga La Ode Abdul Rauf, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 71-72.

daerah perbukitan, adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk dijadikan lahan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi yang demikian ini, maka dapat dikonsepsikan bahwa masyarakat Gu-Lakudo tidak memiliki tradisi budaya dan pengetahuan terhadap pertanian, sebagaimana etnik lokal lain yang bermukim di daerah lain di Sulawesi Tenggara.

Pada dekade tersebut, justru mereka belum memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang berorientasi jangka panjang. Yang lebih mengedepankan kemampuan rasionalitas, sebagaimana halnya dalam perdagangan. Dengan konteks kehidupan ekonomi orang Gu-Lakudo yang demikian itu, agaknya ada dua faktor mendasar yang cukup berpengaruh: (1) kondisi daerah mereka yang tandus; dan (2) mereka belum memiliki etos ekonomi modern dan pengetahuan dagang yang beorientasi pasar.

Aktivitas kehidupan orang Gu-Lakudo dalam ekonomi bertahan hidup (*subsisten*) di daerah asal mereka, berlangsung sebelum dan setelah datangnya H. Abdul Syukur. Potensi sumber daya alam yang mendukung kelangsungan perekonomian mereka hanya pada penangkapan ikan. Namun, yang menjadi problem sosial ekonominya adalah ketika mereka mengembangkan aktivitas kehidupan di laut, hanya tergolong sebagai nelayan tradisional. Yang melakukan penangkapan ikan dengan alat-alat tangkap yang serba terbatas, seperti pancing dan kurung-kurung.

Dengan demikian, pengetahuan mereka terhadap dunia perdagangan dan strategi pengembangan usaha dagang, masih sebatas pada penjualan hasil laut dan perlengkapan “jaring tangkap ikan” yang kebanyakan digunakan oleh nelayan tradisional di sepanjang pesisir pantai daerah mereka. Bentuk usaha dagang yang berskala kecil seperti ini tidak secara umum dilakukan oleh orang Gu-Lakudo, tetapi hanya segelintir orang yang berminat pada kegiatan ekonomi perdagangan. Selain itu, terkait dengan kemampuan modal finansial yang dimiliki. Dalam pengertian, bahwa dari segelintir orang Gu-Lakudo yang mulai terlibat dalam usaha perdagangan berbagai jenis hasil laut dan kebutuhan nelayan tradisional, juga dibatasi oleh kesiapan modal material secara memadai. Kalau ada yang terlibat dalam perdagangan hasil laut, mereka hanya menjadi pedagang kecil yang berperan sebagai tengkulak di level kampung/desa untuk di jual pada pedagang China, terutama di kota Bau-Bau.

Namun, aktivitas penangkapan ikan dengan cara tradisional tersebut dilakukan orang Gu-Lakudo, intensitasnya semakin meningkat setelah datangnya Abdul Syukur di daerah asal

mereka pada tahun 1942. Karena Abdul Syukur memotivasi mereka untuk meningkatkan mobilitas penangkapan ikan. Dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal dan berbagai bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh para nelayan ketika mereka beroperasi di laut pada waktu malam. Selain itu, untuk mendukung pengelolaan hasil tangkapan ikan yang dilakukan para nelayan tradisional, Abdul Syukur berinisiatif membentuk koperasi nelayan yang dinamakan “Koperasi Gu Makmur” (Samdin, 2007; H. Ahmad Hamzah, Wawancara, 8 Pebruari 2007). Adapun tujuan pembentukan lembaga ekonomi ini, adalah selain untuk memaksimalkan pengelolaan tangkapan ikan bagi para nelayan tradisional, tetapi juga memberikan pembelajaran terhadap masyarakat Gu-Lakudo tentang cara dan strategi pengelolaan sumber daya ekonomi melalui sistem kelembagaan yang bersifat modern.

Maraknya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional orang Gu-Lakudo tersebut, kemudian disertai dengan aktivitas perdagangan antar-pulau yang dilakukan oleh Abdul Syukur, adalah menjadi semacam momentum pembelajaran dalam proses tumbuhnya etos ekonomi perdagangan. Dengan kecenderungan tersebut berakibat pada terciptanya kondisi transformatif bagi masyarakat Gu-Lakudo dari konteks perilaku ekonomi bertahan hidup (*subsisten*) pada pengembangan aktivitas ekonomi pasar yang berorientasi perdagangan. Kondisi ini yang membentuk “etos ekonomi” orang Gu-Lakudo.

*Gambar 2.4.*

**Potret pantai dan teluk Lakudo di daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian selatan pulau Muna.**



**Sumber:** Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Lakudo (2008).

Karena itu, maka dengan kedatangan H. Abdul Syukur untuk menetap tinggal di daerah mereka pada tahun 1942, dapat dikonsepsikan telah membawa perubahan yang mendasar terhadap prospek kehidupan sosial orang Gu-Lakudo. Dari konteks ekonomi bertahan hidup (*subsisten*) yang berorientasi pada ekonomi pasar. Karena Abdul Syukur tidak hanya melakukan perubahan terhadap orientasi paham dan tradisi keagamaan yang mereka anut sebelumnya, tetapi juga menggerakkan potensi sumber daya ekonominya. Terkait dengan hal ini, Syukur memotivasi orang Gu-Lakudo untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada penangkapan ikan sebagai nelayan tradisional.

Dengan diawali proses internalisasi terhadap pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya ekonomi secara rasional dan kelembagaan, kemudian menumbuhkan etos ekonomi mereka untuk mengembangkan usaha perdagangan. Karenanya, motivasi orang Gu-Lakudo untuk mulai berkiprah pada aktivitas perdagangan, adalah diawali dengan pengembangan usaha hasil tangkapan ikan yang mereka perdagangkan bersama Abdul Syukur. Selanjutnya, mendorong terbukanya kesempatan mereka untuk mengembangkan perdagangan desa-kota, antar-kota, dan juga antar-pulau. Hal ini dimungkinkan, karena didukung dengan terbukanya “jaringan hubungan maritim” di kepulauan Indonesia, yang telah berlangsung lama.<sup>10</sup>

### **E. Pengaruh Modernisasi dan Pembangunan**

Sebagai suatu konsep pemikiran yang berorientasi pada perubahan sosial budaya, modernisasi (*modernisation*) dan pembangunan (*development*), pada hakekatnya diadopsi dari perkembangan kebudayaan industrial masyarakat Barat, yang ditransformasikan pada sistem kehidupan masyarakat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, dalam proses transformasi nilai-nilai kehidupan telah membawa perubahan yang cenderung bersifat konstruktif, baik yang berkaitan dengan struktur fisik masyarakat maupun tataran sosial dan budayanya.

Pada struktur fisik misalnya, dapat diamati bagaimana berlangsungnya proses pembangunan wilayah-wilayah perkotaan—mulai dari kota kecil (*town*) hingga kota besar (*city*)—yang mencitrakan model kota industrial modern yang disertai dengan berkembangnya

---

<sup>10</sup>Penjelasan yang lebih mendalam tentang terbukanya jaringan komunikasi hubungan maritim di kepulauan Indonesia di masa silam, lihat misalnya, Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*, Komunitas Bambu, Depok, 2008.

pusat-pusat perdagangan atau bisnis. Meskipun dalam pertumbuhan kota modern tersebut, masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang bercorak tradisional dan bahkan yang menampakkan kekumuhan. Sementara itu, perubahan pada konteks kehidupan sosial adalah berkembangnya lembaga-lembaga modern—seperti pada aspek ekonomi, politik, dan nilai budaya, yang sebelumnya belum dikenal dalam masyarakat tradisional di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia.

Karena itu, maka berbagai konsep pemikiran teoretik yang berkaitan dengan modernisasi dan pembangunan yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, menjadi trend di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam pendekatan modernisasi dan pembangunan, membedakan keberadaan manusia modern dengan yang tradisional adalah terletak pada orientasi masa depannya yang cenderung mengedepankan kepentingan hidup yang bersifat material. Dengan demikian, maka yang menjadi ukuran kemajuan masyarakat, adalah (1) nilai-nilai kemodernan yang membentuk sikap hidup mereka; dan (2) terkait dengan konteks kehidupan ekonomi mereka yang berorientasi kapitalistik.

Namun, menurut Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2002), wajah modernitas yang tampak menonjol di Asia Tenggara, tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang memunculkan kawasan-kawasan gedung tinggi dan perumahan mewah yang bercorak modern. Tetapi juga masih tetap bertahannya daerah kumuh dan perkampungan di perkotaan. Konteks modernitas adalah justru meliputi keduanya, yang bercirikan paralelisme antara munculnya ruang global, yang di dalamnya berdiri bank-bank internasional, hotel berbintang, dan pusat-pusat perbelanjaan mewah. Selain itu, ada ruang nasional dengan bangunan monumen dan berbagai kantor pemerintahan negara. Ruang-ruang lokal yang dominan bercirikan oleh pemukiman kumuh. Karenanya, semua konstruksi ruang perkotaan tersebut, adalah sebagai etalase modernitas dan pembangunan. Atau pun sebagai simbiosis antara modernitas dengan eksistensi tradisi lokalnya. Sebagai konsekuensi logis terhadap proses penetrasi ideologi modernisasi dan pembangunan, yang melihat tradisi masyarakat lokal sebagai sesuatu hal yang menghambat kemajuan, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di Indonesia—khususnya aspek ruang kawasan atau kewilayahan—berlangsungnya modernisasi dan pembangunan, cenderung hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan



yang bersentuhan langsung dengan pusat pemerintahan negara, propinsi, dan kabupaten/kota.<sup>11</sup> Sementara itu, kecamatan dan desa, hingga di pelosok kampung, justru masih kebanyakan terabaikan. Meskipun demikian, setidaknya ada dua hal yang mendasar terhadap pengaruh modernisasi dan pembangunan pada konteks kehidupan masyarakat pedesaan di Indoensia. Dan ini juga yang kemudian berpengaruh terhadap orientasi kehidupan sosial ekonomi orang Gu-Lakudo, terutama setelah mereka melakukan migrasi.

*Pertama*, terbukanya akses jaringan jalan terhadap keterisolasian hubungan kota-pedesaan dan juga antar-desa hingga kampung. Misalnya, dengan pembangunan infra-struktur jalan darat—yang meskipun belum cukup memadai, tetapi dapat dilalui kendaraan bermotor—sehingga membuka akses terhadap “dunia luar” bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi Tenggara pada umumnya, termasuk di Gu-Lakudo. Demikian juga ketersediaan sarana transportasi laut yang terus berkembang dan menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain. Sehingga, kalau kita melakukan perjalanan, misalnya dari kota Kendari ke kota Bau-Bau atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan menggunakan kapal laut (*super jet*) atau jalur darat dengan kendaraan roda empat (*mobil*). Meskipun jika menggunakan kendaraan darat, maka harus melakukan penyeberangan dengan *kapal fery*, selanjutnya melintasi jalur jalan di sepanjang pulau Muna dari utara ke selatan, sehingga melewati daerah asal orang Gu-Lakudo.

*Kedua*, dengan kuatnya proses penetrasi nilai-nilai kehidupan modern dalam pembangunan terhadap konteks kehidupan masyarakat Indonesia, adalah juga berdampak pada tarikan ke arah terbukanya “wawasan baru” yang mengintegrasikan antara pola hidup kemodernan dengan sistem nilai budaya lokal. Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, pengaruh modernisasi dan pembangunan semakin membuka wawasan mereka dalam mengembangkan aktivitas ekonomi perdagangan di wilayah perkotaan.

Dengan pengaruh modernisasi dan pembangunan, maka *kaum migran* orang Gu-Lakudo—jika mengacu pada konsep pemikiran Max Weber—mereka terobsesi untuk bertindak lebih rasional. Meskipun juga dalam realitasnya, mereka masih cenderung mengintegrasikan bentuk-bentuk rasionalitas sebagaimana yang dikonsepsikan Weber, terutama yang berkaitan dengan: *traditional rationality*, *value oriented rationality*, dan *purposive rationality*. Pada tataran

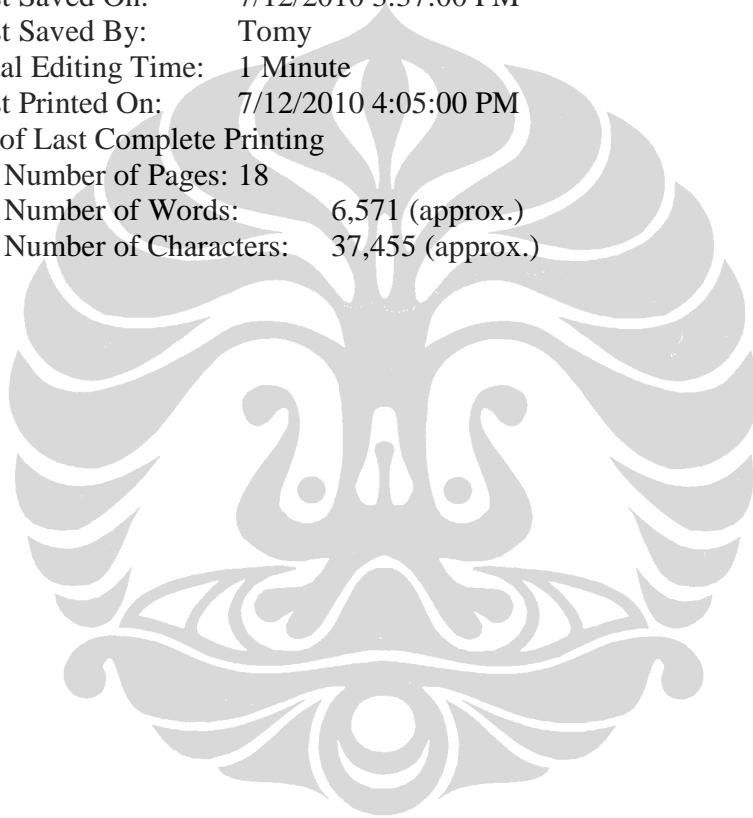
---

<sup>11</sup>Analisis yang lebih mendalam dan komprehensif berkaitan dengan bagaimana pengaruh modernisasi dan pembangunan pada konteks masyarakat negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—lihat Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, 2002, Jakarta.

rasionalitas tradisional, orang Gu-Lakudo masih tetap berpegang teguh pada tradisi budaya keagamaan mereka sebagai penganut Islam yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ajaran agamanya, meskipun nilai-nilai kemodernan pun tetap mereka adopsi. Terkait dengan pengaruh kemodernan, anak-anak orang Gu-Lakudo tidak lagi diharuskan oleh orang tua mereka untuk masuk pada sekolah-sekolah agama, seperti Pesantren dan Madrasah, atau kuliah pada Perguruan Tinggi Islam.

Selanjutnya, pada konteks rasionalitas yang berorientasi nilai, bahwa yang menjadi obsesi orang Gu-Lakudo ketika berhasil mengembangkan usaha perdagangan adalah untuk mendapatkan ongkos naik haji. Demikian juga dengan makin menguatnya etos ekonomi perdagangan mereka melalui peranan H. Abdul Syukur, ditambah dengan pengaruh modernisasi dan pembangunan, semakin menguatkan obsesi mereka dalam pengembangan usaha perdagangan di wilayah perkotaan. Lalu mereka mendapat bantuan modal dagang dari Bank, seperti BRI dan BNI. Namun, tentu saja sebagai konsekwensi dari tanggung jawab moralnya, mereka berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan. terhadap mereka. Oleh karenanya, jalinan kepercayaan mereka dengan lembaga finansial modern tersebut (BRI dan BNI), terus terjaga baik dan berkelanjutan. Sehingga, ketika mereka mengajukan lagi permohonan pinjaman untuk tambahan modal perdagangan, BRI dan BNI selalu memenuhi permintaan mereka. Karena kedua lembaga keuangan itu sudah menaruh kepercayaan yang tinggi pada para pedagang Gu-Lakudo.

Filename: BAB IV  
Directory: D:\Lutfi\Lutfi  
Template: C:\Documents and Settings\Tomy\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 3:36:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 3:37:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 7/12/2010 4:05:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 18  
Number of Words: 6,571 (approx.)  
Number of Characters: 37,455 (approx.)



## **BAB V**

### **PERUBAHAN ORIENTASI PAHAM KEAGAMAAN MODERNIS RASIONAL ISLAM**

#### **A. Konteks Perubahan Masyarakat Indonesia**

Secara *socio-historis* dan *kultural*, konteks sosial budaya masyarakat Indonesia sudah mengalami proses perubahan yang telah berlangsung lama. Tahapan perubahannya sejak masa kolonial Belanda, pasca kemerdekaan, hingga berlangsungnya pembangunan dan industrialisasi yang merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, masalahnya adalah proses dinamikanya, ada yang berlangsung dengan cepat, sedang, dan lambat. Dari berbagai tahapan yang membentuk momen perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia tersebut, dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses yang mendorong berlangsungnya “penetrasi ekonomi kapitalisme”.<sup>1</sup>

Oleh karenanya, dalam proses transformasi sosial ekonomi kapitalis itu, diikuti dengan berlangsungnya perubahan sosial budaya masyarakat yang menerimanya. Bagi masyarakat Indonesia, misalnya, ketika mulai mengadopsi berbagai bentuk lembaga sosial ekonomi modern. Akibatnya, menurut J.H. Boeke (1953), berkembang fenomena ekonomi ganda (*dual economy*). Hal ini mencitrakan terjadinya dikotomis antara keberadaan sistem ekonomi modern yang berorientasi pasar dan berbasis di perkotaan dengan ekonomi tradisional yang berakar pada masyarakat pedesaan. Fenomena keterbelahan sosial ekonomi tersebut, kemudian menciptakan transisi budaya masyarakat Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, transformasi sosial ekonomi kapitalis adalah mengambil bentuk dalam “konstruksi sosial budaya modernitas” yang berlangsung secara global melalui proses pembangunan dan industrialisasi. Karena itu, kerangka pemikiran teori modernisasi dan pembangunan menjadi rujukan yang kuat bagi para ilmuwan dalam menyorot terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dalam proses modernisasi tersebut adalah berlatar belakang sebagai bentuk “penetrasi kebudayaan asing” terhadap berbagai aspek kehidupan sosial bagi masyarakat lokal di

---

<sup>1</sup>Polanyi menyebutnya sebagai “transformasi besar” (*The Great Transformation*) yang menunjukkan suatu proses ekspansi pasar kapitalisme, yang telah berlangsung lama dan mendunia.

negara-negara berkembang. Karena konstruksi masyarakat yang berbudaya maju, adalah terletak pada nilai-nilai budaya modern yang mampu membentuk orientasi masa depannya (*future oriented*), dengan dukungan pencapaian kesejahteraan ekonomi yang tinggi, seperti yang dikonsepsikan oleh Rostow (1960).<sup>2</sup>

Dalam berbagai studi yang dilakukan para ilmuwan sosial, ketika menyorot berlangsungnya proses perubahan sosial budaya masyarakat—dan khususnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia—umumnya berangkat dari *premis* begitu kuatnya pengaruh *eksternal* dengan mengabaikan faktor-faktor *internal*. Karena itu, terbentuknya “struktur sosial baru” pada masyarakat lokal, misalnya, yang digerakkan oleh faktor *internal* yang lebih bersifat *endogen*, cenderung menjadi terabaikan.<sup>3</sup>

Asumsi teoretik yang dikembangkan, bahwa terjadinya perubahan sosial budaya pada berbagai masyarakat lokal—khususnya di Indonesia—secara umum tidak terlepas dari kuatnya pengaruh “modernisasi” yang ditransformasikan melalui proses pembangunan dan industrialisasi. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat lokal hanya sekedar menjadi “peserta pasif” terhadap proses perubahan sosial budayanya dari konteks yang tradisional pada yang bersifat kemodernan. Dengan konstruksi pemikiran tersebut, agaknyanya mengabaikan berlangsungnya dinamika *internal* sosial budaya masyarakat lokal. Yang boleh jadi, dalam proses perubahan sosial budayanya tidak hanya digerakkan oleh kekuatan pengaruh modernisasi dalam pembangunan. Tetapi juga kekuatan sistem nilai *internal* yang bersifat *endogen* yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai-nilai keyakinan agama yang mereka anut.

---

<sup>2</sup>Rostow mengkonsepkan bahwa pembangunan merupakan proses pematangan masyarakat untuk menuju pada tahapan perkembangan dari konteks tradisional ke masyarakat industrial. Tahapan yang harus dilewati adalah: (1) masyarakat tradisional yang menyatu dengan alam; (2) pra-kondisi untuk lepas landas dengan mendapatkan intervensi dari luar; (3) masyarakat lepas landas yang ditandai dengan terkikisnya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi; (4) masyarakat yang bergerak dewasa yang ditandai oleh kemampuan investasi yang tinggi; dan (5) masyarakat konsumsi massal. Di masa Orde Baru, konsep pemikiran ekonomi Rostow tersebut menjadi rujukan yang dianggap ideal bagi para perencana pembangunan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka memantapkan tahapan “tinggal landas pembangunan” bagi masyarakat Indonesia. Kritik terhadap teori pertumbuhan ekonomi model Rostow ini, misalnya, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Mansoer Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

<sup>3</sup>Dikalangan ilmuwan sosial Barat, misalnya, yang melakukan studi terhadap motif utama berlangsungnya proses perubahan sosial budaya bagi masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung melihatnya dari perspektif pengaruh modernisasi yang datang dari luar. Karena kondisi tradisional masyarakatnya tidak mendukung untuk terjadinya suatu perubahan. Unsur-unsur penghambatnya, adalah misalnya: sikap mental, relasi sosial, kelembagaan, dan berbagai hal yang terkait dengan praktek tradisi dan budaya lokal. Lihat juga Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, h. 132-140.

Mengapa masyarakat lokal dikonsepsikan sebagai peserta pasif dalam perubahan sosial budaya mereka? Dengan menggunakan pendekatan teori mentalitas pembangunan, para antropolog memberikan jawaban bahwa masyarakat lokal yang cenderung berbasis pada kehidupan pertanian—seperti halnya di Indonesia—memiliki “hambatan mentalitas” dalam pembangunan”. Hambatan mentalitas tersebut adalah bersifat substansial, karena berkaitan dengan masalah mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu: (1) hakikat hidup; (2) hakikat karya; (3) persepsi tentang waktu; (4) pandangan terhadap alam semesta; dan (5) memaknai hubungan antar-sesama manusia.

Dengan kelima hambatan tersebut, maka masyarakat lokal yang basis kehidupan mereka pada sektor pertanian, mengalami kesulitan dalam mendorong terjadinya proses perubahan sosial budaya mereka dari konteks yang tradisional pada yang kemodernan. Menurut Koentjoroningrat (1982), untuk merangsang partisipasi masyarakat terhadap perubahan sosial budaya mereka, diperlukan mentalitas pembangunan.

Namun, kalau hanya menggunakan pendekatan modernisasi dan pembangunan dalam menganalisis proses perubahan sosial budaya masyarakat, agaknya mengabaikan kekuatan *internal* mereka dalam bentuk “inisiatif dan kreativitas lokal”. Meskipun juga, begitu kuatnya pengaruh dari modernisasi dan pembangunan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial masyarakat lokal tidak bisa dinafikan begitu saja. Tetapi, ada juga yang secara spesifik terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat lokal, justru didorong oleh sistem nilai *endogen* yang mereka anut.

Bagi masyarakat Gu-Lakudo, misalnya, sebelum masuknya pengaruh modernisasi dan pembangunan sudah terlebih dulu terjadi perubahan sosial budaya mereka dari konteks yang tradisional pada semi-kemodernan. Terkait dengan konteks ini, adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang digerakkan oleh nilai-nilai keagamaan mereka dari yang berorientasi kehidupan *mistikal* yang cenderung *stagnan* pada yang *rasional-progresif*. Artinya, dengan “pemahaman baru” terhadap nilai-nilai keyakinan agama Islam yang diperkenalkan oleh H. Abdul Syukur, berkembang sebagai suatu ideologi sosial budaya keagamaan dan ekonomi orang Gu-Lakudo sejak di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Hal ini yang kemudian menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka dan sekaligus menjadi pendorong untuk mereka melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an.

## B. Tradisi Keagamaan Orang Gu-Lakudo

Pembaruan paham keagamaan orang Gu-Lakudo, adalah tidak terlepas dari peran-aktif H. Abdul Syukur setelah datang di daerah asal mereka untuk tinggal menetap di sana. Karena setelah kembali dari mendalami ilmu keislaman selama lima tahun di Mekkah (1930-an), Syukur berperan sebagai salah seorang ulama Islam modernis, sebagaimana umumnya para ulama lain di pulau Jawa dan Sumatera. Memang, jauh sebelum datangnya H. Abdul Syukur di daerah mereka pada tahun 1938<sup>4</sup> dan 1942, orang Gu-Lakudo pada dasarnya sudah menerima keyakinan Islam sebagai agama mereka. Hal ini terkait dengan peranan kesultanan Buton yang sejak abad ke 16 M. sudah menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Karenanya, semua wilayah penyangga (*kadie*) terhadap pemerintahan kesultanan—seperti daerah Gu-Lakudo—masyarakatnya juga harus menerima Islam sebagai agama resmi mereka.<sup>5</sup>

Namun, dalam realitas kehidupan mereka tidak menunjukkan simbol-simbol keberagaman yang bersumber dari kemurnian ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, meskipun mereka telah meyakini Islam sebagai agama mereka, tetapi dalam kehidupan keseharian orang Gu-Lakudo masih tetap saja mempraktekkan “paham keagamaan” yang bersumber dari tradisi keyakinan agama leluhur mereka yang bersifat pra-Islam. Karena memang dalam proses islamisasinya di masyarakat pesisir yang jauh dari kontrol pusat pemerintahan kesultanan Buton, secara *sosio-kultural* ajaran Islam tidak sampai berlangsung *enkulturasi budaya*.<sup>6</sup> Yang justru terjadi adalah proses *sinkretis* antara tradisi budaya Islam yang bernuansa

---

<sup>4</sup>Kedatangan pertama kali H. Abdul Syukur di Gu-Lakudo, pada awalnya hanya untuk memenuhi ajakan dari empat orang tokoh masyarakat daerah itu ketika mereka bertemu dalam kesempatan berdagang di pelabuhan Makassar. Namun, kedatangannya yang pertama ini, belum menetap tinggal untuk selamanya di Gu-Lakudo. Abdul Syukur hijrah ke daerah asal orang Gu-Lakudo pada tahun 1942 untuk menghindari dari “agresi militer Jepang” yang juga melakukan penangkapan terhadap para ulama Islam (H. Ahmad Hamzah, wawancara di Lakudo, 8 Februari 2008).

<sup>5</sup>Ada beberapa kecenderungan yang menjadi fenomena masuknya Islam di Buton. *Pertama*, ketika Islam masuk langsung berinteraksi dengan pusat kekuasaan kerajaan dan nilai-nilai ajarannya dijadikan sebagai “alat legitimasi” bagi elite kekuasaannya. Karena itu, dalam proses islamisasinya cenderung bersifat elitis dan eksklusif. *Kedua*, penyebaran ajaran Islam tidak didukung dengan sistem pendidikan yang berlangsung secara sistematis melalui pondok pesantren seperti yang dilakukan oleh para kiyai di Jawa. Akibatnya, mata rantai islamisasi tidak berkesinambungan, sehingga penyebaran ajaran Islam menjadi stagnan. Dari kedua penyebab tersebut, mengakibatkan penerimaan Islam bagi masyarakat di wilayah-wilayah pesisir sebagai penyangga kekuasaan kesultanan, menjadi kontra-produktif. Artinya, meskipun mereka sudah menerima Islam, tetapi nilai-nilai ajarannya tidak tampak dalam realitas kehidupan. Yang justru dipraktekkan adalah tradisi paham keagamaan pra-Islam yang diwarisi dari leluhur mereka, sebagaimana orang Gu-Lakudo sebelum datangnya Abdul Syukur. Muh. Luthfi Malik, *Islam dalam Budaya Muna: Suatu Ikhtiar Menatap Menatap Masa Depan*, Umitoha, Makassar, 1997.

<sup>6</sup>Terjadinya enkulturasi budaya adalah jika unsur-unsur asing yang masuk dari luar dan berhasil menembus “inti kebudayaan” suatu masyarakat, seperti: paham keyakinan agama, sistem nilai, dan tradisi budaya yang secara fungsional menjadi instrumen dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, unsur-unsur asing tersebut diterima dan disesuaikan dengan sikap emosional serta tingkah laku individu dan juga kolektivitas mereka. Penggunaan kerangka

*mistikal* dengan paham keagamaan pra-Islam, yang dominan dianut oleh komunitas masyarakat lokalnya.

Demikian juga halnya masyarakat Gu-Lakudo, keyakinan Islam yang mereka terima sebelum datangnya H. Abdul Syukur, cenderung hanya berada di atas permukaan tradisi keagamaan yang di warisi dari leluhur mereka secara berkesinambungan. Artinya, meskipun mereka menyatakan diri sebagai penganut agama Islam, tetapi ajaran agama tersebut tidak mewarnai kehidupan mereka. Kecenderungan seperti ini, setidaknya dapat diformulasikan dari penuturan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo sendiri.

Sebelum datangnya H. Abdul Syukur, sebenarnya orang Gu sudah menerima Islam sebagai agama mereka. Tetapi, karena pengajaran agama tidak berlangsung secara berkesinambungan, akibatnya ajaran Islam tidak dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Makanya, ketika beberapa orang pemuka masyarakat Gu, di antaranya La Api, La Ombe, dan La Haya, berangkat ke Makassar membawa barang dagangan dan menumpang pada perahu layarnya orang Binongko; selama dalam perjalanan, mereka heran ketika menyaksikan juragang perahu dan anak buahnya melakukan shalat lima waktu. Akhirnya, mereka menanyakan hal itu pada juragang perahu yang bernama H. Aminuddin tentang pekerjaan apa yang mereka lakukan pada waktu siang, malam, dan subuh. Karena, walaupun mereka juga sebagai penganut Islam, tetapi mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka mendapat penjelasan dari H. Aminuddin bahwa yang dilakukannya pada setiap waktu mendirikan shalat untuk menyembah Tuhan. Kemudian H. Aminuddin berjanji pada mereka, kalau sudah tiba di Makassar, dia akan memperkenalkan mereka dengan “guru agama yang terkenal”—maksudnya Abdul Syukur (H. Ahmad Hamzah, wawancara di Lakudo, 8 Pebruari 2008).

Pernyataan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo di atas, dapat memberikan penjelasan bahwa meskipun mereka telah menerima keyakinan Islam sebagai agamanya; tetapi ajaran Islam tidak mewarnai kehidupan mereka. Bahkan praktek hidup beragama yang mereka jalankan adalah bentuk penyembahan pada kekuatan supernatural yang bernuansa magis, kekeramatan, dan kesucian roh nenek-moyang (*sacred*). Artinya, unsur-unsur kepercayaan dan paham keagamaan tersebut, adalah merupakan sesuatu hal yang bersifat sakral.<sup>7</sup>

---

pemikiran *enkulturasi budaya* ini, sebagaimana digunakan oleh Ali Sadiqin, ketika menganalisis bagaimana berlangsungnya proses dialektika antara ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan konteks sosial budaya masyarakat yang menerimanya, mulai dari masyarakat Arab jahiliah hingga masuk ke Indonesia. Ali Sadiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Ar- Ruzz Media, Jogjakarta, 2008.

<sup>7</sup>Berkaitan dengan keberadaan benda-benda sakral dalam praktek kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat tradisional, sebenarnya secara lahiriyah tidak berbeda dengan benda-benda biasa yang dikenal sehari-



Tentang bagaimana fenomena tradisi paham keagamaan masyarakat Gu-Lakudo, sebelum datangnya H. Abdul Syukur, dapat disimak dalam penuturan tokoh masyarakat Gu-Lakudo berikut ini. Yang sekaligus dapat menggambarkan konteks kehidupan sosial budaya mereka yang cenderung primitif dan animisme.

Di Gu-Lakudo ini, pada masa silam kehidupan masyarakatnya boleh dikatakan setengah *primitif*. Waktu itu saya masih kecil, tapi saya sudah ingat—sebelum datangnya Abdul Syukur—mereka menganut kepercayaan *animisme*. Setiap rumah penduduk, pasti ada *sesajen* yang telah disiapkan untuk penyembahan terhadap roh halus, yang ditujukan untuk para leluhur. Belum dikatakan mampu dalam suatu keluarga, kalau belum ada tempat sesembahan yang disiapkan. Dan orang di sini menyebutnya, sariga. Sariga itu dibuat dari kayu, bentuknya segi empat sebesar meja, yang dibungkus dengan kain putih, kemudian di dalamnya ditaruh berbagai jenis *sesajen* untuk dijadikan sebagai sarana penyembahan (H. Ahmad Hamzah, wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008).

Dengan tradisi paham keagamaan mereka yang demikian ini, adalah terintegrasi ke dalam kondisi lingkungan alam di daerah mereka yang tandus dan penuh bebatuan. Artinya, perpaduan antara unsur-unsur tradisi paham keagamaan yang mereka anut dengan tantangan kehidupan yang dibentuk oleh lingkungan alam yang gersang, telah membentuk konteks sosial ekonomi mereka hanya untuk bisa survive. Oleh karena itu, maka pada dekade ini orang Gu-Lakudo hanya berorientasi pada kehidupan ekonomi bertahan hidup (*subsisten*). Karena mereka belum memiliki etos ekonomi yang bersifat rasional dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki.

Masyarakat Gu-Lakudo, memang sejak lama sudah menerima Islam sebagai agama mereka. Tetapi dalam proses penerimaan dan penerapannya justru terjadi distorsi secara konstruktif, mulai pada ajaran doktrin tentang ke-Tuhan-an (*teologis*), peribadatan (*ritual*), akhlaq (*moral force*), dan juga ideologi sosial (*social ideology*). Karena dalam proses islamisasinya yang dilakukan oleh para pembawa ajaran Islam sebelum datangnya Abdul Syukur

---

hari. Namun, konteks kesakralannya adalah justru berkaitan dengan “perlakuan” yang ditunjukkan oleh kolektivitas masyarakat yang memuja benda-benda sakral tersebut. Karena itu, benda-benda sakral tidak hanya sekedar tampak wujudnya, tetapi harus terpelihara keberadaannya dan dihidupkan dalam hati oleh para pemujanya. Lihat juga Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society*, Random House, Inc., New York, 1954.

di Gu-Lakudo—seperti konsep pemikiran sosiologis Peter L. Berger dan Luckman—tidak diikuti dengan proses *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, meskipun masyarakat Gu-Lakudo sebelum datangnya Abdul Syukur telah menerima keyakinan Islam, tetapi tidak mampu membentuk realitas sosial budaya keagamaan mereka (individu dan kolektivitas masyarakat). Dan fenomena ini masih berlanjut hingga datangnya H. Abdul Syukur. Artinya, untuk merombak orientasi paham keagamaan lama mereka yang bernuansa *animistis* dan menumbuhkan etos ekonomi yang bersifat rasionalitas, tentu saja membutuhkan proses waktu yang panjang.

### **C. Abdul Syukur Hijrah Ke Gu-Lakudo**

#### ***1. Motif Awal Kedatangan Abdul Syukur***

Abdul Syukur, pertama kali datang ke Gu-Lakudo pada tahun 1938 M. atas ajakan beberapa orang pemuka masyarakat daerah itu. Dan kedatangannya yang pertama ini, belum langsung bermukim atau tinggal di Gu-Lakudo. Karena Abdul Syukur, setelah kembali dari Mekkah selain mengembangkan syiar Islam, juga melakukan perdagangan antar-pulau, sehingga dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan perahu layar, aktivitas perdagangannya melintasi kepulauan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, dan hingga Singapur.<sup>9</sup> Karenanya, aktivitas kehidupannya secara antropologis dapat dikonsepsikan sebagai seorang “ulama Islam domaden” yang melakukan perjalanan antar-pulau dari satu daerah ke daerah lain. Abdul Syukur mengintegrasikan aktivitas pengembangan usaha ekonomi perdagangan dengan penyebaran da’wah Islam.

Pertemuannya dengan para pemuka masyarakat Gu-Lakudo, adalah berlangsung di pelabuhan Makassar, yang diperkenalkan oleh H. Aminuddin kepadanya. Karena para pemuka masyarakat Gu-Lakudo (La Api, La Ombe, dan La Haya) ikut membawa barang dagangan ke

---

<sup>8</sup>Menurut konsep pemikiran sosiologis Peter L. Berger dan Luckman, *eksternalisasi* adalah menunjuk pada suatu pengertian tentang kegiatan manusia. Sedangkan *obyektivasi* merupakan proses di mana hasil-hasil aktivitas kreatif tersebut mengkonfrontasi individu-individu sebagai suatu kenyataan obyektif. Sementara itu, *internalisasi* mengkonstruksi kenyataan eksternal tersebut menjadi bagian dari kesadaran yang bersifat subyektif dalam kehidupan individu. Karena itu, lanjut Berger dan Luckman, terjadi proses dialektik antara individu dan masyarakat. Dengan demikian, maka kreativitas dan aktivitas individu mampu menciptakan masyarakat; dan sebaliknya masyarakat menciptakan individu. Peter L. Berger dan Luckman dalam Doyle Paul Jonhson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Robert M.Z. Lawang, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 68.

<sup>9</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008.

Makassar dan menumpang pada perahu layarnya H. Aminuddin (satu daerah asal dengan H. Abdul Syukur, yaitu Binongko).<sup>10</sup>

Melalui pertemuan tersebut, agaknya menarik minat mereka untuk mempelajari agama Islam. Karena itu, selama mereka berada di Makassar, pemuka masyarakat Gu-Lakudo tersebut, secara rutin mengikuti pengajian yang dilakukan oleh H. Abdul Syukur di atas perahu layarnya. Setelah tiba waktunya meninggalkan kota pelabuhan Makassar, mereka mengajak H. Abdul Syukur untuk datang ke Gu-Lakudo. Abdul Syukur pun berjanji pada pemuka masyarakat Gu-Lakudo: “jika barang dagangan saya sudah laku semua, insya Allah saya akan datang ke sana, sekaligus saya membeli bahan makanan di kota Bau-Bau, yang akan saya bawa pulang ke Binongko”.<sup>11</sup>

Ternyata, pada tahun itu juga (1938), Abdul Syukur menyempatkan diri berkunjung ke Gu-Lakudo. Namun, kedatangannya yang pertama kali ini belum langsung menetap tinggal di sana, tetapi hanya semacam kunjungan biasa, yang dalam istilah Islam disebut “silaturahmi”, artinya menjalin hubungan kekeluargaan sesama Muslim. Selain itu, dalam kunjungannya ini, Abdul Syukur juga masih “memimpin armada pelayaran” dalam mengembangkan perdagangan antar-pulau bagi orang-orang Binongko.<sup>12</sup>

Namun, dengan kedatangannya yang pertama kali itu, H. Abdul Syukur sudah mulai menyaksikan secara langsung bagaimana tradisi budaya keagamaan dan aktivitas ekonomi masyarakat Gu-Lakudo. Tentu saja sebagai seorang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang berorientasi pembaruan dan kemodernan, Abdul Syukur menyaksikan realitas kehidupan beragama, kondisi lingkungan alam yang tandus, dan aktivitas ekonomi orang Gu-Lakudo. Agaknya, dengan realitas kehidupan sosial ekonomi dan tradisi budaya yang demikian itu, menjadi bahan pertimbangan bagi H. Abdul Syukur untuk dijadikan sebagai basis pengembangan paham pembaruan keagamaan dalam Islam.

Oleh karena itu, maka setelah berselang waktu empat tahun kemudian (1942), Abdul Syukur memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya (pulau Binongko, Wakatobi) dan hijrah ke Gu-Lakudo. Ini dilakukannya, setelah gagal memenuhi ajakan para pemuka

---

<sup>10</sup>Dalam perkembangan “tradisi pelayaran dan perdagangan laut” orang Buton pada umumnya—sejak masa kolonial Belanda—para pelayar dari kepulauan Wakatobi, terutama pulau Binongko, sudah dikenal sebagai pelayar yang melintasi kepulauan Nusantara. Karena secara geografis letaknya berada di laut Banda, antara kepulauan Maluku dan pulau Buton; dan selain itu, mereka juga membuat sendiri perahu layarnya. Ligtoet dalam Pim Schoorl, Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton, Jambatan, Bandung, 2003, h. 108.

<sup>11</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008.

<sup>12</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 8 Pebruari 2008.

masyarakat Bangka-Belitung untuk menetap tinggal di daerah itu.. Karena sementara dalam perjalanan ke Sumatera, Abdul Syukur sudah lebih dulu mendapatkan informasi dari para sahabatnya di Makassar. Mereka menyampaikan kabar yang di dapat lewat jalur pelayaran bahwa “perkembangan situasi di pulau Jawa dan Sumatera sedang dalam keadaan genting”. Dengan masuknya tentara Jepang (1942), banyak ulama Islam yang ditangkap dan kemudian mereka dipaksa untuk mendukung kepentingan agresi militernya di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau tidak memberikan dukungan, mereka dipenjarakan.<sup>13</sup> Dengan informasi yang diterimanya itu, maka Abdul Syukur tidak lagi melanjutkan perjalanannya ke pulau Sumatera (Bangka-Belitung), melainkan balik haluan untuk kembali ke Buton, selanjutnya menuju Gu-Lakudo, dan kemudian menetap tinggal selamanya di sana.<sup>14</sup>

Agaknya ada dua faktor mendasar yang menjadi pertimbangan bagi Abdul Syukur untuk hijrah ke Gu-Lakudo. *Pertama*, menghindari ancaman penangkapan dari tentara Jepang. Yang mengancam keselamatan jiwanya, keluarga, serta para pengikutnya. *Kedua*, terkait dengan konteks kehidupan beragama dan ekonomi masyarakat Gu-Lakudo. Dalam pandangan Abdul Syukur, mereka memerlukan “pendampingan” untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>15</sup> Karena itu, kedatangan Abdul Syukur yang kedua kali ini, sudah menetapkan niatnya untuk tinggal di Gu-Lakudo. Untuk dijadikan sebagai wilayah penerapan paham pembaruan keagamaan dalam Islam dan sekaligus menjadi basis pengembangan ekonomi perdagangan. Sebab letak geografis daerahnya berada di pesisir pantai teluk Lakudo yang berhadapan dengan selat Buton dan kota Bau-Bau. Artinya, meskipun keberadaannya terpencil, tetapi memiliki akses yang terbuka untuk pelayaran dan perdagangan antar-pulau, sebagaimana yang dilakukan di daerah asalnya kepulauan Wakatobi (Binongko).

*Gambar 3.5.*

**Pelabuhan tempat tambatan perahu layar Abdul Syukur di pantai Lakudo.**



<sup>13</sup>Salah satu ulama yang ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang adalah Moeslim bin Moeslim, yang mengeluarkan fatwa yang mengharuskan umat Islam untuk menghadap ke Tokyo dalam rangka menentang tentara Jepang.  
<sup>14</sup>H. A. ...  
<sup>15</sup>H. A. ...

... arakan oleh tentara Jepang. Menurut Ali Maschan, Moeslim bin Moeslim mengeluarkan fatwa yang mengharuskan umat Islam untuk menghadap ke Tokyo dalam rangka menentang tentara Jepang.  
*... ne Kiai: Konstruksi*



**Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Lakudo (2008).**

Dengan demikian, maka setelah hijrah ke Gu-Lakudo, Abdul Syukur tetap saja mengembangkan aktivitas ekonomi perdagangan. Dan bahkan mulai melibatkan para pemuda Gu-Lakudo untuk ikut mempelajari pengembangan usaha dagang seperti yang digelutinya selama ini. Kecenderungan seperti ini, agaknya secara sosiologis merupakan suatu bentuk metode “penetratif” dalam proses rekayasa sosial budaya masyarakat yang melibatkan para agen sosial untuk terjadinya suatu perubahan yang diinginkan.

Bagi Abdul Syukur sendiri, dalam melakukan rekayasa sosial budaya masyarakat Gu-Lakudo, adalah mengintegrasikan antara upaya pembaruan paham keagamaan dalam Islam dengan pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Dan apa yang dilakukannya adalah menunjukkan perannya sebagai seorang “agen sosial” yang mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, dan agama orang Gu-Lakudo.

Memang awalnya, Abdul Syukur mendapat pertentangan—meskipun tidak secara ekstrim—dari masyarakat Gu-Lakudo. Karena untuk melakukan “perubahan yang mendasar” terhadap suatu masyarakat memerlukan strategi yang tepat dan efektif. Dengan sistem nilai tradisi budaya keagamaan yang sudah berakar dan cenderung bersifat fungsional dalam kehidupan mereka, tentu saja memerlukan kemampuan seorang “agen sosial” yang lebih bersifat konstruktif. Ternyata, sintesis antara pembaruan Islam dengan aktivitas perdagangan, menjadi

pilihan yang tepat bagi Abdul Syukur dalam melakukan perubahan sosial budaya keagamaan dan ekonomi orang Gu-Lakudo.

## **2. Abdul Syukur: Ulama Islam Pelayar**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara *etnisitas*, Abdul Syukur bukan berasal dari Gu-Lakudo. Namun daerah asalnya, terletak di gugusan pulau-pulau kecil di laut Banda atau di antara pulau Buton bagian Timur dan kepulauan Maluku. Karenanya, daerah asal Abdul Syukur lebih dikenal dengan nama singkatan Wakatobi<sup>16</sup> (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko). Di pulau Binongko inilah—atau pulau terujung dari jajaran kepulauan Wakatobi—sebagai daerah kelahirannya, yaitu kampung Popalia. Karenanya, nama kecil yang diberikan oleh orang tuanya ketika di Binongko, adalah La Tampe. Nanti setelah ke tanah suci Mekkah untuk mendalami ajaran agama Islam diberi nama Abdul Syukur oleh gurunya, Syekh Arsyad.<sup>17</sup>

Karena letak geografisnya di laut Banda, yang menghubungkan jalur pelayaran regional di kawasan Timur Indonesia, maka masyarakat Wakatobi dan khususnya orang Binongko, sejak masa kolonial Belanda sudah berinteraksi dengan kehidupan dunia luar. Dalam arti bahwa, baik yang berkaitan dengan konteks hidup yang berorientasi pelayaran dan perdagangan, maupun aktivitas pengembangan syiar Islam. Artinya, selain mereka meninggalkan daerahnya untuk melakukan pelayaran dan perdagangan antar-pulau, juga daerah kepulauan

---

<sup>16</sup>Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko) merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang secara geografis terletak di bagian Timur pulau Buton atau di laut Banda. Sejak masa silam, memang kepulauan Wakatobi sudah masuk dalam kekuasaan kesultanan Buton. Pada tahun 2005, wilayah ini melepaskan diri atau mekar dari kabupaten Buton, yang kemudian menjadi daerah otonom sendiri dan tetap menggunakan nama kabupaten Wakatobi. Di masa silam masyarakatnya juga menanam cengkeh dan pala, tetapi karena “intervensi politik dagang VOC” memerintahkan kepada para petani untuk ditebang (Pim Schoorl, 2003, h. 114). Dengan tujuan, agar memudahkan kontrol perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku, yang mendapat saingan dari para pedagang Eropa lainnya, seperti: Portugis, Spanyol, dan Inggris. Karena itu, dalam “tradisi lisan” orang Buton menjelaskan bahwa, pada masa lalu Wakatobi biasa juga disebut sebagai kepulauan wangi-wangi. Bagi kapal-kapal layar yang melintas di perairan laut Banda dari Buton ke Maluku atau sebaliknya, setelah melewati Wakatobi, mereka mencium bau harum bunga cengkeh dan pala.

<sup>17</sup>La Tampe, adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil di Popaia-Binongko. Dengan pemberian nama tersebut, mengandung pengertian bahwa “tampe” menjadi simbol dari kehidupan keseharian anak-anak Binongko yang masih dalam “usia dini” sudah harus menghadapi ganasnya terpaan gelombang laut Banda. Karenanya, setelah dewasa dapat mewarisi tradisi pelayaran orang Binongko yang sudah terkenal mampu mengarungi lautan lepas di kepulauan nusantara, hingga Singapura dan Malaysia. Sedangkan Abdul Syukur, sebagai nama pemberian gurunya Syekh Arsyad, setelah tinggal di Mekkah; dengan tujuan untuk mempertautkan kedekatan hubungan kekerabatan mereka, karena dari salah seorang anak lelaki gurunya itu, juga bernama Syekh Abdul Syukur Alwan (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 8 Februari 2008; H. Kaharuddin Syukur, Wawancara di Bau-Bau, 16 Februari 2008).

mereka (Wakatobi) menjadi persinggahan para pelayar dan pedagang dari kawasan Barat ke Timur Nusantara, atau sebaliknya.

Dengan demikian, maka kepulauan Wakatobi sejak masa silam sudah berperan sebagai wilayah terbuka dan masuk dalam jalur pelayaran dan perdagangan di kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, orang Wakatobi dapat dikategorikan sebagai salah satu etnik lokal di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sebagai pelayar yang ulung, pedagang antar pulau yang tangguh, dan penuntut ilmu agama Islam yang ulet hingga ke tanah suci Mekkah.

Ligtvoet, yang bertugas sebagai Direktur Urusan Pribumi di kota Makassar pada abad 19 M. dan pernah mengunjungi Buton. Dalam kunjungannya itu, dia membuat catatan (1878) tentang maraknya pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang Buton pada umumnya, dan khususnya orang-orang Binongko. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh salah seorang peneliti Belanda, Pim Schoorl, ketika melakukan penelitian terhadap masyarakat, sejarah, dan budaya Buton (1981 dan 1984).

Sumber utama nafkah orang Buton ialah perniagaan dan pelayaran. Mereka membuat perahu sendiri. Menurut Spelman, pada zamannya pulau Binongko terkenal karena perahu yang dibuat di sana. Di wilayah Barat, perahu dari Buton berlayar sampai Singapura, tetapi mereka teristimewa banyak sekali di bagian Timur dari kepulauan Hindia ini, di mana kapal mereka sering mengangkut barang (Ligtvoet dalam Schoorl, 2003, h. 108).

Karena itu, maka bagi orang Binongko, melakukan pelayaran dan juga mengembangkan perdagangan dengan melintasi pulau-pulau di Nusantara hingga ke Singapura dan Malaysia, adalah menjadi aktivitas utama kehidupan ekonomi mereka sejak masa silam. Demikian juga obsesi naik haji sambil memperdalam ilmu keagamaan di Mekkah, kemudian kembali untuk menyebarkan syiar agama Islam, merupakan *visi utama* dalam kehidupan mereka. Tradisi kehidupan yang mengintegrasikan aktivitas pelayaran dan perdagangan dengan pengembangan syiar Islam tersebut, yang juga termotivasi dalam diri Abdul Syukur sejak masa kecilnya.

Oleh karena itu, maka setelah melewati masa kecilnya dan menanjak remaja serta mempelajari dasar-dasar ajaran agama Islam di kampung kelahirannya, Popaia Binongko, Abdul Syukur (La Tampe) kemudian merantau ke Ambon. Dengan suatu obsesi setelah mendapatkan biaya perjalanan yang cukup memadai untuk berangkat ke tanah suci Mekkah, maka akan

menunaikan ibadah haji. Kecuali itu, selain berhaji Syukur juga berkeinginan untuk menetap tinggal beberapa tahun di kota kelahiran Nabi Muhammad tersebut agar bisa mendalami ilmu agama Islam.

Namun, sebelum niatnya tercapai, terlebih dulu belajar pada para ulama Islam di Masjid Al-Fatah, Ambon, sambil bekerja sebagai penjahit pakaian dan juga berdagang kecil-kecilan. Setelah berhasil mengumpulkan biaya yang cukup untuk ke tanah suci Mekkah dan tinggal beberapa lama di sana, maka Syukur mewujudkan niatnya berangkat naik haji melalui rute perjalanan jama'ah haji Singapur. Oleh karena itu, di tempat kelahiran Nabi Muhammad tersebut, Abdul Syukur bermukim selama lima tahun di sana untuk belajar ilmu agama Islam dari para ulama Mekkah. Di antara salah seorang gurunya yang cukup populer namanya di Masjidil Haram, adalah Syekh Arsyad dari Banten.

Setelah bermukim selama lima tahun di Mekkah dan atas restu gurunya, Abdul Syukur kembali ke kampung halamannya di pulau Binongko. Selanjutnya, memulai aktivitasnya untuk menyebarkan syiar Islam melalui pengembangan usaha perdagangan antar-pulau. Melintasi jalur pelayaran di kepulauan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, dan hingga Singapur. Oleh karenanya, di atas perahu layarnya yang cukup besar—pada setiap pelabuhan persinggahan seperti di Makassar—Abdul Syukur membuka pengajian secara rutin, baik untuk para pengikutnya, maupun mereka yang berminat belajar agama Islam. Dengan aktivitas seperti ini, agaknya semakin mengangkat popularitasnya sebagai salah seorang ulama Islam yang pernah belajar di tanah suci Mekkah, meskipun dengan cara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain.

Pada konteks inilah H. Abdul Syukur dapat dikategorikan sebagai salah seorang *ulama Islam domaden* yang mengembangkan syiar Islam dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya, tidak seperti para ulama Islam yang sezaman dengan dia yang lebih fokus pada pendirian Pondok Pesantren dan menetap di suatu daerah, seperti halnya para Kyai di Jawa. Karena itu, meskipun Abdul Syukur sudah tinggal menetap di Gu-Lakudo, tetap juga menyebarkan da'wah Islam melalui jalur pelayaran dan perdagangan antar-pulau di Nusantara. Setidaknya, ada dua hal yang membentuk karakter kepribadian Abdul Syukur untuk tampil sebagai *ulama Islam domaden*.

*Pertama*, letak geografis daerah asalnya sebagai jajaran pulau-pulau kecil di laut Banda (Wakatobi), yang kehidupan *sosio-kultural* dan ekonomi masyarakatnya dibentuk oleh



tradisi pelayaran dan perdagangan. Yang disertai dengan obsesi “naik haji” sambil belajar ilmu-ilmu keislaman di tanah suci Mekkah. Terbentuknya kepribadian Abdul Syukur, agaknya juga terboresi dari kecenderungan tradisi merantau yang dibentuk oleh konteks sosial masyarakatnya. Artinya, aktivitas pelayaran, perantauan, dan pengembangan usaha perdagangan, yang disertai dengan upaya memperdalam ilmu agama Islam, merupakan suatu hal yang sudah terpatrit dalam jiwa dan kepribadian Abdul Syukur.

*Kedua*, Abdul Syukur mengadopsi model penyebaran agama Islam yang awal di kepulauan Nusantara, melalui “jalur perdagangan” antar-pulau. Karena dalam konsepsi Islam, diajarkan bahwa tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan upaya menyebarkan syiar Islam. Bahkan mengintegrasikan antara kegiatan perdagangan dengan pengembangan ajaran keagamaan, justru dianjurkan dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan para pembawa ajaran Islam yang awal di Indonesia. Dalam pengertian, bahwa secara *sosio-historis* dan *kultural*, antara unsur-unsur perdagangan, kondisi geografis kepulauan Nusantara, terintegrasi dengan baik dalam pengembangan ajaran agama Islam di Indonesia.<sup>18</sup> Abdul Syukur, agaknya juga mengadopsi model tersebut, yang mengintegrasikan aktivitas pelayaran dan perdagangan antar-pulau dengan pengembangan ajaran agama Islam.

Dengan kedua hal sebagaimana gambaran di atas, memungkinkan bagi Abdul Syukur untuk menjalani kehidupan sebagai seorang ulama Islam yang *domaden*. Oleh karena itu, setelah berhasil merombak paham keagamaan orang Gu-Lakudo dan menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka, Abdul Syukur pindah ke Bau-Bau. Momen kepindahannya ini, kemudian diikuti oleh generasi awal *kaum urban* orang Gu-Lakudo, dengan motivasi untuk mengembangkan usaha perdagangan di perkotaan.

### **3. Ulama Islam Modernis dan Moderat**

Posisi kota Mekkah sebagai pusat perkembangan agama Islam di Timur Tengah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji. Tetapi juga menjadi sumber inspirasi terhadap perkembangan ilmu-ilmu keislaman di kepulauan Nusantara. Artinya, semakin banyak jama'ah haji dan yang menuntut ilmu agama Islam, mendorong terbentuknya komunitas muslim yang menunjuk pada terbangunnya “hubungan informal keulamaan” di Indonesia. Hal ini terbentuk sejak berlangsungnya proses awal islamisasi yang membentuk kerajaan-kerajaan Islam

---

<sup>18</sup>Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2007, h. 44-51.

di Nusantara dan hingga tumbuhnya ideologi perlawanan terhadap imperialisme Barat pada abad 20 M.

Oleh karena itu, menurut Azyumardi Azra,<sup>19</sup> keberadaan kota Makkah memiliki “peran transformatif” yang cukup sentral bagi kaum muslim Nusantara ketika itu. Yang tidak hanya terkait dengan bidang keagamaan, tetapi juga sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Dari hampir seluruh ulama Islam—lanjut Azra—yang memainkan peran penting dalam pembaruan keagamaan dan sosial budaya di Nusantara, adalah sebagai jebolan Makkah. Karena memang sejak awal abad ke 19 M—di Timur Tengah—telah berkembang dua bentuk pembaruan keagamaan dalam Islam.

*Pertama*, gerakan pembaruan yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan paham Islam Wahabisme. Bentuk pembaruan yang dicanangkan adalah cenderung bersifat “radikal”, seperti yang dilakukan *kaum paderi* di Sumatera Barat yang membuat pertentangan dengan *kaum adat*-nya, pada paruh pertama abad 19 M. Menurut hasil studi Christine Dobbin (2008), munculnya gerakan *padri* yang berlawanan dengan kepentingan kolonial Belanda, justru menjadi momentum bagi berlangsungnya perubahan sosial ekonomi masyarakat Minangkabau.

*Kedua*, gerakan pembaruan pemikiran Islam yang digulirkan Sayid Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Sentuhannya adalah pada “stagnasi pemikiran” yang telah menyebabkan ketertinggalan bangsa-bangsa Muslim terhadap dunia Barat di masa itu. Oleh karenanya, tekanan gerakan pembaruan yang diusung adalah pada sistem pendidikan yang mensintesiskan pemikiran teologi Islam, filsafat dan peradaban, dengan konteks dunia empirik, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat.

Merujuk dari kedua bentuk gerakan pembaruan atau reformasi paham keagamaan tersebut, dalam proses perkembangannya diadopsi oleh para ulama Islam Indonesia, misalnya: H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Syekh Hasyim Asy’ari, H. Ahmad Dahlan, dan Mohammad Natsir. Demikian juga ketika Abdul Syukur naik haji pada awal abad ke 20 M, kemudian tinggal selama lima tahun di Makkah untuk mendalami ilmu keislaman, dia mengadopsi paham pembaruan Islam yang telah berkembang sebelumnya. Abdul Syukur mendalami ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam dengan berguru pada salah seorang ulama

---

<sup>19</sup>Azyumardi Azra (*Pengantar*) dalam M. Dien Madjid, *Berhaji di Masa Kolonial*, CV. Sejahtera, Jakarta, 2008, h. ix.

Indonesia yang berasal dari Banten, yang bernama Syekh Arsyad. Melalui gurunya ini, kemudian Abdul Syukur mentrasfer paham Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah dalam pemikiran teologi Islam dan Mazhab Syafi'i menurut kodifikasi hukum Islam, seperti yang dianut oleh mayoritas umat Islam, termasuk di Indonesia.

Memang dalam perkembangan pemikiran keagamaan dalam Islam, setidaknya ada empat aliran teologi yang mengkonsepsikan tentang nasib (*taqdir*) manusia—khususnya terkait dengan kehidupan dunia—adalah paham: *jabariyah*, *qadariyah*, *mu'tazilah*, dan *asy'ariyah*. Dari berbagai aliran teologi ini, yang kemudian mempengaruhi pandangan dunia (*world view*) dan membentuk perilaku umat Islam dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial ekonomi.

Berkaitan dengan bagaimana aliran-aliran teologi Islam tersebut dalam mengkonsepsikan keberadaan manusia di dunia ini, agaknya perlu dijelaskan secara konstruktif. Karena hal ini, adalah juga untuk mengetahui konsep pemikiran teologi seperti apa yang diajarkan oleh Abdul Syukur ketika melakukan pembaruan paham keagamaan dan menumbuhkan etos ekonomi orang Gu-Lakudo. Sehingga mereka termotivasi untuk mengintegrasikan kehidupan beragama dengan sosial ekonomi.

**1. Aliran Jabariyah.** Paham teologi dari aliran *jabariyah* ini, mengkonsepsikan bahwa “kehadiran manusia di dunia ini justru telah membawa takdirnya dari Tuhan”. Karena itu, berkaitan dengan pandangan dunia modern, konsep teologi *jabariyah* cenderung mengembangkan “paham fatalisme” terhadap dinamika kehidupan dunia. Artinya, manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, dengan penuh keterpaksaan tanpa memiliki pilihan bebas (Madjid, 2000).

Dalam perkembangan peradaban Islam, paham teologi *jabariyah* tersebut adalah mengambil bentuk pada konsep *uzlah* dalam ajaran tasawuf (*mistisisme* Islam). Yang menunjuk pada pengertian bahwa seorang muslim, agar mencapai tingkat tertinggi dari pendakian spiritualnya, maka harus membelakangi kehidupan dunia. Tujuannya, adalah untuk menghindari berbagai bentuk “pengaruh keduniaan” (*zuhud*). Sebagai implikasinya bagi umat Islam, hanya cenderung membentuk “kesalehan ilahiyah” yang bersifat personal dan berorientasi keakheratan. Sebaliknya, mengesampingkan “kesalehan sosial” yang berbasis pada kehidupan dunia. Meminjam konsep pemikiran sosiologi agama Max Weber,

kecenderungan itu sebagai bentuk “misticisme pasif” yang kontradiktif dengan paham “misticisme aktif” seperti yang dipraktekkan oleh para pengikut Calvinisme.

- 2. Aliran Qadariyah.** Paham teologi *qadariyah* ini, adalah justru berseberangan dengan *jabariyah*. Kalau aliran *jabariyah* cenderung menafikan pilihan bebas manusia di dunia, maka sebaliknya *qadariyah* menempatkan manusia sebagai makhluk yang menentukan nasibnya (*taqdir*) sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Artinya, setelah manusia berada di dunia, maka dengan kemampuan aqlnya memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan “kehendak bebas” berdasarkan pilihan-pilihan yang rasional.

Karenanya, paham teologi *qadariyah* jika dihubungkan dengan konteks dunia modern cenderung mengedepankan “keunggulan individual” manusia untuk menjalani kehidupannya secara dinamis di dunia ini. Menurut Nurcholish Madjid (2000), paham *qadariyah* lebih menekankan kebebasan manusia secara berlebihan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Umer Chapra (2001)—salah seorang ilmuwan ekonomi Islam kontemporer—menempatkan *qadariyah* sebagai golongan “rasionalis ekstrim” yang mencoba memahami hakikat ke-Tuhan-an dengan kemampuan rasionalitasnya.

- 3. Aliran Mu'tazilah.** Dalam perkembangan peradaban Islam, *mu'tazilah* dikategorikan oleh para ilmuwan muslim sebagai golongan yang menempatkan pemahaman agama dengan kemampuan nalar-rasional. Karena itu, *mu'tazilah* merupakan pelanjut dari tradisi *qadariyah*. Meskipun dalam perkembangannya, adalah lebih bersifat moderat. Yang mencoba mensensitiskan pemikiran filsafat ke-Tuhan-an dalam Islam dengan kemampuan penalaran rasional melalui verifikasi indrawi-empiris (Arif, 2008).

Di dunia Islam, paham *mu'tazilah* dikembangkan oleh penganut *Syi'ah*, baik pada aspek teologi maupun filsafat. Karenanya, *mu'tazilah* sebagai golongan yang rasional moderat dalam Islam, menurut Chapra (2001), menempatkan keunggulan *aqal* secara berlebihan. Ketika mulai bergulirnya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia pada tahun 1970-an, misalnya, Harun Nasution diposisikan sebagai pengemban paham *mu'atazilah* di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- 4. Aliran Asy'ariyah.** Sebagai paham teologi yang mayoritas dianut oleh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, maka *asy'ariyah* lebih dikenal dengan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Yang di satu pihak, adalah tetap merujuk pada tradisi mayoritas penganut teologi Islam dan di pihak lain, mempersikan fungsi rasionalitas *aqal* manusia dalam menjalani kehidupannya di

dunia ini. Menurut Nurcholish Madjid (2000), kelebihan paham teologi *asy'ariyah* terhadap yang lainnya, adalah dari aspek metodologinya yang mengambil “jalan tengah” antara berbagai ekstremitas.

Karenanya, *asy'ariyah* mengkonsepsikan bahwa memang nasib (*taqdir*) setiap orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit diketahui manusia. Dengan demikian, manusia memerlukan *usaha*, *ikhtiar*, *doa*, dan *tawakal* untuk menjalani *taqdir*-nya. Sehingga, berkaitan dengan usaha mencari rizqi adalah diwajibkan dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “mencari *rizqi* yang hal itu wajib bagi setiap orang Islam” (Nurcholish Madjid, 2000:h. 595). Hal ini memberikan petunjuk bagi setia muslim, agar berupaya mencari *rizqi*, supaya tidak menjadi “pengemis” karena perbuatan mengemis adalah haram. Dan wajibnya bagi setiap muslim untuk mengembangkan usaha dan ikhtiar mencari rizqi, agar tidak masuk dalam konteks kehidupan yang bernuansa kezaliman dan menimbulkan kemungkar.

Apa yang dikonsepsikan oleh teologi *asy'ariyah* itu, menurut Murcholish Madjid (2000), memiliki persamaan dengan konsep teori predestinasi dan tanggung jawab moral manusia yang membentuk “kesalehan individual” menjadi penekanan yang kuat dalam konteks teologi Calvinis. Pertautan antara ketentuan Tuhan terhadap nasib manusia dan *taqdir*-nya membentuk “etos individual” yang diaplikasikan sebagai bentuk kerja untuk mencari rizqi yang baik di dunia.

Dalam perkembangan tradisi keulamaan di Indonesia, adalah menganut paham *teologi asy'ariyah*—yang lebih populer disebut sebagai *Ahlu Sunna Wal Jama'ah*—sebagaimana yang menonjol dalam oraganisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Abdul Syukur sendiri ketika belajar di Mekkah, juga mengadopsi paham teologi *asy'ariyah* atau Ahlu Sunnah Wal Jama'ah yang disinergiskan dengan semangat pembaruan Islam. Karenanya, setelah kembali ke Indonesia, Abdul Syukur berafiliasi pada organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ary tersebut. Organisasi Islam yang dikategorikan berpaham tradisional dan berbasis di pedesaan ini, menurut Ali Maschan Moesa (2007), dalam melakukan konstruksi sosial keagamaan cenderung bersifat *moderat* ketimbang *radikal*. Akibatnya, para kiyai/ulama NU senantiasa bersikap *penetratif* dan juga *adaptif* terhadap fenomena sosial budaya masyarakat.

Namun demikian, Abdul Syukur dalam menggulirkan gagasan pemikiran agama yang diusungnya, justru melakukan konvergensi antara sikap *moderat* keulamaan NU dan gerakan

*tajdid* Muhammadiyah. Karena itu, konteks kemoderatan dan kemodernisan dari Abdul Syukur, adalah: (1) berafiliasi pada NU; (2) dukungan terhadap partai politik yang bernuansa Islam reformis (Masjumi); dan (3) gerakan modernis Islam yang berbasis pada pendidikan, mengadopsi model Muhammadiyah.

Oleh karena itu, sejak di Gu-Lakudo H. Abdul Syukur sudah membuka lembaga pendidikan keagamaan, yang kemudian menjadi cikal-bakal Madrasah Aliyah Negeri. Demikian juga di Bau-Bau, Abdul Syukur mendirikan Sekolah Muhammadiyah (SD, SMP, SMA) yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Dan pengembangan syiar Islam melalui sistem pendidikan ini, yang juga diikuti oleh salah seorang muridnya dari *kaum urban* orang Gu-Lakudo, seperti H. Sabirin. Selain mengembangkan usaha ekonomi perdagangan, juga mendirikan lembaga pendidikan Islam, seperti Pesantren Syekh Abdul Wahid<sup>20</sup> di kota Bau-Bau.<sup>21</sup>

#### **4. Ulama Islam Transformatif**

Menganalisis bagaimana intensitas keterlibatan Abdul Syukur dalam melakukan perubahan orientasi keagamaan masyarakat Gu-Lakudo, setidaknya dapat dikategorikan sebagai seorang “ulama Islam transformatif”. Elemen-llemen perubahan yang digerakkan oleh H. Abdul Syukur, mulai pada dimensi *doktrinal-teologis* dan *ritual-formal*, hingga masuk pada dimensi orientasi kehidupan sosial ekonomi. Terkait dengan persoalan sosial ekonomi tersebut, Abdul Syukur menumbuhkan etos perdagangan orang Gu-Lakudo, kemudian mendorong mereka untuk melakukan *urbanisasi*. Dengan rangkaian perubahan tersebut, adalah menunjukkan suatu proses transformasi sosial masyarakat Gu-Lakudo yang telah berlangsung secara progresif dan juga dinamis.

Karena keterlibatan Abdul Syukur, tidak hanya sebatas menggulirkan gagasan pemikiran keagamaan yang cenderung berada pada tataran ide-ide abstrak dan teoretik. Tetapi, lebih menitik pada realitas *empirik* dan bersifat *praksis*. Dalam pengertian bahwa bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan mendasar terhadap konteks kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama masyarakat Gu-Lakudo.

---

<sup>20</sup>Syekh Abdul Wahid adalah nama pembawa agama Islam pertama di kerajaan Buton pada tahun 1511 M. Setelah raja Buton VI yang bernama Lakilaponto menganut ajaran agama baru ini, kemudian mengganti sistem kerajaannya menjadi kesultanan. A.M. Zahari, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*, Jilid I, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, h.50.

<sup>21</sup>Pesantren Syekh Abdul Wahid adalah mengadopsi sistem pendidikan di Pondok Modern Gontor. Karena pengasuh pesantren ini, yang bernama KH. Rasjid, Lc. MA sebagai salah seorang putra Lakudo, yang juga alumni Gontor dan Timur Tengah. Diolah dari data lapangan, ketika peneliti berbincang-bincang secara bebas dengan KH. Rasjid di Pondok Pesantrennya, di Bataraguru-Bau-Bau, 5 Juli 2006.

Fenomena kemunculan gerakan pembaruan Islam yang berorientasi transformatif adalah sebagai respons terhadap perkembangan kehidupan umat Islam yang menjalankan ajaran agamanya hanya terhenti pada dimensi *ritual* dan cenderung *formalistik*. Sedangkan dimensi lain, yang juga bersifat *substansif* kurang tersentuh, seperti: kesenjangan sosial, kemiskinan ekonomi, keterpinggiran politik, dan keterasingan budaya. Artinya, orientasi ajaran keagamaan dalam Islam menghendaki keseimbangan antara dimensi kehidupan *formal* keagamaan dan *substansif* sosial masyarakat.

Dengan demikian, gerakan pembaruan Islam *transformatif* merupakan suatu metode pendekatan yang bersifat praksis dalam rangka mengaktualisasikan gagasan pemikiran keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut Syafii Anwar (1995), gerakan transformasi keagamaan, dalam tataran praksisnya terletak pada aspek-aspek pemecahan masalah kehidupan yang bersifat empiris, seperti sosial ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak politik rakyat, serta orientasi keadilan sosial.

Oleh karena itu, jika konteks pembaruan keagamaan transformatif Abdul Syukur ketika itu hanya di level lokal, yaitu masyarakat Gu-Lakudo dan sekitarnya, maka pada level nasional pun digulirkan oleh para ulama Islam Indonesia. Misalnya Tjokroaminoto, Agus Salim, Hasjim As'ary, Ahmad Dahlan, dan Mohammad Natsir. Fenomena gagasan pembaruan keagamaan mereka, cenderung bersifat progresif untuk mendorong proses perubahan sosial masyarakat yang tertinggal dari kemajuan, seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka menyadari bahwa secara "ideologis" keagamaan, Islam memiliki orientasi visioner yang substansial dan universal terhadap upaya perbaikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tjokroaminoto dan Agus Salim, misalnya, menggulirkan ide pemikiran tentang sosialisme Islam.<sup>22</sup> Oleh karena itu, menurutnya kemunculan gerakan sosialisme Islam tergantung pada "kesadaran individual" yang merujuk dari bagaimana peran-aktif para sahabat Nabi Muhammad yang berkepribadian sosialis. Sementara itu, Hasyim Asy'ari sebagai salah seorang pendiri NU, orientasi pembaruannya adalah pada penyadaran dan pemberdayaan basis massa Islam tradisional di pedesaan Jawa.

---

<sup>22</sup>Tjokroaminoto dan Agus Salim, misalnya, menerima sintesis pemikiran marxisme dengan Islam. Karena marxisme dan Islam, secara ideologis bermuara pada realitas sosial dan isu yang sama, yaitu pembebasan terhadap "kaum yang lemah". Namun demikian, menolak varian pemikiran materialisme historis Karl Marx yang tidak hanya mengingkari adanya Tuhan, tetapi justru ber-Tuhan-kan benda (materi). Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2007, h. h. 417-423.

Sebaliknya Ahmad Dahlan yang berperan sebagai pendiri organisasi massa Islam modernis (Muhammadiyah) perkotaan di Indonesia, mencanangkan gerakan pembaruan sosial dan budaya, yang dikuatkan dengan pemberdayaan ekonomi para pedagang. Ini dilakukan, bertolak dari konsep dasar pemikiran bahwa Islam berfungsi sebagai agama *rahmatan lil alamiyn*.<sup>23</sup> Karena itu, gerakan pembaruan Ahmad Dahlan melalui da'wah sosial Muhammadiyah, sejak awal sudah mencanangkan perlunya santunan sosial bagi fakir-miskin, perbaikan kesehatan, perbaikan pendidikan, peningkatan usaha ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan Mohammad Natsir, lebih concern pada pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berorientasi kemodernan. Selain itu, untuk melembagakan gerakan pembaruan keagamaan di bidang politik, Natsir juga membentuk partai Masjumi<sup>24</sup>.

Oleh karenanya, gerakan pembaruan keagamaan transformatif Abdul Syukur, secara kontekstual memiliki pertautan yang erat dengan varian pemikiran pembaruan Islam yang dilakukan oleh para ulama Islam di Indonesia pada awal abad ke 20 M. Misalnya, basis organisasi keagamaannya di level nasional, adalah berafiliasi pada Nahdhatul Ulama. Karena itu, Abdul Syukur memiliki keterkaitan dengan tradisi keulamaan serta metode da'wah organisasi tradisional massa Islam pedesaan tersebut. Yang dalam karakteristik keulamaan NU adalah bersifat *moderat*, *adaptif*, dan *penetratif*. Kecenderungan seperti ini, memang merupakan fenomena yang menonjol dari kalangan kiyai/ulama NU, ketika merespons konteks sosial dan praktek tradisi budaya keagamaan masyarakat Indonesia. Menurut Ali Maschan Moesa (2007), *adaptif* tindakan keulamaan NU adalah bersifat *akomodatif-inklusif* dan *non-konfrontatif*. Dengan demikian, konstruksi pemikiran ulama NU cenderung *moderat* ketimbang *konfrontatif*.

---

<sup>23</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Profetisme Pembaruan Gerakan Sosial-Budaya dalam Satu Abad Muhammadiyah* dalam Mukhaer Pakkanna & Nur Achmad (Editor), *Muhammadiyah Menjemput Perubahan: Tafsir Baru Gerakan Sosila-Ekonomi-Politik*, Buku Kompas, Jakarta, 2005, h. 4.

<sup>24</sup>Gerakan pembaruan Mohammad Natsir pada aspek pendidikan, secara epistemologis mengintegrasikan fungsi inderawi, kemampuan akal rasional, dan petunjuk wahyu (*Teo-antroposentrisme*). Dengan tujuan untuk mengimbangi derasnya pengaruh pendidikan sekuler Barat yang bersifat *antroposentrisme*, seperti yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam konsep pemikiran modernisme Islam, model pendidikan yang dicanangkan Mohammad Natsir itu, adalah bersifat transformatif, agar dapat menjemput perubahan. Analisis secara konstruktif tentang model pendidikan transformatif dalam Islam, lihat misalnya, Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif (Disertasi)*, LkiS, Jogjakarta, 2008. Sedangkan keterlibatan Mohammad Natsir dalam gerakan politik Islam melalui Partai Masjumi—yang juga menjadi afiliasi politik Abdul Syukur di level lokal ketika itu—menurut Kuntowijoyo sebagai kelanjutan dari konteks perjuangan terhadap kehidupan *wong cilik* di masa Tjokroaminoto dan Agus Salim (pra-kemerdekaan) pada konteks warga negara setelah Indonesia merdeka. Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Mizan, 2001, h. 73-77.



Akibatnya, para ulama NU dengan mudah melakukan penetrasi untuk menguatkan basis massa Islam tradisional mereka di pedesaan.

Demikian juga Abdul Syukur dalam melakukan pembaruan keagamaan terhadap masyarakat Gu-Lakudo, tidak bersikap *konfrontatif*. Tetapi sebaliknya bersifat *moderat*, *adaptif*, dan *penetratif*. Namun, kecenderungan itu dilakukan oleh Abdul Syukur, adalah pada tahap awal sosialisasi ajaran keagamaan. Artinya, ketika mulai melakukan pembaruan keagamaan terhadap masyarakat Gu-Lakudo, cenderung bersifat akomodatif pada praktek tradisi budaya dan agama mereka. Tetapi di pihak lain, Abdul Syukur justru secara sistematis melakukan proses internalisasi paham keagamaan yang dibawanya pada konteks kehidupan masyarakat Gu-Lakudo. Sebagai implikasi positifnya, adalah Abdul Syukur tidak terlalu mendapatkan pertentangan yang keras dari masyarakat yang menjadi objektifikasi pembaruan keagamaannya.

Meskipun Abdul Syukur memiliki *blue print* pemikiran dengan para ulama NU, tetapi tidak bersikap “fanatisme sempit”. Dalam pengertian bahwa hanya *concern* pada tradisi keulamaan di NU. Namun, dia juga tetap membuka diri untuk menerima konsep gerakan pembaruan dari pihak lain. Dengan sikap *inklusif*-nya itu, maka Abdul Syukur juga mengadopsi model gerakan pembaruan keagamaan transformatif Ahmad Dahlan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan penguatan ekonomi umat Islam pada aspek perdagangan.

Bagi Ahmad Dahlan—sebagai pendiri Muhammadiyah—adalah selain berperan sebagai seorang pembaharu keagamaan dalam Islam, dia juga aktif menjadi pengusaha batik yang kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai kota di Jawa. Dengan perjalanan yang dilakukannya itu, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga mempelajari penyebab kemunduran yang dialami umat Islam ketika itu.<sup>25</sup> Demikian juga kecenderungan Abdul Syukur, meskipun sudah tinggal menetap di Gu-Lakudo, dia juga masih tetap melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia, hingga Singapura, dan Malaysia.

Sedangkan ketertarikannya pada konteks perpolitikan Islam, adalah berafiliasi pada partai Masjumi. Menurutnya, perjuangan politik yang berorientasi pada penguatan integrasi kebangsaan Indonesia dan kepentingan *kaum muslim* setelah kemerdekaan, termanifestasi dalam perjuangan politik Masjumi. Karenanya, dari aspek politik, Abdul Syukur memiliki konstruksi

---

<sup>25</sup>Mukhaer Pakkanna, *Membangun Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Dari Rekonstruksi Kasus Menuju Rekonstruksi Teologi*, dalam Mukhaer Pakkanna & Nur Ahmad (Editor), *Muhammadiyah Menjemput Perubahan: Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik*, Buku Kompas, Jakarta, 2005, h. 2000.

pemikiran politik yang sama dengan Mohammad Natsir. Namun, setelah kekuasaan Orde Baru dan terjadinya fusi partai pada tahun 1977, Abdul Syukur menjadi pendukung PPP.<sup>26</sup>

Apa yang dapat dikonsepsikan dari fenomena keulamaan transformatif seperti yang diperankan oleh Abdul Syukur di level lokal, adalah menjadi gejala umum yang telah berkembang pada masa pra-kemerdekaan. Karena secara ideologis, di level nasional juga tampil para ulama Islam transformatif<sup>27</sup> yang terobsesi untuk melakukan perubahan sosial budaya melalui gerakan pembaruan keagamaan. Namun yang cenderung spesifik dari karakter keulamaan Abdul Syukur, adalah menciptakan suatu model gerakan pembaruan agama transformatif yang lebih bersifat *konvergensi*. Misalnya mengadopsi tradisi kemoderatan dari karakter keulamaan NU dan sekaligus menggunakan metode da'wah sosial ekonomi dan kebudayaan Muhammadiyah.

Sementara itu, untuk mempertemukan konsepsi pemikiran keagamaan dari kedua organisasi massa Islam tradisional dan modernis tersebut bukan sesuatu hal yang mudah. Karena sekat-sekat perbedaan antara keduanya dalam merespons konteks sosial budaya keagamaan masyarakat, telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dan sikap dikotomis terhadap peranan keulamaan di masa lalu. Namun, mulai terjadinya proses *konvergensi* pemikiran keagamaan antara NU dan Muhammadiyah, menurut Kuntowijoyo (1997), setelah memasuki dekade 1990-

---

<sup>26</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 8 Februari 2008; dan H. Kaharuddin Syukur, Wawancara di Bau-Bau 12 Februari 2008.

<sup>27</sup>Sebagai kesinambungan pemikiran konseptual pembaruan keagamaan transformatif dari para ulama Islam pra-kemerdekaan, maka pada masa Orde Baru, para intelektual muslim Indonesia memunculkan “gagasan pemikiran Islam transformatif”. Menguatnya bingkai pemikiran keagamaan transformatif tersebut, sebagai hasil refleksi kritis terhadap penerapan berbagai konsep teori modernisasi dan pembangunan pada negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—yang justru terjadi kontra-produktif antara hasil pembangunan dengan kondisi riil sosial masyarakat. Misalnya, dalam proses pembangunan mengabaikan prinsip-prinsip: egalitarianisme, keadilan sosial ekonomi, kemandirian masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka dari hasil refleksi tersebut menghasilkan dua varian pemikiran transformatif. *Pertama*, yang *concern* pada tataran teoretik dalam ilmu sosial, seperti Kuntowijoyo, yang menawarkan konsep pemikiran “ilmu sosial *profetik*”, sebagai anti-tesis dari pemikiran sosial *positivistik*. Karenanya, Kunto merumuskan paradigma Islam dengan metode strukturalisme transendental untuk interpretasi dan aksi (1991). *Kedua*, gerakan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat. Yang merupakan hasil integrasi dari proses dialektik antara: refleksi dan aksi, teori dan praktik, serta iman dan amal. Hal ini dikonsepsikan dalam pemikiran “teologi transformatif” (*transformation theology*) yang diimplementasikan dalam bentuk kinerja dan aksioner LSM. Mereka yang masuk dalam kategori ini, seperti Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dan Amin Azis. Karena itu, pesantren diposisikan sebagai basis dan agen transformasi sosial masyarakat. Lihat juga Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2007, h. 448-449.

an. Berlangsungnya hal tersebut, sebagai implikasi dari perubahan konteks sosial budaya dan keagamaan umat Islam Indonesia.<sup>28</sup>

Dengan kecenderungan tersebut, menurut Abdul Munir Mul Khan (2005), telah memunculkan model “da’wah kultural” bagi Muhammadiyah, yang bersentuhan dengan berbagai ragam kehidupan keagamaan sebagai suatu proses sosial budaya. Sedangkan NU, menurut Ali Maschan Moesa (2007), mendorong munculnya pemahaman agama secara inklusif, kontekstual, dan mementingkan substansi ketimbang yang formalisme.

## **D. Pembaruan Keagamaan Abdul Syukur**

### ***1. Proses Transformasi Nilai Ajaran Islam***

Sebelum datangnya H. Abdul Syukur, kehidupan keagamaan orang Gu-Lakudo, dapat dikategorikan sebagai “agama sinkretis”. Suatu bentuk kepercayaan agama yang merupakan persenyawaan antara keyakinan Islam dengan warisan tradisi-budaya nenek-moyang mereka. Bahkan manifestasi kepercayaan terhadap Tuhan menurut konsep ajaran teologi Islam, justru tidak tampak dalam kehidupan orang Gu-Lakudo. Tetapi yang menonjol adalah praktek tradisi keagamaan yang diwarisi dari leluhur mereka yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.

Oleh karena itu, meskipun mereka meyakini adanya Tuhan menurut konsepsi Islam, tetapi mereka juga tetap saja menyiapkan sesajen untuk dijadikan sebagai media “penyembahan” dan sekaligus “meminta perkenaan” bagi pencapaian tujuan kehidupan mereka. Akibatnya, dalam realitas kehidupan keagamaan yang mereka praktekan, sudah tidak menunjukkan tanda-tanda keislaman. Karena yang lebih dominan dilakukan adalah praktek keagamaan yang berakar pada tradisi kepercayaan agama lama mereka, seperti penjelasan dari salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo sendiri.

Di sini (maksudnya di Gu-Lakudo) pada masa lalu, kehidupan masyarakatnya setengah *primitif*. Ketika saya masih kecil, saya sudah ingat—sebelum datangnya H. Abdul Syukur—mereka menganut kepercayaan *animisme*. Setiap rumah penduduk, pasti ada sesajen yang disiapkan untuk penyembahan pada roh halus. Belum dikatakan mampu suatu keluarga, kalau belum ada tempat sesembahan yang disiapkan, orang di sini menyebutnya sariga. Sariga itu dibuat dari kayu, bentuknya segi empat sebesar meja, yang dibungkus dengan kain putih dan di dalamnya ditaruh

---

<sup>28</sup>Menurut konsepsi pemikiran sejarah sosial dan kebudayaan Kuntowijoyo, bahwa keberadaan umat Islam Indonesia telah melewati tiga periode gerakan transformasi masyarakat, yaitu: mistis, ideologi, dan ilmu. Pertama, dalam periode mistis, ditandai dengan perubahan kepercayaan agama

berbagai jenis sesajen untuk dijadikan sebagai sarana penyembahan” (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 8 Pebruari 2008).

Dengan menyimak kandungan makna dari pernyataan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo tersebut, setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa sebelum datangnya Abdul Syukur, cenderung mereka mempraktekan kehidupan beragama pra-Islam. Menurut konsep dasar ajaran Islam, adalah menyekutukan Tuhan. Karena secara teologis, mereka melakukan penyimpangan terhadap keyakinan kepada Allah SWT. Artinya, pada masa sebelum datangnya H. Abdul Syukur, orang Gu-Lakudo meskipun sudah menerima Islam sebagai agama formal mereka, tetapi belum menunjukkan adanya simbol-simbol keislaman dalam kehidupan beragama.

Tetapi, mereka melakukan penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang. Yang telah berakar dalam tradisi budaya keagamaan yang harus dihormati dan ditaati bersama. Karena kepercayaan terhadap roh-roh tersebut merupakan unsur yang begitu esensial, yang dapat merefleksikan tentang alam dunia dengan segala kebaikan dan keburukannya. Dengan demikian, maka agar bisa mempengaruhi baik-buruknya aktivitas para roh, diperlukan sesajen untuk dipersembahkan.<sup>29</sup> Hal ini sebagai simbol kepercayaan yang bersumber dari tradisi agama leluhur mereka. Karena roh-roh yang tidak kelihatan atau *gaib*, diyakini memiliki kekuatan *supernatural* dan *magis* serta bersifat universal. Inilah sebabnya, perlu dimanifestasikan melalui pengadaan sesajen; di mana masyarakat harus menunjukkan sikap *respons* dan kesetiaan kepada hal tersebut.

Abdul Syukur, sebagai salah seorang ulama Islam modernis dan transformatif, ketika menyaksikan realitas kehidupan beragama seperti ini, tidak bersikap *radikal* atau *konfrontatif*. Bahkan setelah berinter-aksi langsung dengan realita kehidupan beragama orang Gu-Lakudo, justru memperlihatkan sikap keulamaan yang *adaptif* dan *penetratif*. Dengan metode pendekatan tersebut, maka sebagai implikasi positifnya secara perlahan namun pasti, pengajaran Islam Abdul Syukur, mulai mendapatkan simpati dari para pemuka masyarakat Gu-Lakudo. Kecenderungan ini dapat disimak dari bagaimana reaksi Abdul Syukur terhadap salah seorang tokoh masyarakat, yang datang kepadanya dalam keadaan “mabuk berat” akibat baru selesai minum tuak.

---

<sup>29</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 17 Maret 2008.

Paman saya—kata H. Ahmad Hamzah—ketika H. Abdul Syukur belum lama datang dan tinggal di sini, dikenal sebagai salah seorang tokoh masyarakat Gu. Sekali waktu dia datang menemui beliau dalam keadaan mabuk berat. Tapi, walaupun dalam keadaan mabuk, dia tetap menyapa dengan sopan: “Tuan Guru, bagaimana jadinya! Saya ini tukang minum tuak sampai mabuk. Dan suka berjudi. Apa orang seperti saya bisa belajar sembahyang?” Abdul Syukur dengan bijak menjawab: “Siapa saja bisa belajar sembahyang. Tapi, kalau minum tuak jangan terlalu banyak. Sebab, kalau kamu mabuk, siapa yang akan mencarikan uang untuk anak-isterimu? Demikian juga, jika berjudi jangan menghabiskan banyak uang; sebab kalau uangmu habis, lalu siapa yang akan membiayai untuk kebutuhan hidup bagi anak-isterimu?” (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 17 Maret 2008).

Bertolak dari rekaman percakapan antara H. Abdul Syukur dengan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo tersebut, maka dapat memberikan gambaran bahwa ketika melakukan pengajaran agama, dia tidak bersikap *radikal*. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi pembaruan keagamaannya, selain menyentuh nurani kemanusiaan seseorang; juga merangsang logika rasionalnya. Artinya, dengan metode pendekatan yang bersifat *penetratif* tersebut, agaknya dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk melakukan introspeksi diri. Tujuannya, agar orang itu dengan kepekaan hati nuraninya dapat memahami baik-buruknya tindakan yang telah dilakukan. Dan juga menyentuh rasionalnya, adalah untuk membedakan mana perbuatan yang bermanfaat dan sebaliknya yang tidak membawa manfaat dari tindakannya itu.

Metode pengajaran nilai-nilai keagamaan seperti yang dilakukan Abdul Syukur tersebut, pada hakikatnya adalah merujuk dari proses *dialektika* dan *enkulturasi* tekstual Al-Qur'an terhadap konteks sosial budaya lokal masyarakat Arab Jahiliyah.<sup>30</sup> Karena yang menjadi

---

<sup>30</sup>Dalam perspektif antropologi budaya, konsep *enkulturasi* adalah menunjuk pada proses pembudayaan nilai-nilai baru terhadap masyarakat yang telah memiliki adat kebiasaan. Nilai-nilai tersebut, kemudian ditransformasikan dengan menggunakan tradisi budaya mereka sebagai medianya. Karena itu, prosesnya meliputi tahapan *sosialisasi*, *asimilasi*, dan *integrasi*. Abdul Syukur, ketika mulai melakukan transformasi nilai-nilai ajaran Islam, juga menggunakan model pendekatan tersebut. *Pertama*, tahapan *sosialisasi* adalah berupaya mengenalkan konsep ajaran keagamaan yang sifatnya baru dalam konteks kehidupan masyarakat Gu-Lakudo. Dalam hal ini, Abdul Syukur menggunakan ajaran Islam untuk membangun dialog dengan masyarakat yang selanjutnya ditransformasikan dalam kehidupan mereka sebagai suatu bentuk “kebenaran”. *Kedua*, tahapan asimilasi adalah di mana Syukur mulai melakukan perubahan terhadap tradisi keagamaan mereka dengan merujuk pada konsepsi Islam. Karena proses *enkulturasi* menjelaskan bagaimana terjadinya inter-aksi antara kebudayaan masyarakat dengan nilai-nilai agama Islam. *Ketiga*, tahapan integrasi adalah menunjukkan bagaimana perpaduan antara ajaran yang diembannya dengan tradisi budaya keagamaan yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Gu-Lakudo. Oleh karena itu, dalam proses *enkulturasi* menekankan perlunya adaptasi, pemeliharaan, dan pengembangan nilai-nilai dan norma-norma baru yang diinternalisasi masyarakat. Dengan demikian, maka *enkulturasi* dalam konteks Islam, menuntut lahirnya produk budaya baru melalui gerakan transformasi sosial keagamaan sebagai proses dialektika antara nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dengan konteks budaya setempat. Sebagai konsekwensinya adalah bahwa

sasaran utama dalam proses *enkulturasi*, adalah berkaitan dengan berbagai hal yang mengganggu “ketertiban sosial”, seperti: berjudi, meminum khamar, praktek riba, perbudakan, dan lain-lain.

Dari keempat bentuk tradisi masyarakat Arab Jahiliyah itu, justru menjadi sasaran *enkulturasi* Al-Qur’an. Namun, penyampaiannya cenderung bersifat adaptif, dengan cara mendorong proses tahapan evolusi berpikir masyarakat yang menerima konsepsi tersebut. Misalnya, perbuatan *judi* dan meminum *khamar*, metode penyampaian Al-Qur’an tidak secara konfrontatif. Tetapi dengan cara merangsang berpikir rasional tentang kedua hal itu. Karena memang melalui peran-aktif Nabi Muhammad, Islam adalah berorientasi untuk membangun masyarakat yang beradab dan berbudaya.

*Pertama*, dialektika Al-Qur’an menggunakan argumen penyadaran tentang manfaat dan bahaya berjudi dan meminum khamar. “Bahwa judi dan khamar, selain mengandung manfaat bagi manusia; tetapi bahayanya lebih besar ketimbang manfaatnya” (QS. 2:219). *Kedua*, Al-Qur’an menggunakan argumen peringatan dalam bentuk larangan terkait dengan masalah khamar. “Seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk, hendaknya jangan melakukan shalat. Karena dikhawatirkan daya ingatnya menjadi lemah dan apa yang diucapkannya tidak dimengerti” (QS. 4:43). *Ketiga*, Al-Qur’an tidak lagi menggunakan argumen penyadaran dan peringatan, tetapi sudah mengarah pada konteks hukum yang mewajibkan untuk meninggalkannya. “Bahwa judi, khamar, dan mengundi nasib, adalah perbuatan setan yang keji dan harus ditinggalkan” (QS. 5:90-91).

Abdul Syukur, ketika melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan pada masyarakat Gu-Lakudo, juga menggunakan metode penyampaian Al-Qur’an, yang lebih bersifat *non-konfrontatif*. Artinya, Syukur tidak bersikap radikal ketika berinter-aksi dengan realitas kehidupan beragama orang Gu-Lakudo, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Namun, dengan metode pendekatan yang demikian itu, masyarakat Gu-Lakudo tidak bersikap anti-pati terhadap pengajaran keagamaan yang dilakukan Abdul Syukur.

Implikasi positifnya, rumah tempat tinggal Abdul Syukur di Lakudo, kemudian dijadikan sebagai pusat pengajaran Islam bagi masyarakat. Karena itu, maka setiap waktu (pagi, siang, sore, dan malam), orang berdatangan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah agama atau petunjuk untuk mengembangkan usaha perdagangan. Bahkan

---

dalam proses *enkulturasi* tersebut, selain mengandung aspek *teologis*, juga sekaligus *antropologis*. Lihat misalnya Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya (Disertasi)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, h. 136-137 dan 181-182.

kalangan tokoh masyarakat Gu-Lakudo yang datang, bukan hanya bertujuan untuk meminta penjelasan tentang kedua masalah tersebut. Tetapi yang berkaitan dengan hal yang justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya meminta berkah pada Abdul Syukur, agar bisa mendapatkan kemenangan dalam menyabung ayam. Hal ini sebagaimana yang direkam oleh peneliti, dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo sendiri.

Pada suatu waktu—menurut cerita H. Ahmad Hamzah—datang salah seorang pemuka masyarakat membawa taji ayam yang sudah mengkilat untuk minta didoakan oleh Abdul Syukur. “Tuan Guru, ini saya membawa taji yang akan saya pakai untuk sabung ayam. Saya minta dijampi-jampi (maksudnya didoakan) supaya saya bisa menang. Kalau saya menang, nanti saya datang pada Tuan Guru untuk belajar agama”. Abdul Syukur, justru memenuhi permintaan orang itu. Ketika dia pergi menyabung ayam, ternyata dia menang. Akhirnya, dia datang kembali kepada Abdul Syukur, selain untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, juga minta dimandisucikan untuk belajar agama Islam. Kejadian ini—lanjut Hamzah—bukan saya dengar cerita dari orang lain, tapi saya saksikan sendiri. Karena Abdul Syukur pertama datang di Gu-Lakudo tinggal di rumah bapak saya, dan yang minta didoakan taji ayamnya itu paman saya, kakak mama saya (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 17 Maret 2008).

Terkait dengan fenomena kehidupan beragama orang Gu-Lakudo, sebelum Abdul Syukur datang di daerah itu, dapat dikonsepsikan bahwa kecenderungan yang demikian itu bukanlah suatu hal yang hanya bersifat spesifik bagi masyarakat Gu-Lakudo. Tetapi, sudah menjadi semacam fenomena umum dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah “pinggiran” atau “pelosok” kekuasaan kesultanan Buton dan kerajaan Muna pada masa silam.

Karena sebelum penelitian disertasi ini dilakukan, peneliti sudah secara intens melakukan kajian berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Buton dan Muna. Analisis yang dikembangkan adalah: (1) bagaimana berlangsungnya proses islamisasi pada masa silam; (2) paham keagamaan seperti apa yang dominan diajarkan oleh para pembawa ajaran Islam; (3) seberapa kuatnya pengaruh ajaran Islam dalam membentuk keyakinan beragama masyarakat kedua daerah itu; dan (4) bagaimana perubahan sosial budayanya setelah masuknya Islam.

Dari hasil analisis *sosio-historis* dan *kultural*, memberikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, memang di masa silam kesultanan Buton memiliki posisi penting dalam proses pengembangan agama Islam di kawasan Timur kepulauan nusantara. Karena pada masa itu,

perairan di bagian selatan pulau Buton menjadi penghubung jalur lalu lintas laut yang cukup strategis antara pelabuhan Makassar dengan kepulauan Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan Timur Nusantara. Oleh karena itu, maka posisi geografis Buton, menjadi “pelabuhan transit” baik sebagai jalur perdagangan maupun berkaitan dengan pengembangan ajaran agama Islam. Demikian juga perairan selat Buton berfungsi sebagai “pintu masuk” yang utama di wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara itu, dalam proses awal masuknya agama Islam di kepulauan nusantara, adalah mengikuti jalur lalu lintas perdagangan laut.

*Kedua*, ajaran agama Islam ketika masuk di Buton dan Muna langsung bersentuhan dengan “istana kerajaan”. Dalam pengertian bahwa raja yang menjadi penguasa tertinggi dalam pemerintahan menerima Islam sebagai agama baru, yang juga diikuti oleh para petinggi kerajaannya. Namun, masalahnya adalah yang menjadi motif pengembangan agama Islam di masa itu lebih bersifat *elitis*. Artinya, konsepsi Islam dijadikan sebagai “alat legitimasi kekuasaan kerajaan”. Inilah sebabnya, dalam proses transformasi sistem nilai ajaran Islam, seperti “doktrin teologis” (*tauhid*) dan juga implikasi pengamalannya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah penyangga (*kadie*)—seperti di Gu-Lakudo—cenderung *eksklusif* dan tidak bersifat *egaliter*. Sebagai akibatnya, ajaran Islam tidak mampu menyentuh elemen-elemen dasar struktur masyarakat di lapis bawah (*grassroot*). Munculnya kecenderungan seperti ini, berkaitan dengan proses islamisasi yang tidak didukung dengan sistem pendidikan yang terlembagakan, sebagaimana Wali Songo di pulau Jawa. Yang mendirikan padepokan (pesantren) sebagai pusat pengajaran agama dan berlangsung secara sistematis, terbuka (*inklusif*), berkesinambungan, sehingga bisa *diakses* masyarakat secara luas.<sup>31</sup> Penyebaran agama Islam di

---

<sup>31</sup>Kecenderungan masuknya agama Islam di kerajaan Buton dan Muna pada ke-15 M. agak berbeda dengan di Jawa. Di Wilayah pengembangan keagamaan Wali Songo ini, ajaran agama Islam lebih dulu berinteraksi dengan kondisi sosial budaya masyarakat lapis bawah (*grassroot*), karena begitu kuatnya tekanan pengaruh sistem nilai budaya Hindu-Budha di pusat-pusat kekuasaan kerajaan di Jawa. Karenanya, setiap Wali—dimulai dari Sunan Bonang—mendirikan padepokan (pesantren) sebagai lembaga pendidikan Islam, yang kemudian mendorong berlangsungnya islamisasi di tanah Jawa. Dari pelembagaan pengajaran keagamaan yang dilakukan oleh Wali Songo ini, selanjutnya Islam mendapatkan “legitimasi politik” yang cukup kuat dari kekuasaan kesultanan Demak—lantaran Sunan Kalijaga menjadi Panglima tertingginya—pada abad ke-15 M. Artinya, Islam telah masuk ke dalam “pintu istana” kerajaan dan juga ikut memainkan peran-sentral dalam struktur kekuasaan. Namun, sebagai implikasi sosial budayanya adalah berlangsungnya apa yang diistilahkan dengan proses “sinkretis” antara ajaran “mistik Islam” dengan “mistik Jawa” yang hasilnya dalam bentuk “Islam kejawaan” yang banyak dianut oleh kalangan priayi, sebagai elite sosial dan kekuasaan kerajaan. Dari proses seperti inilah, dalam konteks dunia Islam modern memunculkan kategori: santri, abangan, dan priayi, menurut tesis Clifford Geertz (1956), sebagai suatu hasil studi antropologisnya. Oleh karena itu—beberapa puluh tahun sebelum studi Geertz—ketika H. Ahmad Dahlan kembali dari menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama Islam, dengan mengadopsi semangat pembaharuan keagamaan yang digulirkan Muhammad bin Abdul Wahab di Makkah dan Syekh Muhammad Abduh di Mesir, tantangan awal yang dihadapinya setelah menjadi Khatib di Masjid Kauman Yogyakarta, adalah perlungnya



wilayah Gu-Lakudo dan Mawasangka, atau pun di bagian selatan pulau Muna, memang pernah dilakukan oleh salah seorang ulama kalasik Buton yang cukup lama belajar di Mekkah pada abad ke-17 M. yang bernama H. Sulaiman. Namun, dalam proses pembelajaran keagamaan yang dilakukan, tidak didukung dengan lembaga pendidikan yang bersifat permanen, seperti *padepokan* atau *pesantren* oleh Wali Songo di Jawa (Luthfi, 1990).<sup>32</sup> Oleh karena itu, maka tidak bisa membentuk semacam “mata rantai islamisasi” yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga datangnya H. Abdul Syukur (Samdin, 2007).

*Ketiga*, proses islamisasi yang berlangsung di Buton dan Muna, cenderung *eksklusif*, *stagnan*, dan tidak bersifat *egaliter*. Hal ini terkait dengan paham keagamaan yang dikembangkan oleh para pembawa agama Islam. Mereka lebih dominan mengajarkan “paham tasawuf” dan pelembagaan tareqat, dari pada pengajaran syariat Islam secara utuh dan sistematis. Dalam konsepsi agama Islam, *tasawuf* merupakan ajaran *mistisisme* keagamaan yang penganutnya cenderung berorientasi pada kepentingan akhirat, ketimbang keduniaan. Karena itu, paham *tasawuf* di masa klasik dapat membentuk karakter para penganutnya untuk bersikap “membelakangi dunia”, atau menurut konsep kehidupan para ulama sufi disebut *uzlah*.<sup>33</sup> Inilah

---

merekonstruksi kembali pemikiran agama dalam Islam yang telah lama terbelenggu oleh kekuatan magis, mistisisme, irasional, dan stagnasi tradisi-budaya keagamaan masa klasik, yang memang sejak lama bercokol dalam tampilan Islam kejawaen. Kondisi yang demikian ini, yang mendorong H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi kemodernan dalam rangka melembagakan gerakan pembaharuan Islam di Jawa, yang dimulai dari kota Yogyakarta dan Solo. Karenanya, terkait dengan orientasi paham keagamaan sebagaimana tuntutan dalam dunia modern, maka bagi Ahmad Dahlan adalah perlunya melakukan perubahan dalam konteks kehidupan beragama yang lebih bersifat rasional dan juga progresif untuk berjuang memenuhi kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Tentang peranan pembaharuan pendiri Muhammadiyah ini, lihat misalnya, Sukidi Mulyadi, *Ahmad Dahlan: Sebagai Prototipe Muslim Calvinis*, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, Mei—Agustus, STIE Ahmad Dahlan, Jakarta, 2005. Dan Abdul Munir .Mul Khan, *Profetisme Pembaruan Gerakan Muhammadiyah*, dalam Mukhaer Pakkanna dan Nur Ahmad (ed), *Muhammadiyah Menjemput Perubahan: Tafsir Baru Gerakan Sosia-Ekonomi-Politik*, Buku Kompas, Jakarta, 2005.

<sup>32</sup>Salah satu hasil studi peneliti yang berjudul: *Islam dalam Budaya Muna—Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*—diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Idomesia Makassar (Umitoha), 1997.

<sup>33</sup>Membelakangi dunia atau *uzlah* sebagaimana konsep hidup *kaum sufi* di masa perkembangan peradaban Islam klasik, mengandung beberapa varian pemikiran filosofis. *Pertama*, menafikan peranan rasionalitas yang bersumber dari kemampuan *aqal* manusia. Dengan kecenderungan seperti ini, dapat dikonsepsikan bahwa pandangan dunia (*world view*) *kaum sufi* lebih bersifat *teosentris* ketimbang *antroposentris*, seperti yang pernah berkembang di Eropa pada masa *renaissance* dan pencerahan (*aufklarung*). Bagi bangsa-bangsa Eropa di masa itu, keunggulan rasionalitas yang bersumber dari kemampuan *aqal* manusia—meskipun juga harus berbenturan dengan pandangan teologis gereja—tetapi dalam proses selanjutnya, kemudian menjadi “pilar utama” bagi perkembangan peradaban dunia Barat. *Kedua*, perilaku kesalehan (*ascetis*) individu *kaum sufi* adalah tidak berorientasi keduniaan seperti yang dikonsepsikan Martin Luther King terhadap penganut Protestan-Calvinis—sebagaimana tesis Max Weber (1905)—tetapi lebih pada keakhiratan. *Ketiga*, praktek *uzlah* bagi *kaum sufi*, tidak hanya bermakna perlunya untuk meninggalkan “dunia ramai”, tetapi juga harus mencampakkan “kemewahan material” yang bersifat duniawi. Ekstrimnya, kalangan *sufi* dengan pendakian spiritualitasnya yang dilakukan setiap waktu—melalui manifestasi dzikir—yang dikejar adalah “kekayaan rohani” bukan “kekayaan materi”. Karenanya, pada dekade 1970-an Buya

sebabnya, bagi *kaum sufi* di masa silam, mereka cenderung memperlihatkan “sikap *fatalistis*” terhadap tuntutan kehidupan dunia. Karena yang menjadi obsesi dari tujuan akhir kehidupan mereka, adalah berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap Tuhan dengan segala sifat-sifat-Nya yang suci dan juga paripurna. Dan sifat-sifat ke-Tuhan-an tersebut, dalam pandangan *sufistik* memungkinkan untuk masuk dan melebur dalam diri seorang Muslim, melalui tahapan proses pendakian spiritualitas keagamaan.

Karena itu, Abdul Syukur setelah menetap di Gu-Lakudo dan mulai melakukan proses pengajaran nilai-nilai keagamaan dalam Islam terhadap masyarakatnya, cenderung menghindari untuk mengajarkan paham *tasawuf* dan *tareqat* pada mereka. Justru yang lebih ditekankan oleh Abdul Syukur, adalah pemahaman tentang *tauhid* dan *syari'at* secara utuh. Konsepsi pengajaran yang demikian ini dalam Islam, bertujuan untuk membentuk “karakter kepribadian” yang mengedepankan prinsip hidup keseimbangan yang dinamis antara kepentingan dunia dan akhirat, sebagaimana *hadits (masyhur)* Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh para ahli *hadits*: “*Tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, danuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok*”.

Dalam konteks ini, Abdul Syukur berupaya melakukan perombakan terhadap pola pikir masyarakat Gu-Lakudo, dari yang bernuansa *mistis-irasional* pada konteks yang *logis-rasional*. Artinya, bentuk keyakinan agama yang ditawarkannya sebagai hal yang bersifat fundamental dalam Islam, adalah mengandung logika yang sederhana dan bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Karena konsep monoteisme dalam Islam cenderung meniadakan hierarki penyembahan terhadap Tuhan. Implikasinya dari sistem kepercayaan monoteisme tersebut, adalah meruntuhkan tatanan stratifikasi sosial masyarakat.

Sebab, melalui ajaran *tauhid* yang bersifat *doktrinal-teologis*, memiliki implikasi pada perombakan sistem keyakinan, pola pikir, dan juga model tindakan individu dan

---

Hamka sebagai salah seorang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, melakukan rekonstruksi pemikiran terhadap pemahama tasawuf, misalnya: Tasawuf—Perkembangan dan Pemurniannya, dan juga Tasawuf Modern, yang diterbitkan oleh PT. Panjimas. Bagi Hamka, kehidupan *sufi* melalui ajaran tasawuf tidak harus meninggalkan “dunia ramai” sebagaimana yang dipraktikkan pada masa klasik. Namun, konsep tentang *uzlah* adalah sebagai bentuk kesalehan *spiritualitas* individu yang tetap berpijak pada konteks keduniaan, dengan melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan untuk membentuk “kesalehan kolektif” (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), yang merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam, sebagaimana kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada awal perkembangan Islam di jazirah Arab abad ke-7 M. Dalam perkembangan perdaban dunia kontemporer, konsep pemikiran Hamka tersebut, justru mendapatkan ruang yang apresiasi bagi munculnya kalangan pengusaha sukses yang “berbisnis dengan hati” di AS., seperti yang di gambarkan oleh Gay Hendricks dan Kate Ludman, dalam *The Corporate Mystic*, Bantam Books, New York, 1996.

kolektivitas masyarakat. Artinya, dengan konsepsi tersebut, Abdul Syukur berupaya membangun suatu bentuk kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individual maupun sosial. Dengan demikian, maka masyarakat Gu-Lakudo yang dikonsepsikan oleh Abdul Syukur, adalah suatu kontekstualisasi kehidupan yang selalu berpikir rasional yang tetap merujuk pada ajaran Islam yang komprehensif dalam memandang masa depannya.

Karenanya, Abdul Syukur tidak mengajarkan paham tasawuf kepada masyarakat Gu-Lakudo. Tentu saja kecenderungan seperti ini, karena terkait dengan karakter dasar keulamaan yang disandangnya, yaitu sebagai “ulama Islam modernis dan transformatif”.

Abdul Syukur—menurut H. Hamzah—tidak menerapkan ajaran tasawuf ketika mengajarkan Islam kepada orang Gu-Lakudo. Paham tasawuf hanya dipraktikkan sendiri<sup>34</sup> dalam bentuk ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Yang utama dan paling mendasar, yang ditekankan oleh Abdul Syukur, adalah berkaitan dengan masalah ketauhidan, sebagai suatu pengetahuan dasar untuk mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifat-Nya yang wajib diketahui dan dipahami setiap Muslim, supaya terhindar dari perilaku musyrik. Karena memang orang di sini, sebelum datangnya H. Abdul Syukur, mirip dengan kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah yang menyekutuakan Tuhan, ketika Nabi Muhammad mulai mengajarkan agama Islam kepada mereka. Dan pengajaran Abdul Syukur tentang Islam terhadap orang Gu-Lakudo, menerapkan paham *Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah* dalam ilmu ke-Tuhan-an dan *Mazhab Imam Syafi'i* di bidang hukum. Ia sangat menekankan kepada kami sebagai murid-muridnya yang pertama belajar Islam untuk selalu disiplin waktu dalam menegakkan shalat. Nanti setelah itu, baru mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 17 Maret 2008).

Dengan merujuk pada penjelasan H. Ahmad Hamzah di atas, dapat dikonsepsikan bahwa Abdul Syukur juga menganut paham teologi asy'ariyah atau Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Yang mengajarkan bahwa meskipun nasib manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi untuk menjalani kehidupan di dunia ini perlu disertai dengan usaha, ikhtiar, doa, dan juga tawakal. Karena manusia tidak mengetahui nasib baik dan buruknya, sehingga dituntut untuk melakukan berbagai bentuk amal kebajikan.

---

<sup>34</sup>Paham tasawuf yang dipraktikkan Abdul Syukur, sebagaimana yang dimaksudkan H. Ahmad Hamzah tersebut, dapat dikonsepsikan bahwa dia tidak memahami tasawuf seperti halnya para *ulama sufi* di masa Islam klasik yang meninggalkan “keramaian dunia” atau melakukan *uzlah* untuk berkontemplasi dalam pendakian spiritualitas dalam rangka mendekati Tuhan. Namun, dia tetap berada di tengah-tengah orang banyak dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Paham kesufian seperti yang dipraktikkan Abdul Syukur ini, adalah juga sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Hamka dalam paham tasawuf modernnya.

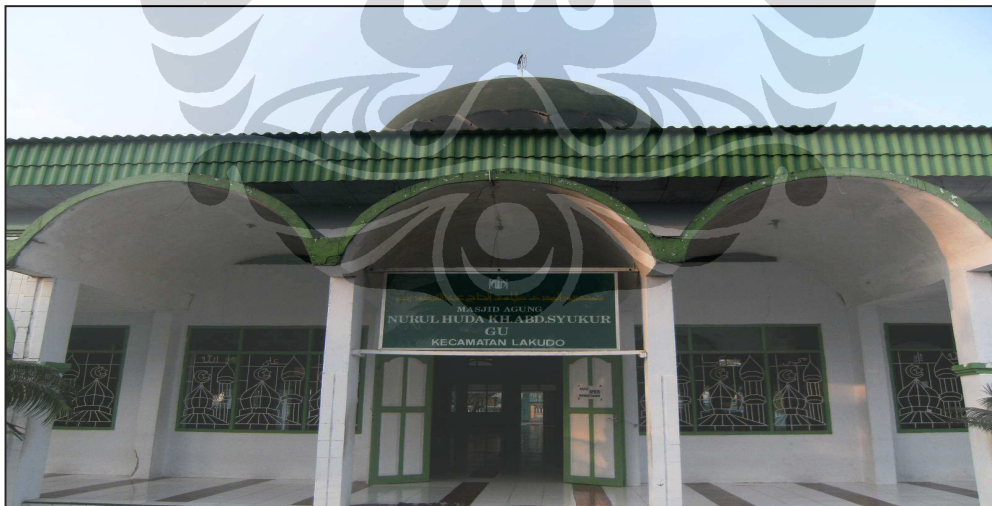
## 2. Bersama KH. Asy'ary di Gu-Lakudo

Dari penjelasan salah seorang tokoh masyarakat Gu-Lakudo di atas, bahwa Abdul Syukur tidak mengajarkan paham tasawuf kepada mereka. Karena konsep tasawuf merupakan bagian dari ajaran mistisisme Islam yang cenderung mengabaikan pemikiran rasionalitas dalam mengembangkan kehidupan beragama. Dengan pengajaran nilai-nilai keimanan (*tauhid*) yang mengarah pada perubahan orientasi paham keagamaan mulai kelihatan dalam kehidupan mereka. Artinya, masyarakat Gu-Lakudo semakin menunjukkan kegairahan dalam hal mempelajari ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, maka atas restu dari kalangan pemuka masyarakat Gu-Lakudo, Abdul Syukur mulai mendirikan masjid, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah shalat. Tetapi juga menjadi pusat pengajaran agama Islam bagi masyarakat luas. Kemasyhuran namanya sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu keislaman yang luas, tidak hanya diterima oleh masyarakat Gu-Lakudo. Melainkan juga menyebar pada daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan bahkan juga di pusat kesultanan Buton dan kerajaan Muna.

*Gambar 4.5.*

**Masjid Agung Nurul Huda KH. Abdul Syukur di Lakudo yang telah direnovasi.**



*Sumber:* Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Lakudo.

Dengan demikian, maka masjid yang didirikan oleh Abdul Syukur sekaligus berfungsi sebagai *madrasah* yang banyak didatangi masyarakat dari berbagai kampung di sekitar

bagian selatan pulau Muna. Artinya, pengajaran keagamaan yang dilakukan Abdul Syukur, semakin berkembang luas. Bahkan kemudian mendapat ajakan dari raja Muna untuk menetap tinggal di wilayah kekuasaannya, agar bisa dengan leluasa mengajarkan agama Islam terhadap masyarakatnya.

Sebagai implikasi positifnya, maka pengajaran ilmu agama Islam di Gu-Lakudo semakin marak dan mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat luas. Kecenderungan tersebut, adalah juga didukung dengan datangnya KH. Muhammad Asy'ary di wilayah Gu-Lakudo. Tokoh pembaruan agama Islam yang satu ini, selain berasal dari daerah yang sama (Binongko-Wakatobi) dengan Abdul Syukur, juga mereka sama-sama belajar Islam di Mekkah. Tetapi, Asy'ary lebih lama tinggal di Mekkah (11 tahun), ketimbang Abdul Syukur (5 tahun).

Muhammad Asy'ary, juga dikenal luas hingga di Timur Tengah sebagai salah seorang ulama Islam ahli hadits dan hukum Islam (*fiqh* dan *ushul fiqh*). Namun, setelah kembali ke Indonesia, tidak langsung bergabung dengan Abdul Syukur di Gu-Lakudo. Melainkan, terlebih dulu membuka pengajaran agama Islam di Masjid Al-Fatah Ambon. Dan nanti beberapa tahun kemudian, KH. Asy'ary baru datang ke Buton, selanjutnya ke Gu-Lakudo bersama KH. Abdul Syukur.

Peranan kedua ulama pembaharu Islam tersebut, dapat dikonsepsikan berhasil mewarnai kehidupan sosial keagamaan orang Gu-Lakudo. Dari konteks kehidupan yang cenderung primitif-tribal pada yang berorientasi kemandirian. Oleh karenanya, menurut H. Ahmad Hamzah, kedatangan Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary di Gu-Lakudo dikategorikan sebagai rahmat dari Tuhan.

Bagi kami, kedatangan kedua orang ulama Islam KH. Abdul Syukur dan KH. Muhammad Asy'ary di sini, bagaikan rahmat yang diturunkan Tuhan kepada kami masyarakat Gu-Lakudo. Ibaratnya, memasuki hutan belantara yang begitu lebat dan tidak kelihatan langit. Abdul Syukur berperan sebagai perintis awal, menebangi pohon-pohon besarnya dan membersihkan rumput liar yang ada di bawahnya, serta menyemai bibit tanamannya untuk ditanam. Dan selanjutnya Muhammad Asy'ary yang turut memberi pupuk dan ikut merawatnya, sehingga dapat menghasilkan "buah manis" seperti yang kami rasakan sekarang ini (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 17 Maret 2008).

Transformasi sosial keagamaan Abdul Syukur yang berperan sebagai pedagang dan ulama pembaharu Islam, kemudian mendapat dukungan yang kuat dari Muhammad Asy'ary.

Dan hal ini, telah mengantarkan masyarakat Gu-Lakudo ke dalam konteks perubahan orientasi paham keagamaan dari kecenderungan sinkretisme antara mistik Islam dengan agama tradisi budaya lokal mereka kepada paham agama yang bernuansa Islami. Dengan pengertian, bahwa kehidupan keagamaan masyarakat Gu-Lakudo menjadi begitu dinamis, dibanding etnik-etnik lokal lain yang ada di Buton dan Muna, bahkan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Karena paham keagamaan yang mereka adopsi—baik yang diterima dari Abdul Syukur maupun Muhammad Asy'ary—adalah berorientasi pada “keseimbangan hidup” antara kepentingan dunia dan akhirat.

Kesalahan individu yang telah membentuk kepribadian dasar mereka tidak hanya berorientasi keakhiratan dalam bentuk ketaatan terhadap pelaksanaan ibadah formalisme dalam Islam. Tetapi juga berimplikasi positif terhadap munculnya dorongan kesuksesan yang berorientasi kehidupan dunia dalam bentuk pengembangan ekonomi perdagangan di wilayah perkotaan. Artinya, nilai-nilai spiritualitas keagamaan yang mereka terima dari Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary, mampu membentuk etos ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo dan mendorong mereka untuk: (1) melakukan urbanisasi dan migrasi ke kota Bau-Bau; (2) memulai mengembangkan usaha perdagangan di perkotaan; dan (3) berkompetisi dengan para pedagang China dan Bugis-Makassar.<sup>35</sup>

### ***3. Tumbuhnya Etos Ekonomi Orang Gu-Lakudo***

Abdul Syukur, yang dapat dikategorikan sebagai salah seorang ulama Islam *modernis-transformatif*, secara sistematis melakukan proses pengajaran keagamaan pada masyarakat Gu-Lakudo, berlangsung sekitar 30 tahunan (1940-an—1970-an). Konsepsi pengajaran nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Abdul Syukur, secara sistematis dimulai dari: (1) pemurnian ajaran *tauhid* atau keimanan kepada Tuhan; (2) mendorong ketaatan terhadap pelaksanaan ibadah formal; dan (3) menjawab persoalan realitas sosial ekonomi masyarakat.

---

<sup>35</sup>Dalam suatu perbincangan bebas dengan salah seorang tokoh agama dan budaya Buton, bercerita kepada peneliti terkait dengan “ujian moral kejujuran” yang dilakukan oleh Abdul Syukur terhadap masyarakat Gu-Lakudo. “Pada suatu ketika, KH. Syukur mengutus salah seorang muridnya dari kampung lain untuk datang ke Gu-Lakudo dan berlagak sebagai seorang musafir. Ketika dekat waktu maghrib, orang tersebut ikut mandi di sumur umum. Tanpa setahu orang lain dia sengaja menyimpan barang berharga (cincin emas dan jam tangan) seakan-akan terlupakan, dan orang itu lalu menghilang entah ke mana. Yang menemukan barang tersebut langsung dibawa ke Masjid untuk diumumkan kepada masyarakat untuk mengetahui siapa pemiliknya” (H.D., Perbincangan bebas, di Keraton Buton, 10 Juni 2007).

*Pertama*, Abdul Syukur melakukan pemurnian terhadap elemen dasar ajaran keimanan (*tauhid*) kepada masyarakat Gu-Lakudo. Hal ini dimaksudkan untuk mendekonstruksi paham keagamaan lama mereka yang bersumber dari warisan tradisi leluhurnya. Sementara itu, di pihak lain untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan paham keagamaan yang Islami. Karena konsepsi ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, senantiasa berupaya merombak pola pikir masyarakat dari konteks *mistikal-irasional* pada keunggulan berpikir secara *logis-rasional*. Dengan metode berpikir yang demikian itu, maka masyarakat dituntun untuk membangun kesadaran dirinya dengan mengandalkan pikirannya sendiri. Konsepsi yang demikian ini, menurut Abdul Munir Mul Khan (2005), secara sosiologis adalah justru akan melahirkan “kesalehan etik”. Yang mengkonsepsikan bahwa ketika seorang muslim melakukan amal-amal kebajikan, bukan hanya didorong untuk mendapatkan pahala semata; tetapi hal itu dilakukan karena memang sebagai suatu pilihan sadar.<sup>36</sup>

Karenanya, konsep *tauhid* bagi setiap muslim adalah menjadi sebab awal (*prima causa*) dalam menggerakkan berbagai bentuk amal kebajikan dalam Islam. Selain itu, dengan *tauhid* memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar selalu berpikir *logis-rasional* dalam memandang realitas kehidupan dan masa depannya. Karena secara esensial, ajaran Islam mengandung paham rasionalitas yang proses kerjanya tentu saja mendapatkan tuntunan dari wahyu Tuhan. Dengan demikian, maka ajaran agama Islam ditujukan pada kerja rasional akal manusia.<sup>37</sup> Terkait dengan urgennya fungsi kerasionalan akal manusia, Nabi Muhammad menyatakan bahwa: “Agama itu adalah akal, tidak beragama seseorang yang tidak menggunakan akalnyanya”.

Dengan melakukan pemurnian keyakinan *tauhid* kepada Tuhan, juga mendorong masyarakat untuk bertindak produktif. Karena dengan menganut prinsip pertanggung-jawaban yang begitu ketat secara pribadi, maka mendorong setiap orang Islam untuk berlomba mengaktualisasikan orientasi kehidupannya dalam bentuk amal kebajikan (*amal saleh*). Hal ini tidak hanya terkait dengan ibadah formal, tetapi juga berkaitan dengan amal sosial kemasyarakatan. Pada konteks ini, menurut Nurcholish Madjid (1987), harus berjalan secara

---

<sup>36</sup>Kesalehan (individu dan sosial) adalah suatu bentuk tindakan individu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, yang dilakukan atas kesadaran pada ketaatan terhadap ajaran Tuhan. Karena itu, tindakan yang berorientasi kesalehan adalah merupakan dari proses keberimanan yang berlangsung secara sadar. Lihat juga misalnya, Abdul Munir Mul Khan, *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta, 2005, h. 11.

<sup>37</sup>Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, tth., h. 9-11.

berbarengan dengan membutuhkan kualitas ilmu dan iman. Dimensi ilmu untuk dunia dan dimensi iman yang berorientasi keakhiratan.<sup>38</sup>

*Kedua*, setelah penguatan keimanan, Abdul Syukur mendorong ketaatan terhadap pelaksanaan ibadah formal dalam Islam, seperti: shalat, puasa, zakat, dan haji. Bagi kaum muslim yang telah menyatakan keimanan pada Tuhan, maka sebagai konsekwensinya adalah disertai dengan pelaksanaan ibadah. Karena yang dapat dikategorikan sebagai muslim adalah orang yang menampakkan ketaatan beribadah dan penyerahan diri secara mutlak kepada Tuhan. Implikasi positifnya adalah membentuk “karakter kepribadian” seorang muslim, yang selanjutnya menggerakkan tingkah laku-perbuatan kesehariannya.

*Ketiga*, Abdul Syukur juga mencoba memberikan jawaban terhadap persoalan sosial ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Gu-Lakudo. Karena dalam Islam mengkonsepsikan bahwa ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks kehidupan keagamaan. Sejak awal kehadirannya di tengah masyarakat Arab, Islam sudah menegaskan bahwa “kemiskinan adalah mendekati kekafiran”. Dengan doktrin seperti ini Islam senantiasa memberikan motivasi pada umatnya untuk selalu bekerja keras dan tidak terbelenggu dalam kondisi kemiskinan, baik secara spiritual maupun material.

Bagi masyarakat Gu-Lakudo, dengan ketiga hal tersebut menjadi basis yang kuat dalam menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka. Karenanya, Abdul Syukur menanamkan suatu sistem nilai kerja dalam usaha pengembangan ekonomi kepada mereka, dengan mengatakan bahwa: “agama tanpa ekonomi tidak bisa berjalan, sebaliknya ekonomi tanpa agama, bisa menyesatkan”.<sup>39</sup> Namun, untuk mengimplementasikan hal tersebut, Abdul Syukur mengajarkan pada orang Gu-Lakudo untuk menerapkan “prinsip hidup kenabian” atau yang dikonsepsikan sebagai “amanat kerasulan” (*siddiq, amanah, fatsanat* dan *tabligh*). Dengan sifat-sifat perilaku utama tersebut menjadi rujukan untuk setiap muslim dalam menjalani berbagai aspek kehidupan sosialnya.

Sifat *siddiq*, adalah memberikan tuntunan bagi seseorang untuk selalu “berperilaku benar” dalam hidupnya. Dengan demikian, maka bagi setiap muslim secara sadar dapat

---

<sup>38</sup>Dengan menyertakan iman dan ilmu itulah, menurut Nurcholish Madjid, manusia mampu melaksanakan “amal saleh” dan mencapai tingkat kemanusiaannya yang paling tinggi, baik di dunia ini maupu di akhirat kelak. Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1987, h. 249-250.

<sup>39</sup>H. Sabirin, Wawancara di Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid Bau-Bau, 12 Pebruari 2008. Sabirin adalah merupakan salah seorang murid generasi awal Abdul Syukur di Gu-Lakudo. Setelah melakukan urbanisasi di kota Bau-Bau, sambil berdagang dia juga terobsesi untuk mendirikan Pondok Pesantren, yang kemudian dikelola oleh putranya dari alumni Gontor dan Timur Tengah.



menjalani orientasi kehidupan yang benar. Mengaktualisasikan konsep *siddiq* dalam aktivitas ekonomi, dapat mengarahkan tujuan yang hendak dicapai secara efektif (tepat dan benar) ketika mengembangkan usaha ekonomi; dan juga efisiensi agar tidak terjadi kemubaziran. Karena sifat mubazir cenderung tidak benar dalam menjalani kehidupan.

Adapun sifat *amanah*, adalah membentuk sikap jujur dan terpercaya. Dengan sifat amanah ini, dapat membentuk karakter seseorang untuk mengemban tanggung jawab sosialnya, karena memiliki kredibilitas yang tinggi. Sifat amanah atau kejujuran menjadi sangat urgen dalam pengembangan usaha ekonomi karena dapat membentuk kepercayaan dari pihak lain, sebagai bentuk modal sosial dan jaringan ekonomi. Kecenderungan seperti ini yang kemudian menonjol dari orang Gu-Lakudo, sehingga mereka berhasil mengembangkan usaha perdagangan.

Sedangkan sifat *fatsanat*, adalah terkait dengan kecerdasan seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sifat ini dibentuk oleh keunggulan rasionalitas seseorang yang bersumber dari potensi kemanusiaannya yang paling tinggi (akal), untuk mencapai kesuksesan. Dalam aktivitas ekonomi, kecerdasan yang dapat melahirkan pertimbangan rasional sangat diperlukan. Sebab kejujuran, dipercaya, dan kredibilitas yang tinggi, belum cukup kalau tidak dibingkai dengan kemampuan rasionalitas yang mencerminkan kecerdasan dalam bertindak.

*Tabligh*, adalah sifat keterbukaan dalam menjalani kehidupan. Dengan sifat ini, seseorang dengan mudah dapat menciptakan kondisi yang komunikatif dalam proses inter-aksi sosial dengan berbagai pihak. Bagi pengembangan usaha ekonomi, sifat *tablig* diperlukan untuk menjalin hubungan kepercayaan dan juga jaringan usaha yang sedang dikembangkan. Karena itu, orang Gu-Lakudo dengan mudah dapat menjalin hubungan kepercayaan dan kerja sama dengan pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar, pada awal kedatangan mereka ke kota Bau-Bau.

Dengan konsep ajaran tentang perilaku utama yang diajarkan Abdul Syukur tersebut yang kemudian membentuk karakter kepribadian generasi awal orang Gu-Lakudo. Sehingga, ketika mereka terobsesi untuk melakukan migrasi desa-kota sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan ketaatan dalam mengamalkan ajaran agama dengan pengembangan ekonomi perdagangan. Karena bagi Abdul Syukur sendiri, bukan sebagai sesuatu hal yang begitu sulit untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi dalam kehidupan beragama. Sebelum kedatangannya di Gu-Lakudo sudah terlebih dulu mempraktekan sistem integratif tersebut. Abdul Syukur—sebagaimana Ahmad Dahlan di Jawa Tengah—selain berperan sebagai ulama

pembaharu keagamaan dalam Islam, tetapi juga berprofesi sebagai seorang pedagang (*wirausahawan*).

Ketika Abdul Syukur terobsesi untuk merombak sistem kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gu-Lakudo yang bersifat *subsisten* dan kemudian berorientasi pada usaha perdagangan, adalah tidak hanya terhenti pada tataran konseptual semata. Tetapi juga bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan masyarakat Gu-Lakudo. Sejak awal kedatangannya di daerah mereka pada tahun 1938 M, Abdul Syukur sudah mencermati bagaimana realitas sosial ekonomi masyarakatnya, yang hanya bergumul dengan sistem ekonomi bertahan hidup. Karena memang daerah mereka yang tandus sebagai hamparan batu kapur dengan dukungan potensi sumber daya alam yang terbatas, agaknya telah mengusik keprihatinan Abdul Syukur.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, maka setelah Abdul Syukur hijrah ke Gu-Lakudo dan menetap tinggal di daerah tersebut, selain merombak paham keagamaan lama mereka; juga mendorong tumbuhnya etos ekonomi perdagangan masyarakatnya. Terkait dengan hal ini, Abdul Syukur mengamati kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka yang masih memprihatinkan. Karena itu, meskipun dia berupaya untuk memurnikan dan menguatkan keimanan mereka; tetapi jika masih tetap terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan, maka kehidupan mereka boleh jadi tetap bersikap *fatalistis* dalam konteks keduniaan. Sehingga, Abdul Syukur melakukan langkah-langkah yang strategis dan sistematis untuk mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gu-Lakudo sebagai bagian yang integral dari visi pembaruan dan transformasi sosial keagamaan yang diembannya.

Langkah awal yang dilakukan oleh Abdul Syukur adalah mendorong aktivitas nelayan tradisional orang Gu-Lakudo untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan. Sebagai dasar pertimbangan rasionalnya, adalah sesuai dengan potensi sumber daya kelautan yang mereka miliki. Posisi geografis perkampungan mereka yang berada di teluk Lakudo dan menghubungkan dengan perairan selat Buton. Karena masih memiliki hasil laut yang lumayan banyak, seperti berbagai jenis ikan. Selain itu, penjualan ikan teri kering merupakan salah satu komoditi perdagangan hasil laut yang memiliki pasaran yang luas di kota-kota besar di pulau Jawa hingga Singapura.

---

<sup>40</sup>Kondisi geografis daerah Gu-Lakudo, dapat dikategorikan memiliki kemiripan dengan daerah asal Abdul Syukur di pulau Binongko-Wakatobi, yang juga terkenal tandus dan berbatu-batu. Oleh karena itu, maka masyarakatnya pun cenderung menumbuhkan “etos pelayaran dan perdagangan” antar-pulau di kepulauan Nusantara, termasuk Abdul Syukur sendiri.

Dalam menggalakkan penangkapan ikan bagi para nelayan tradisional di Gu-Lakudo tersebut, Abdul Syukur sendiri berperan sebagai penyedia “modal usaha”. Artinya, berbagai kebutuhan para nelayan untuk menunjang keberhasilan penangkapan ikan, adalah difasilitasi oleh Abdul Syukur dalam bentuk pinjaman lunak. Berkaitan dengan kesiapannya sebagai penyedia modal usaha bagi para nelayan, karena memang Abdul Syukur yang berprofesi sebagai pedagang antar-pulau yang telah memiliki kemampuan modal finansial. Namun demikian, dalam memposisikan diri sebagai pemberi pinjaman kepada para nelayan tersebut, Abdul Syukur justru tidak berperan sebagai “rentenir” atau “tengkulak”, bahkan bentuk pinjamannya tanpa bunga.<sup>41</sup>

Motivasi yang kuat dari Abdul Syukur, dan kemudian disertai dengan bantuan pinjaman modal bagi para nelayan Gu-Lakudo, membuat semakin marak penangkapan ikan—khususnya bagi penangkapan ikan teri—di wilayah itu. Oleh karena itu, meskipun hanya menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut *kurung-ngkurung*, tapi hasilnya cukup berlimpah. Dan hasil tangkapan ikan teri yang mereka dapat, dijemur pada panas matahari, hingga mengalami proses pengeringan. Lalu hasil pengeringannya dijual ke Makassar, Surabaya, dan hingga Singapur. Penjualan ikan teri kering itu, selanjutnya digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan para nelayan dan masyarakat pada umumnya.

Dengan maraknya penangkapan ikan oleh para nelayan tradisional Gu-Lakudo itu mendorong Abdul Syukur untuk membentuk lembaga ekonomi masyarakat, yang dinamakan *Koperasi Gu Makmur*. Adapun koperasi tersebut, merupakan “koperasi nelayan” meskipun melibatkan masyarakat secara luas. Pada awal terbentuknya yang menjadi simpanan pokok dan simpanan wajibnya bukan dalam bentuk uang, tetapi ikan yang disesuaikan dengan nilai tukar sejumlah uang. Tujuannya adalah sebagai wadah pengelolaan hasil tangkapan ikan bagi para nelayan serta menyiapkan berbagai kebutuhan pokok mereka. Karena itu, dengan terbentuknya koperasi tersebut, selain untuk mengorganisir pengelolaan hasil tangkapan ikan secara kelembagaan, sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat Gu-Lakudo dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi yang mereka miliki.

---

<sup>41</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 12 Pebruari 2008. Abdul Syukur sebagai salah seorang ulama Islam modernis-transformatif, tidak menyetujui adanya “bunga pinjaman” dalam transaksi utang-piutang. Dan apa yang dilakukannya terhadap para nelayan Gu-Lakudo, agaknya memiliki kemiripan dengan upaya awal Muahammad Yunus di Bangladesh, ketika memulai mengucurkan dana bantuan tanpa bunga kepada para petani miskin yang terbelenggu oleh piutang rentenir di desanya. Hal ini dilakukan oleh Yunus ketika masih berprofesi sebagai “guru besar ilmu ekonomi” di universitas Chittagong, Bangladesh dan sebelum mendirikan Greemand Bank. Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, h. 51.

Seiring dengan keberhasilan para nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan, Abdul Syukur juga mendorong masyarakat Gu-Lakudo agar mengembangkan usaha perdagangan antar-kampung, desa-kota, dan antar-pulau. Karena untuk aktivitas *jual-beli* barang dan jasa yang terlembagakan dalam sistem perdagangan, secara *normatif* dan *empirik* dianjurkan dalam Islam.<sup>42</sup> Meskipun demikian, perdagangan yang dilakukan harus mengacu pada nilai-nilai *moral-etik* keagamaan yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan sosial. Misalnya, jangan mengurangi takaran atau timbangan, menjual barang yang rusak atau ilegal, tidak menepati janji dalam transaksi jual-beli, hingga penerapan sistem riba untuk menghimpun modal dalam perdagangan. Kesemua hal tersebut adalah menjadi penekanan Abdul Syukur pada masyarakat Gu-Lakudo, ketika mereka mulai mengembangkan usaha perdagangan.<sup>43</sup>

Oleh karenanya, ketika etos ekonomi mereka mulai tumbuh dan terobsesi untuk terlibat dalam usaha perdagangan, orang Gu-Lakudo tidak hanya menempatkan “kerja” sebagai aktivitas ekonomi untuk “menghimpun kekayaan” tanpa kendali nilai-nilai *moral-etik* Islam. Tetapi, lebih dari itu adalah merupakan bagian yang integral dari pengamalan ajaran agama. Dalam pengertian lain, munculnya etos kerja tidak hanya dibentuk oleh tradisi budaya yang telah berakar dengan kuat dalam suatu masyarakat, melainkan sebagai rahmat yang bersumber dari Tuhan.<sup>44</sup>

Dengan pengajaran Abdul Syukur yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian yang integral dari ajaran Islam, maka orang Gu-Lakudo memahami konsep kerja sebagai implementasi dari “amal saleh dalam mencari rizki di muka bumi.”<sup>45</sup> Artinya, bekerja keras untuk mencari harta kekayaan adalah dianjurkan dalam Islam, dengan tetap menjaga dan berada

---

<sup>42</sup>Pernyataan normatif, Al-Qur’an terhadap umat Islam: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian*” (QS. 4:29). Sementara itu secara empirik, Nabi Muhammad pun menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menggalakkan usaha perdagangan, baik ketika masih berada di Makkah maupun setelah di Medinah. Lihat juga Taqiuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 149-151.

<sup>43</sup>H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo 12 Pebruari 2008.

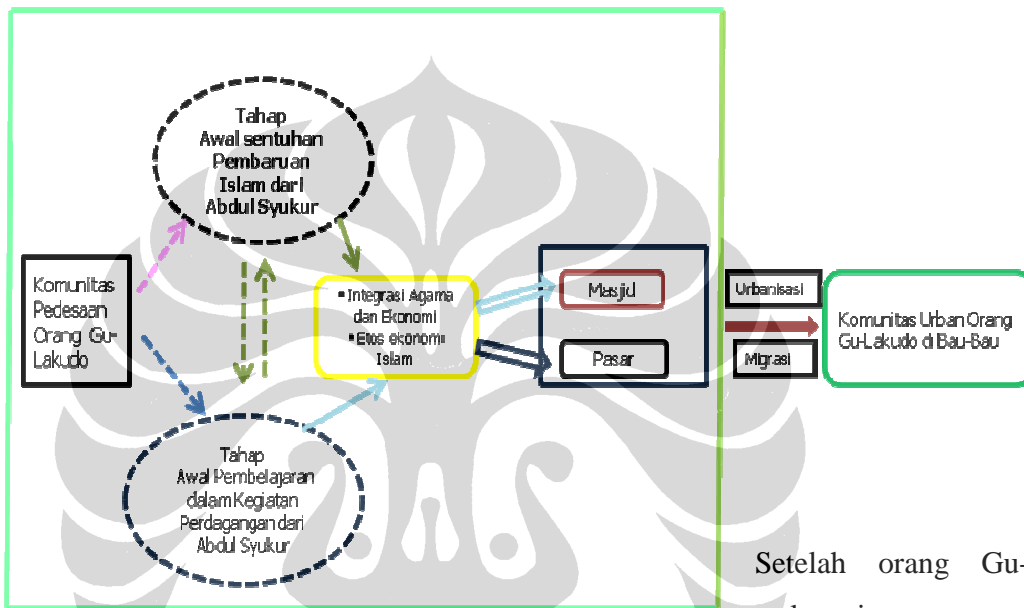
<sup>44</sup>Lihat juga Jansen H. Sinamo, *8 Etos Kerja Profesional*, Institut Darma Mahardika, Jakarta, 2005, h. 39.

<sup>45</sup>Kaitan antara kerja dengan mencari *rizqi*, secara teologis, Al-Qur’an menyatakan: “*Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizqi-Nya*” (QS. 67:15). *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang beriman yang akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, kemudian diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* (QS. 9:105). “*Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk keselamatan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia*” (QS. 28:77). “*Siapa yang ingin keberuntungan dunia, akan Kami beri keberuntungan itu, tapi celaka nasibnya di akhirat*” (QS. 42:20). “*Siapa yang ingin keberuntungan akhirat akan Kami beri tambahan kepada keberuntungannya itu.....*” (QS. 42:20).

pada koridor *moral force* agama. Karenanya, bekerja untuk mencari rizki dan mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah melalui sistem ekonomi, dalam konsepsi Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan hidup keduniaan, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan selanjutnya (akhirat).

Bagan 3. 5

Terbentuknya Etos Ekonomi Perdagangan Orang Gu-Lakudo (1940-an—1960-an)

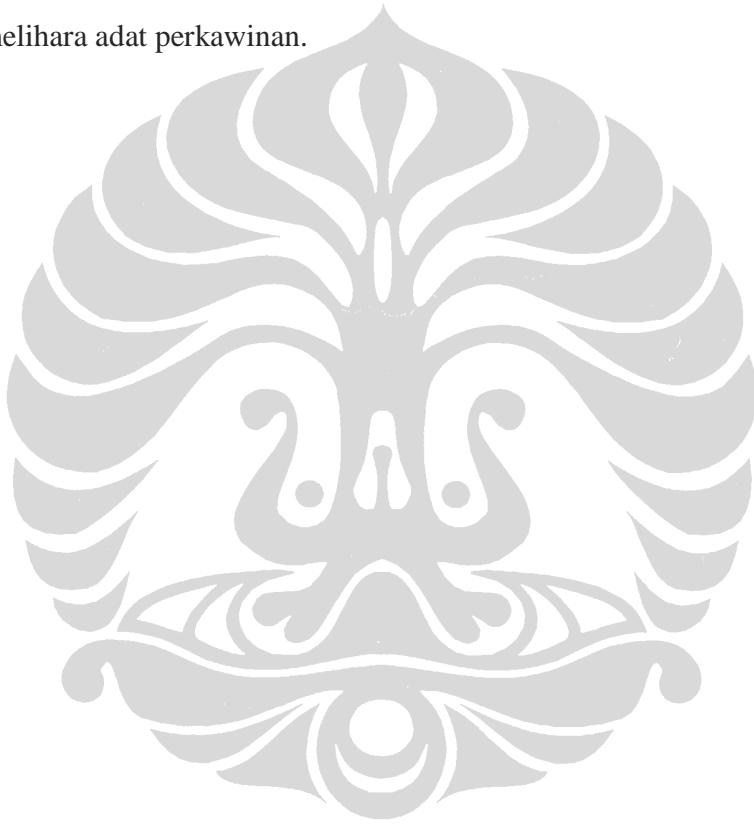


Setelah orang Gu-Lakudo melewati proses pengajaran dan pendidikan nilai-nilai keagamaan dalam Islam dari Abdul Syukur, konsepsi keseimbangan hidup (dunia dan akhirat), membentuk etos kerja mereka dalam mengembangkan usaha ekonomi perdagangan. Inilah sebabnya, material yang berhasil mereka kumpulkan, selain untuk pengembangan usaha dagang, juga disumbangkan untuk membangun sarana ibadah (masjid), sarana pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah, serta berbagai kegiatan amal kebajikan dalam Islam.

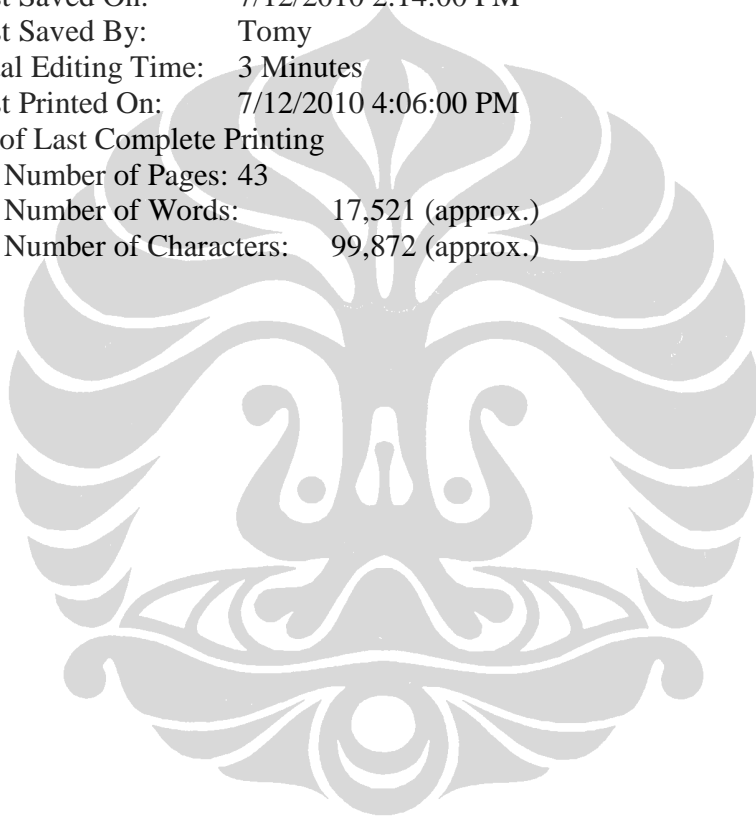
Tumbuhnya etos ekonomi dari berbagai suku-bangsa di Indonesia, adalah memang terkait dengan nilai-nilai budaya dan paham keagamaan yang mereka anut. Bagi orang Bugis-Makassar (Matulada, 1985; Rahim, 1985; dan Darmawan, 2005), misalnya, bahwa tumbuhnya “etos ekonomi mereka” dalam mengembangkan usaha dagang di Nusantara, termotivasi oleh sistem nilai budaya dan agama mereka yang terekspresikan dalam *siri*. Menurut Matulada, pengertian *siri* yang telah mengakar dengan kuat dalam konteks kehidupan sosial budaya dan

kemasyarakatan orang Bugis-Makassar. Oleh karena itu, maka *siri'* berkaitan dengan: (1) perasaan malu seseorang, keluarga, atau kelompok; (2) kewajiban untuk menegakkan sanksi adat; dan (3) spirit yang kuat bagi seseorang untuk selalu bekerja keras.

Orang Bugis-Makassar menghayati konsepsi ajaran *siri'* sebagai suatu panggilan untuk mempertahankan sistem nilai yang mereka miliki, hormati, dan hargai, lantaran mengandung makna esensial kehidupan, baik terhadap individu maupun dalam struktur sosial masyarakat. Karena mengandung: (1) kepercayaan beragama; (2) memegang kuat suatu janji dan amanah; (3) menjunjung tinggi nilai persahabatan; (4) memegang teguh kesetiakawanan; dan (5) untuk memelihara adat perkawinan.



Filename: BAB V  
Directory: D:\Lutfi\Lutfi  
Template: C:\Documents and Settings\Tomy\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 2:11:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 2:14:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 3 Minutes  
Last Printed On: 7/12/2010 4:06:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 43  
Number of Words: 17,521 (approx.)  
Number of Characters: 99,872 (approx.)



## BAB VI

### MIGRASI DESA-KOTA ORANG GU-LAKUDO

#### A. Akar Tradisi Budaya Perantauan di Indonesia

##### 1. Merantau Sebagai Fenomena Sosial-Budaya

Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan perpindahan dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain, baik untuk tinggal menetap selamanya maupun hanya sementara waktu, secara tradisional dikonsepsikan sebagai *perantau* atau *merantau*.<sup>1</sup> Namun, seiring dengan proses modernisasi kehidupan sosial masyarakat yang disertai dengan berlangsungnya pembangunan, konsep merantau pun semakin jarang digunakan. Tetapi yang justru menjadi populer, adalah: *migrasi*, *transmigrasi*, dan *imigrasi*. Adapun berlangsungnya hal tersebut, sesuai dengan konteks hubungan jarak secara geografis dan juga ruang lingkup perjalanan yang ditempuh. Oleh karena itu, maka ketika terjadinya pergerakan penduduk dari desa ke kota, dikategorikan sebagai *migrasi*. Atau, perpindahan suatu komunitas masyarakat pada konteks antar-daerah kepulauan di Indonesia, adalah sebagai proses *transmigrasi*. Sedangkan perpindahan warga masyarakat suatu bangsa yang cenderung melampaui wilayah antar-negara, dikonsepsikan sebagai *imigrasi*.

Namun, konsepsi apa pun yang diformulasikan tentang perantauan atau perpindahan penduduk (*migrasi*, *transmigrasi*, dan *imigrasi*) adalah berkaitan dengan kemampuan “mobilitas geografis individual” seseorang atau sekelompok orang ketika meninggalkan daerah asalnya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dan selanjutnya membangun “relasi sosial baru” di luar komunitas masyarakat mereka sendiri, baik pada aspek politik, ekonomi, maupun budaya. Meskipun sebagai konsekwensinya, adalah senantiasa berkaitan dengan tercapainya harapan “kesuksesan” atau sebaliknya mengalami “kegagalan” dalam perantauan, terutama sukses pada aspek ekonomi. Karena memang yang menjadi tujuan akhir dari perantauan, senantiasa mengacu pada perbaikan kehidupan ekonomi. Artinya, manakala mencapai kesuksesan ekonomi dalam

---

<sup>1</sup>Perantau adalah menunjuk pada pengertian konseptual tentang individu, kelompok, dan komunitas, yang melakukan pekerjaan merantau. Yang dalam hal ini, adalah meninggalkan daerah asalnya ke daerah lain, baik untuk menetap tinggal selamanya di daerah tujuan maupun hanya bersifat sementara waktu. Dengan mengemban segala harapan, yang senantiasa berorientasi pada “kesuksesan hidup” (*material* dan *spiritual*). Obsesi keberhasilan yang demikian itu, yang juga mendorong orang Gu-Lakudo melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke berbagai kota di Indonesia, khususnya kota-kota di Sulawesi Tenggara.



perantauan, dapat mengangkat “status sosial” mereka, seperti yang menjadi obsesi para TKI/TKW ke luar negeri.

Bagi kebanyakan suku-bangsa atau pun etnik di berbagai daerah di Indonesia, ketika meninggalkan daerah asalnya untuk melakukan perantauan, memang ada yang termotivasi oleh sistem nilai budaya mereka. Dalam pengertian, bahwa nilai-nilai budaya masyarakatnya yang telah membentuk “pandangan hidup” mereka sebagai perantau. Tujuan yang ingin dicapai, adalah bagaimana caranya berjuang di daerah rantau untuk mewujudkan harapan mereka untuk meraih “kesuksesan”, khususnya dalam konteks kehidupan ekonomi.

Oleh karenanya, maka kecenderungan untuk meninggalkan daerah asal mereka dan menjadi perantau, mengakar dalam tradisi budayanya. Dengan sistem nilai budaya yang mereka anut merupakan sumber inspirasi dan juga motivasi dalam melakukan perjalanan sebagai “perantau”. Adapun dari berbagai etnik di Indonesia, sejak masa silam sudah mengembangkan tradisi budaya merantau. Sebagaimana dalam tradisi lisan orang Banjar, misalnya, menurut hasil studi Arbain (2009), bahwa aktivitas merantau disebut dengan *madam*. Ini menunjuk pada pengertian, melakukan perjalanan jauh dalam kurun waktu yang cukup lama, dan bahkan cenderung untuk menetap tinggal di daerah tujuan. Inilah sebabnya, sejak awal abad ke 18 M. orang Banjar sudah menyebar di sepanjang Sumatera Timur, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Demikian juga orang Minang di Sumatera Barat, dari hasil studi Elizabeth E Graves (2007), merantau pada berbagai kota di Indonesia, telah menjadi tradisi budaya mereka sejak masa lampau. Basis-basis keluarga orang Minang yang mengembangkan tradisi merantau, adalah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu: (1) penuntut ilmu agama; dan (2) para pedagang kecil. Hal ini didukung oleh sistem sosial budaya orang Minang yang memposisikan “kaum perempuan” sebagai pengelola dan pengawas tanah-tanah pertanian mereka. Sistem sosial budaya tersebut, membuka ruang untuk kaum laki-laki—khususnya para pemuda—untuk meninggalkan desanya. Karenanya, setelah memasuki usia dewasa, bagi kebanyakan para pemuda sudah tidak tidur di rumah orang tuanya, melainkan tidur di *surau*. Demikian juga para pedagang yang sedang melakukan perjalanan, tidak jarang mereka pun menumpang bermalam di *surau* untuk mempelajari paham keagamaan dari para guru-guru agama. Karena itu, menurut Graves (2007), *surau* bagi orang Minang berfungsi sebagai “pusat informasi dan kontak-kontak

sosial berkaitan dengan orientasi kehidupan di luar nagari mereka”. Selanjutnya, dapat merangsang kaum mudanya untuk melakukan perantauan.

Menonjolnya tradisi merantau orang Minang tersebut, seperti juga orang pulau Bawean di Jawa Timur. Dari hasil studi Drajat Tri Kartono (2005), menyatakan bahwa mereka melakukan perantauan adalah terkait dengan tradisi budaya mereka yang terus diwarisi kalangan generasi mudanya.<sup>2</sup> Konstruksi pengetahuan tentang perantauan bagi orang Bawean, menurut Kartono, adalah menjadi: (1) realitas sosial orang muda; dan (2) realitas ekonomi keluarga.

Kaitannya dengan realitas sosial dari kaum muda Bawean, telah terobjektifikasi pada aktivitas keseharian individu-individu. Dalam konteks ini, merantau menjadi realitas sosial yang terkonstruksi dengan kuat pada kalangan generasi muda orang Bawean. Merantau bagi mereka senantiasa dihubungkan dengan keberhasilan untuk mengangkat status sosial ekonomi dalam bentuk kekayaan material yang cenderung menonjol di daerah asalnya, di pulau Bawean. Sedangkan keterkaitannya dengan realitas ekonomi keluarga, bahwa merantau adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri—terutama Malasiya dan Singapura—dengan tujuan agar bisa untuk “mengangkat ekonomi” keluarga mereka yang ditinggalkan di Bawean. Karena itu, dengan konstruksi pemikiran yang demikian ini, maka aktivitas merantau bagi orang Bawean, adalah juga mengandung misi pengembangan ekonomi.

Di Sulawesi Selatan, etnik lokalnya yang mendiami wilayah tersebut yang dapat dikategorikan memiliki akar tradisi budaya merantau yang cukup dominan adalah orang Bugis-Makassar. Karena memang merantau bagi mereka, merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau pun *integral* dari etos pelayaran dan pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan yang mereka geluti sejak masa silam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian mereka cenderung mendominasi daerah perantauan pada berbagai wilayah perkotaan di Indonesia.

Bagi orang Bugis-Makassar, misalnya, pengaruh *mitos* pengembaraan maritim *Sawerigading*, agaknya telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang kuat dalam hal melakukan pelayaran dan juga perantauan. Menurut mitos *La Galigo*, diceritakan bahwa

---

<sup>2</sup>Dari temuan kedua hasil studi tersebut, agaknya menunjukkan suatu perbedaan yang mencolok dalam hal melakukan perantauan. Perantauan orang Minang cenderung memiliki jangkauan wilayah yang luas, dalam arti menyebar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Sedangkan kecenderungan merantau bagi orang Bawean, adalah berangkat ke Malaysia. Dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai dan penghasilan yang banyak.

*Sawerigading* mengarungi samudera luas ke berbagai wilayah di kepulauan Nusantara hingga ke negeri China,<sup>3</sup>

Karenanya, dalam konteks kehidupan orang Bugis-Makassar, merantau adalah berkaitan dengan motivasi pengembangan usaha perdagangan. Konstruksi pengetahuan mereka tentang pelayaran dan perantauan, adalah dapat disimak dari berbagai konsep ajaran dalam bentuk *petuah-petuah* yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dan *spirit* yang terkandung di dalamnya memberikan motivasi kepada generasi mudanya untuk mencari dan menemukan “kesuksesan” di daerah perantauan. Menurut konsepsi ajaran nilai-nilai budaya orang Bugis-Makassar, bahwa untuk meraih sukses tidak hanya dengan semangat saja, tetapi perlu dibarengi dengan tujuan yang pasti dan jalan yang benar.

Kalau layar sudah terkembang dan kemudi (*perahu*) telah terpasang, lebih baik tenggelam daripada surut langkah ke belakang” (Machmud, 1994).

Kalau mau berhasil dalam usahamu atau pekerjaanmu, amatilah jejak-jejak. Janganlah mengikuti jejak yang simpan siur, tetapi ikutilah jejak yang baik urutannya” (Machmud, 1994).

Merujuk dari muatan makna *petuah* tersebut, maka melakukan perantauan bagi orang Bugis-Makassar adalah memerlukan kebulatan tekad yang kuat dan keberanian untuk bertindak serta menanggung segala resiko yang dihadapi. Karena secara ideologis, surut langkah dari cita-cita perantauan yang sudah dipersiapkan dengan perhitungan yang matang, perlu diwujudkan meskipun harus menanggung semua resiko yang besar. Namun, tetap berada dalam bingkai keyakinan dan tekad yang kuat, bahwa “untuk mengetahui hasil suatu perjuangan, maka harus berusaha hingga di titik akhir” (Machmud, 1994, h. 52)

Sedangkan di Sulawesi Tenggara, yang dapat dikategorikan memiliki tradisi budaya merantau, adalah orang Buton pesisir dan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko). Meskipun intensitas dan wilayah perantauan mereka tidak terlalu menonjol sebagaimana dominannya kecenderungan merantau orang Bugis-Makassar.

Bagi orang Buton pesisir dan orang Wakatobi, sejak masa silam sudah mengenal daerah perantauan, seperti: Ambon, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Banten, Batavia, Tanjung

---

<sup>3</sup>Lihat misalnya, Nurhayati Rahman dkk (Ed.), *La Galigo: Menelusuri Warisan Sastra Dunia*, Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003.

Pinang, hingga Singapur dan Malaysia. Karena memang orang Buton pesisir dan Wakatobi, sejak masa kolonial Belanda sudah mengenal jalur pelayaran dan perdagangan maritim di kepulauan Nusantara. Artinya, sejak berabad-abad lamanya kedua etnik lokal di kepulauan Buton tersebut, sudah ikut terlibat dalam pengembangan aktivitas pelayaran dan perdagangan antar-pulau.

Kondisi ini didukung oleh kemampuan mereka sendiri dalam hal menyiapkan sarana pelayaran dan perdagangan. Misalnya, mereka membuat sendiri perahu layar, baik yang berukuran kecil maupun besar. Demikian juga berbagai kebutuhan barang dagangan yang laku di pasar perdagangan antar-pulau ketika itu, seperti hasil bumi, hutan, dan laut, mereka beli di kepulauan Maluku, selanjutnya mereka jual kembali di kota-kota di pulau Jawa atau bahkan hingga ke Singapur.

Dengan demikian, orang Buton pesisir dan Wakatobi—sebagaimana orang Bugis-Makassar—sebelum adanya kapal api yang mendukung kelancaran hubungan transportasi laut, mereka sudah mengenal daerah perantauan. Merantau bagi orang Buton dan Wakatobi, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi budaya pelayaran pada masa silam. Yang justru terintegrasi dalam perkembangan sistem perdagangan maritim yang memperjual-belikan berbagai komoditas dari hasil laut, perkebunan, dan hasil hutan. Karena itu, melakukan pelayaran dan mengembangkan ekonomi perdagangan bagi orang Buton dan Wakatobi, adalah juga identik dengan “perantauan”.<sup>4</sup>

Namun, setelah dimulainya pembangunan pada awal tahun 1970-an yang disertai dengan proses industrialisasi, kemudian merangsang elemen-elemen masyarakat di berbagai daerah untuk meninggalkan daerah asal mereka dan melakukan perantauan. Karena itu, wilayah-wilayah perkotaan—terutama kota-kota besar di pulau Jawa—yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan, menjadi tujuan utama bagi para perantau. Atau pun kota-kota yang terkonsentrasi sebagai pengembangan ekonomi perdagangan, menjadi tumpuan perpindahan penduduk dalam bentuk gerakan spontan sebagai perantau. Demikian juga dalam proses pengembangan kawasan-kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia, banyak didatangi oleh para perantau sebagai pencari kerja.

---

<sup>4</sup>Di Makassar, misalnya, sejak abad ke 17 M. sudah dikenal adanya “Kampung Butung” sebagai wilayah tempat tinggal orang Buton. Demikian juga orang Wakatobi, sampai sekarang mereka memiliki kompleks pemukiman di Tanjung Periuk, Jakarta Utara.

Karenanya, setelah berlangsungnya pembangunan dan industrialisasi pada masa Orde Baru, antara tradisi budaya merantau dengan gerakan spontanitas sebagai perantau menjadi tumpang-tindih. Artinya, sudah sulit untuk membedakan mana elemen masyarakat Indonesia yang memang memiliki akar tradisi budaya merantau dengan yang tidak. Karena setelah berlangsungnya proses pembangunan dan industrialisasi, mobilitas penduduk untuk melakukan perpindahan—terutama dari wilayah yang tertinggal pada wilayah yang lebih maju—cenderung semakin tinggi.

Dengan demikian, melakukan perantauan tidak lagi termotivasi oleh sistem nilai budaya mereka. Tetapi hanya lebih bersifat “gerakan spontanitas” untuk meninggalkan daerah asalnya dan pergi merantau ke daerah lain, baik untuk tinggal selamanya maupun hanya sementara waktu. Karena itu, berlangsungnya model perantauan seperti ini bagi kebanyakan etnik di Indonesia adalah lebih terkait dengan begitu kuatnya pengaruh pembangunan dan industrialisasi pada masa Orde Baru.

## **2. Orang Gu-Lakudo di Daerah Perantauan**

Agaknya, orang Gu-Lakudo berbeda dengan orang Buton pesisir dan Wakatobi dalam hal mengenal daerah perantauan. Bagi kedua etnik lokal yang disebutkan terakhir ini, justru sejak abad ke 17 M sudah terlibat dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan antar-pulau di kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, dengan keterlibatan mereka dalam mengembangkan akses perdagangan pada jalur pelayaran, memberikan penjelasan bahwa orang Buton pesisir dan Wakatobi, sejak masa silam sudah mengenal daerah perantauan. Sebagaimana halnya orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, orang Buton pesisir dan Wakatobi memiliki tradisi budaya merantau, melalui jalur pelayaran dan perdagangan.

Sementara itu, orang Gu-Lakudo ketika melakukan perantauan ke daerah lain tidak terinspirasi dan termotivasi oleh tradisi budaya mereka sebagai perantau. Karena pada masa silam mereka tidak terlibat dalam pengembangan jalur pelayaran dan perdagangan antar-pulau di kepulauan Nusantara. Artinya, secara *sosio-historis* dan *kultural* mereka tidak memiliki akar tradisi budaya sebagai “pelayar dan perantau”. Orang Gu-Lakudo mengenal daerah perantauan belum terlalu lama. Mereka terobsesi untuk melakukan perantauan, setelah memasuki pertengahan abad ke 20 M. Walaupun kemudian dalam proses transformasi sosial ekonomi desa-kota, mereka dapat dikategorikan berhasil mengembangkan usaha perdagangan di wilayah perkotaan, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Ketika orang Gu-Lakudo melakukan perantauan ke daerah lain, pada awalnya hanya bersifat “gerakan spontan” Karena pada masa silam—sebelum datangnya Abdul Syukur di daerah asal mereka—orang Gu-Lakudo dapat dikategorikan tidak memiliki akses dan kontribusi pada jalur pelayaran dan perdagangan antar-pulau. Keterlibatan mereka dalam pelayaran dan perdagangan, menumpang pada perahu layarnya orang Binongko dari kepulauan Wakatobi. Karena tidak “membuat perahu layar sendiri” untuk menopang sarana transportasi laut dalam perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awal keterlibatan mereka dalam upaya pengembangan usaha perdagangan antar-pulau, justru tidak dilakukan secara mandiri.

Selain itu dari gambaran di atas, juga memberikan penjelasan bahwa sebelum datangnya Abdul Syukur di daerah mereka, orang Gu-Lakudo memiliki pengetahuan yang cukup terbatas tentang pelayaran dan perdagangan. Karena memang konteks kehidupan sosial ekonomi mereka masih terkonsentrasi pada sistem ekonomi *subsisten*. Daerah mereka yang tandus dan penuh bebatuan, tidak memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, di daerah asal mereka hanya mengandalkan hasil laut dan perikanan. Kemudian didukung dengan perdagangan desa-kota dalam skala yang lebih kecil. Namun, ketika terjadinya degradasi besar-besaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan, orang Gu-Lakudo ikut mengalami kesulitan dalam hal mengembangkan potensi kehidupannya. Pilihan yang dilakukan adalah harus mampu memotivasi diri untuk keluar daerah atau melakukan perantauan. Meskipun ketika mereka merantau tidak ada jaminan, bahwa mereka dapat berhasil membuka akses pada pengembangan usaha ekonomi di daerah lain.

Dengan demikian, maka dapat dikonsepsikan bahwa pada awal orang Gu-Lakudo berorientasi keluar daerah atau melakukan perantauan, hanya bersifat spontan. Karena dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah mereka yang tandus. Tetapi dalam perantauan mereka pada dekade tersebut, belum didukung dengan “kemampuan etos ekonomi yang kompetitif”. Artinya, kecenderungan mereka dalam melakukan perantauan, hanya lebih bersifat spekulatif. Meskipun juga orientasi perantauan yang mereka lakukan, adalah bermotif “perbaikan ekonomi”. Atau pun setidaknya untuk keluar dari kondisi kehidupan ekonomi yang sulit ketika masih berada di daerah asalnya.

Terkait dengan kondisi alam di daerah mereka yang tandus, adalah menjadikan mereka untuk melakukan pilihan-pilihan yang sulit. Apakah tetap tinggal dan menetap di daerah mereka tanpa memiliki potensi sumber daya ekonomi yang bisa dikembangkan sebagai sumber

kehidupan. Atau sebaliknya, meninggalkan daerah asal mereka untuk merantau ke daerah lain. Oleh karenanya, orang Gu-Lakudo ketika melakukan perantauan dapat dikategorikan dalam dua tahapan.

*Pertama*, orang Gu-Lakudo melakukan perantauan pada masa pra-kemerdekaan. Pada dekade ini, inspirasi dan motivasi mereka dalam merantau hanya semacam gerakan spontan yang lebih bersifat spekulatif. Tanpa didukung dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang daerah perantauan. Hal ini dilakukan melalui transportasi laut (*perahu layar*) yang menghubungkan jaringan perdagangan antar-pulau, misalnya ke Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua di kawasan Timur Indonesia. Namun, ada juga yang ke Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan bahkan ke Malaysia. Meskipun perantauan mereka pada dekade tersebut, belum membawa keberhasilan pada pengembangan sumber daya ekonomi. Karena pekerjaan mereka di daerah rantau adalah sebagai “pekerja serabutan”. Artinya, perantauan orang Gu-Lakudo belum cukup efektif dalam hal mengakses potensi sumber daya ekonomi di daerah lain.

*Kedua*, perantauan orang Gu-Lakudo setelah kemerdekaan (1950-an—1960-an). Perantauan mereka pada dekade ini, pada prinsipnya tidak terlalu berbeda jauh dengan dekade sebelum kemerdekaan. Dalam melakukan perantauan adalah juga menggunakan *perahu layar*. Selain itu, pekerjaan mereka sebagai perantau, masih bersifat serabutan. Namun yang agak membedakan dengan dekade sebelumnya, motivasi perantauan mereka sudah mulai terfokus pada bagaimana caranya mengumpulkan modal usaha dagang yang selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi perdagangan di perkotaan. Kecenderungan tersebut, sebagaimana pengkuan dari salah seorang tokoh masyarakat dan agama orang Gu-Lakudo sendiri di kota Bau-Bau.

Sekitar tahun 1950-an saya memberanikan diri untuk merantau ke Ambon. Waktu itu saya hanya tamat sekolah dasar. Di ambon, saya tinggal di masjid untuk mendalami ajaran agama (Islam), walaupun di kampung saya juga sudah belajar agama dari H. Abdul Syukur. Ketika itu, pekerjaan saya sehari-hari di kota Ambon sebagai tukang pikul barang belanjaan orang di pasar, dengan mendapatkan upah dari yang punya barang. Tetapi dengan cara ini saya mulai mengumpulkan modal usaha untuk berdagang kecil-kecilan. Setelah modal usaha dagang saya terus berkembang dan saya merasa sudah cukup lama di Ambon, tahun 1970-an saya pulang kampung. Selanjutnya saya ikut berdagang pakaian jadi di pasar sentral Bau-Bau. Tapi sekarang saya sudah tua. Dan usaha dagang saya di pasar, saya sudah serahkan pada anak-anak untuk dilanjutkan. Sedangkan saya sendiri, hanya menekuni ibadah kepada Tuhan (menjadi imam masjid raya Bau-Bau); dan terkadang saya

memberikan bimbingan haji kepada orang Gu-Lakudo yang sudah siap mau berangkat ke tanah suci” (H. Baharuddin, Wawancara di Bau-Bau, 15 Desember 2007).

Apa yang dapat dikonsepsikan dari pernyataan salah seorang tokoh masyarakat dan agama orang Gu-Lakudo tersebut, bahwa motivasi melakukan perantauan adalah berkaitan dengan perjuangan hidup dalam pengembangan ekonomi, khususnya untuk mengumpulkan modal usaha dagang. Meskipun prosesnya melewati rentang waktu yang panjang dan dikumpulkan sedikit-demi sedikit. Artinya, orientasi mereka untuk berusaha mengembangkan perdagangan dalam perantauan pada dekade kedua ini, justru sudah mulai terinstrumentalisasi dengan kuat.

Demikian juga pengakuan dari salah seorang pedagang Gu-Lakudo yang pernah merantau ke Malaysia. Yang justru dalam perantauannya, dia tidak bisa mengumpulkan modal usaha untuk mengembangkan perdagangan setelah pulang kampung, sebagaimana obsesinya ketika sebelum melakukan perantauan. Di negeri Jiran tersebut, Harun hanya berpindah-pindah pekerjaan tanpa bisa menyimpan uang sedikit pun dari hasil kerjanya. Karenanya, dengan kondisi yang demikian itu maka Harun memutuskan untuk kembali ke Indonesia, khususnya di kampung halamannya Gu-Lakudo, meskipun tanpa membawa uang atau barang yang dijadikan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau.

Rangkaian pengalaman Harun sejak mulai merantau ke Malaysia, kemudian kembali ke Gu-Lakudo. Selanjutnya, dengan susah payah merintis usaha dagang, dengan berbagai kegagalan awal yang juga dialaminya, diceritakan kembali pada peneliti ketika melakukan wawancara—selesai shalat isya—di toko meubelnya di kota Bau-Bau.

Tahun 1958 saya tamat SMP di Bau-Bau. Kemudian saya melanjutkan ke PGA. Baru 1 tahun saya sekolah di PGA—tahun 1959—saya terdorong untuk ikut merantau ke Tawau, Malaysia. Di sana, saya bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah itu pada beberapa tahun kemudian, saya tergiur untuk pindah bekerja pada perusahaan kapal penangkapan ikan. Selama 7 tahun di Malaysia, saya tidak mendapatkan hasil seperti yang saya harapkan. Tahun 1966, saya pulang kampung. Lalu saya berdagang keliling dengan memanfaatkan kepercayaan dari China. Tahun 1973, saya berangkat ke Taliabo (kepulauan Maluku). Dengan tujuan untuk berdagang hasil laut. Karena waktu itu, perdagangan hasil laut ke pulau Jawa memberikan keuntungan yang lumayan. Tetapi selama 2 tahun di Taliabo, tidak membawa hasil seperti yang saya harapkan. Karena itu, tahun 1975, saya pulang



kampung (Gu-Lakudo). Akhirnya, saya memutuskan untuk mulai berdagang kecil-kecilan di Bau-Bau (H. Harun, Wawancara di Bau-Bau, 2 Pebruari 2008).<sup>5</sup>

Pilihan untuk melakukan perantauan bagi orang Gu-Lakudo, agaknya memang menjadi suatu hal yang lumrah. Karena terkait dengan kesulitan pengembangan potensi sumber daya ekonomi di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Pengalaman hidup mereka di daerah perantauan, meskipun “penuh rintangan” untuk sukses; tetapi obsesi dan motivasi mereka untuk mengumpulkan modal usaha dagang merupakan tujuan akhir yang mesti dicapai. Karenanya, yang menjadi tujuan utama orang Gu-Lakudo ketika melakukan perantauan pada dekade kedua ini, adalah lebih terkonsentrasi pada bagaimana bisa “mengumpulkan modal usaha dagang”. Yang dimulai dari pekerjaan yang bersifat serabutan. Namun, disertai dengan keuletan, kerja keras, hidup hemat, dan pandai menabung.

Karena itu, dapat dikonsepsikan bahwa sebelum orang Gu-Lakudo terlibat dalam pengembangan usaha perdagangan secara menetap di wilayah perkotaan di Sulawesi Tenggara (Bau-Bau, Raha, dan Kendari), kebanyakan mereka terlebih dulu melakukan perantauan ke daerah lain. Pengalaman perantauan dalam mencari modal awal untuk mengembangkan usaha dagang, adalah juga seperti yang diceritakan oleh salah seorang pedagang pakaian jadi orang Gu-Lakudo, di pasar Sentral Laino, Raha.

Pada waktu kecil di Lakudo, saya sekolah hanya sampai kelas tiga SD. Karena kesulitan ekonomi orang tua dan ada sedikit kemelut keluarga, saya ikut perahu penangkap ikan ke Kolonadale Sulawesi Tengah. Dua tahun saya ikut penangkapan ikan di sana, saya pulang kampung. Kemudian tahun 1973, saya merantau ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Awalnya saya menjadi tukang pikul di pasar. Lalu, saya berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan (pedagang kaki lima). Setelah saya mendapatkan sedikit modal, saya mulai berdagang sembako di pasar. Hampir sepuluh tahun di Balikpapan, saya pulang kampung dan bisa mengumpulkan modal untuk berdagang pakaian jadi di pasar sentral Bau-Bau. Tapi kemudian, dagangan saya bangkrut. Dengan sedikit modal yang tersisa, saya mulai lagi berdagang keliling ke kampung-kampung. Tahun 1989 saya datang ke Raha ini dan bersama teman-teman kami mendapatkan tempat berdagang di pasar Sentral lama. Tapi setelah beberapa lama kami berdagang, pasar terbakar. Saya lagi mengalami kerugian, barang dagangan saya ikut terbakar. Dan pasar dipindahkan di Laino, saya mulai lagi

---

<sup>5</sup>H. Harun merupakan salah seorang pedagang Gu-Lakudo yang melakukan diversifikasi usaha dagang dari barang-barang kelontong ke pakaian jadi, kemudian ke *meubel*. Karena itu, di Bau-Bau, H. Harun memiliki toko *meubel*. Bahkan salah seorang adiknya pernah bersamanya dan membantu dalam mengembangkan perdagangan, sudah memiliki toko *meubel* sendiri.

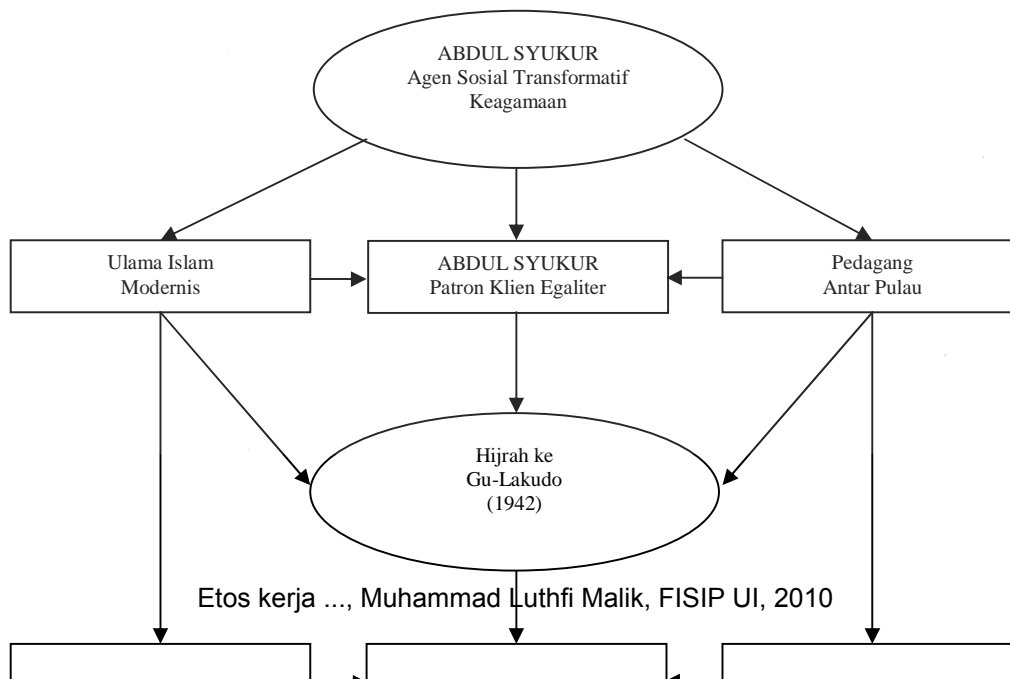
berdagang pakaian jadi. Tahun 2004 pasar Laino juga terbakar. Tapi alhamdulillah, atas kuasa Tuhan saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Usaha apa saja yang kita lakukan, memerlukan kerja keras, sabar, dan jujur. Ini bisa kita dapatkan dari ajaran agama kita. Makanya, sekalipun saya tidak tamat SD, tapi saya terus belajar agama, di Lakudo, di Bau-Bau, dan waktu di Balikpapan (H. Yusuf, Wawancara di Raha 20 April 2009).

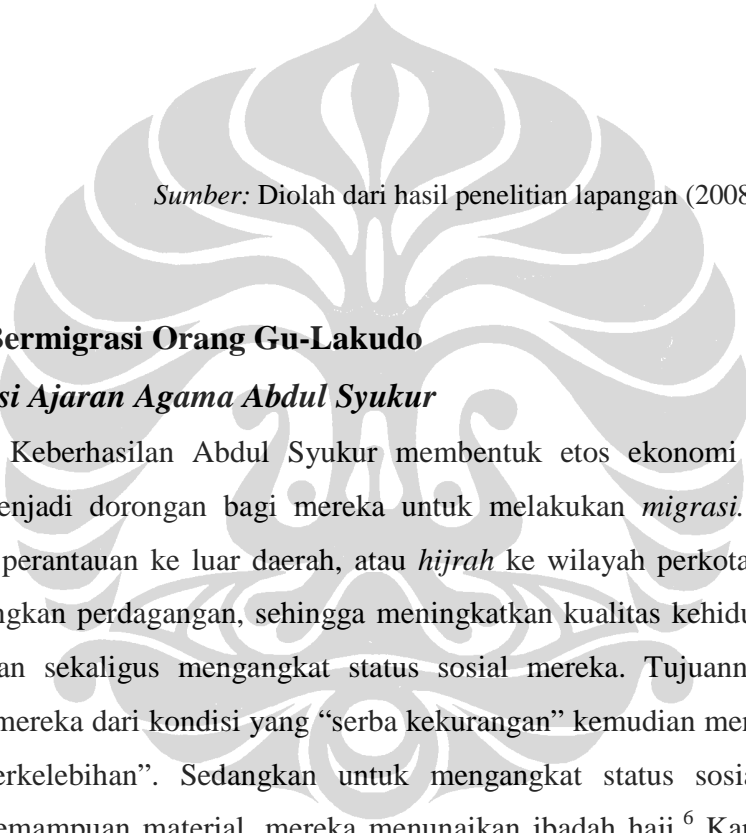
Bertolak dari pernyataan salah seorang pedagang pakaian jadi orang Gu-Lakudo di pasar sentral Raha tersebut, setidaknya dapat memberikan penjelasan bahwa merantau merupakan suatu “gerakan spontan”. Yang di daerah tujuan mereka ketika melakukan perantauan, belum tentu mereka mendapatkan kesuksesan. Namun, dengan nilai-nilai agama yang mereka yakini kebenarannya, meringkai obsesi mereka untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan.

Karena yang menjadi tujuan utama mereka melakukan perantauan, adalah bagaimana caranya bisa mengumpulkan modal awal agar bisa untuk mulai mengembangkan usaha perdagangan. Meskipun pada awalnya, terkadang tidak sesuai dengan harapan mereka, ketika mulai melakukan perantauan. Tetapi yang menjadi “kekuatan spirit” mereka adalah nilai-nilai ajaran agama Islam, yang diimplementasikan dalam bentuk kerja keras, ulet, jujur, sabar, dan tidak mudah untuk berputus asa. Dengan demikian, maka dorongan etos kerja mereka sebelum melakukan perantauan ke daerah lain, sudah dibentuk oleh sistem nilai agama Islam yang memang sebelumnya sudah ditumbuh-kembangkan H. Abdul Syukur di daerah asal mereka di Gu-Lakudo.

*Bagan 4.6.*

Peranan Abdul Syukur dalam membentuk etos ekonomi perdagangan Orang Gu-Lakudo sejak di daerah asal mereka.





*Sumber:* Diolah dari hasil penelitian lapangan (2008).

## **B. Motif Bermigrasi Orang Gu-Lakudo**

### ***1. Terobsesi Ajaran Agama Abdul Syukur***

Keberhasilan Abdul Syukur membentuk etos ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo, menjadi dorongan bagi mereka untuk melakukan *migrasi*. Menurut istilah mereka melakukan perantauan ke luar daerah, atau *hijrah* ke wilayah perkotaan. Dengan tujuan untuk mengembangkan perdagangan, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan mereka pada bidang ekonomi dan sekaligus mengangkat status sosial mereka. Tujuannya, untuk meningkatkan kehidupan mereka dari kondisi yang “serba kekurangan” kemudian menjadi “berkecukupan” dan sampai “berkelebihan”. Sedangkan untuk mengangkat status sosial mereka, kalau sudah memiliki kemampuan material, mereka menunaikan ibadah haji.<sup>6</sup> Karena dengan menyandang peridikat haji, maka status sosial mereka menjadi terangkat, baik di lingkungan keluarga mereka sendiri dan maupun di tengah masyarakat luas.

Menguatnya obsesi seperti ini bagi orang Gu-Lakudo, sebagaimana pengalaman pribadi guru-guru mereka KH. Abdul Syukur dan KH. Muhammad Asy'ary. Sebelum meninggalkan kampung halamannya Binongko (Wakatobi) untuk menuju Ambon, dan

---

<sup>6</sup>H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau 17 Pebruari 2008.

seterusnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, maka dapat dikonsepsikan bahwa yang menjadi motif utama orang Gu-Lakudo melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* adalah terdorong oleh perbaikan kehidupan ekonomi dan ketertarikan untuk naik haji.

Sejak pra-kemerdekaan, sudah ada segelintir orang Gu-Lakudo yang melakukan perantauan dan mengetahui dunia luar, seperti: kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Tetapi dari penghasilan yang mereka dapat di negeri orang, secara ekonomis belum bisa mendukung untuk menghimpun modal awal bagi pengembangan usaha perdagangan.

Namun, setelah mendapatkan pengajaran dari Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary, baik pada aspek penguatan paham keagamaan dalam Islam maupun terkait dengan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber daya ekonomi, perantauan mereka mulai tampak lebih efektif. Artinya, *urbanisasi* dan *migrasi* orang Gu-Lakudo sudah berorientasi pada aktivitas pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Karena motif perpindahan mereka dari desa ke kota, bukan lagi semacam gerakan spontan yang cenderung bersifat spekulatif. Tetapi, sudah disertai dengan penguatan etos ekonomi yang dibentuk oleh H. Abdul Syukur.

Dengan demikian, maka kecenderungan orang Gu-Lakudo ketika melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*, telah memiliki “suasana batin keagamaan” yang kuat untuk memberikan motivasi kesuksesan pada mereka, yang diimplementasikan dalam bentuk kerja keras dan juga hidup hemat. Hal ini kemudian, didukung dengan kemampuan mereka dalam melakukan kalkulasi untung-rugi secara rasional, sebagaimana tuntutan dalam mekanisme pasar.

Perpaduan kedua unsur tersebut (spirit keagamaan dalam Islam dan tindakan rasional ekonomi) adalah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang kuat bagi mereka untuk mencapai kesuksesan dalam mengembangkan usaha perdagangan di wilayah perkotaan. Dan setelah pemerintah kabupaten Buton membangun pasar sentral (1970) di kota Bau-Bau, maka mulai

---

<sup>7</sup>Dalam konteks ini, orang Gu-Lakudo naik haji hanya untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima bagi setiap Muslim, karena sudah memiliki kemampuan finansial dan kondisi fisik yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci Mekkah; dan pada umumnya, mereka naik haji setelah dekade 1970-an. Ini artinya, motif naik haji orang Gu-Lakudo sudah berbeda dengan yang dilakukan oleh kedua guru mereka (Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary). *Pertama*, kedua guru mereka berangkat ke Mekkah pada masa pra-kemerdekaan, selain harus mendapatkan izin resmi keberangkatan dari pemerintah kolonial Belanda; juga merupakan suatu perjalanan panjang hingga bertahun-tahun yang mengancam keselamatan nyawa seseorang, baik ketika perginya maupun waktu pulangnya. *Kedua*, motif keberangkatan guru mereka ke tanah suci, tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi juga untuk tinggal sementara waktu di sana, agar dapat mendalami ajaran agama Islam dari para ulama Mekkah. Namun, bagi orang Gu-Lakudo pada umumnya, dengan kemampuan finansial yang mereka miliki untuk naik haji, selain bernilai ibadah kepada Allah, juga sekaligus mengangkat status sosialnya dalam komunitas urban mereka atau masyarakatnya. Mereka makin terpadang dan menjadi “panutan” di komunitas mereka.

marak *kaum urban* orang Gu-Lakudo yang mengembangkan usaha perdagangan pakaian jadi dan barang-barang kelontong di pasar tersebut.<sup>8</sup>

Karena memang, sejak orang Gu-Lakudo mengalami “pematangan etos ekonomi” dan kemudian dimotivasi oleh guru mereka KH. Abdul Syukur, sekitar tahun 1960-an mereka sudah mulai melakukan perpindahan atau *urbanisasi* secara permanen di wilayah perkotaan, khususnya kota Bau-Bau (Samdin, Disertasi, 2007, h. 3). Dan bagi Abdul Syukur sendiri justru ikut-serta memelopori kepindahan mereka, dengan cara membeli sebidang tanah di tengah kota Bau-Bau, yang lokasinya berdekatan dengan pasar dan masjid raya.<sup>9</sup> Adapun generasi pertama orang Gu-Lakudo yang melakukan *urbanisasi* di kota Bau-Bau, seperti: H. Mansyur, H. Baharuddin, H. Sabirin, dan H. Harun.<sup>10</sup> Mereka ini yang dapat dikategorikan sebagai pelopor *urbanisasi* dan *migrasi* orang Gu-Lakudo.

Peranan KH. Abdul Syukur terhadap perkembangan kehidupan orang Gu-Lakudo, tidak hanya terbatas pada proses perubahan sosial budaya mereka melalui perubahan orientasi paham keagamaan dalam Islam. Lalu menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka. Tetapi juga sekaligus memberikan dorongan terhadap mereka agar memiliki tekad yang kuat untuk meninggikan daerah asal mereka dan menetap tinggal di wilayah perkotaan, terutama di kota Bau-Bau. Karena menurut Abdul Syukur sendiri bahwa untuk merubah kehidupan sosial

---

<sup>8</sup>Pada tahun 1972, bertepatan dengan liburan bulan suci ramadhan, peneliti berangkat ke Bau-Bau dengan tujuan “membeli pakaian baru” untuk persiapan menyongsong datangnya hari raya *idul fitri* pada tahun itu. Di pusat kota Bau-Bau, yang dikelilingi oleh pertokoan orang China, pemerintah Kabupaten Buton ketika itu, membangun “pasar bertingkat” yang di dalamnya didominasi oleh para pedagang Gu-Lakudo. Selain peneliti membeli pakaian, peneliti menyaksikan maraknya penjualan pakaian jadi dan barang-barang kelontong yang diperdagangkan orang Gu-Lakudo di pasar kota Bau-Bau tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1978 peneliti pindah sekolah dari SMA 1 Raha pada SMA 1 Bau-Bau hingga 1980. Dalam rentang waktu dua tahun ini, peneliti telah menyaksikan bagaimana progresifnya komunitas urban orang Gu-Lakudo dalam perdagangan, yang secara dinamis mereka mulai bersaing dengan para pedagang China dan Bugis-Makassar. Yang kemudian diikuti dengan penguasaan lokasi-lokasi pemukiman dan pertokoan mereka di sekitar pasar dan perluasan kota Bau-Bau. Fenomena seperti ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, hingga mereka melakukan ekspansi pasar perdagangan pakaian jadi di kota Raha dan Kendari, pada tahun 1990-an hingga saat ini.

<sup>9</sup>Dilokasi inilah KH. Abdul Syukur membangun rumah dan Sekolah Muhammadiyah (SD, SMP dan SMA) yang sekaligus berfungsi sebagai pengembangan syiar Islam yang berorientasi pada paham pembaharuan keagamaan. Sehingga Abdul Syukur pun dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Buton menjadi “imam besar” masjid raya kota Bau-Bau. Hal ini semakin menarik minat orang Gu-Lakudo untuk melakukan urbanisasi. Diolah dari data lapangan oleh peneliti, selama berlangsungnya penelitian disertasi ini, baik ketika di Bau-Bau maupun di Gu-Lakudo, 2007.

<sup>10</sup>Dari generasi pertama orang Gu-Lakudo yang melakukan urbanisasi ini, umumnya mereka telah berada di atas usia 60-an—70-an tahun. Bahkan H. Mansyur dan H. Baharuddin, sudah tidak aktif lagi berdagang, karena usia mereka yang sudah lanjut. Adapun usaha dagang yang mereka geluti sudah diserahkan kepada anak-anak mereka. Sementara itu, H. Sabirin selain aktif berdagang, juga ikut mengelola Pesantren Syekh Abdul Wahid bersama putranya, KH. Rasyid. Sedangkan H. Harun selain aktif dalam usaha perdagangan meubel (*olimpic*), dia juga berperan sebagai salah seorang “penggalang dana” renovasi masjid raya kota Bau-Bau. Diolah dari hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian disertasi di Bau-Bau, dari bulan Juni hingga Maret, 2007.

ekonomi orang Gu-Lakudo pada kondisi yang lebih baik, mereka perlu didorong untuk meninggalkan daerah asalnya dan terobsesi mengembangkan ekonomi perdagangan di kota.

Bentuk motivasi seperti apa yang dilakukan oleh Abdul Syukur pada orang Gu-Lakudo, agar mereka melakukan urbanisasi ? Dari salah seorang “murid generasi pertama” Abdul Syukur sendiri, menjelaskan bagaimana guru mereka memberikan dorongan agar termotivasi untuk *hijrah* ke kota dan mengembangkan usaha ekonomi perdagangan, meskipun dimulai dari usaha dagang kecil-kecilan.

KH. Abdul Syukur—kata Haji Sabirin—sejak kami masih di kampung, beliau tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kami: “Kalau ingin berhasil dalam mengembangkan usaha perdagangan, tempatnya bukan di desa, kecuali di kota. Karena perputaran ekonomi desa berbeda dengan ekonomi kota. Ekonomi desa perputarannya lambat, sedangkan ekonomi kota berputar dengan cepat. Di desa, berapa pun banyaknya hasil yang kita dapat, hanya untuk di makan. Berbeda dengan di kota, walaupun sedikit yang kita dapat setiap hari, tetapi kalau kita kerja keras dan bisa berhemat, kita bisa menyimpan untuk dijadikan modal usaha dagang di pasar, sehingga kita juga mendapat untung, biar untungnya tidak banyak asalkan perputarannya lancar” (H. Sabirin, Wawancara di Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid, Bataraguru, Bau-Bau, 6 Pebruari 2008).

Sebagai salah seorang ulama modernis dan transformatif Islam yang sekaligus berprofesi pedagang antar-pulau, Abdul Syukur cukup memahami bagaimana perbedaan antara kondisi ekonomi pedesaan yang cenderung stagnan dengan ekonomi perkotaan yang dinamis. Dengan membedakan bagaimana perkembangan ekonomi pedesaan dan ekonomi kota, Abdul Syukur mencoba merangsang rasionalitas dan daya kreativitas orang Gu-Lakudo, agar mereka memiliki “tekad yang kuat” untuk melakukan migrasi. Memang kehidupan di kota, tentu saja disertai dengan “persaingan hidup” yang cukup tajam. Apalagi sebagai pendatang baru dan memasuki struktur ekonomi perkotaan yang kompetitif, kemudian berupaya mengembangkan usaha perdagangan, bukan suatu hal yang mudah. Namun, sebagai prasyarat untuk sukses di kota, adalah: kerja keras, hemat, pandai menyimpan untuk modal usaha, dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama, harapan untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan ekonomi perdagangan merupakan suatu hal yang cukup rasional.

Oleh karena itu, dengan dorongan dari guru mereka—KH. Abdul Syukur—akibatnya mereka menjadi terobsesi untuk melakukan migrasi desa-kota. Dan yang menjadi tujuan awal dari proses *migrasi* mereka adalah kota Bau-Bau. Meskipun setelah itu, ada juga di

antara mereka yang melanjutkan perantauan ke daerah lain di Indonesia, seperti Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan bahkan hingga ke Malaysia. Namun yang menjadi orientasi utama mereka ketika melakukan perantauan, adalah untuk memulai mengembangkan usaha ekonomi perdagangan. Atau paling tidak, agar bisa mendapatkan modal awal untuk berdagang kecil-kecilan.

Dorongan Abdul Syukur pada orang Gu-Lakudo untuk melakukan *migrasi* desa-kota, dengan tujuan memperbaiki kehidupan mereka dari aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya, baik secara individual maupun kolektivitas. Konteks perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain bagi umat Islam untuk memperjuangkan kehidupan ke arah yang lebih baik, adalah merujuk pada *hijrah*-nya Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang awal dari Makkah ke Madinah. Yang dilatar-belakangi oleh struktur sosial mereka yang timpang di Makkah—khususnya aspek ekonomi—cenderung monopolis dan juga eksploitatif yang berakibat pada ketimpangan sosial yang tajam (Ali Sodiqin, 2008).

Proses *migrasi* orang Gu-Lakudo, meskipun konteksnya tidak memiliki kemiripan yang persis sama dengan ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang awal berhijrah, tetapi setidaknya memiliki relevansi sejarah sosial yang memungkinkan untuk dipertautkan. Secara sosiologis, dapat dikonsepsikan bahwa kedua komunitas tersebut ketika berhijrah dan bermigrasi, pada hakekatnya mereka melakukan “mobilitas geografis” untuk kemudian berproses pada “mobilitas vertikal” baik secara ekonomi, politik, dan maupun sosial budaya.

Karena memang dalam ajaran Islam, secara kontekstual memberikan tuntunan bahwa terjadinya proses perubahan dari suatu komunitas, masyarakat, atau bangsa, adalah terpulang pada upaya mereka sendiri. Dan untuk hal ini, maka secara konseptual justru al-Qur’an memberikan isyarat bahwa: “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak (berupaya) merubah nasibnya sendiri” (QS. 13:11).

*Hijrah* atau pun dalam pengertian modernnya sebagai bentuk *migrasi*, adalah juga berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Bagi orang Gu-Lakudo sendiri, agaknya mereka telah masuk dalam kategori tersebut. Sebagai *kaum migran*, ketika mereka meninggalkan daerah asalnya, mereka telah memiliki etos ekonomi yang cukup kompetitif untuk masuk dan ikut berkiprah dalam struktur ekonomi perkotaan, yang dimulai di kota Bau-Bau. Meskipun dalam mewujudkan obsesi mereka sebagai pedagang, melalui perjuangan panjang dan dimulai dari level bawah struktur ekonomi perdagangan di wilayah

perkotaan. Namun, dengan karakter mereka yang menunjukkan pekerja keras, dapat dipercaya, dan hidup hemat, menjadi potensi yang kuat mendorong kesuksesan mereka dalam pengembangan usaha dagang di Sulawesi Tenggara.

## **2. Perbaikan Kehidupan Sosial Ekonomi**

Sebagaimana etnik lokal lain di berbagai daerah di Indonesia, ketika melakukan *migrasi* yang menjadi motif utamanya adalah berkaitan dengan “faktor ekonomi”. Karena di daerah asal mereka cenderung disebabkan oleh persoalan tekanan sosial ekonomi; sementara itu di daerah tujuan, terbukanya kesempatan terhadap perbaikan kehidupan, khususnya pada aspek ekonomi. Meskipun juga terkadang harapan mereka mengalami berbagai hambatan dan bahkan tidak terwujud sama sekali, setelah berhadapan dengan kenyataan riil yang ditemui di daerah tujuan.

Kecenderungan yang demikian ini, adalah seperti kebanyakan yang dialami oleh *kaum migran* yang memasuki kota Jakarta dan kota besar lainnya di pulau Jawa dan kota-kota lain di Indonesia. Atau, sebagaimana pengalaman para TKI/TKW Indonesia di Malaysia, yang terkadang tidak sesuai dengan harapan mereka sebelum meninggalkan daerah asalnya.

Namun, obsesi mereka untuk mendapatkan kesuksesan pada aspek ekonomi cukup tinggi, sehingga mereka meninggalkan daerah asalnya atau pun bermigrasi dari desa ke kota. Meskipun kemudian antara harapan untuk sukses dengan kenyataan yang mereka temukan di tempat tujuan melakukan migrasi, justru menjadi kontra-produktif. Karena memang untuk masuk dalam struktur kehidupan sosial ekonomi perkotaan cenderung diwarnai dengan persaingan yang cukup tajam antar-individu dan kelompok, membutuhkan “etos ekonomi” yang juga kompetitif dan strategis. Bagi *kaum migran*—sebagai pendatang baru di wilayah perkotaan—justru tidak memberikan “ruang yang cukup kondusif” untuk mendukung pencapaian jalan kesuksesan hidup mereka.<sup>11</sup>

Demikian juga halnya orang Gu-Lakudo ketika mulai terobsesi untuk melakukan migrasi, yang menjadi motif utamanya adalah “faktor ekonomi”. Setelah Abdul Syukur berhasil

---

<sup>11</sup>Di negara-negara “industri maju” proses industrialisasi mendahului gerak laju urbanisasi, sehingga bagi para pencari kerja kebanyakan terserap pada sektor industri. Kecenderungan seperti ini, secara mendasar berbeda dengan yang berlangsung di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Yang terjadi justru *urbanisasi* dan *migrasi* desa-kota melampaui proses percepatan pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Bahkan menurut McGee terjadi “urbanisasi semu” yang menyebabkan terjadinya “invulsi kota”. Atau kata Hozelitz, berlangsungnya “urbanisasi tanpa industrialisasi”, sehingga terjadi bias urban. Lihat juga Chris Manning dan Tadjuddin Noer Efendi (Penyunting), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Studi Kependudukan UGM, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.



melakukan perubahan orientasi paham keagamaan orang Gu-Lakudo dan kemudian menumbuhkan etos ekonomi mereka, selanjutnya memotivasi mereka untuk melakukan migrasi desa-kota. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekonomi perdagangan di wilayah perkotaan.

Bagi Abdul Syukur, mengapa perlu memotivasi orang Gu-Lakudo agar melakukan migrasi desa-kota, kemudian mengembangkan usaha ekonomi perdagangan, adalah berdasarkan pertimbangan yang memang cukup rasional. Karena daerah asal orang Gu-Lakudo yang tandus dan tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai basis kehidupan ekonomi mereka. Kondisi daerah asal orang Gu-Lakudo, adalah memiliki kemiripan dengan daerah asal Abdul Syukur dan Muhammad Asy'ary, di pulau Binongko, yang juga terkenal tandus. Hal ini membentuk “pengetahuan instrumental” masyarakatnya untuk melakukan perantauan ke daerah lain dan terlibat dalam aktivitas perdagangan. Termasuk pengalaman pribadi Abdul Syukur sendiri, yang sejak usia remaja sudah meninggalkan daerah asalnya menuju Ambon, selanjutnya mulai mengembangkan usaha perdagangan kecil-kecilan. Demikian juga setelah kembali dari mendalami ajaran Islam di Mekkah, Abdul Syukur tetap aktif mengembangkan perdagangan antar-pulau, hingga hijrah ke Gu-Lakudo.

Karenanya, dengan refrensi pengetahuan keagamaan yang dimilikinya dan juga didukung dengan pengalaman pribadinya sendiri, menjadi rujukan yang kuat bagi Abdul Syukur untuk memotivasi orang Gu-Lakudo, agar mereka terobsesi untuk melakukan *migrasi* desa-kota. Tekanan ekonomi di daerah asal mereka dan adanya harapan kesuksesan di daerah rantau, maka kemudian menjadi pendorong yang kuat bagi mereka untuk berurban dan bermigran.

Hal ini sebagaimana pengalaman pribadi Abdul Syukur sendiri dan juga etniknya orang Binongko dan Wakatobi pada umumnya, bahwa mereka pun cukup berhasil mengangkat status sosial ekonominya, justru setelah melakukan perantauan dan terlibat dalam aktivitas perdagangan antar-pulau di kepulauan Nusantara ketika itu. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman pribadinya yang kemudian ditransformasikan oleh Abdul Syukur pada orang Gu-Lakudo. Sehingga, merangsang mereka untuk melakukan *migrasi* dari desa ke kota.

Untuk mengimplementasikan kepindahan mereka, justru Abdul Syukur sendiri yang mengawalinya dengan cara membeli sebidang tanah di kota Bau-Bau. Posisinya berdekatan dengan pasar dan masjid, sebagai pusat pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan kegiatan keagamaan di kota tersebut.

Dengan kepoloporan guru mereka, Abdul Syukur, kemudian diikuti oleh generasi awal orang Gu-Lakudo yang melakukan *migrasi* ke kota Bau-Bau pada dekade 1960-an. Selanjutnya, terus berlangsung secara bergelombang dan simultan. Bagi generasi orang Gu-Lakudo semakin terobsesi untuk meninggalkan daerah asal mereka untuk ikut berkiprah dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan di perkotaan.

Meskipun pada awal memasuki struktur ekonomi kota—khususnya di kota Bau-Bau—orang Gu-Lakudo berhadapan dengan begitu kuatnya “dominasi” perdagangan orang China dan Bugis-Makassar. Karena memang dari kedua *etnik migran* tersebut, sejak masa pra-kemerdekaan sudah memainkan peran-aktif dalam pengembangan ekonomi perdagangan di kota tersebut. Terkait dengan hal ini para pedagang China dan Bugis-Makassar, mendominasi sistem perdagangan hasil bumi, laut, dan hutan, serta berbagai bentuk barang kebutuhan masyarakat, termasuk konveksi.

Oleh karena itu, orang Gu-Lakudo yang terobsesi untuk melakukan *migrasi*, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha perdagangan di perkotaan, secara *sosio-ekonomik* dapat dikonsepsikan dalam beberapa kecenderungan. Dan fenomenanya dapat menjelaskan bagaimana mereka mulai “berjuang” untuk memasuki struktur dan sistem ekonomi masyarakat kota, seperti kota Bau-Bau, yang membutuhkan etos ekonomi kompetitif dan strategis.

*Pertama*, orang Gu-Lakudo yang telah melakukan *migrasi* ke kota Bau-Bau. Mereka yang memiliki sedikit dukungan modal awal untuk memulai mengembangkan usaha dagang. Orang Gu-Lakudo yang termasuk dalam kategori ini, memang secara kuantitatif jumlahnya sangat sedikit. Mereka kemudian mulai mengembangkan usaha perdagangan sesuai dengan minat mereka masing-masing dan juga kemampuan permodalan yang dimiliki. Sebagai pendatang baru di perkotaan, tentu saja untuk mengembangkan usaha dagang, membutuhkan spirit kewirausahaan yang tangguh untuk mendorong kiprah mereka dalam upaya pengembangan ekonomi perdagangan di kota, meskipun masih dalam skala kecil.

*Kedua*, orang Gu-Lakudo yang bermigrasi ke kota Bau-Bau, namun belum memiliki dukungan modal awal untuk mulai berdagang. Bagi mereka yang masuk dalam kategori ini, kemudian berupaya mengumpulkan modal usaha dagang. Untuk itu, maka ada yang “menjalin kepercayaan” dengan para pedagang Tionghoa. Terkait dengan hal ini, dari kalangan *kaum migran* Gu-Lakudo yang mendapatkan kepercayaan mengambil barang dagangan dari pedagang China di kota Bau-Bau untuk didagangkan di kampung/desa. Dengan harapan kalau barang

dagangan sudah laku terjual, bisa mendapat “komisi” sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun mereka sudah menetap tinggal di kota Bau-Bau, tetapi aktivitas dagang yang digeluti masih berkeliling kampung untuk menjajakan barang dagangannya. Setelah merasa mampu untuk mandiri, baru mereka mulai berdagang secara menetap di kota Bau-Bau.<sup>12</sup> Sedangkan mereka yang tidak menjalin kepercayaan dengan pedagang China, menggeluti berbagai obyek pekerjaan yang bersifat serabutan. Namun, sebagai tujuan akhirnya adalah untuk mengumpulkan modal usaha awal, agar mereka bisa berdagang secara mandiri. Fenomena yang demikian ini, adalah seperti yang dialami oleh H. Radeni.<sup>13</sup>

*Ketiga*, orang Gu-Lakudo yang menjadikan kota Bau-Bau sebagai tempat transit untuk melakukan perantauan ke daerah lain, misalnya ke Ambon atau kota-kota lain di Indonesia. Namun, yang menjadi obsesi mereka dalam perantauan adalah bagaimana caranya bisa mengumpulkan modal usaha untuk berdagang. Dalam perkembangannya, mereka ini ada yang menetap di daerah perantauan setelah berhasil mengembangkan usaha dagang.<sup>14</sup> Tetapi, ada juga yang kembali membangun basis usaha perdagangannya di kota Bau-Bau. Kecenderungan seperti ini, adalah seperti yang dilakukan H. Baharuddin. Setelah bertahun-tahun merantau ke Ambon dan berhasil mengumpulkan modal usaha untuk berdagang, kemudian ia pulang kampung dan selanjutnya mengembangkannya usaha dagang pakaian jadi di kota Bau-Bau.<sup>15</sup> Atau, ada juga dari mereka yang setelah berhasil dalam pengembangan perdagangan di perantauan, mengalihkan basis usaha dagangnya ke kota Bau-Bau. Hal ini, seperti yang dilakukan oleh H. Abas Mustafa, yang memindahkan aktivitas perdagangannya dari kota Dili, Timor-Timur ke Bau-Bau.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>H. Harun, Wawancara di Bau-Bau 2 Februari 2007.

<sup>13</sup>H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau, 17 Pebruari 2008.

<sup>14</sup>Orang Gu-Lakudo yang telah berhasil mengembangkan usaha ekonomi perdagangan di daerah rantau, mereka juga tetap memanfaatkan waktu pulang kampung (mudik) pada setiap tahun di akhir bulan suci ramadhan hingga lewat satu minggu, setelah idul fitri. Karena sudah menjadi tradisi keagamaan bagi orang Gu-Lakudo, pada setiap tahun mereka mengadakan perayaan massal yang disertai dengan jamuan makan bersama (kande-kandea), yang dilaksanakan setiap tahun setelah seminggu perayaan idul fitri. Acara ini, juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat Gu-Lakudo, baik yang tetap tinggal di daerah asal mereka maupun yang menetap di daerah perantauan.

<sup>15</sup>H. Baharuddin, Wawancara di kota Bau-Bau, 15 Desember 2007.

<sup>16</sup>H. Abas Mustafa, sejak tamat SD sudah ikut keluarganya untuk merantau ke Ambon (1970-an). Di kota ini sambil bersekolah di SMP, dia mulai berdagang rokok keliling sekitar 2 tahun. Dan setelah tamat SMP, Abas bekerja di Hotel Ablali Ambon selama 2 tahun. Kemudian dia berdagang barang komisi (kain dan pakaian jadi) pada musim cengkeh. Selanjutnya, Abas pindah ke Maluku Tenggara dengan mendapatkan kepercayaan dari China untuk berdagang pakaian jadi. Pada tahun 1982, dia pindah ke Dili, Timor-Timur untuk mengembangkan perdagangan pakaian jadi. Setelah 2 tahun di kota Dili, usaha dagang Abas cukup berkembang, hingga bolak-balik Surabaya dan Jakarta untuk belanja barang dagangan. Namun demikian, setelah memasuki dekade 1990-an ke atas, kondisi

### C. Kota Tujuan Awal Migrasi Orang Gu-Lakudo

Ajaran keagamaan yang diintegrasikan dalam spirit kewirausahaan yang lebih bersifat rasional dari Abdul Syukur, membuat orang Gu-Lakudo terobsesi untuk meninggalkan daerah asalnya. Dalam pengertian, mereka mulai melakukan *migrasi* untuk mengembangkan perdagangan di perkotaan. Meskipun mereka perlu memulainya dari konteks usaha dagang yang kecil-kecil, atau sebagai pedagang kaki lima (PKL). Karena memang sebagai “pendatang baru” di wilayah perkotaan dan kemudian memasuki struktur ekonomi perdagangan kota yang kompetitif, tentu saja merupakan tantangan mendasar yang harus mereka hadapi. Apalagi untuk merealisasikan obsesi mereka sebagai pelaku ekonomi perdagangan yang sukses di perkotaan, mereka belum didukung dengan “kekuatan modal finansial” yang cukup memadai.

Namun, atas kepeloporan Abdul Syukur, dengan cara membeli sebidang tanah di pusat kota Bau-Bau untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, basis pengembangan usaha dagang, dan pusat da'wah Islam.<sup>17</sup> Yang letaknya berdekatan dengan pasar, masjid, dan juga pelabuhan. Karena itu, ketika generasi awal orang Gu-Lakudo mulai bermigrasi, mereka pun mengikuti jejak langka guru mereka Abdul Syukur. Dalam pengertian, bahwa untuk memulai mengembangkan basis ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau, maka mereka juga membangun rumah tempat tinggal dekat pasar, masjid, dan pelabuhan. Sehingga memudahkan mobilitas usaha dagang mereka dan aktivitas keagamaan di masjid, seperti pelaksanaan ibadah shalat lima waktu.

Mengapa Abdul Syukur dan orang Gu-Lakudo menjadikan Bau-Bau, sebagai kota tujuan awal migrasi mereka? Karena kota kecil ini sejak masa silam sudah mulai berkembang sebagai “kota dagang”. Dengan letak geografisnya yang cukup strategis dalam hubungan transportasi laut (selat Buton), memungkinkan bagi kota Bau-Bau untuk berfungsi sebagai “pintu masuk” di Sulawesi Tenggara.

Adapun cikal-bakalnya sebagai kota dagang, dapat dijelaskan bahwa memang sejak maraknya perdagangan hasil bumi, hutan, dan laut pada abad ke 17 M., di kawasan Timur ke pulau Nusatenggara, pelabuhan Bau-Bau sudah masuk dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar-pulau dan bahkan antar-benua (E. L. Poelinggomang, 2002: h. 34-35; Sutherland, 2009: h.

---

Timor-Timur—khususnya kota Dili—sudah mulai tidak aman. Karena itu, Abas Mustafa dan keluarganya setelah menunaikan ibadah haji, maka pada tahun 1996 memindahkan usaha dagangnya dari Dili ke Bau-Bau. Di kota ini, setelah membeli sebidang tanah, Abas membangun beberapa petak ruko. Usaha dagang yang digelutinya: pakaian jadi, perlengkapan dan pakaian olah raga, serta perbengkelan. H. Abas Mustafa, Wawancara di Bau-Bau 23 Pebruari 2008.

<sup>17</sup>H. Kaharuddin Syukur, Wawancara di Bau-Bau 10 Pebruari 2008.

112-113; Rudyansyah, 2009: 69). Oleh karena itu, maka sejak kekuasaan kesultanan Buton dari abad ke 17 M—20 M., kota Bau-Bau sudah berfungsi sebagai “pelabuhan persinggahan”. Dalam hal ini menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dari kawasan Barat, Tengah, dan selanjutnya ke kawasan Timur Indonesia, dan demikian pula sebaliknya.

Dengan letak geografisnya yang seperti itu, dalam perkembangannya, terutama setelah mendapatkan sentuhan modernisasi dan pembangunan (1970-an), kota Bau-Bau tumbuh menjadi “kota dagang” di Sulawesi Tenggara. Intensitas dan mobilitas perdagangan barang dan jasa berlangsung secara dinamis. Aktivitas perdagangan diperankan oleh para pedagang Buton, Tionghoa, Bugis-Makassar, dan Wakatobi.

Konstruksi sosio-ekonomi dan perdagangan yang demikian ini, yang kemudian mendorong Abdul Syukur dan orang Gu-Lakudo pada umumnya untuk ikut berkiprah dalam pengembangan usaha dagang. Dalam pengertian, bahwa kota Bau-Bau memiliki prospek yang baik untuk menjadi tempat memulai aktivitas perdagangan. Apalagi bagi Abdul Syukur sendiri memiliki wawasan yang cukup luas dan pengalaman yang panjang dalam hal pengembangan usaha dagang antar-pulau.

Selain itu, kecenderungan lain yang mendorong orang Gu-Lakudo untuk beruban dan bermigran ke kota Bau-Bau, adalah jarak antara daerah asal mereka dengan kota tersebut cukup dekat, yang hanya dipisahkan oleh selat Buton. Dalam pengertian bahwa posisi daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian Muna selatan adalah berhadapan dengan kota Bau-Bau, meskipun dibatasi laut Buton dan tanjung Wamengkoli. Karena itu, maka akses mereka terhadap prospek pengembangan ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau, cukup terbuka.

Pertimbangan lain adalah hubungan *sosio-historis* dan *kultural*. Terkait dengan hal ini adalah bahwa sejak awal menguatnya kekuasaan kesultanan Buton pada abad ke 17 M., Gu-Lakudo sudah masuk dalam wilayah pemerintahannya (*kadie*). Ini memberikan penjelasan bahwa meskipun daerah Gu-Lakudo berada di bagian selatan pulau Muna, tetapi tidak masuk dalam wilayah pemerintahannya, hingga terbentuknya daerah otonom/kabupaten di Sulawesi Tenggara pada tahun 1963. Kecuali masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten Buton sampai sekarang ini. Artinya, masyarakat Gu-Lakudo secara sosio-historis dan kultural memiliki kedekatan dengan orang Buton.

Namun, pertimbangan mendasar dan cukup rasional bagi Abdul Syukur, mengapa memotivasi orang Gu-Lakudo untuk melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke kota Bau-Bau, adalah

dalam dinamika perkembangannya sebagai salah satu kota dagang di kawasan Timur Nusantara. Karenanya, Sutherland (2009) misalnya, menggambarkan bagaimana orang Buton sejak abad ke 18 M. secara intens sudah ikut berdagang hasil laut, seperti teripang dan sirip ikan hiu. Terkait dengan hal tersebut, menurutnya posisi strategis kota Bau-Bau menjadi salah satu pelabuhan yang baik untuk pemberangkatan barang-barang dagangan dari jenis hasil laut ke berbagai kota dagang yang sudah terkenal dalam peta perdagangan, misalnya ke Makassar, Surabaya, dan Batavia.

#### **D. Komunitas Migran Gu-Lakudo di Bau-Bau**

Berkaitan dengan terobesinya orang Gu-Lakudo melakukan *migrasi* desa-kota, maka setidaknya ada tiga kecenderungan sosiologis yang memerlukan analisis secara mendasar. Karena dengan memahami ketiga hal tersebut, maka dapat dijadikan sebagai rujukan pemikiran yang lebih bersifat konstruktif untuk mengkonsepsikan bagaimana terbentuknya *komunitas urban* orang Gu-Lakudo di perkotaan. Kemudian diikuti dengan aktivitas mereka dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Selanjutnya, mereka dapat mengimbangi kecenderungan dominatif para pedagang lain, terutama orang China dan Bugis-Makassar.

*Pertama*, tentang hubungan sosial antara Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo, yang justru cenderung menjadi *patronase* mereka. Yang fenomenanya muncul sejak di daerah asal mereka, hingga setelah melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke kota Bau-Bau. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah jalinan hubungan sosial Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo, berbentuk *patron-clien* atau bukan? Karena memang dalam perkembangan masyarakat transisi dari konteks yang tradisional pada kemodernan —seperti yang sedang dialami orang Gu-Lakudo ketika itu (1960-an)—merupakan suatu fenomena sosial yang juga berlangsung pada masyarakat lain di Indonesia.

*Kedua*, adalah terkait dengan bagaimana pola strategi adaptasi orang Gu-Lakudo setelah mereka melakukan *migrasi*, terutama di kota Bau-Bau. Karena setelah memasuki dekade 1970-an—1980-an), mereka mulai menunjukkan mobilitas sosial ekonomi dan aktivitas perdagangan yang cenderung kompetitif terhadap para pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar. Kemudian pada dekade 1980-an—1990-an, mereka pun sudah mampu melakukan diversifikasi usaha perdagangan. Artinya, para pedagang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha dagangnya, tidak lagi hanya terfokus pada penjualan pakaian jadi, sandal-sepatu, dan barang-

barang kelontong; tetapi juga barang lainnya, seperti meubel, bahan bangunan, dan bentuk usaha lain. Selain itu, mereka juga melakukan perluasan pasar perdagangan, misalnya ke Muna dan Kendari, bahkan keluar Sulawesi Tenggara.

*Ketiga*, berkaitan dengan bagaimana “terjalannya integrasi sosial” mereka sebagai *komunitas urban* perkotaan. Hal ini merupakan perwujudan dari proses adaptasi mereka, baik pada lingkungan sosial mereka sendiri (*internal*) maupun dalam konteks sosial yang lebih luas (*eksternal*). Hal ini tentu saja, yang kemudian menjadi instrumen dasarnya adalah bagaimana kecenderungan mereka dalam melakukan interaksi sosial, dalam konteks kehidupan masyarakat perkotaan yang heterogen, seperti halnya di kota Bau-Bau atau pun kota lain di Sulawesi Tenggara.

### **1. Hubungan Sosial Abdul Syukur dan Orang Gu-Lakudo**

Sebagaimana uraian di atas, dikemukakan suatu pertanyaan: apakah antara Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo terjalin hubungan sosial yang berbentuk *patron clien*? Kalau memang demikian, maka hubungan *patron clien* seperti apa yang terjalin antara Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo?

Tentang jalinan hubungan sosial antara *patron* dan *clien*, menurut Christian Pelras (2009),<sup>18</sup> berawal dari terbentuknya model hubungan hierarki sosial yang muncul dan berkembang pada bangsa Romawi kuno di Eropa. Karena bagi seseorang yang berada pada stratifikasi sosial yang tinggi (*bangsawan*), adalah menjadi *patronus* dan menguasai sejumlah warga masyarakat dari tingkat yang lebih rendah, yang dikonsepsikan sebagai *clientes*. Meskipun para *clientes* tersebut secara hukum merupakan orang-orang bebas, tetapi menjalin hubungan kedekatan dengan keluarga pelindung mereka sebagai *patron*. Karena itu, ikatan hubungan sosial antara *patron* dan *clien* dalam masyarakat mereka terbangun berdasarkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Yang selanjutnya berlangsung secara turun-temurun. *Patron* berkewajiban untuk menjaga *clien*-nya dari berbagai kesulitan, termasuk kelangsungan

---

<sup>18</sup>Ketika pertama kali Christian Pelras mulai melakukan studi di Sulawesi Selatan pada tahun 1967, terkait dengan konteks sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar, menurutnya ia belum memiliki pengetahuan mendasar tentang konsep hubungan *patron clien* dalam sistem hierarki sosial dan kekerabatan masyarakat Indonesia. Namun, setelah ia berinteraksi langsung dengan para subyek penelitiannya (*informan*) kemudian memunculkan kepekaan intelektualnya pada suatu fenomena sosial yang menunjukkan kuatnya hubungan *patron* dan *clien* mereka. Christian Pelras, *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan*, dalam Roger Tol dkk (editor), *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Inminawa, Makassar, 2009.

hidup ekonomi keluarganya. Sebaliknya, para *clien* pun dengan suka-rela menyiapkan diri dan apa yang dimilikinya untuk membantu kesulitan *patron*-nya.

Konstruksi sosial yang demikian itu, menurut Pelras (2009), dapat ditemukan dalam berbagai periode kesejarahan dalam perkembangan struktur masyarakat, seperti di Italia, Amerika Latin, Asia Tenggara, termasuk di Timur Tengah, misalnya di Irak dan Iran. Dari hasil studi Pelras di Indoensia, masih menguatnya hubungan sosial yang bersifat *patron clien*, adalah pada konteks kehidupan sosial dalam masyarakat tradisional Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Berkembangnya hubungan *patron clien* di daerah tersebut, dapat diamati dalam konteks kepemimpinan politik dan pengembangan usaha ekonomi yang terkonstruksi dalam stratifikasi masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk membagi status sosial mereka ke dalam unit-unit teritorial, yang masing-masing memiliki pemimpin atau penguasa.

Dengan demikian, maka bagi seorang *patron* yang berasal dari kaum bangsawan Bugis dan Makassar,<sup>19</sup> menurut pranata sosial budaya mereka adalah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap para *clien* dan keluarganya dari gangguan pihak lain. Atau juga secara ekonomi *subsisten* memberikan jaminan kesejahteraan hidup para *clien* mereka. Karenanya, bagi para *clien* pun dengan tulus memberikan pelayanan yang diinginkan oleh *patron* mereka, kapan saja diperlukan. Artinya, *clien* mengabdikan dirinya untuk memenuhi kepentingan *patron*-nya.

Namun dengan berlangsungnya proses modernisasi dan pembangunan, menurut hasil studi Darmawan Salman (2006), fenomena adanya hubungan sosial yang bersifat *patron clien* tersebut telah bergeser pada hubungan industrial.<sup>20</sup> Melemahnya hubungan sosial yang demikian itu, lanjut Salman, dapat ditemukan pada komunitas-komunitas masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan.

Apa yang dikonsepsikan oleh Christian Pelras (1971 dan 2009), berkaitan dengan menguatnya hubungan sosial *patron clien* pada setiap periode sejarah dalam kehidupan

---

<sup>19</sup>Hubungan *patron-clien* dalam masyarakat Bugis dikonsepsikan sebagai hubungan sosial antara seorang *pappuangeng* yang berasal dari kalangan bangsawan dengan *anaq guru* (murid atau pengikut). Sedangkan dalam masyarakat Makassar, diistilahkan sebagai hubungan antara seorang *karaeng* (bangsawan) dengan para *joaq* (pengikut) atau *tau* (orang biasa). Christian Pelras, *ibid*, 2009, h. 29.

<sup>20</sup>Dalam studi Darmawan Salman terhadap komunitas masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan yang terlibat pada pembuatan perahu pinisi, penangkapan ikan, dan pengembangan wisata pantai, menurutnya fenomena menguatnya model hubungan sosial *patron-clien* dalam masyarakat tradisional Bugis-Makassar justru telah bergeser pada bentuk "hubungan industrial" sebagaimana tuntutan dalam perkembangan ekonomi modern. Darmawan Salman, *Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*, Inninawa, Makassar, 2006.



masyarakat, juga berlangsung di Buton. Sebagai salah satu daerah peninggalan kekuasaan politik dan pemerintahan kerajaan Islam, pada masa lalu memiliki pranata sosial budaya yang merujuk pada pelapisan-pelapisan sosial. Karena itu, di Buton pun dikenal adanya penggolongan atau stratifikasi sosial masyarakat: (1) kaum bangsawan (*kaomu*); (2) pemangku hukum adat (*walaka*); (3) orang kebanyakan (*papara*); dan (4) golongan budak (*batua*).<sup>21</sup>

Tetapi, sebagaimana hasil studi Salman yang menemukan fenomena bergesernya hubungan sosial tradisional (*patron clien*) pada hubungan sosial kemodernan (*industrial*) terhadap komunitas masyarakat Bugis-Makassar di pesisir Sulawesi Selatan, demikian juga halnya di Buton. Sejak berlangsungnya pembangunan pada dekade 1970-an, telah memunculkan “elite-elite sosial baru” dalam struktur masyarakat Buton. Mereka adalah kalangan yang berpendidikan modern dan yang memiliki kemampuan ekonomi. Yang dalam perkembangannya, mereka berkiprah pada berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tuntutan dunia modern, seperti di birokrasi pemerintahan, pendidik, politisi, atau pengusaha dan pedagang.

Oleh karena itu, di kota Bau-Bau misalnya, yang dapat dikategorikan sebagai kota dagang, agaknya sudah sulit untuk menemukan suatu fenomena masih kuatnya hubungan sosial masyarakat yang berbentuk *patron clien*, sebagaimana pada masa silam. Artinya, dalam konteks kehidupan sosial orang Buton—khususnya yang terkonsentrasi di kota Bau-Bau—sudah melebur dalam struktur kehidupan masyarakat modern, yang lebih bersifat *heterogen* dengan pranata sosial budaya yang *pluralistik*.

Namun, untuk memahami bagaimana hubungan sosial antara Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo, agaknya perlu merujuk kembali pada konsepsi pemikiran Christian Perlas tentang *patron clien*. Yang fenomenanya secara empirik dapat ditemukan dalam setiap periode sejarah, termasuk pada konteks masyarakat tradisional Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Demikian juga halnya di Buton, yang struktur masyarakat tradisionalnya pada masa silam dibentuk oleh nilai-nilai kehidupan sosial budaya yang dikonstruksikan dalam sistem kerajaan Islam.

---

<sup>21</sup>Lihat juga hasil studi Tony Rudiansyah, yang melakukan kajian terhadap proses terbentuknya kesultanan Buton dengan berbagai pranata sosial budayanya dari abad ke 14 M—20 M, yang kemudian melebur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kemerdekaan. Meskipun dalam kajian ini, Rudiansyah tidak secara gamblang mengangkat bagaimana bentuk hubungan *patron clien* masyarakat tradisional Buton, sebagai salah satu tema kajiannya. Tony Rudiansyah, *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Model hubungan sosial yang terkonstruksi pada masyarakat tradisional seperti yang dikonsepsikan oleh Christian Perlas, adalah hubungan sosial *patron clien* yang lebih bersifat *feodalistik*. Yang secara *genealogi* merepresentasikan adanya lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi dalam masyarakat yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga memunculkan kaum bangsawan sebagai *patron* dan orang biasa atau rakyat kebanyakan sebagai *clien*. Kalau merujuk pada konsep pemikiran Marxis tentang kelas sosial, maka hubungan *patron clien feodalistik* adalah cenderung bersifat *hegemonik*. Dalam pengertian, bahwa bagi seorang *patron* yang berasal dari kalangan bangsawan dengan penuh keleluasaan untuk melakukan *hegemoni* terhadap *clien*-nya sebagai pengikut setianya.

Fenomena tersebut, berbeda dengan model hubungan sosial yang terjalin antara Abdul Syukur dengan orang Gu-Lakudo, baik sejak di daerah asal mereka maupun setelah melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* desa-kota. Adapun jalinan hubungan sosial mereka, adalah cenderung bersifat *patron clien* yang lebih *egalitarian*. Karena memang secara *genealogis*, Abdul Syukur bukan berasal dari kaum bangsawan, sebagaimana yang dikonstruksikan dalam struktur masyarakat tradisional orang Buton di masa kerajaan. Dengan demikian, maka posisinya sebagai seorang *patronase* terhadap orang Gu-Lakudo, adalah tidak terbentuk berdasarkan sistem stratifikasi sosial yang menempatkan kaum bangsawan pada posisi yang tinggi dan terhormat, seperti kalangan *kaomu* dan *walaka* dalam konstruksi sosial masyarakat tradisional Buton di masa silam. Atau pun sebagai *pappuangeng* dan *karaeng* bagi orang Bugis-Makassar dalam konteks sosial masyarakat tradisional di Sulawesi Selatan. Karenanya, sebagaimana konsep pemikiran sosiologi budaya Max Weber tentang stratifikasi dan otoritas yang dimiliki oleh seseorang, maka Abdul Syukur dapat dikategorikan tidak memiliki legitimasi status sosial yang berpijak pada otoritas tradisional.

Kembali pada konsep Weber tentang otoritas pribadi seseorang, hingga dijadikan panutan (*patron*) oleh para pengikutnya (*clien*), justru yang menonjol dari karakteristik Abdul Syukur adalah memiliki “otoritas karismatik”. Karena memang setelah mendalami agama Islam di Mekkah, kemudian kembali ke Indonesia, Syukur memposisikan dirinya sebagai salah seorang ulama *modernis* dan *transformatif*. Kedatangannya di Gu-Lakudo adalah untuk mewujudkan obsesinya sebagai salah seorang pembaharu keagamaan dalam Islam. Seperti halnya H.O.S.

Tjokroaminoto pada masa kolonial yang mengkonsepsikan umat Islam sebagai *wong cilik*.<sup>22</sup> Menurut pandangan Ahmad Dahlan, mereka berada pada lapisan terbawah dari struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Karenanya, untuk mengangkat mereka dari ketimpangan struktur sosio-ekonomik ini, diperlukan pembentukan “etos kewirausahaan” sebagai pedagang.<sup>23</sup>

Demikian juga kondisi masyarakat Gu-Lakudo, sebelum kedatangan Abdul Syukur di daerah asal mereka. Secara sosio-struktural: ekonomi, politik, budaya, dan agama, masih terintegrasi dengan kuat ke dalam struktur masyarakat tradisional Buton yang merujuk pada sistem stratifikasi sosial. Karena itu, maka untuk mendorong proses perubahan sosial budaya keagamaan dan menumbuhkan etos kewirausahaan mereka dalam perdagangan, Abdul Syukur perlu menciptakan hubungan sosial yang cenderung bersifat *egaliter* terhadap orang Gu-Lakudo. Yang spiritnya adalah merujuk pada hadits Nabi Muhammad, yang menyatakan bahwa: “*Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Orang Arab tidak lebih mulia dari yang bukan Arab, kecuali iman dan taqwanya*”.<sup>24</sup>

Dengan hadits tersebut merefleksikan bahwa semangat *egalitarian* dalam Islam, menjadi refrensi dasar untuk membangun solidaritas dan relasi sosial (*ashabiyah*) bagi komunitas-komunitas Muslim. Oleh karena itu, maka bagi para ulama Islam yang berorientasi *modernis* dan *transformatif*, seperti: H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, H. Ahmad Dahlan, termasuk H. Abdul Syukur, memosisikan diri mereka sebagai “patronase yang egalitarian”

---

<sup>22</sup>Karenanya, semangat pembaruan keagamaan H.O.S. Tjokroaminoto pada masa kolonial Belanda, adalah cenderung memperjuangkan munculnya “sosialisme Islam”. Hal ini merupakan suatu upaya alternatif untuk memahami berbagai konsep ajaran sosial kemasyarakatan dalam al-Qur’an, yang selalu menghendaki perlu adanya proses transformasi struktural dari berbagai ketimpangan yang ada, seperti: penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Ada dua alasan bagi Tjokro, ketika menggulirkan perlunya ide sosialisme Islam. *Pertama*, untuk menyadarkan umat Islam tentang keselamatan bersama bagi semua para pemeluk agama, dalam konteks pergaulan hidup kemanusiaan. *Kedua*, untuk membantah pandangan umum bahwa Islam tidak mampu memajukan umatnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial-politik dan ekonomi. Lihat misalnya studi Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Jokjakarta, 2007, h. 417-426.

<sup>23</sup>Azrul Tanjung dan Sutia Budi, *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah*, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, NO. 3, Jakarta, Mei—Agustus 2005, h. 287-296.

<sup>24</sup>Dalam ilmu *hadits* dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab munculnya *hadits* tersebut, adalah sebagai bentuk “teguran” terhadap Abu Dzar Al-Ghifari—salah seorang sahabat Nabi dari pemuka kabilah yang cukup terpandang dalam suku Quraisy—yang melakukan penghinaan terhadap Bilal sebagai seorang Negro yang berkuli hitam. Karena itu, Nabi mengeluarkan pernyataan (*hadits*), yang menegaskan bahwa: “Orang Arab tidak lebih mulia dari yang bukan Arab, kecuali iman dan taqwanya”. Konsep iman dan taqwa dalam Islam mengandung banyak arti, tetapi yang paling substansial adalah menjaga hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dengan demikian, maka iman dan taqwa menjadi roh bagi terbentuknya kesatuan sosial (*ummah*) yang lebih bersifat *egalitarian*, yang bukan hanya ditujukan pada umat Islam, tetapi juga “kesatuan umat manusia”. Menurut Dawam Rahardjo, bahwa konsep *ummah* adalah mengandung beberapa pengertian, seperti: kelompok masyarakat (*community*), kelompok penganut agama (*religious community*), dan juga bangsa (*nation*). Lihat juga Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina—Ulumul Qur’an, Jakarta, 2002, h. 482—505.

dalam menjalin hubungan sosial dengan *clien* mereka. Sebagai konsekwensi logis dari “gerakan pembebasan” terhadap bentuk “hegemoni” dalam hubungan sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Christian Perlas (1971 dan 2009).

## **2. Adaptasi Sosial Orang Gu-Lakudo di Kota**

Sejak Abdul Syukur mulai memotivasi orang Gu-Lakudo untuk melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke kota Bau-Bau (dekade 1960-an), hal ini dapat dikonsepsikan sebagai cikal-bakal terhadap proses perpindahan mereka dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka dari yang *subsisten* pada *ekonomi pasar*, melalui pengembangan aktivitas perdagangan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Abdul Syukur, bahwa “dalam sistem ekonomi pedesaan perputarannya lambat, berapa pun hasil yang didapat hanya untuk dimakan (konsumsi); berbeda dengan ekonomi kota meskipun hasilnya sedikit, tetapi bisa disimpan untuk dijadikan modal usaha dagang” (H. Sabirin, Wawancara di Bau-Bau 5 Pebruari 2008).

Dengan berlangsungnya *urbanisasi* dan *migrasi* generasi awal orang Gu-Lakudo tersebut, dalam perkembangan lebih lanjut makin menarik minat generasi mereka yang berikutnya untuk ikut meninggalkan daerah asalnya. Karena itu, maka pada akhir dekade 1960-an dan awal tahun 1970-an, arus *urbanisasi* dan *migrasi* generasi orang Gu-Lakudo terus berlangsung dari daerah asal mereka ke wilayah perkotaan. Hal ini dilakukan, baik untuk langsung menetap tinggal di kota Bau-Bau, dan kemudian mulai mengembangkan usaha perdagangan. Atau, melanjutkan perantauan ke daerah lain, tetapi yang menjadi tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan ekonomi perdagangan. Demikian juga anak-anak mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD, mereka pun terobsesi untuk melanjutkan pendidikan (SLTP dan SLTA) ke kota Bau-Bau.

Oleh karena itu, dengan kepeloporan Abdul Syukur dan diikuti generasi awal orang Gu-Lakudo, maka secara sosiologis telah menjadi semacam “simpul jaringan” bagi generasi *urban* dan *migran* mereka selanjutnya. Karena memang jarak antara daerah asal mereka dengan kota Bau-Bau cukup dekat. Apalagi setelah didukung oleh kemajuan sarana transportasi laut yang menghubungkan daerah mereka dengan kota tersebut. Mendorong pergerakan mereka untuk melakukan mobilitas sosial (*horizontal*) dari daerah asalnya ke kota tujuan yang diinginkan, misalnya kota Bau-Bau atau kota-kota lain di Indonesia.

Namun tentu saja, yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah berkaitan dengan bagaimana adaptasi dan integrasi sosial mereka, sehingga membentuk *komunitas urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo yang cukup kompetitif dalam perkembangan usaha ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau. Lalu bagaimana mereka melakukan adaptasi sosial di kota tersebut?

Bagi yang ingin memulai untuk mengenali bagaimana keberadaan *kaum urban* orang Gu-Lakudo, misalnya di kota Bau-Bau, maka setidaknya dapat dilakukan pada dua tempat yang menjadi pusat kegiatan keseharian mereka, yaitu: *pasar* dan *masjid*. Hal ini terkonstruksi, sejak Abdul Syukur bersama generasi awal *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo datang ke Bau-Bau (1960-an). Mereka mulai mengembangkan pemukiman di sekitar *pasar* dan *masjid*, sebagaimana yang dicontohkan oleh panutan (*patron*) mereka Abdul Syukur. Yang keduanya—*pasar* sentral dan *masjid* raya—memang berada di pusat kota Bau-Bau. Dan dari institusi sosial ekonomi dan juga institusi social keagamaan umat Islam tersebut, mereka memulai melakukan adaptasi dengan masyarakat perkotaan pada umumnya. Dengan demikian, maka melalui konsentrasi aktivitas mereka di *pasar* dan *masjid*, memungkinkan bagi mereka untuk melakukan inter-aksi sosial secara rutin dengan warga masyarakat kota Bau-Bau, seperti: orang Buton, Bugis-Makassar, China, Wakatobi, dan lain-lain. Artinya, tidak lagi harus saling mengunjungi di tempat tinggal mereka masing-masing, karena boleh jadi setiap waktu mereka bertemu di *pasar* atau *masjid*. Karena memang dalam perkembangan kota Bau-Bau, adalah didukung dengan mobilitas masyarakatnya pada aspek perdagangan dan aktivitas kehidupan beragama yang dinamis. perdagangan dengan Terkecuali memang berkaitan dengan hal-hal tertentu—misalnya ada kedukaan atau pun kegiatan sosial lain—yang mengharuskan mereka untuk datang.

Keberadaan dari kedua institusi tersebut, tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas kehidupan keseharian mereka, baik sebagai pelaku ekonomi perdagangan atau sebagai muslim. Tetapi sekaligus merepresentasikan bagaimana strategi adaptasi mereka sebagai *kaum urban* dan *migran* perkotaan, melalui aktivitas kehidupan di *pasar* dan *masjid*. Artinya, intensitas inter-aksi mereka di *pasar* dan *masjid*—baik di komunitas mereka sendiri maupun dengan warga masyarakat luas pada umumnya—sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Arbain dalam studinya tentang bagaimana “strategi *adaptasi*” kaum migran Banjar di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada pasca-konflik etnik Dayak-Madura di Sampit. Ada tiga faktor yang meringkai keberhasilan *adaptif* mereka. *Pertama*, sistem nilai *sosio-kultural* etnik Banjar dalam berinter-aksi dengan etnik lain, senantiasa bersikap hati-hati dan adaptif. Sehingga, mereka pun mampu beradaptasi dan bertahan hidup di daerah

Dari hasil penelitian Hans-Dieter Evers (1971), menjelaskan bahwa *pasar* dan *masjid* di kota Padang berfungsi sebagai “semesta simbolik” bagi *kaum urban* perkotaan. Pasar sentral di kota itu, misalnya, menjadi “inti struktur kota”. Meskipun petak-petak pertokoannya yang kecil-kecil yang dilewati oleh para pengunjung dengan penuh sesak di lorong-lorong sempit, justru menciptakan kondisi keakraban dalam suatu inter-aksi antara pembeli dan penjual. Fenomena seperti ini menurut Evers, sudah menjadi simbol dari kehidupan kota di Indonesia. Selain itu, pembangunan *masjid* yang berdekatan dengan *pasar* pun di pusat kota, merupakan hal yang penting. Karena itu, nuansa simbolisasi kebangkitan paham kemodernan dalam Islam bersinergis dengan perkembangan ekonomi modern di wilayah perkotaan pada berbagai daerah di Indonesia.

Bagi *kaum urban* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, ada tiga *pasar* utama yang dijadikan sebagai pusat pengembangan kegiatan usaha ekonomi perdagangan, yakni pasar La Elangi, Nugraha, dan Mall Umna Rijoli. Sedangkan *masjid*, menjadi pusat kegiatan keagamaan mereka, seperti untuk melaksanakan ibadah shalat—mulai waktu *shubuh*, *dzuhur*, *ashar*, *maghrib*, dan *isya*—di masjid Agung kota Bau-Bau, masjid Tomba, dan masjid Bataraguru.

Apa yang dapat dikonsepsikan berkaitan dengan strategi adaptasi sosial *kaum urban* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, bahwa faktor ketaatan dalam hal menjalankan ajaran agama mereka di masjid, yang didukung oleh aktivitas pengembangan usaha ekonomi perdagangan, agaknya cukup efektif. Artinya, modal spiritual keagamaan yang mereka dapatkan dari Abdul Syukur, tidak hanya membentuk etos ekonomi perdagangan mereka; tetapi juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan adaptasi sosial mereka dalam struktur masyarakat perkotaan yang multi-etnik. Namun hal ini, juga didukung dengan kondisi sosial keagamaan kota Bau-Bau, yang mayoritas warga masyarakatnya memang beragama Islam. Kecuali beberapa etnik migran yang juga telah lama menetap tinggal di kota itu, seperti China, Ambon, dan Toraja, yang memang bukan sebagai kaum Muslim.

Dengan proses adaptasi sosial mereka yang berlangsung secara intens melalui institusi *pasar* dan *masjid*, maka sebagai akibat positifnya mendorong mobilitas ekonomi

---

tujuan migrasi, seperti halnya di Kalteng. *Kedua*, ketaatan mereka dalam hal mengamalkan ajaran agama. Sebagai konsekuensi logisnya, maka orang Banjar selalu berupaya untuk mengontrol sikap, perilaku, dan peran mereka terhadap etnik lain; karena terkait dengan citra mereka sebagai kaum Muslim. *Ketiga*, orientasi mereka pada perbaikan kehidupan ekonomi, mendorong orang Banjar untuk masuk dalam berbagai bentuk pekerjaan di perkotaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan intensitas inter-aksi sosial mereka dengan etnik lain di kota Palangkaraya, Kalteng. Taufik Arbain, *Strategi Migran Banjar*, LKiS, Yogyakarta, 2009, h. 172-173.

perdagangan mereka. Karena di satu pihak kota Bau-Bau berkembang sebagai kota dagang, di pihak lain momentum tersebut dimanfaatkan orang Gu-Lakudo, untuk mengembangkan usaha perdagangan.

Seiring dengan proses perjalanan waktu (1970-an—1990-an) eksistensi mereka sebagai *komunitas urban* perkotaan makin menunjukkan keunggulan yang kompetitif. Kalau sebelumnya mereka hanya menempati lokasi pemukiman di sekitar *pasar sentral* dan *masjid raya* (Kelurahan Wale). Namun, dengan keberhasilan mereka dalam pengembangan ekonomi perdagangan, maka mendorong mereka untuk menguasai lokasi-lokasi pemukiman yang cukup strategis di kota Bau-Bau, seperti di Kelurahan Tomba dan Bataraguru. Hal ini dilakukan, dengan cara membeli tanah-tanah penduduk yang secara sosio-ekonomik tidak memiliki akses untuk ikut berkompetisi dalam struktur perekonomian kota Bau-Bau, yang telah berkembang sebagai salah satu “kota dagang” di Sulawesi Tenggara.<sup>26</sup>

### **3. Integrasi Sosial Orang Gu-Lakudo**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak generasi awal orang Gu-Lakudo melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* di akhir tahun 1960-an, mereka mulai menempati area pemukiman warga di sekitar *pasar sentral* dan *masjid raya* kota Bau-Bau. Artinya, sebagai pendatang baru di wilayah perkotaan, mereka mulai menempati posisi strategis terkait dengan prospek pengembangan ekonomi perdagangan. *Pasar* dan *masjid*, justru dijadikan sebagai pusat aktivitas kehidupan keseharian mereka (*pedagang muslim*).

Area pemukiman awal *kaum urban* orang Gu-Lakudo tersebut, bersebelahan dengan kompleks pertokoan pedagang Tionghoa dan pemukiman migran Bugis-Makassar. Karena itu, maka dalam perkembangan struktur wilayah kota Bau-Bau—sebagai kota dagang—*pasar* dan *masjid* dikelilingi pemukiman ketiga etnik pelaku ekonomi perdagangan tersebut (China, Bugis-Makassar, dan Gu-Lakudo). Meskipun ada juga dari etnik lokal lain yang membaaur di dalamnya, seperti orang Wakatobi, Baruta, dll.

Namun, seiring dengan perkembangan kota Bau-Bau yang cukup dinamis pada aspek perdagangan, momentum ini justru menjadi pendorong bagi mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo. Yang selanjutnya makin memapankan pengembangan usaha dagang mereka. Sehingga,

---

<sup>26</sup>Ketika saya melakukan penelitian lapangan di Bau-Bau (2007/2008), dalam suatu “perbincangan bebas” dengan salah seorang Pejabat Pemerintah di kota itu. Dia menyatakan: “Tingkat kemahalan harga tanah di Bau-Bau ini cukup tinggi, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Sulawesi Tenggara. Perbandingannya kecuali dengan kota Makassar. Untuk membeli sebidang tanah yang lokasinya strategis bagi pengembangan usaha, kita harus mampu mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah”.

mereka memiliki kemampuan modal finansial untuk membeli tanah penduduk yang letaknya cukup strategis, meskipun dengan harga yang mahal. Karena itu, jika sebelumnya pemukiman mereka hanya terkonsentrasi di lingkungan *pasar sentral* dan *mesjid raya*, kemudian mereka mengembangkan area pemukiman yang membaur dengan warga kota lainnya. Yang lokasinya masih berada di sekitar *pasar Nugraha* dan *masjid Tomba* serta *Bataraguru*. Dengan demikian, maka tetap mendukung mobilitas ekonomi perdagangan mereka sebagai pedagang Muslim.

Terbentuknya area pemukiman kaum *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo yang cenderung berdekatan dengan *pasar* dan *masjid*, bukan hanya perlu dicermati dari aspek “ruang fisik” sebagai tempat tinggal. Namun secara sosiologis, dapat dimaknai sebagai bentuk pengembangan identitas dan integrasi sosial mereka, yang disertai dengan proses “penguasaan terhadap ruang-ruang sosial” di wilayah perkotaan. Yang tentu saja, dengan terbentuknya identitas tersebut justru menjadi kesatuan sosial yang khas bagi mereka dari berbagai etnik lokal yang lain di kota Bau-Bau. Karenanya, bentuk identitas dan kesatuan sosial mereka dijaga dan dipertahankan melalui penguatan institusi kekerabatan, yang dibingkai oleh nilai-nilai ajaran agama yang mereka anut. Menurut konsepsi pemikiran teori sosiologi struktural-fungsional, bahwa struktur kekerabatan pada hakikatnya berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan, pemeliharaan dan pewarisan sistem nilai kehidupan bersama melalui pendidikan (*informal*) generasi mudanya.

Sebagai suatu bentuk komitmen bersama tentang pentingnya sistem nilai untuk dianut dan dipertahankan, adalah bersumber dari ajaran agama. Yang secara tradisional memberikan suatu kerangka pemaknaan yang bersifat simbolik. Oleh karenanya, dapat membentuk “pandangan dunia” (*world view*) bagi para penganutnya. Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembangkan orientasi pemikiran yang perlu dianut bersama dalam suatu komunitas masyarakat.

Kecenderungan itu, seperti yang dikonstruksikan orang Gu-Lakudo sebagai kaum *urban* dan *migran* perkotaan. Dimulai dari ruang fisik pemukiman yang mencitrakan perlunya mempertahankan hubungan kekerabatan. Sedangkan aktivitas mereka di pasar-pasar, mengekspresikan proses inter-aksi sosial yang berlangsung secara intens di internal mereka sendiri dan di eksternal komunitas mereka. Sedangkan rutinitas dalam mengamalkan ajaran agama yang berlangsung di masjid—seperti melaksanakan *shalat berjama'ah*—adalah mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam Islam yang berfungsi sebagai perekat (*kohesi*



*sosial*), agar tetap mempertahankan identitas dan integrasi sosial mereka sebagai *kaum urban* perkotaan.

Namun, dalam perkembangannya integrasi dan kesatuan sosial mereka, tentu saja bukannya tanpa mengalami problem. Sebagaimana tesis Lewis Coser (1956) berkaitan dengan munculnya fenomena konflik dalam suatu komunitas masyarakat. Menurutnya, bahwa semua bentuk hubungan sosial pada hakikatnya memiliki tingkat antagonisme tertentu dan perasaan-perasaan negatif, yang dapat memunculkan ketegangan-ketegangan internal. Terjadinya hal ini disebabkan oleh keinginan individu terhadap *prestise*, dukungan sosial pada orientasi kekuasaan (*formal* dan *informal*), dan juga peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, maka secara internal dapat menimbulkan kompetisi sosial yang tidak terelakan dalam komunitas masyarakat.

Bagi *kaum urban* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, sejak meninggalnya Abdul Syukur (1976) sebagai tokoh panutan karismatik (*patron*) mereka, mengakibatkan mereka mulai kehilangan “simbol pemersatu”. Sementara itu, *migrasi* orang Gu-Lakudo ke kota Bau-Bau, terus berlangsung. Karena itu, seiring dengan perjalanan waktu komunitas mereka makin bertambah besar, yang disertai dengan proses regenerasi. Akibatnya, meskipun identitas mereka tetap eksis sebagai *kaum urban*, tetapi juga memunculkan ketegangan-ketegangan dalam inter-aksi sosial mereka, sebagai implikasi dari perbedaan pandangan dan kepentingan. Hal ini menciptakan hubungan yang cenderung disharmonis antara kalangan generasi tuanya (*elit informal*) dengan generasi muda mereka (*kelompok progresif*).<sup>27</sup> Klimaksnya, adalah terjadinya perbedaan pilihan politik, pada waktu berlangsungnya pemilihan Walikota Bau-Bau dan Gubernur Sulawesi Tenggara (2007).

Karena itu, maka dikalangan tokoh masyarakat mereka yang tidak terpolarisasi ke dalam ketegangan tersebut melakukan mediasi dan pertemuan secara kekeluargaan di *masjid* Tomba yang kemudian dilanjutkan di *masjid* Lakudo.<sup>28</sup> Dengan tujuan untuk menyelesaikan

---

<sup>27</sup>Ketika saya melakukan penelitian lapangan di kota Bau-Bau pada pertengahan tahun 2007 hingga awal 2008, telah terjadi disharmonis antara kalangan tokoh masyarakat mereka dengan kelompok progresif dari generasi mudanya. Salah satu penyebabnya, adalah terkait dengan masalah perbedaan pilihan politik ketika berlangsungnya pemilihan Walikota Bau-Bau dan Gubernur Sulawesi Tenggara (2007).

<sup>28</sup>Sudah menjadi semacam tradisi bagi orang Gu-Lakudo, bahwa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul adalah diselesaikan di *masjid*. Demikian pula untuk meredakan ketegangan sosial yang muncul dalam komunitas mereka—akibat perbedaan pilihan politik dalam pilkada—pada malam Jum’at 7 Pebruari 2008 dibicarakan di *masjid* Tomba, Bau-Bau. Kemudian besoknya, setelah selesai pelaksanaan shalat Jum’at, 8 Pebruari 2008, dilanjutkan di *masjid* Agung KH. Abdul Syukur, di Lakudo. Karenanya, dari kedua moment pertemuan “keluarga besar” orang Gu-Lakudo tersebut, saya mengikutinya dengan antusias dan juga tetap memposisikan diri sebagai seorang peneliti sosial kemasyarakatan.

kesalah-pahaman di antara sesama mereka. Sehingga, ketegangan yang bisa memicu munculnya “konflik internal” tidak sampai merusak integrasi sosial mereka sebagai *komunitas urban* di kota Bau-Bau. Kemudian, dapat mengganggu jalinan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan mereka secara meluas, hingga di daerah asalnya di Gu-Lakudo.

Munculnya fenomena desintegrasi sosial—baik pada konteks internal maupun eksternal komunitas—pada hakekatnya merupakan suatu bentuk dinamika sosial yang cenderung mewarnai proses inter-aksi sosial masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Setelah berlangsungnya reformasi (1998), misalnya, *euforia* kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, semakin terbuka. Selanjutnya, mendorong inter-aksi antar-individu dan kelompok dalam masyarakat yang menghendaki keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan juga melakukan pilihan politik. Kecenderungan seperti ini, yang kemudian ditangkap oleh “kelompok progresif” dari kalangan generasi muda *kaum urban* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau. Namun, membawa implikasi sosial terhadap tumbuhnya “bibit konflik” di internal komunitas mereka. Dan selanjutnya, dapat berakibat pada: (1) rusaknya jalinan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan mereka; (2) melemahkan basis pengembangan jaringan perdagangan mereka yang sudah terbangun; dan (3) ketidak-siapan mereka menghadapi momen politik dalam pilkada.

Oleh karena itu, maka ketika mereka mengadakan pertemuan di masjid Tomba, Bau-Bau, saya menawarkan suatu konsep pemikiran bahwa perlunya mereka membentuk “institusi sosial modern” untuk mengelola potensi atau modal yang dimiliki bersama<sup>29</sup>. Kecuali itu, untuk menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan, maupun dalam momen politik.<sup>30</sup> Misalnya, membentuk suatu Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Gu-Lakudo. Dengan tujuan untuk: (1) melakukan kajian

---

<sup>29</sup>Dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi *komunitas urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau—setelah melewati rentang waktu sekitar tiga puluh tahun (1970-an—2000)—mereka memiliki potensi atau modal yang perlu dikelola bersama. Misalnya modal: (1) spiritualitas agama; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya ekonomi; (4) sumber daya sosial; dan (5) sumber daya politik. Pengkategorian seperti ini, adalah bersumber dari hasil analisis studi lapangan selama peneliti berada di Bau-Bau, dengan mengacu pada metode observasi dan wawancara.

<sup>30</sup>Perlunya mereka membentuk dan memperkuat fungsi kelembagaan dalam bentuk institusi sosial modern, adalah berpijak dari fenomena empirik yang menonjol dalam komunitas mereka, bahwa dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang berbasis pada perdagangan, masih tetap mengandalkan keunggulan kompetitif individu dan keluarga. Mereka belum mengarah pada penguatan *institusi formal*, misalnya: *koperasi* atau *asosiasi* pedagang untuk mendorong mobilitas usaha perdagangan mereka. Karena itu, saya menawarkan pada mereka, agar membentuk “asosiasi pedagang”. Dengan tujuan untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan menguatkan bargaining position mereka dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Karena dalam realitasnya, meskipun mereka cenderung mendominasi perdagangan pada tiga pasar (La Elangi, Nugraha, Mall Umna) di kota Bau-Bau, tetapi mereka berada dalam “posisi tawar” yang lemah, baik dengan *developer* maupun pemerintah. Padahal dari segi kemampuan financial, mereka juga sudah bisa membangun pasar dan lembaga keuangan sendiri, seperti BPR.

secara berkala terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; (2) menjadi institusi mediasi dan dialogis bagi semua elemen masyarakat Gu-Lakudo; dan (3) menyiapkan tokoh politik mereka untuk ikut dalam momen perpolitikan di level lokal. Dengan demikian, lembaga tersebut perlu dikelola kalangan generasi muda orang Gu-Lakudo sendiri yang memiliki “kemampuan visioner” dalam hal memberikan solusi alternatif terhadap berbagai problem sosial yang muncul dan mengganggu integrasi sosial mereka sebagai *komunitas urban* perkotaan.

Sedangkan pembentukan Asosiasi Pedagang Gu-Lakudo, bertujuan: (1) untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi mereka secara profesional; (2) memberikan alternatif terhadap problem ekonomi perdagangan; (3) merencanakan pembentukan lembaga keuangan sendiri; dan (4) menangkap berbagai peluang pengembangan bisnis. Oleh karena itu, maka asosiasi tersebut perlu dikelola oleh kelompok orang Gu-Lakudo yang mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Selain itu, mereka juga dituntut untuk memiliki visi yang jauh ke depan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan terbentuknya kedua lembaga (LPM dan Asosiasi Pedagang) tersebut, maka dapat menjadi kekuatan pendorong bagi orang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau. *Pertama*, memungkinkan bagi mereka untuk memiliki posisi tawar yang kuat, baik dengan sesama pelaku ekonomi maupun dengan pemerintah kota tersebut. *Kedua*, mereka juga dapat menciptakan suatu bentuk instrumen politik lokal yang lebih bersifat penetratif dan tidak mudah untuk terpengaruh dengan irama perpolitikan yang muncul dari luar komunitas mereka. *Ketiga*, memunculkan para politisi orang Gu-Lakudo yang potensial, dengan kekuatan modal sosial politik yang representatif dan memiliki keunggulan kompetitif, seperti: spiritualitas Islam, kemampuan (finansial), dan jaringan sosial kemasyarakatan. *Keempat*, menguatkan basis pengembangan usaha ekonomi perdagangan mereka di level lokal, khususnya di kota Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara pada umumnya.

#### **E. Akibat Kerusuhan Ambon (1998)**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang Gu-Lakudo ketika melakukan perantauan ke daerah lain, pada dasarnya merupakan suatu bentuk “gerakan spontan”. Karena memang sebelum datangnya Abdul Syukur di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna, orang Gu-Lakudo tidak memiliki “tradisi budaya merantau”. Kecenderungan ini disebabkan, pada waktu maraknya perkembangan jalur pelayaran dan perdagangan antar-pulau sebelum

memasuki abad ke 20 M, mereka belum terlibat di dalamnya, seperti halnya orang Bugis-Makassar, Buton pesisir, dan Wakatobi. Intensitas keterlibatan mereka dalam perdagangan, adalah tidak terlepas dari kuatnya motivasi Abdul Syukur dalam hal membentuk etos ekonomi mereka sebagai pedagang. Akibatnya, orang Gu-Lakudo terobsesi untuk melakukan perantauan (*urbanisasi* dan *migrasi*).

Berkaitan dengan bagaimana proses gerakan spontan dari kelompok-kelompok masyarakat di suatu daerah ketika melakukan *migrasi* ke daerah lain, setidaknya ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi mereka (Arbain, 2009). *Pertama*, adanya informasi yang memotivasi mereka tentang tingginya nilai manfaat yang akan diperoleh—khususnya pada aspek ekonomi—manakala melakukan perantauan. *Kedua*, terbentuknya jaringan *migrasi* di daerah tujuan yang dibangun oleh para *migran* sebelumnya. Misalnya, dalam bentuk jalinan relasi kerja, atau terbukanya peluang usaha, seperti perdagangan. *Ketiga*, adalah terkait dengan makin membaiknya sarana transportasi, khususnya darat dan laut. Dengan kondisi ini, maka memudahkan bagi elemen-elemen masyarakat lapis bawah (*grassroot*) untuk melakukan *migrasi* dari daerah asalnya ke daerah lain.

Demikian juga orang Gu-Lakudo, dari ketiga hal tersebut menjadi pendorong bagi orang Gu-Lakudo untuk meninggalkan daerah asal mereka yang begitu tandus. Karena itu, dalam proses perkembangan mobilitas sosial *horizontal* mereka, kemudian tidak hanya memasuki kota Bau-Bau, tetapi juga merantau ke berbagai daerah lain di Indonesia, terutama pada kota-kota di kawasan Timur Indonesia, terutama Ambon. Kecenderungan tersebut, tentu saja dapat dijelaskan bahwa yang menjadi motivasi utama orang Gu-Lakudo melakukan *migrasi* ke daerah lain, adalah berkaitan dengan perbaikan kehidupan sosial ekonomi. Meskipun ketika melakukan *migrasi*, umumnya mereka tidak didukung dengan “modal finansial” untuk mulai mengembangkan usaha perdagangan di daerah tujuan. Tetapi, dengan “modal spiritualitas Islam” yang memang sudah terbentuk sebelumnya, mereka memiliki spirit dan tekad yang kuat untuk berjuang dan mencapai kesuksesan dalam pengembangan ekonomi perdagangan.

Namun, terkait dengan konteks keberadaan orang Gu-Lakudo setelah di daerah perantauan (*migrasi*)—seperti juga berbagai sub-etnik Muna-Buton lainnya—mereka lebih dikenal atau dikategorikan sebagai orang Buton. Artinya, secara sosiologis identitas etnisitas asli mereka adalah terintegrasi atau pun melebur dalam proses adaptasi sosial di daerah lain, sebagai orang Buton. Adapun terbentuknya identitas sosial-etnisitas yang demikian ini, memang sudah

berlangsung sejak masa silam. Berkaitan dengan hal ini, mereka yang berasal dari wilayah kepulauan Buton dan Muna, ketika merantau ke daerah lain seperti halnya ke Maluku, dikategorikan oleh masyarakat asli Ambon sebagai orang Buton. Padahal di dalamnya, terintegrasi banyak sub-etnik Buton dan Muna, misalnya: orang Wakatobi, Gu-Lakudo, Baruta, Wadiabero, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, maka ketika terjadinya kerusuhan Ambon (1998), misalnya, yang menjadi sasaran utamanya adalah mereka yang dikategorikan sebagai orang Buton dan Bugis-Makassar (BBM). Penyebabnya adalah terkait dengan munculnya “kecemburuan sosial” terhadap warga pendatang (*kaum migran*). Karena setelah berpuluh-puluh tahun mereka menetap tinggal di Ambon, perkembangan ekonomi perdagangan di kota tersebut cenderung didominasi oleh orang Buton dan Bugis-Makassar. Sehingga, ketika mulai meletusnya kerusuhan sosial yang berlangsung sekitar lima tahun (1998—2003), maka yang banyak mengalami kerugian—baik material maupun korban jiwa—adalah dari ketiga etnik *kaum migran* tersebut. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian melakukan pengungsian atau eksodus ke daerah asalnya masing-masing, termasuk Bau-Bau, Raha, dan Kendari, di Sulawesi Tenggara. Sebagai klimaks dari berlangsungnya pengungsian mereka, adalah pada tahun 1999—2002. Di pelabuhan Bau-Bau, misalnya, pada dekade tersebut setiap kapal Pelni yang tiba dari Ambon, dipadati oleh para pengungsi.

Lalu bagaimana dengan para pedagang Gu-Lakudo yang melakukan *migrasi* ke Ambon? Setelah terjadinya kerusuhan sosial di kota tersebut, mereka pun melakukan pengungsian. Dalam pengertian, mereka pulang kampung untuk membangun kembali basis-basis ekonomi perdagangan yang sebelumnya mereka geluti di Ambon. Sehingga, bagi mereka yang masih memiliki modal usaha, maka tanpa harus menunggu waktu yang agak panjang untuk mulai berdagang. Sedangkan mereka yang sudah tidak memiliki permodalan harus berupaya lagi memulai usaha dagangnya, meskipun dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, maka setelah berhasil melakukan pengungsian akibat kerusuhan Ambon, di kota Bau-Bau misalnya, mereka mulai tersebar pada berbagai lokasi aktivitas perdagangan, baik di tiga pasar utama di kota itu (La Elangi, Nugraha, dan Mal Umna Rijoli) maupun di luar pasar.

Demikian pula halnya di pasar Laiono Raha, pasar Baru Wua-Wua dan Mall Mandonga Kendari. Karenanya, bagi pedagang Gu-Lakudo yang berhasil menyelamatkan usaha dagangnya dari kerusuhan sosial kota Ambon, selain mereka memindahkan basis perdagangan

mereka ke Bau-Bau, ada juga yang ke Raha dan Kendari. Namun berkaitan dengan hal ini, belum didukung dengan data kuantitatif yang dapat memberikan penjelasan berapa jumlah pedagang Gu-Lakudo, yang kembali membangun basis usaha dagangnya setelah terjadinya kerusuhan Ambon, baik di Bau-Bau maupun Raha dan Kendari. Sebab untuk mendapatkan data yang lebih bersifat kuantitatif, agaknya memang memerlukan suatu studi tersendiri dalam bentuk survei.

Meskipun demikian, secara kualitatif dapat digambarkan bahwa para pedagang Gu-Lakudo yang kembali membangun basis-basis usaha dagang mereka pada berbagai kota di Sulawesi Tenggara, setelah berlangsungnya kerusuhan Ambon (1998) jumlahnya cukup besar. Misalnya, pada tiga pasar utama di kota Bau-Bau (La Elangi, Nugraha, dan Mal Umna Rijoli), ketambahan pedagang orang Gu-Lakudo yang datang dari Ambon memang tidak terlalu menonjol. Karena di tiga pasar tersebut sudah ditempati oleh para pedagang yang sejak beberapa tahun sebelumnya, mereka mengembangkan aktivitas perdagangannya di kota itu. Jumlahnya cukup besar, adalah mereka yang memulai membangun kembali basis-basis perdagangannya di luar pasar, atau di berbagai tempat lainnya di kota Bau-Bau.

Demikian juga keberadaan mereka di pasar Laino, kota Raha, kabupaten Muna. Mereka yang dominan berdagang adalah pedagang Gu-Lakudo yang datang sejak tahun 1990-an dan beraktivitas di pasar Butung-Butung, yang sebelumnya mengalami kebakaran.<sup>31</sup> Sedangkan para pedagang dari korban kerusuhan Ambon tahun 1998, hanya dalam jumlah yang kecil. Hal ini dibenarkan oleh H. Yusuf, yang juga sebagai salah seorang pedagang dari kerabat mereka sendiri, yang berdagang di pasar tersebut sejak tahun 1996. Menurutnya, para pedagang Gu-Lakudo yang datang dari Ambon dan ikut berdagang di pasar Laino, jumlahnya sedikit.

Namun, berbeda halnya dengan yang ada di Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Di kota tersebut, dari para pedagang Gu-Lakudo cenderung terus bertambah. Ketertarikan mereka untuk mengembangkan usaha dagang di kota itu, adalah munculnya kecenderungan baru, bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini kota Kendari sudah mulai berkembang sebagai “kota dagang”, seperti juga halnya Bau-Bau.

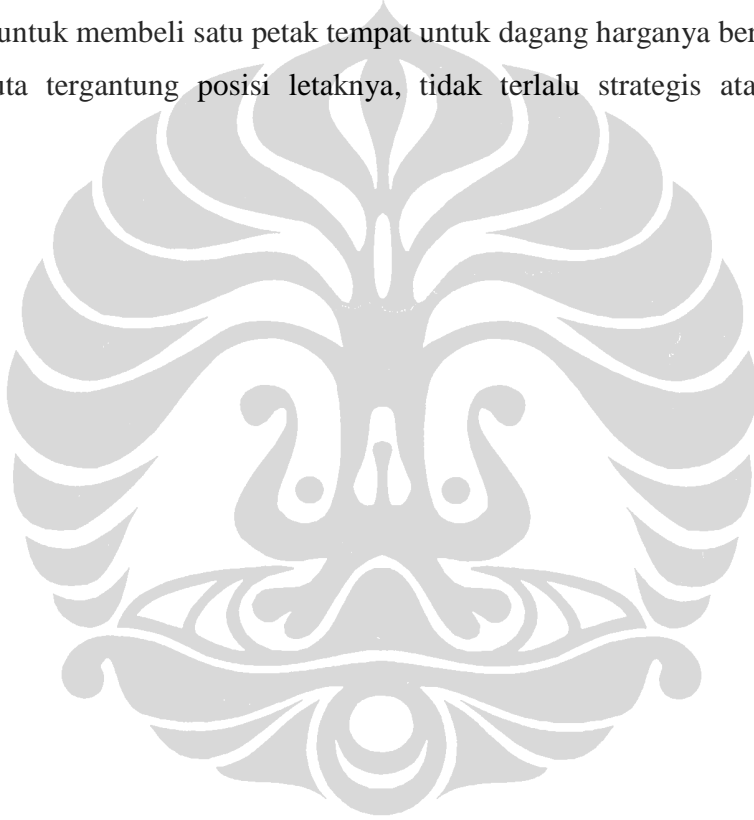
Oleh karena itu, maka dengan kondisi yang demikian itu, kemudian menarik minat para pedagang Gu-Lakudo untuk ikut mengembangkan usaha dagang di kota Kendari. Dalam

---

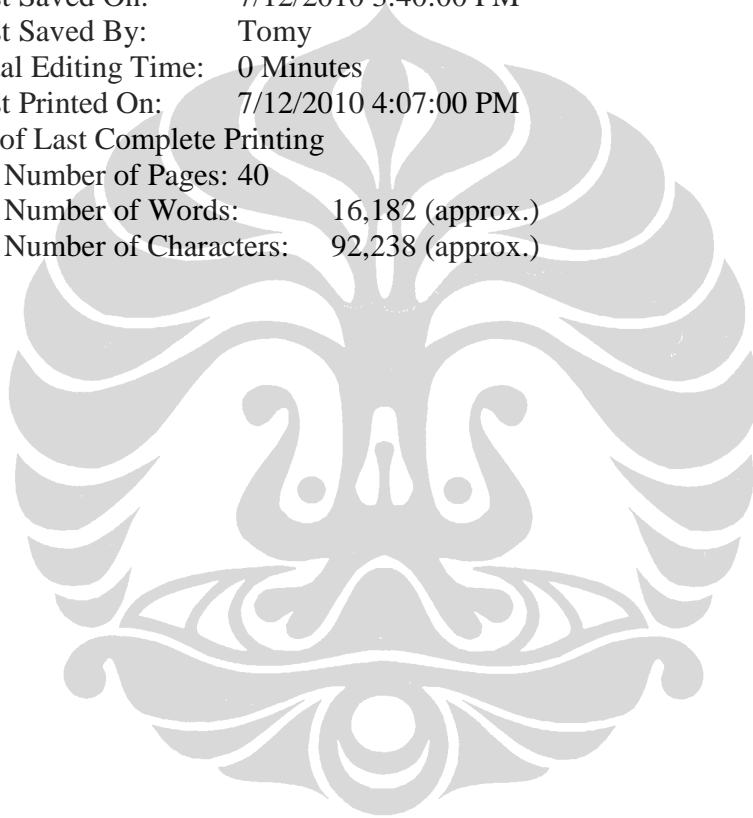
<sup>31</sup>Pasar Butung-Butung adalah “pasar lama” yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten Muna. Namun, kemudian mengalami kebakaran, sehingga pemerintah membangun kembali lokasi pasar di Laino, dan memindahkan para pedagang di pasar tersebut. Bagi para pedagang Gu-Lakudo yang juga ikut berdagang, mereka pun tetap terkonsentrasi pada perdagangan pakaian jadi, sandal-sepatu, tas, dan barang-barang lainnya.

prosesnya, ada yang datang sebelum kerusuhan Ambon. Namun, setelah berlangsungnya pengungsian, maka jumlah pedagang Gu-Lakudo, terus bertambah. Menurut Kepala Pasar Baru Wua-Wua Kendari, misalnya, dari sekitar 500 lebih los bangunan pasar yang disiapkan pemerintah kota, hampir setengahnya diisi oleh para pedagang Gu-Lakudo, baik yang datang sebelum kerusuhan Ambon, dan maupun sesudahnya.

Demikian juga keberadaan mereka di Mal Mandonga Kendari. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh manajer pengelolanya, bahwa pada tahun 2007 hingga 2008 ini, pesanan tempat berdagang dari orang Gu-Lakudo, terus bertambah. Padahal menurut para pedagang, untuk membeli satu petak tempat untuk dagang harganya berkisar Rp. 250 juta sampai Rp 450 juta tergantung posisi letaknya, tidak terlalu strategis atau cukup strategis untuk berdagang.



Filename: BAB VI  
Directory: D:\Lutfi\Lutfi  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 3:38:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 3:40:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 0 Minutes  
Last Printed On: 7/12/2010 4:07:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 40  
Number of Words: 16,182 (approx.)  
Number of Characters: 92,238 (approx.)





## BAB VII

### PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN

#### A. Kota Bau-Bau dalam Peta Perdagangan

Sebagai salah satu kota pelabuhan *transit* yang letaknya cukup strategis di pulau Buton, maka sejak masa silam Bau-Bau sudah masuk dalam jalur lalu-lintas pelayaran dan perdagangan pada antar-pulau di kawasan timur kepulauan Nusantara. Posisinya menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dari kawasan Barat (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT) ke kawasan tengah (Kalimantan dan Sulawesi, khususnya pelabuhan Makassar), selanjutnya menuju kepulauan Maluku. Bahkan menurut Poelinggomang (2002), Buton ketika itu masuk dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional, dari Maluku ke Makassar, NTT, NTB, Bali, pesisir Timur dan Utara pulau Jawa, Batavia, Banten, Palembang, Jambi, Aceh, Johor, Malaka, Kamboja, Siam, Pattani, Makao dan Manila di Asia, hingga ke benua Eropa.

Dengan posisinya yang cukup strategis tersebut, adalah terkait dengan keberadaan kesultanan Buton sebagai salah satu *kerajaan maritim* yang ada di kepulauan Nusantara di masa itu (Zuhdi, 1999). Karenanya, sejak abad ke 17 M. Bau-Bau sudah berfungsi sebagai “pelabuhan transit” yang disinggahi para pedagang antar-pulau dan bahkan juga pedagang antar-benua, yang melakukan perjalanan ke kepulauan Maluku sebagai pusat pembelian rempah-rempah. Dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali, baik di pasar regional dan nasional, maupun internasional. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kota Bau-Bau, sejak masa lampau sudah masuk dalam “peta perdagangan” yang berfungsi menghubungkan simpul-simpul pelayaran dan perdagangan di kepulauan Nusantara.

Menurut Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2002) bahwa sejak berdirinya kerajaan-kerajaan pertama yang mengintegrasikan kontrol kekuasaan dan pemerintahan dengan aktivitas perdagangan jarak jauh, adalah telah menjadi ciri khas yang menyertai perkembangan kawasan Asia Tenggara. Karena itu, maka merujuk dari latar belakang terbentuknya kota-kota di Asia Tenggara—termasuk Indonesia—dapat dikategorikan dalam dua tipe utama: (1) kota dagang yang berada di pesisir pantai; dan (2) kota suci yang letaknya di pedalaman. Dari kedua tipe wilayah perkotaan tersebut, pada prinsipnya saling terintegrasi dalam suatu sistem pembagian fungsi. Misalnya untuk kota dagang, menyediakan kebutuhan barang-barang import

yang datang dari luar negeri. Sebaliknya, kota pedalaman memasok kebutuhan pangan untuk bahan konsumsi bagi warga kota dagang (Evers dan Korff, 2002).

Fenomena terbentuknya wilayah perkotaan seperti yang dikonsepsikan Evers dan Korff tersebut, agaknya memang menjadi suatu ciri yang khas di masa lampau. Karena terkait dengan bagaimana posisi suatu pemerintahan kerajaan untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas perdagangan. Menurut Ongkodharma (1987), kesultanan Banten di masa lampau, misalnya, selain memiliki kota pelabuhan sebagai pusat pengembangan perdagangan maritim, juga terbangun kota pedalaman yang memasok kebutuhan bahan makanan dan barang dagangan dari hasil bumi dan hutan.

Demikian pula kesultanan Buton di masa silam, selain memiliki “kota pelabuhan” (Bau-Bau) sebagai tempat *transit* dalam jalur pelayaran dan perdagangan, juga terbangun “kota suci” yang disebut *Wolio* dan *Baadia* sebagai pusat pemerintahan yang mengontrol lalu-lintas perdagangan antar-pulau di wilayah kekuasaannya. Pada masa itu kota Bau-Bau telah menunjukkan keberadaannya sebagai salah kota pelabuhan, yang didukung aktivitas kehidupan masyarakatnya yang bercirikan ekonomi perdagangan. Karena menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dan perahu layar para pedagang Nusantara (pribumi dan asing), terutama kolonial Belanda.

Menurut hasil studi Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2002), terbangunnya kota-kota di Asia Tenggara, secara fungsional dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar: (1) kota dagang sebagai simpul utama dalam hubungan perdagangan; (2) kota suci sebagai pusat pemerintahan kerajaan; dan (3) kota kecil sebagai penghubung jaringan perdagangan. Pada kategori pertama, dengan penduduknya yang multi etnik dan lebih berorientasi pada perdagangan, maka “penguasaan jalur perniagaan” merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertahankan. Sedangkan kategori kedua, dapat memberikan penjelasan bahwa di kota-kota sucilah, kosmologi, ideologi, dan agama, terjalin dengan kuat dan mendapat legitimasi dari pusat kekuasaan kerajaan. Sementara itu, kategori ketiga berfungsi sebagai penghubung antara simpul-simpul perdagangan dengan kota suci yang ada di pedalaman.

Adapun keberadaan kota Bau-Bau di masa silam, dapat dimasukkan pada kategori ketiga, yang berfungsi sebagai penghubung simpul-simpul perdagangan antar-pulau hingga antar-benua, dengan pusat kekuasaan kerajaan Buton yang terposisikan sebagai kota suci. Dengan demikian, keberadaannya sangat penting bagi pusat pemerintahan. Artinya posisi Bau-

Bau sebagai pelabuhan persinggahan kapal-kapal dagang—baik dari kawasan Barat ke Timur, atau sebaliknya—menjadi salah satu sumber pemasukan bagi kerajaan. Karena kapal-kapal dagang yang masuk dan berlabuh di Bau-Bau, diwajibkan untuk membayar “bea masuk pelabuhan”. Selain itu, barang-barang dagangan yang berasal dari para pedagang asing, seperti produk China dan Eropa, juga diperjual-belikan.

Di pesisir pantai Bau-Bau, mulai dari bagian Utara, Barat, dan hingga ke Selatan (Ngangana-umala, Kaobula, Wameo, dan Bone-Bone), memang sebelum tahun 1900-an sudah berkembang menjadi pemukiman masyarakat, yang tentu saja masih bercorak tradisional.<sup>1</sup> Namun, kota kecil ini dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kemudian diikuti oleh datangnya para imigran China dari Makassar dan kota lain ke Bau-Bau. Oleh karenanya, kota kecil tersebut menjadi sebuah kota pantai yang bercorak kemodernan, setelah kolonial Belanda secara formal menguasai atau pun mengendalikan sistem pemerintahan kesultanan Buton pada tahun 1906 (Pim Schoorl, 2003, h. 119-124).

Pada masa itu kolonial Belanda, selain mengembangkan sarana pemukiman di bagian pantai Timur Bau-Bau (Batulo) bagi orang Belanda sendiri, juga membangun gedung perkantoran untuk mengendalikan administrasi pemerintahan, dan pelabuhan untuk mengontrol lalu-lintas perdagangan dan pelayaran bagi kapal-kapal niaga yang singgah di Bau-Bau. Dengan demikian, maka kota pelabuhan tersebut berada di bawah kendali kekuasaan kolonial Belanda, hingga mulai datangnya penjajahan Jepang tahun 1942—1945.

Keterlibatan bangsa-bangsa Eropa dalam ekonomi perdagangan Asia Tenggara, maka kota-kota dagang yang memiliki posisi strategis di kepulauan Nusantara, menjadi sasaran taklukan dan penguasaan (Evers dan Korff, 2002). Fenomena yang demikian ini, seperti halnya perebutan pengaruh antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris, terhadap posisi strategis kota pelabuhan Makassar dan Ambon pada abad ke 17 M. Tujuannya, untuk mengendalikan jalur lalu-lintas perdagangan rempah-rempah di kawasan Timur kepulauan Nusantara. Karena bagi bangsa-bangsa Eropa ketika itu, memandang begitu pentingnya terhadap penguasaan dan pengendalian kota-kota dagang, baik melalui cara penaklukan maupun pendirian

---

<sup>1</sup>Pada masa silam, ibu kota kesultanan Buton berada di atas perbukitan yang disebut Wolio dan Badia yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari Bau-Bau. Namun demikian, dalam struktur pemerintahan kesultanan juga ditetapkan adanya jabatan “Sahbandar” yang bertugas mengawasi lalu-lintas pelayaran dan perdagangan bagi kapal-kapal dagang yang datang dan berlabuh di pesisir pantai Bau-Bau (AM. Zahari, 1977, h. 83; Pim Schoorl, 2003, h. 82).

kota dagang yang baru, seperti Batavia, ketimbang hanya sekedar penguasaan territorial (Evers dan Korff, 2002).

Menurut hasil studi Supratikno Rahardjo (1991), yang merujuk pada pendekatan evolusioner Wertheim, berkaitan dengan proses pertumbuhan dan keruntuhan kota-kota pra-kolonial di Indonesia. Dalam perkembangannya, justru melewati empat tahapan: (1) *The Old Indonesian Town*; (2) *The Indishe Town*; (3) *The Colonial Town*; dan (4) *The Modern Town* (Wertheim, 1959; Rahardjo, 2007).

Tahap *pertama*, adalah mencakup munculnya kota-kota sejak adanya kerajaan-kerajaan tertua hingga masuknya agama Islam di kepulauan Nusantara. Kota-kota ini muncul baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kemudian tahap *kedua*, adalah berkaitan dengan masuknya kolonial Belanda, dengan mendirikan kota Batavia sebagai pusat pengendalian usaha dagang VOC. Selanjutnya tahap *ketiga*, dikonsepsikan sebagai periode modernisasi bagi kota-kota yang telah ada. Periode ini diawali dengan mengadopsi “sistem perdagangan bebas” (1870) sebagai prinsip ekonomi modern. Perdagangan bebas yang didukung oleh industri mulai menjadi perhatian para pedagang Eropa, di bawah kendali kolonialisme Belanda, yang didukung oleh para pedagang China dan kalangan elite lokal. Yang pada gilirannya, perkembangan kota-kota tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sudah diwarnai dengan persebaran ideologi. Dan tahap *keempat*, pertumbuhan kota-kota modern setelah abad ke 19 M. yang semakin terintegral dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perkembangan ekonomi perdagangan yang didukung oleh proses industrialisasi, mendorong masuknya penduduk dari desa-desa ke kota (*urbanisasi dan migrasi*).

Kota Bau-Bau pun mengalami tahapan proses evolusi sebagaimana gambaran di atas. Yang berawal dari terbentuknya kerajaan Buton pra-Islam pada abad ke 14 M dan berkembang menjadi kerajaan Islam di abad ke 16 M (Zahari, 1977; Rudyansjah, 2009). Selanjutnya, mengalami proses penetrasi dan kontrol dari kekuasaan kolonial Belanda, hingga masa pra-kemerdekaan. Namun, setelah pasca-kemerdekaan yang ditandai oleh berakhirnya bentuk pemerintahan swapraja Buton pada tahun 1960, Bau-Bau menjadi ibu kota kabupaten Sulawesi Tenggara.<sup>2</sup> Dan ketika terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1963 dan masing-masing daerah bekas swapraja (Buton, Muna, Kendari dan Kolaka) berdiri sendiri sebagai

---

<sup>2</sup>Setelah kemerdekaan hingga terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1963, empat daerah bekas swapraja: Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka masuk dalam kekuasaan pemerintahan RI dan menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.

kabupaten. Bau-Bau pun menjadi ibu kota kabupaten Buton. Dalam proses selanjutnya, melalui UU NO. 13 Tahun 2001, Bau-Bau terbentuk sebagai wilayah pemerintahan kota, yang terpisah dari kabupaten Buton.

Namun, terlepas dari bagaimana proses perkembangan kota Bau-Bau pada masa silam hingga masa kini, satu hal yang dapat dikonsepsikan bahwa dengan posisinya yang strategis telah berfungsi sebagai salah satu simpul penghubung dalam jalur perdagangan antar-pulau di kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Dengan demikian, mendorong kota kecil tersebut menjadi kota dagang. Sehingga memungkinkan bagi *kaum migran*, baik dari etnik lokal maupun etnik lain untuk mengembangkan usaha perdagangan. Peluang ini yang kemudian dimanfaatkan orang Gu-Lakudo untuk melakukan migrasi dari daerah asal mereka ke kota Bau-Bau untuk mengembangkan usaha ekonomi perdagangan.

## **B. Wilayah, Penduduk dan Perekonomian Kota Bau-Bau**

Kota Bau-Bau berada di pulau Buton dan terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi kordinatnya  $5^{\circ}5'$  hingga  $5^{\circ}33'$  Lintang Selatan dan  $122^{\circ}$ — $122^{\circ}47'$  Bujur Timur. Letak geografisnya yang berada di selat Buton dan memiliki pelabuhan laut yang menjadi penghubung dengan kota-kota lain di Sultra (Raha dan Kendari) dan sebagai pelabuhan transit dari kawasan Barat ke Timur Indonesia. Pada konteks inilah kota Bau-Bau berkembang menjadi kota dagang (lokal, regional, dan nasional). Sebagai salah satu kota pantai, Bau-Bau memiliki luas wilayah 221,00 km<sup>2</sup>. Di bagian utara kota tersebut, karakteristik wilayahnya cenderung subur, sehingga memungkinkan bagi masyarakatnya untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan. Namun, di wilayah selatannya kurang begitu subur, sehingga hanya diperuntukkan sebagai pengembangan pemukiman warga kota dan juga berbagai sarana pemerintahan (Marsudi, 2009).

Dengan luas wilayahnya 221,00 km<sup>2</sup> tersebut, sampai akhir tahun 2008 memiliki jumlah penduduk 127.743 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 63.079 jiwa dan perempuan 64.664 jiwa. Oleh karena itu, dalam perkembangan wilayah perkotaannya terjadi penambahan penduduk yang cukup tinggi, dengan memiliki tingkat kepadatan penduduk 6.523 jiwa/km<sup>2</sup> (Marsudi, 2009). Sebagai salah satu kota dagang di kawasan Timur Indonesia, kota Bau-Bau juga memiliki keragaman etnik, baik dari berbagai etnik lokalnya maupun yang datang dari daerah lain dan sudah menetap tinggal di kota Bau-Bau.

Menurut data BPS (2008) memberikan gambaran bahwa kota Bau-Bau berkembang dengan angkatan kerja sebanyak 51.701 orang. Dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada, maka sektor perdagangan dan jasa memberikan tempat terbesar dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Sejumlah 45.694 orang dengan status sebagai pekerja aktif, 11.125 orang justru bekerja pada sector perdagangan (Marsudi, 2009). Dengan kecenderungan yang demikian ini, karena di kota Bau-Bau telah memiliki infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Misalnya, pelabuhan laut yang berstandar nasional sebagai tempat transit bagi kapal-kapal Pelni dan kargo. Demikian juga adanya bandar udara Betoambari yang menghubungkan kota Bau-Bau dengan kota-kota lain, terutama ke Makassar dan Jakarta.

Oleh karena itu, dengan tersedianya kedua pelabuhan tersebut (laut dan udara), sehingga menjadi sarana yang cukup vital bagi kelancaran distribusi barang dan jasa yang masuk ke kota Bau-Bau, atau pun sebaliknya. Selain itu juga terbangunnya pasar-pasar perdagangan sebagai tempat berdagang barang dan jasa masyarakat, baik yang dibangun oleh pemerintah kota maupun kalangan swasta. Dengan data kuantitatif berikut ini, dapat memberikan gambaran terkait dengan jumlah penduduk dan lapangan usaha yang ada di kota Bau-Bau.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Usaha di kota Bau-Bau, Tahun 2007.

Sektor Lapangan Usaha	Laki-Laki	Permpuan	Total
Pertanian	6.208	3.743	9.951
Pertambangan & Penggalian	250	115	365
Industri Pengolahan	1.082	1.912	2.994
Listrik, Gas & Air	42	-	42
Bangunan	3.619	-	3.619
<b>Perdagangan</b>	<b>5.632</b>	<b>5.493</b>	<b>11.125</b>
Angkutan & Komunikasi	5.157	573	5.730

Keuangan	332	917	1.249
<b>Jasa</b>	<b>6.519</b>	<b>4.100</b>	<b>10.619</b>
<i>Total</i>	<i>28.841</i>	<i>16.853</i>	<i>45.694</i>

Sumber: BPS Kota Bau-Bau (2008), dalam Marsudi (2009)

Berdasarkan data BPS menjelaskan bahwa sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kota Bau-Bau (2003—2007). Oleh karena itu, maka dalam kurun waktu tersebut, perekonomian kota Bau-Bau menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi hingga mencapai 7,50 % sehingga pada kurun waktu yang sama cenderung melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 6,00 % (Marsudi, 2009).

Tabel 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau menurut Sektor Tahun 2004—2008.

Lapangan Usaha	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata
SEKTOR PRIMER	11,44	5,29	3,23	2,44	5,60
- Pertanian	11,74	5,39	2,97	2,20	5,57
- Pertambangan dan Penggalian	6,53	3,59	7,86	6,53	6,13
SEKTOR SEKUNDER	9,48	6,18	9,12	8,93	8,43
- Industri Pengolahan	10,47	3,09	6,26	7,04	6,72
- Listrik, Gas dan Air Bersih	13,99	23,78	9,34	14,46	15,39
- Konstruksi	9,11	6,29	9,74	9,11	8,56
SEKTOR TERSIER	5,80	8,99	7,39	7,73	7,48
- Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,69	8,54	3,57	4,38	4,80
- Pengangkutan dan Komunikasi	7,97	10,25	8,32	8,12	8,66
- Keuangan, Persewaan & Jasa	25,46	20,12	22,79	25,21	23,39
- PDRB	7,24	7,93	7,35	7,47	7,50

Sumber: BPS Kota Bau-Bau (2008), dalam Marsudi (2009).

### C. Kondisi Perdagangan Kota Bau-Bau

Setelah kota Bau-Bau memiliki otonomi pemerintahan sendiri sebagai salah satu *Kotamadya*, maka dalam perencanaan pembangunannya diarahkan pada “penguatan ekonomi” yang berorientasi perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah kota tersebut merumuskan visi pembangunan jangka panjangnya hingga 2023, adalah: “*Terwujudnya kota Bau-Bau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang nyaman, sejahtera dan berbudaya pada tahun 2023*” (Amirul Tamim dan Halaka Manarfa, 2008).

Memang, sejak mulai beroperasinya kapal-kapal perintis Pelni tahun 1970-an dan kapal-kapal Pelni tahun 1985-an yang menghubungkan berbagai kawasan di Indonesia, semakin menguatkan posisi strategis kota Bau-Bau sebagai pelabuhan transit.<sup>3</sup> Sehingga, makin mendorong perkembangan sosial ekonomi perdagangan masyarakatnya. Karena didukung dengan kelancaran transportasi laut, yang menghubungkan kota-kota dagang di berbagai daerah di Indonesia, misalnya: Biak, Ambon, Ternate, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, hingga Kijang dan Batam di kepulauan Riau.

Dengan letak geografisnya yang cukup strategis tersebut, kelancaran transportasi laut dan mobilitas perdagangan masyarakatnya, menjadikan Bau-Bau berkembang sebagai kota dagang di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini menciptakan “iklim perdagangan” dengan memiliki prospek yang baik dalam pengembangan usaha ekonomi yang berbasis pada perdagangan.

Peluang tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh orang Gu-Lakudo untuk memacu pertumbuhan usaha dagang mereka. Pada tahun 1970-an, mereka hanya terfokus pada pengembangan usaha perdagangan pakaian jadi dan barang-barang kelontong di pasar kota Bau-Bau. Namun, setelah memasuki dekade 1990-an ke atas, mereka sudah mampu melakukan difersifikasi usaha dagang dan melakukan ekspansi pasar ke kota Raha dan Kendari, hingga terbentuk “jaringan sistem perdagangan lokal” bagi mereka di Sulawesi Tenggara.

---

<sup>3</sup>Dari hasil pengamatan peneliti dan juga didukung dengan data kesyahbandaran pelabuhan kota Bau-Bau, selama 5 hari kerja dalam setiap minggu, sudah menjadi jadwal tetap untuk tiba dan berangkatnya kapal-kapal Pelni di pelabuhan Murhum Bau-bau. Dan belum lagi tiba-berangkatnya kapal-kapal pengangkut barang (peti kemas) yang melakukan bongkar-muat di pelabuhan tersebut. Dengan fenomena seperti ini, tentu saja dapat memberikan gambaran bahwa mobilitas keluar-masuknya orang dan juga barang-barang perdagangan yang bernilai ekonomi bagi pertumbuhan usaha perdagangan di kota Bau-Bau, intesitasnya cukup tinggi. Oleh karena itu, maka pemerintah kota ini menetapkan visi jangka panjang pembangunannya, adalah: “*Terwujudnya kota Bau-Bau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang nyaman, sejahtera dan berbudaya pada tahun 2023*” (Amirul Tamim dan LM. Halaka Manarfa, *Visi dan Misi Pembangunan Kota Bau-Bau Tahun 2008-2013*, h. 7).



Dari hasil observasi lapangan selama berlangsungnya penelitian, yang didukung dengan serangkaian data primer dan sekunder, peneliti mendapatkan gambaran tentang konstruksi perdagangan di kota Bau-Bau. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada lima *etnik* utama yang dominan dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan di kota tersebut, baik yang berdagang di pasar maupun bangunan pertokoan..<sup>4</sup> Adapun kelima etnik dimaksud, adalah: orang Buton asli, Bugis-Makassar, China, Wakatobi, dan Gu-Lakudo. Agaknya, mereka memainkan peran-aktif dalam mengembangkan ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau, sesuai dengan penguasaan segmen usaha dagang masing-masing.

**1. Pedagang Buton.** Para pedagang dari orang Buton sendiri, meskipun mereka juga mengembangkan usaha perdagangan barang-barang lain di Bau-Bau, tetapi yang cenderung mereka kendalikan dalam pemasarannya hingga ke luar daerah, adalah perdagangan barang-barang pecah-belah dan berbagai jenis alat rumah tangga lainnya. Dari salah seorang pedagang (*distributor*) yang dapat dikategorikan cukup berhasil di bidang usaha dagang tersebut, misalnya Haji Salam.

Dalam perkembangan pemasaran barang-barang dagangannya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat kota Bau-Bau atau pun wilayah kabupaten Buton dan sekitarnya. Tetapi juga melayani permintaan para pelanggannya dari kepulauan Maluku, Papua, dan juga daerah lain.

Karena itu, toko dagang yang dimilikinya sebagai tempat penjualan barang-barang dagangannya, terletak di pusat kota Bau-Bau dan berdekatan dengan pasar La Elangi. Di toko dagangnya ini, hanya menyiapkan berbagai contoh barang yang dijualnya dalam jumlah kecil (*eceran*) pada setiap hari. Namun, untuk memenuhi permintaan barang dalam jumlah yang besar, para pembeli diajak mengambil di gudang yang memang sudah disiapkan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

Bagi kebanyakan para pedagang orang Buton asli di kota Bau-Bau, memposisikan H. Salam sebagai salah seorang pelaku ekonomi perdagangan yang cukup berhasil di

---

<sup>4</sup>Tantangan yang dihadapi pemerintah kota Bau-Bau, dengan makin meningkatnya intensitas dan mobilitas perdagangan masyarakatnya, yang didukung oleh kelancaran transportasi laut dan udara adalah terbukanya ruang yang lebar untuk berkembangnya apa yang disebut dengan “ekonomi bawah tanah” (*underground economy*) dan “ekonomi hitam” (*black economy*), seperti penyeludupan dan perdagangan barang-barang ilegal, yang sulit dikontrol oleh pemerintah kota tersebut. Karena hubungan lalu-lintas dan juga komunikasi perdagangan berbagai kota besar di Indonesia, sudah semakin terbuka lebar. Dan dalam suatu perbincangan bebas dengan salah seorang pejabat pemerintah kota Bau-Bau ketika berlangsungnya penelitian disertasi ini peneliti menyampaikan kecenderungan tersebut kepadanya, dan menurutnya memang fenomena itu sudah mulai muncul di kota Bau-Bau.

bidangnya. Kekuatan etos dagangnya—sebagaimana yang dimiliki orang Gu-Lakudo—juga dibentuk oleh nilai-nilai spiritualitas agama dalam Islam. Sehingga, ketika melakukan transaksi jual-beli dan untuk membangun jaringan pembeli (*pelanggan*) dalam perdagangan di wilayah lain, Salam tidak terlalu menekankan “pembayaran tunai” dalam pembelian barang. Tetapi yang lebih diutamakan adalah berkaitan dengan “kepercayaan” (*trus*). Karena itu, pelanggannya datang dari berbagai daerah, hingga di luar kota Bau-Bau dan kabupaten Buton.

Namun, setelah anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan formal mereka di berbagai Perguruan Tinggi di pulau Jawa, usaha dagangnya mulai diserahkan pada mereka untuk dikelola dengan model manajemen modern yang cenderung lebih profesional. Dan anak-anak Haji Salam pun mulai merambah pada bentuk perdagangan yang lain, meskipun basis usaha dagang yang diwariskan oleh orang tua mereka tetap dipertahankan (Amsir Afie, Wawancara di Bau-Bau 5 April 2008).

2. ***Pedagang Bugis-Makassar.*** Sebagaimana para pedagang Tionghoa, para *migran* Bugis-Makassar, sejak pra-kemerdekaan berhasil melakukan ekspansi perdagangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Maka demikian pula halnya keberadaan mereka di kota Bau-Bau. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, para pedagang Bugis-Makassar di kota tersebut, mendominasi perdagangan sembako, perhiasan emas, dan juga jenis barang dagangan yang lain. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut hingga memasuki dekade 1990-an—2000-an, intensitas perdagangan mereka mengalami penurunan, dibanding sebelumnya.

Dengan demikian, maka mobilitas sosial ekonomi mereka dalam pengembangan usaha perdagangan, cenderung menjadi stagnan. Salah satu penyebabnya, adalah di satu pihak daya saing mereka menurun; sementara itu di pihak lain, tuntutan terhadap peningkatan persaingan dalam aktivitas perdagangan, semakin mendesak. Karena itu, jika pada tahun 1960-an hingga 1970-an, para pedagang Bugis-Makassar di kota masih cukup handal untuk bersaing dengan para pedagang Tionghoa, tetapi setelah tahun 1990-an, kemampuan mereka mulai menurun.

Apa yang dialami oleh para pedagang Bugis-Makassar di kota Bau-Bau tersebut, juga dibenarkan oleh salah seorang dari tokoh masyarakat mereka, yang bernama Haji Kamhar. Menurutny, dalam sepuluh tahun terakhir ini aktivitas mereka dalam perdagangan memang

mengalami kemerosotan. Ia sendiri sejak awal kedatangannya di Bau-Bau tahun 1970-an, sudah mulai mengembangkan perdagangan perhiasan emas. Namun, setelah memasuki tahun 1990-an ke atas, usaha dagangnya mengalami pasang-surut, hingga terhenti sama sekali. Penyebabnya, dari anak-anaknya sendiri tidak ada yang berminat untuk melanjutkan usaha dagangnya, karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan lain.

Kecuali itu, Haji Kamhar juga mulai merasakan kekurangan modal finansial dan sudah memasuki usia lanjut. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, menyebabkan toko emasnya di pasar sentral Bau-Bau ditutup. Namun demikian, bagi kebanyakan etnik Bugis-Makassar yang memang berprofesi sebagai pedagang, mereka masih tetap bertahan dalam pengembangan usaha perdagangan, sekalipun harus menghadapi persaingan yang makin ketat (H. Kamhar, Wawancara di Bau-Bau, 10 April 2008).

3. **Pedagang Tionghoa.** Posisi mereka sebagai pelaku ekonomi perdagangan *lokal*, *regional*, dan *nasional* di kota Bau-Bau, masih tetap menunjukkan dominasinya. Oleh karena itu, maka mereka menguasai dan mengendalikan berbagai segmen usaha perdagangan barang dan jasa. Misalnya: bahan bangunan, elektronik, kendaraan bermotor, jasa ekspedisi, distributor sembako dalam skala besar, hingga pasar swalayan.<sup>5</sup> Adapun masih dominannya penguasaan segmen-sehmen usaha perdagangan yang strategis oleh para pedagang China di kota Bau-Bau, tentu saja memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun, satu hal yang cukup mendasar adalah bahwa etnik Tionghoa sejak masa kolonial Belanda, mereka sudah lebih dulu mendominasi jaringan sistem perdagangan lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional.

Karenanya, perkembangan dan pemaparan usaha ekonomi perdagangan mereka di berbagai daerah di Indonesia—termasuk di Sulawesi Tenggara—telah mengalami proses perjalanan waktu yang cukup panjang. Yang tentu saja hal ini, membawa beberapa implikasi

---

<sup>5</sup>Ketika penelitian ini berlangsung di kota Bau-Bau, peneliti juga mencoba melakukan wawancara dengan pedagang China, namun yang menjadi kendala utamanya adalah sulit untuk mendapatkan data yang diinginkan sebagaimana tujuan penelitian. Karena mereka bersikap tertutup dengan orang luar yang ingin mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha perdagangan mereka. Misalnya, peneliti mengharapkan informasi tentang bagaimana proses awal kedatangan leluhur mereka ke kota itu dan mereka datang dari mana. Hal ini cukup sulit untuk didapatkan dari informan orang China sendiri. Oleh karenanya, data penelitian yang digunakan terkait dengan perkembangan usaha ekonomi perdagangan etnik China di kota Bau-Bau—untuk menjadi pembandingan dari mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo dan juga etnik lain—diolah dan dianalisis berdasarkan hasil observasi lapangan dan sumber data-data sekunder yang ditemukan selama berlangsungnya penelitian.

positif terhadap mereka, dalam kaitannya dengan penguasaan segmen-segmen usaha perdagangan yang cenderung strategis pada berbagai kota di Indonesia.

*Pertama*, memungkinkan bagi mereka untuk melakukan penumpukan modal usaha dagang yang terus membesar dan semakin kuat. *Kedua*, dapat membuka akses yang luas terhadap pengembangan jaringan atau jangkauan pasar perdagangan. *Ketiga*, penguasaan segmen-segmen usaha perdagangan yang cenderung bervariasi dan strategis. *Keempat*, dengan dukungan modal yang kuat, jaringan perdagangan yang luas, dan penguasaan segmen-segmen usaha yang strategis, mereka dengan mudah melakukan regenerasi. Artinya, berlangsungnya proses pergantian generasi terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi yang berorientasi pada pengembangan usaha dagang, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Demikian juga keberadaan pedagang Tionghoa di Bau-Bau, memiliki kecenderungan tersebut: (1) penguatan modal; (2) penguasaan segmen usaha strategis; (3) perluasan jaringan; dan (4) regenerasi dalam perdagangan. Tentu saja, dengan menerapkan empat hal di atas demi pengembangan dan kelangsungan usaha perdagangan, merupakan suatu upaya dari rasionalisasi tindakan ekonomi. Dalam pandangan sosiologi ekonomi, sebagaimana yang dikonsepsikan Max Weber, dapat dikategorikan sebagai “tindakan rasional individu yang lebih bersifat instrumental”. Karena dilakukan dengan penuh pertimbangan dan pilihan yang sadar serta berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dari tindakan tersebut. Asumsinya adalah bahwa tindakan individu dalam sistem ekonomi pasar, memerlukan pandangan dasar yang bersifat rasionalitas instrumental.

4. ***Pedagang Gu-Lakudo.*** Bagi *kaum urban* yang datang belakangan di kota Bau-Bau ini, setelah mereka bergelut dengan berbagai tantangan dalam pengembangan usaha dagang, mereka pun sudah mampu mendominasi beberapa segmen perdagangan di kota tersebut. Kalau pada awalnya (1970-an), mereka terlibat dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan, masih terkonsentrasi pada penjualan pakaian jadi dan barang-barang kelontong. Namun, setelah berlangsung sekitar dua puluh tahun lebih (1990-an—2000-an), mereka pun memasuki segmen-segmen usaha dagang yang lain. Yang sekaligus melakukan perluasan dan penguasaan pasar perdagangan. Di kota Bau-Bau, misalnya, sebelumnya pengembangan aktivitas perdagangan mereka hanya terkonsentrasi di pasar La Elangi. Tetapi, setelah terbangunnya pasar Nugraha dan Mall Umna Rijoli, mereka pun kemudian

membuka akses perdagangan pada kedua pasar tersebut. Demikian juga pada dua kota lain di Sulawesi Tenggara, seperti Raha dan Kendari.

Artinya, para pedagang Gu-Lakudo secara sosio-ekonomik, mereka melakukan diversifikasi usaha dagang dan juga ekspansi pasar perdagangan. Pada dekade 2000-an ke atas, para pedagang Gu-Lakudo sudah merambah pada berbagai segmen usaha dagang yang di kota Bau-Bau. Kalau sebelumnya, mereka hanya terkonsentrasi pada penjualan barang kelontong, pakaian jadi, sandal-sepatu, tas sekolah dan pakaian. Namun, kemudian mereka juga mulai mengembangkan perdagangan pada kebutuhan lain, seperti: *meubel*, alat rumah tangga dari aluminium, bahan bangunan, ekspedisi, *mini market*,<sup>6</sup> dan juga toko obat/apotik.

Kesemua segmen usaha dagang yang digeluti oleh para pedagang Gu-Lakudo tersebut, merupakan hasil diversifikasi usaha dagang yang mereka lakukan, setelah sekian puluh tahun mereka bergelut dengan penjualan pakaian jadi, sandal-sepatu, dan barang-barang kelontong. Meskipun demikian, perdagangan dari ketiga jenis barang tersebut, masih tetap dominan diperdagangkan oleh komunitas *urban* orang Gu-Lakudo, baik di pasar maupun toko-toko mereka di kota Bau-Bau.

5. ***Pedagang Wakatobi***. Di kota Bau-Bau, kelompok pedagang dari kepulauan tukang besi ini (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko), mereka terlibat dalam aktivitas perdagangan hasil bumi dan laut, pakaian bekas dari Singapura, dan jasa angkutan transportasi laut antar-pulau. Namun, dalam perkembangannya, usaha perdagangan mereka cenderung merosot dan bahkan mengalami stagnasi.

Munculnya kecenderungan tersebut bagi para pedagang Wakatobi di Bau-Bau, salah satu penyebabnya adalah “keterputusan regenerasi” dalam pengembangan usaha perdagangan. Artinya, sekitar tiga puluh tahun lebih ini (1970-an—2000-an), secara geologis telah terjadi proses peralihan jalan kehidupan bagi generasi mereka dari konteks perdagangan pada profesi lain. Tidak seperti orang Tionghoa atau pun orang Gu-Lakudo, kesinambungan generasi mereka dalam usaha ekonomi perdagangan terus berlanjut. Yang didukung dengan perluasan jaringan perdagangan, terutama di kota-kota lain di Sulawesi Tenggara.

---

<sup>6</sup>H. Radeni misalnya—salah seorang informan peneliti dari orang Gu-Lakudo—selain bertugas sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, juga memiliki mini market di kota Bau-Bau. Usaha ekonomi perdagangan yang dibangunnya hingga berkembang seperti sekarang ini, justru dirintis sejak masih remaja sambil mengikuti pendidikan dan sebelum jadi PNS. Karena itu, pengelolaan usaha dagangany diserahkan kepada anak-isteri dan keponakannya (H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau, Maret 2008).

Anak-anak pedagang orang Wakatobi, menurut Mustafa Zain, pada dekade belakangan ini kebanyakan mulai mengalihkan profesi kehidupan mereka. Atau tidak lagi sepenuhnya melanjutkan “tradisi perdagangan” seperti yang pernah digeluti oleh orang tua mereka. Padahal di masa silam, leluhur mereka terkenal sebagai pelayar yang tangguh dan juga pedagang antar-pulau yang ulet. Namun, dengan proses modernisasi dan pembangunan, kebanyakan generasi orang Wakatobi sudah beralih profesi, misalnya sebagai PNS, kontraktor, politisi, dan aktivis LSM (M. Zain, Wawancara di Bau-Bau, 2 September 2007).

Tabel 3.7.

Penguasaan *Segmen Usaha* Perdagangan menurut kategori *Etnik* di Kota Bau-Bau dari tahun 2000 hingga 2007.

No	Etnik Dominan dalam Perdagangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jenis Usaha Perdagangan (Segmentasi)
1	Buton			Barang Peca Belah
2	China			Hasil Bumi dan Laut Bahan Bangunan Elektronik Expedisi Kebutuhan 9 Bahan Pokok
3	Bugis-Makassar			Perhiasan Emas Sembako, dll.
4	Gu-Lakudo			Pakaian Jadi Sendal, Sepatu dan Tas Meubel (Olimpic), dll.
5	Wakatobi			Transportasi Laut antar pulau.

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2007/2008.

Konsepsi pemikiran yang dapat ditarik dari rangkaian data yang ada pada tabel di atas, adalah memberikan gambaran bahwa kelima etnik tersebut memberikan kontribusi yang cukup

besar terhadap penguatan posisi strategis kota Bau-Bau sebagai salah satu “kota dagang” di Sulawesi Tenggara. Namun dalam perkembangannya, yang justru mendominasi berbagai segmen usaha perdagangan, adalah para pedagang China dan Gu-Lakudo. Sementara itu, yang ketiga etniknya mengalami stagnasi pengembangan usaha ekonomi perdagangan.

Masih tetap menguatnya dominasi terhadap berbagai segmen usaha dagang orang Tionghoa, adalah terkait dengan peran mereka dalam perdagangan komoditi *ekspor* dan *import*. Terutama hasil bumi dan hutan, hasil laut, dan berbagai barang kebutuhan masyarakat yang berkualitas *import*. Kecenderungan yang demikian ini, telah berlangsung sejak pra-kemerdekaan, hingga menguatnya proses pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. Orientasi perdagangan mereka, adalah menghubungkan antar-wilayah, mulai dari level lokal, regional, nasional, dan hingga internasional (Singapur, Taiwan, dan Hongkong).

Dengan peluang tersebut, maka di dalam proses jangka panjangnya, berkaitan dengan pengembangan usaha perdagangan etnik Tionghoa—termasuk di kota Bau-Bau—memberikan implikasi positif bagi mereka dalam perdagangan. *Pertama*, memungkinkan untuk menghimpun modal finansial, yang kemudian mendukung pengembangan usaha ekonomi perdagangan mereka dalam konteks jangka panjang. *Kedua*, memberikan kemungkinan yang cukup besar terhadap mereka untuk mengembangkan berbagai segmen usaha dagang, sesuai dengan kecenderungan permintaan pasar. *Ketiga*, terbukanya akses yang luas bagi mereka untuk mengembangkan jaringan perdagangan, baik di level lokal, regional, dan nasional, maupun internasional.

Fenomena tersebut adalah berkaitan dengan terbentuknya struktur masyarakat perkotaan yang melibatkan *kaum urban* dan *migran* dalam upaya penguasaan “ruang-ruang sosial” yang tentu saja berlangsung secara kompetitif. Dan khususnya penguasaan pada akses sumber daya ekonomi dalam konteks perdagangan lokal. Kecenderungan tersebut, adalah mengikuti proses “penetrasi dan transformasi kapitalisme” dalam pembangunan ekonomi.

Menguatnya fenomena sosial yang demikian itu, menurut Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2000), merupakan suatu konsekwensi logis dalam perkembangan kehidupan masyarakat kota. “Wilayah perkotaan menjadi pusat kekuasaan yang *legitimate* yang telah membentuk masyarakat *borjuis*, seperti yang berlangsung pada abad pertengahan di Eropa, yang

selanjutnya melahirkan bentuk ekonomi kapitalisme sebagai perekonomian *kaum urban*”.<sup>7</sup> Dengan demikian, maka baik kota kecil (*town*) atau pun kota besar (*city*), adalah menjadi pusat kemajuan dan pembangunan. Tetapi yang lebih mendasar dari hal itu, adalah bahwa wilayah perkotaan merupakan basis berlangsungnya perubahan sosial.

Penetrasi dan transformasi ekonomi kapitalisme di berbagai daerah di kepulauan Nusantara—termasuk di Sulawesi Tenggara—pada hakekatnya telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Menurut konsep pemikiran teoretik Karl Polanyi (1957), bahwa proses transformasi sosial masyarakat kapitalis telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam bentuk *The Great Transformation* yang menyebar secara global. Namun, sebagai implikasinya adalah menguatnya sistem ekonomi pasar, kemudian berperan menjadi institusi *superior* terhadap berbagai institusi sosial lainnya.

#### **D. Organisasi Perdagangan Orang Gu-Lakudo**

Sebelum mengkonsepsikan tentang bagaimana bentuk organisasi sosial perdagangan orang Gu-Lakudo, maka perlu terlebih dulu memformulasikan basis sosial mereka sebagai salah satu komunitas migran desa-kota, seperti di Bau-Bau. Dalam konteks ini, terbentuknya struktur sosial internal mereka di perkotaan dibentuk oleh dua hal, yakni: (1) identitas etnik lokal; dan (2) identitas sebagai muslim. Pada identitas etnik, misalnya—seperti yang dikonsepsikan oleh Durkheim—membentuk “solidaritas mekanik”. Karena itu, hubungan-hubungan sosial yang mereka bangun, masih cenderung merujuk pada nilai-nilai kehidupan tradisional yang bersifat kekerabatan atau kekeluargaan yang berlangsung secara informal. Kecenderungan tersebut, kemudian dibingkai oleh identitas mereka sebagai muslim. Karena komunitas etnik mereka juga dibentuk oleh sistem nilai keimanan atau tauhid Islam sebagai “pandangan dunia” (*world view*) mereka.

Dengan sinergisitas dari kedua identitas tersebut menguatkan basis sosial mereka dalam menjalani kehidupan di perkotaan. Konsekwensinya adalah bahwa dalam pengorganisasian usaha dagang mereka cenderung mengabaikan hubungan-hubungan sosio-ekonomik yang berlangsung secara formal, melainkan lebih bersifat “informal”. Misalnya, untuk mendukung model pengelolaan usaha perdagangan yang lebih profesional, maka diperlukan

---

<sup>7</sup>Lihat Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, h. 12.



adanya “asosiasi pedagang” bagi mereka. Tetapi keperluan terhadap hal seperti ini bukan sesuatu yang urgen dalam pengembangan ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo.

Atau, dengan kemampuan permodalan material yang mereka miliki, sebenarnya secara sosio-ekonomik mereka pun sudah memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk membentuk semacam lembaga finansial, seperti BPR dan Koperasi. Yang keberadaannya, bisa menjangkau semua pedagang Gu-Lakudo dalam kaitannya dengan kebutuhan tambahan modal usaha dagang; sehingga mereka tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap Bank. Namun, dalam realitas hidup mereka, tidak terobsesi dengan bentuk aktivitas kehidupan yang bersifat “formalisme”, meskipun mereka juga tidak jarang harus berhadapan dengan hal yang demikian itu dalam menjalani kehidupan modern.

Memang sebelum mereka melakukan migrasi desa-kota—ketika masih di daerah mereka—Abdul Syukur membentuk koperasi nelayan sebagai lembaga sosial ekonomi formal bagi orang Gu-Lakudo. Namun, setelah berlangsung sekitar sepuluh tahun lebih (1950-an—1960-an), koperasi tersebut menjadi macet, karena kepengurusannya menjadi terbengkalai setelah Abdul Syukur pindah ke Bau-Bau. Pertanyaan yang muncul kemudian, jika demikian fenomenanya lantas bagaimana orang Gu-Lakudo mengorganisasikan pengembangan usaha ekonomi perdagangan mereka? Berdasarkan hasil studi lapangan, ditemukan setidaknya ada tiga bentuk institusi sosial informal yang menjadi penggerak dan juga pendorong mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo di perkotaan, yaitu: (1) penguatan basis keluarga; (2) internal kolektif etnisitas; dan (3) jaringan sosial eksternal.

### ***1. Penguatan Basis Keluarga***

Sebagaimana umumnya etnik lain, maka orang Gu-Lakudo pun ketika mulai membangun basis ekonomi perdagangan mereka melalui keluarga. Dengan demikian, keterlibatan “keluarga inti” dalam mengembangkan usaha perdagangan cukup menentukan. Karena itu, ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak yang menjadi anggota keluarga, masing-masing ikut memainkan peran-penting dalam proses pengembangan usaha perdagangan. Misalnya, suatu keluarga dari orang Gu-Lakudo yang sudah memiliki beberapa basis usaha perdagangan, seperti di pertokoan dan di pasar. Dengan demikian—sebagai pilihannya—

keluarga tersebut melakukan pembagian tugas dalam pengembangan usaha perdagangan. Isteri dan anak-anak mereka, boleh jadi menjaga toko. Sedangkan suaminya berdagang di pasar. Tetapi bisa saja juga isteri dan anak-anak mereka yang berdagang di pasar.

Oleh karena itu, sebagaimana dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat modern, maka orang Gu-Lakudo pun sudah tidak mendikotomiskan antara peran laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya, baik isteri-isteri mereka maupun anak-anak perempuan mereka telah ikut terlibat dalam obsesi pengembangan usaha perdagangan. Di pasar modern kota Bau-Bau dan Kendari (Mall Umna Rijoli dan Mall Mandonga), misalnya, anak-anak perempuan orang Gu-Lakudo mengembangkan usaha perdagangan, yang memang dimodali oleh orang tua mereka. Dengan model seperti ini—secara sosio-ekonomik—orang Gu-Lakudo melakukan proses regenerasi dalam perdagangan.

Namun, selain melakukan regenerasi perdagangan pada anak-anak mereka, ada juga yang melibatkan anggota keluarga dekatnya, seperti menantu, adik ipar, dan kemanakan. Mereka ini pada awalnya hanya memosisikan diri sebagai “penyumbang tenaga suka-rela” terhadap keluarga inti yang menjadi *patron* mereka. Tetapi dalam perkembangannya, dari anggota keluarga dekat mereka ini justru berperan sebagai “pelaku magang” dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Dalam pengertian, bahwa setelah memungkinkan untuk berdagang secara mandiri, maka akan didorong dan bahkan mendapat bantuan modal dari keluarga inti yang menjadi tempatnya magang. Misalnya, ketika H. Harun mulai mengalihkan usaha dagangnya pada perdagangan meubel, dibantu oleh adik iparnya. Namun, setelah berlangsung beberapa tahun dan mendapat dukungan dari H. Harun, maka adik iparnya pun mulai mengembangkan usaha dagang sendiri. Dan bahkan dalam perkembangannya, perdagangan meubel yang digeluti adik ipar Harun justru lebih sukses dari usaha perdagangan dari kakak iparnya, yang sebelumnya menjadi tempat magang untuk berdagang.

Demikian juga yang dilakukan H. Radeni, ketika mulai membangun basis usaha dagang *mini market*-nya, dibantu oleh keponakannya. Namun, setelah bisa mandiri dan mulai terobsesi untuk berdagang secara terpisah dari pamannya, maka Radeni pun membukakan akses usaha dagang untuk keponakannya sesuai dengan yang diinginkan dan kemampuan permodalan.

Apa yang dipraktikkan oleh H. Harun dan H. Radeni dalam konteks pengembangan usaha dagang, adalah merupakan suatu fenomena yang umum bagi kebanyakan orang Gu-Lakudo yang memiliki kemampuan ekonomi perdagangan. Terkait dengan hal ini, bahwa

pemanfaatan potensi sumber daya keluarga—baik keluarga inti maupun dalam hubungan kekerabatan—menjadi salah satu bentuk basis sosial dalam pengorganisasian usaha perdagangan orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari kecenderungan yang demikian ini, kemudian berlanjut pada penguatan basis etnisitas, yang ditopang oleh hubungan-hubungan kekerabatan yang berlangsung secara informal.

## ***2. Internal Kolektif Etnisitas***

Menguatnya basis ekonomi perdagangan keluarga-keluarga inti orang Gu-Lakudo, menjadi fondasi yang kuat terhadap penguatan basis perdagangan mereka pada konteks etnisitas. Oleh karena itu, sebagai salah satu etnik lokal yang melakukan urbanisasi dan migrasi desa-kota, kemudian mereka muncul sebagai pelaku usaha ekonomi perdagangan yang cukup kompetitif di level lokal, seperti di kota Bau-Bau. Terkait dengan fenomena ini, meskipun basis-basis perdagangan mereka belum sebesar dan sekuat perdagangan etnik Tionghoa, tetapi kehadiran mereka dapat dikategorikan mengimbangi dominasi penguasaan segmen-segmen usaha perdagangan dari etnik imigran itu.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana bentuk organisasi sosial perdagangan orang Gu-Lakudo pada konteks etnisitas, sehingga mendorong mobilitas usaha ekonomi perdagangan mereka? Apa yang bisa dikemukakan untuk menjawab pertanyaan ini, adalah bahwa organisasi sosial perdagangan mereka di level etnisitas cenderung tidak terlalu kuat. Karena memang dalam pengembangan usaha perdagangan mereka belum didukung dengan keberadaan “institusi formal” yang berfungsi sebagai wadah pemersatu bagi para pedagang Gu-Lakudo, seperti halnya “asosiasi pedagang”. Atau, “koperasi simpan pinjam” yang keanggotaannya melibatkan semua pedagang Gu-Lakudo. Kalau toh di antara mereka, ada yang berinisiatif membentuk lembaga finansial formal—misalnya koperasi—nggotanya hanya dalam kelompok-kelompok kecil, seperti yang dilakukan H. Muchsin.

Apa yang dapat dikonsepsikan berkaitan dengan motif keberhasilan memobilisasi usaha dagangnya melalui hubungan-hubungan sosial yang lebih bersifat informal. Misalnya, mereka membuat kelompok-kelompok arisan untuk penambahan modal usaha dagang dan belanja barang dagangan. Dengan cara yang demikian itu, maka ketika mereka berangkat belanja barang dagangan, seperti ke Makassar, Surabaya, atau Jakarta dilakukan secara bergilir, sehingga meringankan biaya perjalanan mereka. Penguatan institusionalisasi hubungan-hubungan sosial informal dalam pengembangan ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo, adalah berlangsung di

pasar dan di masjid. Keberadaan dari kedua institusi itu (ekonomi dan agama), menjadi pusat aktivitas mereka dalam mengembangkan perdagangan. Pasar sebagai institusi ekonomi selain berfungsi menjadi tempat transaksi jual-beli barang dan jasa; juga sekaligus sebagai area yang terbuka untuk berlangsungnya inter-aksi sosial dan mengakses berbagai informasi yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Demikian pula masjid bagi orang Gu-Lakudo, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah; tetapi juga menjadi pusat informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk untuk pengembangan usaha dagang, atau menyelesaikan persoalan yang muncul di internal etnisitas mereka.

### ***3. Jaringan Sosial Eksternal***

Pasar dan masjid, secara internal menjadi pusat aktivitas kehidupan orang Gu-Lakudo, baik dari aspek pengembangan usaha ekonomi perdagangan maupun dalam kehidupan beragama. Inilah sebabnya, jika ada pertanyaan untuk mendapatkan jawaban: mengapa orang Gu-Lakudo selalu berupaya membangun kompleks pemukiman mereka—khususnya untuk di kota Bau-Bau—cenderung berdekatan dengan pasar dan masjid? Karena memang keberadaan kedua institusi sosial tersebut, menjadi “simbol utama” bagi keberhasilan mereka sebagai migran desa-kota dalam melakukan proses transformasi sosial ekonomi yang berorientasi perdagangan. Dengan pengertian lain, bahwa keberadaan kedua institusi itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsolidasi untuk penguatan basis sosial mereka sebagai komunitas urban; tetapi juga menjadi semacam “muara” bagi terbukanya akses informasi dan pengembang jaringan sosial perdagangan.

Namun, kedua institusi tersebut bagi orang Gu-Lakudo menjadi pusat pengembangan jaringan perdagangan. Misalnya, ketika orang Gu-Lakudo mulai membuka akses hubungan kerja sama—dalam bentuk kepercayaan—dengan para pedagang Tionghoa, karena terjadinya inter-aksi sosial mereka di sekitar pasar dan masjid. Dalam hal ini, orang Gu-Lakudo mengembangkan aktivitas perdagangan di pasar dan kehidupan beragama mereka di masjid; sementara itu kompleks pertokoan pedagang Tionghoa pun berada di sekitar pasar dan masjid. Dengan kondisi seperti ini, maka intensitas hubungan inter-aksi sosial antara pedagang Tionghoa dengan orang Gu-Lakudo terjalin dengan baik. Hal ini, berlanjut pada hubungan kepercayaan dalam mengembangkan usaha perdagangan. Sehingga bagi orang Gu-Lakudo dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari para pedagang Tionghoa untuk memperdagangkan barang-barang mereka, yang disebut sebagai bentuk perdagangan “barang komisi”. Terbangunnya hubungan

yang demikian ini antara dengan pedagang Tionghoa dengan orang Gu-Lakudo—khususnya dikota Bau-Bau—karena kecenderungan mereka yang berorientasi pada bentuk jaringan sosial ekonomi yang lebih bersifat informal. Artinya, dalam proses pengembangan basis-basis perdagangan orang Tionghoa di berbagai kota di Indonesia, senantiasa membangun jaringan kepercayaan dengan pelaku ekonomi lokal.

Oleh karena itu, melalui proses inter-aksi sosial yang berlangsung di kota Bau-Bau, khususnya di pasar dan masjid, orang Gu-Lakudo dapat mengakses informasi untuk menjalin hubungan kerja sama dalam pengembangan ekonomi perdagangan dengan pihak lain. Dalam hal ini, para pedagang Gu-Lakudo seperti halnya pedagang Tionghoa, memanfaatkan jaringan sosial untuk mengembangkan usaha perdagangan, meskipun masih dalam skala kecil.

Misalnya, keberhasilan H. Harun dan juga adik iparnya ketika mereka mulai mengalihkan usaha dagangnya pada penjualan meubel, sebelumnya terlebih dulu mereka menjalin hubungan dengan pedagang Bugis. Selanjutnya, mereka dihubungkan dengan perusahaan *olimpic* di Makassar untuk menjalin kerja sama perdagangan meubel. Demikian juga keberhasilan H. Muchsin membangun usaha jasa ekspedisi di Bau-Bau, karena berhasil menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan jasa ekspedisi di Surabaya dan Jakarta. Sedangkan H. Abas Mustafa ikut terlibat dalam kepemimpinan partai politik, tujuannya adalah untuk semakin memperluas jaringan pelanggan usaha dagangnya.

## **E. Basis Perdagangan Orang Gu-Lakudo**

### ***1. Awal Mengembangkan Usaha Dagang***

Sejak orang Gu-Lakudo mulai melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* ke kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an, secara umum mereka tidak didukung dengan kesiapan modal finansial untuk mulai mengembangkan usaha dagang. Kalau toh di antara mereka ada yang memiliki sedikit modal awal maka dapat dikategorikan dalam jumlah yang terbatas. Demikian juga generasi *kaum migran* mereka yang terus berdatangan untuk mengadu nasib keberuntungan di wilayah perkotaan. Mereka terobsesi oleh ajaran keagamaan Abdul Syukur yang lebih bersifat transformatif dan membentuk “etos kewirausahaan” mereka dalam upaya pengembangan usaha dagang.

Dengan demikian, kehadiran mereka sebagai *kaum migran*, terlebih dulu berhadapan dengan tantangan kehidupan. Selain mereka mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

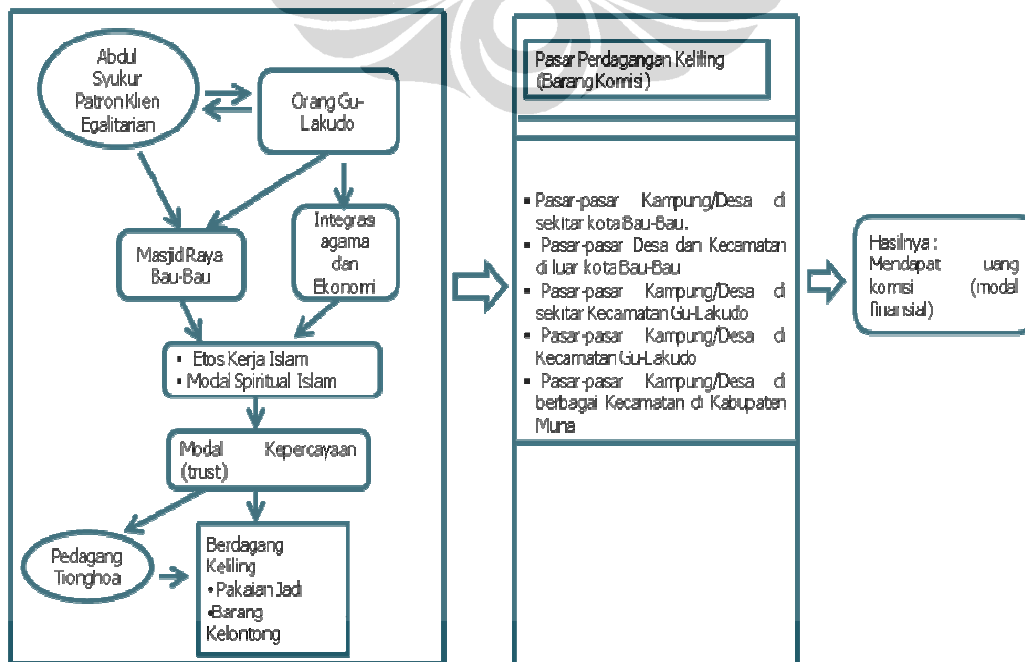
sehari-hari, juga bagaimana caranya mendapatkan modal awal agar bisa berdagang. Problem seperti ini, agaknya sudah merupakan konsekwensi logis dari keberadaan *kaum migran* pada umumnya di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Sedangkan bagi orang Gu-Lakudo sendiri, mengatasi hal tersebut dengan caranya masing-masing, agar bisa bertahan hidup dan memiliki akses untuk berdagang.

Karena itu, terkait dengan upaya awal mereka dalam pengembangan usaha perdagangan di kota Bau-Bau, maka dapat dikategorikan: (1) mereka yang memiliki sedikit modal; dan (2) mereka yang sama sekali tidak memiliki modal. Mereka yang tergolong didukung sedikit modal usaha, mulai mengembangkan aktivitas perdagangan, meskipun masih dalam skala kecil. Misalnya, ada yang berdagang hasil bumi dan laut ke Makassar dan Surabaya. Namun, ada juga yang mulai berdagang di pasar sentral Bau-Bau, termasuk di pinggir-pinggir jalan sekitar pasar, dan juga pelabuhan penyebrangan sebagai PKL.

Sementara itu, bagi mereka yang tidak memiliki modal usaha dagang hanya dapat mengandalkan kepercayaan dari pihak lain, terutama orang China. Bagi *kaum migran* orang Gu-Lakudo yang termasuk dalam kategori ini, mereka mengambil barang dagangan dari pedagang Tionghoa untuk diperdagangkan di kampung-kampung dan desa, di sekitar kota Bau-Bau. Lalu mereka mendapatkan sejumlah komisi dalam persentase yang telah disepakati bersama dari hasil penjualan barang-barang yang diperdagangkan.

Bagan 5.7

Tahap awal Orang Gu-Lakudo di Kota Bau-Bau (1970-an—1980-an)



Uraian berikut ini, setidaknya dapat memberikan gambaran tentang keuletan dan perjuangan *kaum urban* orang Gu-Lakudo, dalam memulai usaha perdagangan mereka di kota Bau-Bau.

(1) **Kasus H. Mansyur.** Sebagai salah seorang generasi awal orang Gu-Lakudo yang melakukan *urbanisasi* pada tahun 1960-an,<sup>8</sup> Mansyur memiliki sedikit modal untuk memulai usaha dagang. Dengan mendapatkan “pinjaman tanpa bunga” dari KH, Abdul Syukur, kemudian dia mulai berdagang hasil bumi dan laut ke Surabaya, dengan menggunakan transportasi laut (*perahu layar*). Karena itu, walaupun usaha perdagangannya terus berjalan, tetapi dalam perkembangannya cukup lamban. Disebabkan keuntungan yang diperoleh untuk diporsikan kembali sebagai modal usaha dagang berikutnya, adalah membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang.

Apa yang dialami oleh Mansyur tersebut, terkait dengan begitu lamanya perjalanan ke Surabaya. Dengan menggunakan perahu layar yang hanya digerakkan oleh tiupan angin tanpa mesin, sehingga sampai berbulan-bulan di tengah laut, sejak berangkatnya hingga tiba kembali di Bau-Bau. Kondisi ini, kemudian berakibat pada stagnannya perkembangan usaha dagang hasil bumi dan laut yang sudah dirintisnya. Namun, dengan kenyataan itu justru seakan menantanginya untuk mencari alternatif usaha dagang yang lain dan memungkinkan untuk terus dikembangkan.

Karenanya, dengan mendapatkan sedikit pinjaman modal dari BNI 46 Bau-Bau, maka tahun 1970-an Mansyur mengalihkan usaha perdagangannya dari hasil bumi dan laut pada “penjualan pakain jadi”. Dengan dukungan transportasi laut, yang ketika itu sudah mulai beroperasi kapal-kapal perintis Pelni, memungkinkan bagi Mansyur untuk berangkat ke Makassar dan Surabaya, agar bisa berbelanja sendiri berbagai kebutuhan barang dagangan. Akibatnya positifnya, dalam beberapa tahun kemudian usaha dagang pakain jadi yang digelutinya terus berkembang. Sehingga, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan pakaian jadi ini, yang telah mengantarkannya untuk pergi menunaikan *ibadah haji* ke tanah suci Mekkah.

---

<sup>8</sup>Pada waktu berlangsungnya penelitian ini, ketika peneliti berkunjung ke rumah H. Mansyur dan mencoba melakukan wawancara dengannya, sudah dalam kondisi usia lanjut atau 83 tahun. Karena itu, sudah tidak aktif dalam usaha perdagangan. Dan kelanjutan usaha dagangannya diserahkan kepada anak-anaknya yang berminat mengembangkan aktivitas perdagangan (H. Mansyur, Wawancara di Bau-Bau, 2 Februari 2008).

Usaha dagang pakaian jadi tersebut terus digeluti sampai memasuki “usia pensiun” sebagai seorang pedagang. Kemudian usaha dagangnya diserahkan pada anak-anaknya untuk dilanjutkan. Sementara itu, H. Mansyur sendiri mengisi masa tuanya menjadi imam di masjid agung kota Bau-Bau. Adapun prinsip hidup yang menyemangati aktivitas kesehariannya ketika menggeluti usaha perdagangan selama 40 tahun, adalah: “menyelaraskan keseimbangan hidup, antara kepentingan dunia dan akhirat”. Dan pandangannya tentang bagaimana kaitan antara pengembangan ekonomi dengan agama, Mansyur mencontohkan pengalaman dirinya dalam berdagang. Apa yang dipraktikkan ketika masih aktif mengembangkan usaha dagang, adalah: sikap jujur, ulet, kerja keras, hemat, dan rajin bersedekah. Menurutnya, sedekah bukan untuk mengurangi harta kekayaan yang dimiliki, tetapi sebaliknya bisa berlipat ganda asal diyakini kebenarannya, kemudian disertai dengan usaha dan ikhtiar (H. Mansyur, Wawancara di Bau-Bau, 2 Pebruari 2008).

- (2) **Kasus H. Baharuddin.** Sebelum melakukan *urbanisasi* untuk tinggal menetap di kota Bau-Bau, sejak usia remaja (1950-an) sudah terlebih dulu merantau ke Ambon. Di kota yang menjadi tujuan dari kebanyakan perantau orang Buton dan Wakatobi ini, Baharuddin mengaktifkan diri di masjid Al-Fatah, sebagai seorang remaja masjid. Karenanya, diperbolehkan untuk tinggal di samping masjid tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mempelajari agama dari para ulama Islam yang ada di masjid Al-Fatah Ambon. Selain itu dengan keaktifannya di masjid, memudahkan Baharuddin untuk mendapat informasi tentang peluang mencari pekerjaan di pasar. Karena yang menjadi obsesinya adalah bisa mendalami ajaran agama Islam, sambil mengembangkan usaha dagang. Untuk itu, maka Baharudin pun bekerja serabutan, agar bisa mengumpulkan uang yang akan dijadikan sebagai modal awal untuk berdagang.

Namun, setelah beberapa tahun di Ambon dan sudah mendapatkan cukup modal awal untuk memulai usaha perdagangan, Baharuddin pulang kampung. Karena itu, di daerah asalnya Gu-Lakudo, dengan hasil yang dapat dikumpulkan selama merantau ke Ambon, maka memungkinkan baginya untuk mulai mengembangkan usaha dagang. Sambil berdagang antar-kampung dan desa. Baharuddin memperdalam ilmu agamanya pada KH. Abdul Syukur dan KH. Muhammad Asy'ary. Dan pada akhir tahun 1960-an, bersama generasi awal *kaum urban* orang Gu-Lakudo lainnya, mereka meninggalkan daerah asalnya untuk menetap tinggal di Bau-Bau, mengikuti ajakan Abdul Syukur. Tujuannya, adalah



untuk memperluas jangkauan wilayah pengembangan usaha dagang mereka. Karena kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Oleh karena itu, setelah mereka berada di Bau-Bau dan mulai mengembangkan usaha dagang, Baharuddin sudah memiliki modal awal. Artinya, dia telah memiliki “modal finansial” untuk berdagang. Yang diperlukan ketika memulai usaha dagang di kota, adalah kemampuan bagi pedagang dalam mencermati keadaan pasar sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan oleh pembeli. Karenanya, menurut Baharuddin kemampuan seorang pedagang untuk mencermati pasar sangat diperlukan, agar dapat mengetahui kebutuhan dasar pembeli, barang-barang seperti apa yang diperlukan.

Ternyata dari hasil pengamatannya di pasar terhadap kecenderungan konsumen, baik oleh masyarakat kota Bau-Bau sendiri maupun para pembeli yang datang dari berbagai desa dan kecamatan. Mereka mulai tertarik pada kebutuhan sekunder, seperti pakaian jadi dan berbagai alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi ini tercipta, adalah juga berkaitan dengan kepedulian pemerintah kabupaten Buton. Tahun 1970-an membangun pasar dua lantai di pusat kota Bau-Bau, yang dijadikan sebagai sarana perdagangan bagi para pedagang. Dan pasar inilah yang pada awalnya menjadi basis pengembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo. Baharuddin pun mulai berdagang pakaian jadi dan berbagai bentuk barang lainnya yang sejenis, seperti: kopiah hitam, sajadah, mukena, dll. Dengan usaha perdagangan yang terus digelutinya ini, hingga memberikan kesempatan baginya untuk menunaikan *ibadah haji*.

Namun, setelah aktif berdagang selama tiga puluh tahun lebih di pasar Bau-Bau, H. Baharuddin menyerahkan usaha dagangnya pada anak-anaknya untuk dilanjutkan. Sedangkan dia sendiri terfokus pada aktivitas keagamaan, seperti pelaksanaan ibadah di masjid, menyebarkan syiar Islam di kampung-kampung/desa sekitar Gu-Lakudo. Dan juga berperan sebagai penuntun *haji* bagi para calon *jema'ah haji* kota Bau-Bau, khususnya terhadap komunitas *urban* orang Gu-Lakudo (H. Baharuddin, Wawancara di Masjid Raya Bau-Bau, 15 Desember 2007).

- (3) **Kasus H. Harun.** Pada tahun 1958, Harun menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bau-Bau, dan kemudian 1959 masuk Pendidikan Guru Agama (PGA). Tetapi baru satu tahun menjalani pendidikan di PGA, Harun meninggalkan pendidikannya untuk merantau ke Malaysia dan bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, pindah

pekerjaan di kapal penangkap ikan. Namun, hampir sepuluh tahun berada di Malaysia, hingga memutuskan untuk pulang ke kampungnya, Gu-Lakudo sekitar tahun 1966, Harun tanpa membawa hasil (*uang*) seperti yang diharapkan sebelumnya.

Dalam keadaan kesulitan permodalan awal untuk mulai berdagang di Bau-Bau, Harun mendapatkan kepercayaan dari pedagang Tionghoa. Oleh karenanya, diperbolehkan mengambil barang dagangan dari toko mereka untuk diperdagangkan di kampung-kampung dan desa, dengan ketentuan mendapat komisi setelah barang dagangan laku terjual. Model perdagangan seperti ini, yang diistilahkan oleh orang Gu-Lakudo sebagai berdagang “barang komisi”. Artinya, hanya dengan modal kepercayaan (*trust*), mereka dapat mengambil barang-barang dagangan dari para pedagang Tionghoa untuk diperdagangkan. Yang secara sosio-ekonomik dapat dikonsepsikan sebagai bentuk “simbiosis mutualisme” karena kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan.

Karena itu, peluang tersebut dimanfaatkan oleh Harun untuk berdagang keliling kampung dan desa. Barang yang didagangkan adalah diambil dari toko-toko China di Bau-Bau. Dengan kesepakatan bersama, bahwa setelah barang dagangan sudah terjual Harun mendapat komisi. Bentuk perdagangan dengan cara menjual barang komisi ini, dijalankannya hingga tahun 1970-an.

Setelah memiliki sedikit modal finansial yang didapatkan dari hasil perdagangan barang komisi tersebut, kemudian beralih pada usaha dagang hasil laut. Karenanya tahun 1973, Harun berangkat ke Taliabo untuk lebih mengembangkan perdagangan hasil laut di kepulauan Maluku tersebut. Namun, usaha dagang yang baru digelutinya ini, tidak juga membawa keberuntungan seperti yang diharapkannya. Sehingga tahun 1975, Harun pulang ke Gu-Lakudo. Dan selanjutnya, memulai berdagang secara menetap di pasar sentral Bau-Bau.

Dengan mendapatkan kepercayaan dari pedagang Tionghoa—seperti sebelumnya—Harun berdagang barang-barang kelontong. Kemudian mendapatkan kredit dari BRI Bau-Bau (1978), sehingga memungkinkan untuk dijadikan modal awal dalam pengembangan usaha dagang. Kesempatan tersebut, mendorong Harun untuk mengalihkan usaha dagangnya dari barang kelontong pada pakaian jadi. Namun, setelah itu kemudian beralih lagi pada perdagangan perabot rumah tangga, seperti rak piring dan ranjang besi. Tahun 1982 hingga 1987, dengan mendapat tambahan pinjaman modal dari BRI, Harun mulai fokus pada usaha

perdagangan *meubel* dan *kursi plastik*. Dengan usaha yang baru digelutinya tersebut, kemudian mengantarkannya untuk berhubungan dagang dan sekaligus mendapat kepercayaan dari perusahaan *meubel olimpik* di Makassar. Bentuk usaha dagang ini terus dikembangkan, hingga menarik saudara iparnya yang juga telah sukses berdagang *meubel olimpik* di kota Bau-Bau. Dan sebagai tempat usaha dagang mereka—Harun dan saudara iparnya—masing-masing sudah menggunakan toko dan gudang tersendiri.

Sebagaimana orientasi kehidupan *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo pada umumnya, bahwa keberhasilan pada pengembangan usaha perdagangan makin memberikan motivasi yang kuat untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Demikian juga halnya Harun, isteri, dan saudara ipar bersama isterinya, mereka pun telah menunaikan *ibadah haji* (H. Harun, Wawancara di Bau-Bau, 5 Pebruari 2008).

- (4) **H. Radeni.** Salah seorang dari pedagang Gu-Lakudo yang juga dapat dikategorikan cukup sukses ini, bukan termasuk generasi pertama yang melakukan urbanisasi ke kota Bau-Bau. Tetapi sudah tergolong generasi berikutnya, yang datang di kota itu. Menurut pengakuannya, sejak masih di Sekolah Dasar di Gu-Lakudo, obsesinya untuk berdagang sudah mulai tumbuh. Karena selain termotivasi oleh cita-citanya untuk meraih sukses dalam usaha ekonomi perdagangan—seperti *kaum* kerabatnya yang sudah duluan tinggal di kota Bau-Bau—juga bertolak dari kesulitan hidup ekonomi keluaraganya di Gu-Lakudo.

Karenanya, sambil bersekolah di SD, Radeni juga berjualan rokok dan makanan ringan. Dan setelah melakukan urbanisasi tahun 1970-an, semangat dagangannya makin terasah. Sehingga, ketika melanjutkan pendidikan di SMP Bau-Bau, Radeni masih tetap menekuni usaha dagang rokok dan makanan ringan pada malam hari di sekitar pelabuhan, dengan menggunakan *kotak papan* yang dilengkapi *lampu teplok*. Usaha dagang kecil-kecilan ini, terus digelutinya hingga tamat SMEA Bau-Bau. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA tersebut, Radeni bukannya terobsesi untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi. Melainkan berupaya untuk memperluas segmen usaha dagangannya di bidang lain, seperti penjualan sembako, meskipun harus menggunakan kios yang berukuran kecil.

Namun, dalam perkembangannya, tempat usaha dagang yang dirintisnya terus diperluas, dengan cara membeli tanah yang memang letaknya cukup strategis dalam pengembangan usaha dagang. Dengan demikian, maka perkembangan usaha dagang Radeni makin pesat. Sehingga mengantarkannya untuk menunaikan *ibadah haji*. Selain itu, Radeni

juga diangkat menjadi PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau dan mendapatkan gelar kesarjanaan (S-1).

Memasuki tahun 2000-an, usaha dagangnya lebih dikembangkan lagi menjadi *mini market* yang menjual barang campuran, jasa foto copy, dan rental computer. Selain itu, membeli lokasi penjualan pakaian jadi dan barang-barang hiasan di Mall Umna Rijoli Bau-Bau. Agar tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai PNS, maka pengelolaan usaha dagangnya diserahkan pada keluarganya (anak, keponakan, dan isteri). Oleh karenanya, H. Radeni merupakan salah seorang dari *kaum urban* orang Gu-Lakudo di Bau-Bau, yang berhasil mengintegrasikan dua profesi, yakni sebagai pedagang dan sekaligus menjadi PNS. Menurutnya, keuletan, kesabaran, dan kepercayaan, serta ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjadi semacam pilar-pilar yang sangat kuat untuk mewujudkan obsesi mereka ketika mengembangkan usaha ekonomi perdagangan (H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau, 17 Pebruari 2008).

- (5) **Kasus H. Abas Mustafa.** Sebagaimana halnya Radeni, Abas Mustafa sudah termasuk generasi berikutnya dari orang Gu-Lakudo yang melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*. Bahkan sebelum tinggal menetap di Bau-Bau, sejak kecil sudah merantau ke Ambon, hingga menamatkan SD dan SMP di kota itu. Abas mulai merintis usaha dagang dengan cara menjual rokok keliling selama dua tahun. Kemudian dilanjutkan bekerja di hotel Ablali Ambon, juga selama dua tahun.

Pada tahun 1970-an, Abas Mustafa terobsesi untuk menjalin hubungan sebagai langganan dengan pemilik kebun ubi-ubian di pedalaman Maluku, untuk dijual ke kota Ambon. Dengan cara ini, Abas pun mendapat keuntungan yang cukup lumayan untuk dikembangkan sebagai modal usaha dagang. Selanjutnya, dia mendapatkan kepercayaan dari pedagang kain dan pakain jadi di pasar kota Ambon. Karenanya, mendorong Abas untuk berdagang “barang komisi” di pedalaman Maluku. Aktivitas perdagangan seperti ini, dilakukan adalah bertepatan dengan datangnya musim panen cengkeh. Namun, perkembangan usaha dagangnya masih mengalami pasang-surut. Oleh karena itu, tahun 1979 Abas Mustafa ke Maluku Tenggara, karena mendapat kepercayaan dari orang China untuk berdagang pakain jadi, yang digelutinya hingga tahun 1982.

Setelah beberapa tahun berdagang pakaian jadi di Maluku Tenggara, kemudian Abas Mustafa meninggalkan wilayah itu untuk melanjutkan perantauan ke propinsi Timor-Timur. Di kota Dili—dengan modal usaha dagang seadanya—mulai mencari akses untuk mengembangkan perdagangan pakaian jadi. Karenanya, untuk mendorong mobilitas usaha dagangnya, maka sejak tahun 1983 Abas secara intens melakukan perjalanan ke Surabaya dan Jakarta. Dengan tujuan, agar bisa berbelanja sendiri di pasar Turi dan Tanah Abang, berbagai kebutuhan barang dagangan yang akan dijual di pasar kota Dili dan kota lain di Timor-Timur.

Menurutnya, selama mengembangkan perdagangan di ibu kota Timor-Timur ini, usaha dagangnya terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai akibat positifnya, semakin menguatkan modal usaha yang digelutinya. Karena itu, selain menambah intensitas dan mobilitas perdagangannya, juga memberikan peluang bagi Abas dan isterinya untuk berangkat menunaikan *ibadah haji*. Namun, setelah kembali dari tanah suci Mekkah (1994), kondisi politik lokal di Timor-Timur sudah tidak kondusif. Yang kemudian berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan terhadap kehidupan warga-masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi perdagangan. Dengan keadaan seperti ini, maka mendorong Abas Mustafa untuk memutuskan kembali ke Bau-Bau (1996) dan membangun basis usaha dagang yang baru. Karena menurutnya, sudah tidak memungkinkan untuk tetap bertahan di Timor-Timur. Meskipun setelah sepuluh tahun lebih (1982—1995) Abas berdagang pakaian jadi di kota Dili, usaha dagangannya mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Setelah kembali ke Bau-Bau, maka untuk memulai aktivitasnya berdagang Abas Mustafa membeli tempat (*los-petak*) di pasar La Elangi. Lalu membeli sebidang tanah di pusat kota dan kemudian membangun toko tiga lantai sebagai pusat pengembangan usaha dagangnya dan menjadi kantor partai politik (PNBK) yang dipimpinnya. Terkait dengan hal ini, agaknya memang sosok Abas Mustafa tidak hanya bergelut dengan usaha dagang, melainkan juga memasuki “dunia politik praktis”, meskipun menurutnya tidak terobsesi untuk menjadi anggota DPRD. Namun, keterlibatannya dalam konteks perpolitikan lokal, adalah untuk membangun relasi sosial dan sekaligus memperluas jaringan usaha dagangannya. Menurutnya dengan model seperti ini, yang juga mendukung keberhasilan usaha dagangnya, ketika masih berada di Timor-Timur. Di kota Dili, misalnya, Abas

menjadi salah seorang pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>9</sup> Salah satu manfaat yang mendukung perkembangan usaha dagangnya, ketika terlibat dalam kepengurusan partai politik, adalah membuka jaringan pelanggannya secara lebih luas. Di kota Bau-Bau, dengan bangunan tokonya yang cukup besar, Abas menjual pakaian jadi, sandal-sepatu, pakaian olah raga serta berbagai kelengkapannya. Sementara itu, di samping luar pertokoannya, dibuka usaha jasa perbengkelan (H. Abas Mustafa, Wawancara di Bau-Bau, 23 Pebruari 2008).

- (6) **Kasus H. Muchsin.** Demikian juga halnya Muchsin, termasuk generasi belakangan yang melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*. Sebagaimana Abas Mustafa, sebelum membangun basis usaha dagangnya di Bau-Bau, Muchsin sejak kecil sudah merantau ke Ambon, hingga menyelesaikan pendidikan SLTA di kota tersebut. Oleh karena itu, maka pengalaman dagangnya pun memang dimulai di Ambon. Menurutnya, ketika itu selain harus tetap aktif bersekolah, Muchsin juga membantu kerabatnya berdagang di pasar.

Setelah tamat SMA dan mulai menikah (1978), Muchsin pun turut membantu mertuanya berjualan pakaian jadi di pasar kota Ambon, Namun pada tahun 1981, dia memutuskan untuk kembali ke Bau-Bau, meskipun belum memiliki modal awal untuk mulai berdagang secara mandiri. Oleh karena itu, Muchsin berperan sebagai seorang “agen perbelanjaan” barang-barang dagangan bagi orang Gu-Lakudo dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bau-Bau. Selain itu, Muchsin juga mulai menjalin hubungan baik dengan pegawai Bank dan Kantor Pelni.

Akibatnya, Muchsin mendapatkan dua kesempatan sekaligus terkait dengan pengembangan usaha perdagangan. *Pertama*, mendapat pinjaman modal dari BNI 46 Bau-Bau. Dengan modal awal yang dimilikinya, Muchsin mulai mengembangkan usaha dagang pakaian jadi di pasar La Elangi. Yang kemudian, diserahkan kepada isterinya untuk dikelola lebih lanjut. *Kedua*, Muchsin juga mendapat dukungan dari Pelni Bau-Bau, untuk mulai

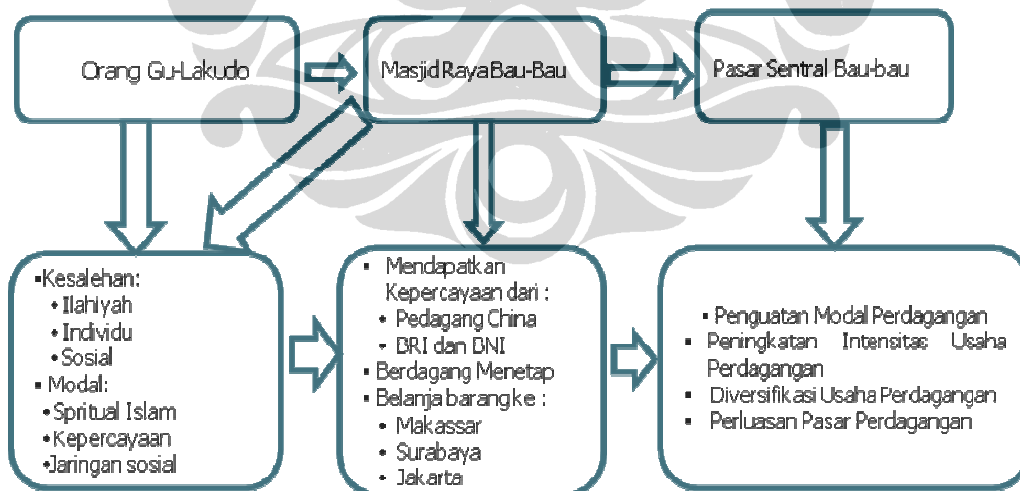
---

<sup>9</sup>Ketika peneliti melakukan wawancara dengan H.Abas Mustafa di lantai 3 tokonya di kota Bau-Bau, salah satu pertanyaan saya kepadanya, “apa yang memotivasi bapak, sehingga memadukan aktivitas perdagangan dengan kegiatan politik?” H. Abas menjawab: “untuk membangun relasi dagang!” Kemudian dia memberi contoh konkrit, bahwa dirinya sejak tahun 2006 dipercaya oleh para pengurus PNBK kota Bau-Bau untuk menjadi Ketua Partai. “Meskipun saya tidak memenuhi syarat untuk jadi anggota DPRD, tapi relasi dagang saya semakin banyak. Teman-teman, baik di partai kami atau pun partai lain serta pejabat pemerintah yang menjadi kenalan saya, ketika membutuhkan barang yang diinginkan mereka datang belanja ke sini. Kecuali persediaan saya tidak ada, baru mereka mencari ke tempat lain”. Terkait dengan konteks ini dan berpijak dari pengalamannya selama di Timor-Timur, agaknya H. Abas cukup berhasil membangun “jaringan usaha dagangnya melalui relasi elite politik”.

merintis pembukaaan usaha jasa ekspedisi. Dengan perkembangan kedua jenis usahanya ini, maka mengantarkan Muchsin dan isterinya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan *ibadah haji*, sebagaimana kecenderungan para pedagang Gu-Lakudo pada umumnya.

Di Bau-Bau, H. Mucsin sudah memiliki bangunan toko sendiri, yang sekaligus berfungsi sebagai kantor ekspedisi yang dirintisnya. Menurutny, sejak mulai merintis usahanya hingga sekarang ini, perkembangannya cukup pesat. Yang kemudian disertai dengan proses difersivikasi usaha yang dilakukannya. Misalnya perdagangan pakaian jadi di pasar La Elangi, jasa ekspedisi (Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta), pengisian air minum, pengumpulan barang bekas, dan angkutan becak, semuanya berjalan lancar. Selain itu, Muhsin bersama kelompoknya membentuk dan mengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terhadap para pedagang Gu-Lakudo. Dengan demikian, anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha perdagangan, tidak lagi harus meminjam ke Bank, tetapi sudah melalui kesiapan dana pinjaman koperasi yang dikelolanya, dengan bunga 1 % (H. Muhsin, Wawancara di Bau-Bau, 15 Pebruari 2008).

Bagan 6.7  
Tahap Lanjut Orang Gu-Lakudo di Kota Bau-Bau (1980-2000-an)



2.  
*Pedagang Gu-*

*Lakudo di Kota Bau-Bau*

Mencermati bagaimana *kaum urban* orang Gu-Lakudo mengembangkan aktivitas perdagangan mereka di kota Bau-Bau, maka dapat dikelompokkan dalam empat kategori.

- (1) *Pedagang Gu-Lakudo*, yang memang secara khusus mereka mengembangkan usaha dagangnya di tiga pasar kota itu (La Elangi, Karya Nugraha, Mal Umna Rijoli). Bagi mereka yang berdagang pada salah satu pasar tersebut, dari aspek kemampuan modal finansial sudah cukup memadai untuk mendukung perputaran usaha dagang mereka. Karena ketiga pasar itu, dibangun oleh kalangan swasta. Sehingga, bagi para pedagang yang ingin mendapatkan tempat berjual, maka memerlukan modal awal berkisar antara Rp. 75 juta hingga Rp. 250 juta. Misalnya untuk membeli tempat di pasar Nugraha, harganya mencapai Rp. 75 jutaan. Sedangkan di pasar La Elangi, seharga Rp. 100 juta sampai Rp. 150 juta. Dan di Mal Umna Rijoli, berkisar antara Rp. 200 juta hingga Rp. 250 juta. Salah seorang pedagang di Mal Umna, H. Buchari, membeli dua petak sekaligus dengan harga Rp. 450 juta, untuk menjual pakaian jadi. Artinya, kebutuhan modal finansial bagi para pedagang menengah ke bawah, adalah cukup lumayan besar. Karena, belum lagi jika ditambah dengan kebutuhan modal untuk pembelian barang-barang dagangan di Makassar, Surabaya, dan Jakarta.
- (2) *Pedagang Gu-Lakudo*, yang mengembangkan usaha perdagangannya pada bangunan pertokoan yang mereka bangun. Sebagaimana halnya keberadaan pedagang China, para pedagang Gu-Lakudo yang berdagang di toko-toko mereka, tentu saja memiliki kemampuan permodalan yang sudah cukup kuat dibanding mereka yang berdagang di pasar. Karena mereka selain harus membeli tanah-tanah permukiman di pusat kota dengan harga yang cukup mahal, juga kebutuhan permodalan untuk pengadaan barang-barang dagangan. Adapun segmen usaha dagang mereka adalah bervariasi, seperti: konveksi, alat-alat olah raga, meubel, barang-barang campuran, dan bahan bangunan.<sup>10</sup>
- (3) *Pedagang Gu-Lakudo*, yang memiliki dua tempat sekaligus, yaitu: toko dan di pasar. Bagi para pedagang yang masuk dalam kategori ini, adalah mereka yang sudah didukung dengan kemampuan modal usaha yang kuat. Dengan jenis barang-barang dagangan yang memang dominan diperdagangkan para pedagang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau. Karenanya, ada yang hanya terfokus pada perdagangan barang konveksi, baik di pasar maupun di toko mereka. Namun, ada juga yang mengembangkan usaha dagang yang berbeda dengan di pasar dan di toko mereka. Artinya, selain mereka berhasil membangun pertokoan, seperti untuk

---

<sup>10</sup>Dari hasil observasi lapangan ketika berlangsungnya penelitian, ada beberapa segmen usaha dagang yang masih didominasi oleh para pedagang China, misalnya: bahan bangunan, elektronik, perdagangan hasil bumi dan laut, serta kendaraan bermotor, seperti sepeda motor.



penjualan barang-barang campuran, meubel, dll, juga memiliki tempat berdagang barang konveksi di pasar.<sup>11</sup>

(4) *Pedagang Gu-Lakudo*, yang tidak memiliki toko atau pun tempat berdagang di tiga pasar (La Elangi, Nugraha, dan Mal Umna). Mereka ini yang mengembangkan usaha dagangnya di luar ketiga pasar tersebut. Yang secara sosiologis, mereka berada pada lapis bawah stratifikasi sosial ekonomi *kaum urban* Gu-Lakudo, di kota Bau-Bau. Karena kemampuan permodalan yang mereka miliki masih sangat terbatas untuk mengembangkan usaha dagangnya sebagaimana para pedagang yang lainnya. Oleh karena itu, mereka dapat dikategorikan sebagai para pedagang kecil di perkotaan. Adapun barang-barang dagangan yang mereka perdagangkan, umumnya yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, misalnya beras eceran, gula lokal, bawang merah, makanan kemasan, rokok, dan lain-lain.

### **3. Perdagangan di Tiga Pasar Kota Bau-Bau**

Kota Bau-Bau, dengan ketersediaan sarana pengembangan ekonomi perdagangan yang dimilikinya, seperti bangunan pasar dan pelabuhan laut yang cukup strategis, menjadi faktor pendukung bagi elemen-elemen masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan. Pasar Karya Nugraha dan La Elangi yang berbentuk semi-modern, serta Mall Umna Rijoli sebagai pasar modern, ketiganya merupakan pasar utama yang menjadi pusat pengembangan usaha dagang di kota Bau-Bau. Karenanya, intensitas perdagangan barang dan jasa di tiga pasar tersebut, berlangsung cukup marak. Meskipun juga harus disertai dengan kepadatan warga kotanya, baik yang memang tinggal di kota itu, atau pun yang datang dari berbagai wilayah lain, dalam rangka melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Kondisi kepadatan kota Bau-Bau semakin tampak dan terasa sesak, mulai di sekitar pasar hingga di los-los tempat para pedagang melayani pembeli, ketika memasuki bulan *suci ramadhan* dan menghadapi *idul fitri*.

Namun, dengan kondisi tersebut justru membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Karena omset penjualan barang dagangan mereka mengalami peningkatan dari biasanya. Maraknya aktivitas perdagangan di kota Bau-Bau, adalah juga terkait dengan posisinya sebagai salah satu kota dagang di Sulawesi Tenggara. Yang kemudian dalam perkembangannya,

---

<sup>11</sup>H. Radeni, misalnya, selain memiliki toko *Indomaret* yang dikelola oleh anak dan keponakannya sebagai tempat penjualan barang-barang campuran, *foto copy*, dan *rental komputer*, namun juga memiliki tempat berdagang barang-barang konveksi di Mal Umna Rijoli. Radeni, Wawancara di Bau-Bau 17 Februari 2008.

menjadi pusat perdagangan di wilayah pulau Buton, Muna, Kabaena, Wakatobi, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.

Lalu bagaimana dengan aktivitas perdagangan orang Gu-Lakudo pada tiga pasar utama di kota Bau-Bau? Agaknya secara sosio-ekonomik, mereka dapat dikategorikan mendominasi kegiatan usaha perdagangan di pasar Karya Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli. Kecenderungan tersebut, tentu saja didukung dengan hasil studi lapangan yang dapat diformulasikan dalam bentuk data-data kuantitatif. Yang memberikan gambaran tentang keberadaan para pedagang dari berbagai etnik pada tiga pasar di kota Bau-Bau, termasuk orang Gu-Lakudo.

### **3. 1. Pasar Karya Nugraha**

Ketika terjadinya kebakaran pasar sentral kota Bau-Bau tahun 1990, maka tentu saja merugikan para pedagang. Sehingga, tahun 1993 dari kalangan swasta membangun pasar Karya Nugraha. Dengan konstruksi bangunannya terdiri dari dua lantai. Dan sebagai sebuah pasar yang baru dibangun dengan bentuk semi-modern, kemudian merangsang para pedagang untuk berdagang di pasar tersebut. Oleh karena itu—sebagaimana hasil studi lapangan—maka dari aspek etnisitas setidaknya ada 11 kelompok etnik/sub-etnik yang beraktivitas melakukan perdagangan barang dan jasa di pasar tersebut. Berbagai etnik tersebut adalah: orang Buton, Gu-Lakudo, Wadiabero, Lamena, Baruta, Wakatobi, Siompu, Kadatua, Kabaena, Bugis-Makassar, dan pedagang Tionghoa.

*Gambar. 5. 7.*

**Pedagang Gu-Lakudo di pasar Karya Nugraha, Bau-Bau.**



**Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Bau-Bau (2008).**

Dari kelompok etnik yang disebutkan itu, umumnya mereka berdagang barang-barang kebutuhan *sekunder*. Meskipun demikian, ada juga para pedagang yang memperjual-belikan barang-barang kebutuhan pokok atau *primer*, seperti sembako dan lain-lain. Tabel berikut ini, dapat memberikan gambaran bagaimana komposisi para pedagang di pasar Karya Nugraha kota Bau-Bau.

*Tabel 4. 7.*

Komposisi pedagang menurut kategori *etnisitas* dan *variasi* barang dagangan di Pasar Karya Nugraha, Kota Bau-Bau.

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Etnis</b>	<b>Frekwensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pakaian Jadi/Tas	Buton, Gu/Lakudo, Wadiabero, Lamena, Wakatobi, Bugis Makassar, Baruta, Siompu	62	43.97
Sembako/Beras	Lamena, Wakatobi, Bugis Makassar, Kabaena	15	10.64
Sendal/Sepatu	Buton, Gu/Lakudo, Wadiabero, Lamena, Baruta, Kadatua	25	17.73
Elektronik	Gu/Lakudo, China	10	7.09
Peca Belah	Buton	3	2.13
Tekstil	Wadiabero	1	0.71
Kosmetik	Gu/Lakudo, Wadiabero, Wakatobi, Baruta	15	10.64
Barang Imitasi	Buton, Gu/Lakudo	8	5.67
Jasa Travel	Buton, Gu/Lakudo	2	1.42
<b>T o t a l</b>		<b>141</b>	<b>100</b>

*Sumber: Diolah dari data lapangan, 2007 / 2008*

Dengan rangkaian data kuantitatif yang disajikan pada tabel di atas, memberikan gambaran bahwa komposisi pedagang yang secara formal berdagang di pasar tersebut, berjumlah 152 orang. Yang secara etnisitas, mereka terdiri dari para pedagang: Buton 8 orang, Gu-Lakudo 42 orang, Wadiabero 41 orang, Lamena 7 orang, Wakatobi 8 orang, Bugis-Makassar 9 orang, China 1 orang, Baruta 17 orang, Siompu 5 orang, Kadatua 2 orang, dan Kabaena 3 orang. Selain itu, dari komposisi para pedagangnya yang demikian itu, orang Gu-Lakudo dan Wadiabero cenderung mendominasi aktivitas perdagangan di pasar Karya Nugraha, Bau-Bau.

### **3. 2. Pasar La Elangi**

Maraknya aktivitas perdagangan yang berlangsung di kota Bau-Bau, maka pada tahun 1997 mendorong kalangan swasta untuk membangun pasar La Elangi, yang juga konstruksi bangunannya terdiri dari dua lantai. Karena itu, sebagaimana keberadaan pasar Karya Nugraha, konstruksi bangunan pasar La Elangi pun dapat dikategorikan berbentuk semi-modern. Dengan demikian, maka bagi para pedagang yang memiliki kemampuan modal finansial dan terobsesi untuk berdagang di pasar La Elangi yang baru terbangun itu, mereka harus membeli los-los tempat usaha dagang pada kalangan swasta yang membangunnya.

*Gambar 6. 7.*

**Pedagang Gu-Lakudo di Pasar La Elangi, Bau-Bau.**



**Sumber:** Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Bau-Bau (2008).

Berdasarkan hasil studi lapangan, setidaknya ada tujuh kelompok etnik atau pun sub-etnik yang mengembangkan usaha perdagangan di pasar tersebut. Dan keterlibatan mereka dalam pengembangan usaha perdagangan, tentu saja sesuai dengan kemampuan rasionalitas mereka dalam hal membaca peluang pasar dan kemampuan modal finansial yang mereka miliki. Komposisi para pedagang di pasar La Elangi, adalah: orang Buton, Gu-Lakudo, Wadiabero, Baruta, Wakatobi, Bugis-Makassar, dan Minang.

Tabel 5. 7.

Komposisi pedagang menurut kategori *etnisitas* dan *variasi* barang dagangan di Pasar La Elangi, Kota Bau-Bau.

Jenis Usaha	Etnis	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
Pakaian Jadi/Tas	Buton, Gu/Lakudo, Wadiabero, Wakatobi, Minang, Baruta	130	79.75
Sendal / Sepatu	Gu/Lakudo, Wadiabero, Bugis Makassar	25	15.34
Jasa Wartel	Buton	1	0.61
Mainan	Gu/Lakudo	2	1.23
Rokok	Gu/Lakudo	2	1.23
Kosmetik	Gu/Lakudo, Baruta	3	1.84
<b>T o t a l</b>		<b>163</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2007/2008

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, memberikan gambaran tentang komposisi pedagang—menurut kategori etnik—di pasar La Elangi, Bau-Bau. Dari sejumlah 158 orang yang berdagang di pasar tersebut, pedagang Gu-Lakudo 81 orang, Wadiabero 31 orang, Buton 19 orang, Wakatobi 12 orang, Baruta 10 orang, Bugis- Makassar 2 orang, dan Minang 2 orang. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pedagang Gu-Lakudo masih mendominasi aktivitas perdagangan di pasar La Elangi, kota Bau-Bau. Dengan barang dagangan mereka yang masih tetap dominan, adalah pakaian jadi dan juga sendal-sepatu.

### 3. 3. Mall Umna Rijoli

Sebagaimana di pasar Karya Nugraha dan La Elangi, Mall Umna Rijoli pun dibangun oleh kalangan swasta pada tahun 2005, yang mengikuti *trend* pasar modern di berbagai kota besar di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Mall Umna Rijoli dapat dikategorikan sebagai pasar modern yang ada di kota Bau-Bau. Bagi para pedagang yang terobsesi untuk turut berdagang di pasar tersebut, tentu saja membutuhkan modal awal yang cukup besar. Karena untuk membeli satu tempat berdagang, harganya berkisar antara Rp. 200 juta hingga Rp. 250 juta.

**Gambar 7.7**  
**Pedagang Gu-Lakudo di Mall Umna Rijoli, Bau-Bau.**



**Sumber:** Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Bau-Bau (2008).

Namun demikian, dari hasil studi lapangan setidaknya ada 11 etnik/sub-etnik yang berdagang di Mall Umna Rijoli, kota Bau-Bau. Mereka adalah terdiri dari: orang Buton, Wadiabero, Lamena, Wakatobi, Bugis-Makassar, Tionghoa, Baruta, Siompu, Kadatua, dan Kabaena. Dengan tabel berikut ini, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana komposisi para pedagang yang mengembangkan usaha dagangannya di Mall Umna Rijoli.

*Tabel 6.7.*

Komposisi pedagang menurut kategori *etnisitas* dan *variasi* barang dagangan di Mall Umna Rijoli, kota Bau-Bau.

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Etnis</b>	<b>Frekwensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pakaian Jadi	Buton, Gu/Lakudo, Wadiabero, Lamena, Wakatobi, Bugis Makassar, Baruta, Siompu	73	62.39
Sembako	Lamena, Wakatobi, Bugis Makassar, Kabaena	4	3.42
Sendal-Sepatu	Buton, Gu/Lakudo, Wadiabero, Lamena, Baruta, Kadatua	27	23.08
Elektronik	Gu/Lakudo, China	3	2.57
Peca Belah	Buton	1	0.85
Tekstil	Wadiabero	1	0.85
Kosmetik	Gu/Lakudo, Wadiabero, Wakatobi, Baruta	4	3.42
Barang Imitasi	Buton, Gu/Lakudo	2	1.71
Jasa Travel	Buton, Gu/Lakudo	2	1.71
<b>T o t a l</b>		<b>117</b>	<b>100</b>

*Sumber:* Diolah dari data lapangan, 2007/2008

Dari rangkaian data kuantitatif yang ditampilkan pada tabel di atas, memberikan suatu gambaran yang lebih jelas terhadap keterlibatan para pedagang di Mall Umna Rijoli, kota Bau-Bau. Komposisinya adalah pedagang Buton 13 orang, Gu-Lakudo 57 orang, Wadiabero 12 orang, Lamena 11 orang, Wakatobi 4 orang, Bugi-Makassar 4 orang, China 1 orang, Baruta 3 orang, Siompu 1 orang, Kadatua 5 orang, dan Kabaena 6 orang. Melalui komposisi perdagangan seperti yang tampak pada tabel tersebut, agaknya dapat dikonsepsikan bahwa dari para pedagang Gu-Lakudo, tetap juga mendominasi aktivitas perdagangan di Mall Umna Rijoli, Bau-Bau.

#### **4. Difersivikasi Segmen Usaha Perdagangan**

Perkembangan usaha perdagangan orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, semakin memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perluasan (*difersivikasi*) segmen usaha perdagangan barang dan jasa yang diperdagangkan. Kalau pada awalnya (1960-an—1970-an),

mereka hanya terfokus pada perdagangan pakaian jadi (konveksi) dan barang-barang kelontong. Namun, setelah memasuki dekade 1990-an para pedagang Gu-Lakudo pun sudah mulai mengembangkan usaha perdagangan di bidang lain. Memang, kemampuan mereka dalam hal memasuki serta mengembangkan *segmen* usaha perdagangan barang dan jasa pada bidang lain—selain pakaian jadi dan barang kelontong—bukan dipicu oleh “kekuatan modal finansial” yang mereka miliki. Sebagaimana dominannya para pedagang Tionghoa dalam perdagangan di berbagai kota di Indonesia. Melainkan lebih terkait dengan saling terintegrasinya antara konteks internal dan eksternal dalam perkembangan struktur usaha perdagangan di kota Bau-Bau.

Pada yang internal misalnya, adalah berkaitan dengan kemampuan para pedagang dari orang Gu-Lakudo sendiri, ketika mereka mencoba untuk menangkap dan menginternalisasi “peluang pasar” dalam perdagangan barang dan jasa, khususnya di kota Bau-Bau. Yang kemudian didorong “keuletan individual mereka” sebagai bentuk “motivasi diri” untuk memanfaatkan dan memaksimalkan peluang tersebut dalam berupaya mengembangkan usaha perdagangan di wilayah perkotaan. Kemampuan dan keuletan H. Harun, H. Abas Mustafa, dan H. Muchsin dalam membaca peluang pasar, misalnya, setidaknya dapat dimasukkan dalam kategori internal tersebut.

Sementara itu, dari konteks eksternalnya adalah berkaitan dengan pergeseran struktur perdagangan yang berlangsung di kota Bau-Bau. Menurunnya mobilitas perdagangan dari orang Buton asli, Wakatobi, dan komunitas *migran* orang Bugis-Makassar, serta makin tersegmentasinya usaha perdagangan dari masing-masing etnik, termasuk yang dilakukan pedagang China. Dengan kondisi tersebut, agaknya telah membuka ruang sosial ekonomi perdagangan bagi para pedagang Gu-Lakudo untuk memaksimalkan kemampuan penetrasi usaha dagang mereka, termasuk melakukan *difersivikasi* usaha perdagangan mereka di Bau-Bau. Pedagang Tionghoa misalnya, cenderung tidak lagi mendominasi semua *segmen* usaha perdagangan di kota ini, seperti pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Demikian juga halnya bagi orang Buton asli, jika pada tahun 1970-an orientasi generasi mereka dalam hal mengembangkan usaha perdagangan masih cukup tinggi,<sup>12</sup> namun setelah dekade 1990-an sudah

---

<sup>12</sup>Ketika peneliti masih bersekolah di SMA 1 Bau-Bau (1978—1980), secara pengamatan bebas peneliti dapat melihat bagaimana maraknya keterlibatan orang Buton asli dalam perdagangan, mulai dari barang pecah-belah dan alat-alat rumah tangga lainnya, sembako, hasil bumi dan laut, bahkan hingga jasa ekspedisi. Ini dilakukan oleh orang Buton asli yang tinggal di sekitar kota Bau-Bau, seperti: Ngangana-umala, Kaobula, Wameo, Bone-Bone, Wajo, dan Lamangga. Namun, setelah memasuki dekade 1990-an, secara kuantitatif mulai tampak menurun. Analisis yang dikembangkan oleh peneliti terkait dengan fenomena tersebut adalah bersentuhan dengan sistem nilai budaya Buton



mulai tampak menurun. Hal ini boleh jadi berkaitan dengan perubahan sudut pandang generasi orang Buton sendiri sebagai implikasi dari proses modernisasi dan pembangunan, yang mampu mengalihkan orientasi pandangan hidup mereka pada pilihan profesi lain. Fenomena yang demikian ini, memiliki kemiripan dengan penyebab menurunnya mobilitas perdagangan dari *kumunitas urban* dan *migran* orang Wakatobi di kota Bau-Bau. Proses regenerasi para pedagangnya mengalami stagnasi dan bahkan cenderung merosot. Sebagai penyebab utamanya, adalah anak-anak para pedagang dari etnik lokal Wakatobi tersebut, setelah berhasil menempuh pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi lebih memilih profesi kehidupan lain, ketimbang terobsesi untuk melanjutkan usaha perdagangan yang telah dirintis dan dibangun oleh orang tua mereka dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Bagi *kaum migran* Bugis-Makassar, berbeda kasusnya dengan orang Buton asli dan Wakatobi, berkaitan dengan konteks “penurunan mobilitas” perdagangan mereka di kota Bau-Bau, setelah memasuki tahun 1990-an hingga 2000-an ke atas. Dalam suatu penuturan tokoh masyarakat Bugis-Makassar, yang juga pernah berkiprah selama hampir 30 tahun dalam mengembangkan usaha perdagangan perhiasan emas, adalah bernama H. Kamhar. Menurutnya, bahwa perkembangan usaha dagang mereka di kota Bau-Bau, memang sejak memasuki decade 1990-an sudah mulai tampak menurun.<sup>13</sup> Salah satu penyebab utamanya—menurut H. Kamhar—mereka mulai mengalami keterbatasan modal finansial untuk mendorong perkembangan usaha perdagangan yang mereka kelola. Namun, selain itu ada juga di antara para pedagang Bugis-Makassar yang mengalihkan modal usahanya ke kota lain. Atau, kalau tidak lagi berdagang secara langsung di pasar, mereka membuka lahan perkebunan dan tambak ikan di wilayah pedesaan.

---

tentang stratifikasi sosial. Dalam pengertian, bahwa super-struktur masyarakat Wolio bukan pada kemampuan finansial secara ekonomi, tetapi pada kualitas SDM di pemerintahan atau pun berbagai bentuk profesi lain dalam konteks kemodernan. Karena memang, sejak masa lampau orang Buton asli sudah mendudukkan prestise seseorang pada kemampuannya berperan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan kesultanan Buton, bukannya pada keunggulan secara ekonomi yang yang diperoleh melalui hasil perdagangan. Dengan kecenderungan seperti ini, maka pengembangan usaha perdagangan bagi orang Buton asli, hanya menjadi “penyokong” untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan selanjutnya memilih profesi kehidupan lain, sesuai dengan bakat mereka. Akibat jangka panjangnya, adalah “terputusnya mata rantai perdagangan” bagi orang Buton asli sendiri di kota Bau-Bau.

<sup>13</sup>Pada tahun 1970-an, H. Kamhar sebagai salah seorang pedagang perhiasan emas dari komunitas *migran* orang Bugis-Makassar, yang skala usahanya cukup lumayan besar. Karena selain memiliki toko perhiasan emas di pasar sentral Bau-Bau, di rumahnya menjadi semacam “bengkel pengolahan emas” untuk dijadikan perhiasan. Sewaktu peneliti masih sekolah di SMA 1 Bau-Bau (1978), sering melewati rumah dan tokonya, serta menyaksikan bagaimana aktivitas perdagangan emasnya di kota itu. Namun, ketika peneliti bertemu dengannya dan meminta informasi terkait dengan perkembangan usaha perdagangan orang Bugis-Makassar di kota Bau-Bau selama hampir 30 tahun ini, dia mengatakan: “Saya sudah lama tidak berdagang perhiasan emas lagi” (H. Kamhar, Wawancara di Bau-Bau, 25 Februari 2008).

Tetapi, fenomena lain yang juga berkaitan dengan proses penurunan mobilitas perdagangan bagi *kaum migran* orang Bugis-Makassar di kota Bau-Bau, adalah makin termobilisasinya berbagai *sub-etnik lokal* lain di wilayah pulau Buton dan Muna untuk melakukan migrasi ke kota Bau-Bau. Kemudian mereka turut mengembangkan usaha perdagangan, walaupun mereka harus memulainya dari lapisan bawah struktur ekonomi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu, maka struktur perdagangan di kota Bau-Bau, komposisinya semakin bervariasi, menurut kategori *etnisitas*.

Menurunnya mobilitas perdagangan orang Buton asli, Wakatobi, dan *kaum migran* orang Bugis-Makassar, menjadi salah factor penyebab terjadinya pergeseran struktur ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau. Selain itu, juga makin meningkatnya kecenderungan dari berbagai *sub-etnik lokal* lain di sekitar wilayah pulau Buton dan Muna untuk melakukan *migrasi*, selanjutnya ikut berkompetisi dalam dunia usaha perdagangan.

Dengan kecenderungan tersebut, maka merupakan peluang yang cukup positif bagi para pedagang Gu-Lakudo yang telah memiliki kemampuan modal finansial untuk lebih meningkatkan mobilitas perdagangan mereka di kota Bau-Bau. Yang kemudian memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perluasan atau difersivikasi segmen usaha perdagangan. Kalau sebelumnya, mereka hanya terkonsentrasi pada penjualan pakaian jadi, sandal-sepatu, dan barang kelontong; selanjutnya memasuki segmen usaha lain, seperti: meubel, alat kebutuhan rumah tangga dari alminium, bahan bangunan, jasa ekspedisi, dan lain-lain.

## **F. Perluasan Akses Pasar Perdagangan**

Meningkatnya mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo di wilayah perkotaan yang berlangsung sejak tahun 1970-an, makin merangsang generasi mereka untuk melakukan *migrasi*, khususnya ke kota Bau-Bau. Selanjutnya, berkiprah dalam kegiatan usaha perdagangan. Namun, tentu saja proses ini membawa implikasi yang luas bagi perkembangan kota, terutama pada aspek fisik dari “ruang kota”. Karena yang melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*, bukan hanya orang Gu-Lakudo. Tetapi juga berbagai kelompok *etnik* atau *sub-etnik lokal* lainnya, mereka memasuki kota untuk berkiprah dalam kehidupan yang lebih kompetitif, khususnya pada aspek sosial ekonomi. Sehingga, bagi *kaum urban* orang Gu-Lakudo sendiri yang telah mengalami proses pematangan dalam pengembangan ekonomi perdagangan, perlu mencari peluang pasar di

daerah lain. Dan terbukanya peluang dagang di kota lain di Sulawesi Tenggara, seperti yang mereka tangkap adalah di kota Raha dan Kendari.

Karenanya, ada tiga faktor mendasar yang dapat dijadikan sebagai obyek analisis, mengapa orang Gu-Lakudo terdorong untuk melakukan ekspansi pasar perdagangan di kota lain di Sulawesi Tenggara. Ketiga faktor tersebut, adalah: (1) terkait dengan struktur fisik kota Bau-Bau; (2) persaingan yang makin ketat dalam perdagangan; dan (3) terbukanya peluang dagang di kota lain di Sulawesi Tenggara.

*Pertama*, terkait dengan struktur fisik kota Bau-Bau. Dalam proses perkembangan kota tersebut, adalah semakin mengalami tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan penambahan warga kota yang memang sulit terkendali, sebagai akibat dari proses *migrasi* desa-kota yang tidak sebanding dengan kesiapan ruang fisik perkotaan. Hal ini mendorong elemen-elemen masyarakatnya untuk melakukan kompetisi terhadap penguasaan area pemukiman yang strategis dan pengembangan usaha ekonomi, terutama perdagangan.<sup>14</sup> Sebagai konsekuensi logisnya, maka bagi kebanyakan *kaum migran* yang secara ekonomi masih tergolong lemah, tentu saja memiliki kesulitan untuk melakukan kompetisi terhadap penguasaan segmen usaha perdagangan. Terkait dengan faktor ini juga yang kemudian mempengaruhi mengapa tingkat mobilitas perdagangan *kaum migran* orang Bugis-Makassar menjadi menurun.

*Kedua*, persaingan yang semakin ketat dalam pengembangan usaha perdagangan. Akibatnya, struktur sosial ekonomi masyarakat kota Bau-Bau mengalami segmentasi sebagai akibat dari proses persaingan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan dari berbagai etnik. Dengan kecenderungan seperti ini, maka mendorong orang Gu-Lakudo yang belum memiliki kemampuan untuk ikut bersaing secara terbuka dan profesional dalam perdagangan, mendorong mereka untuk mencari akses ke kota lain, hingga keluar Sulawesi Tenggara.

*Ketiga*, terbukanya peluang dagang di kota lain, dan khususnya di Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka menarik minat orang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha dagang mereka. Meskipun sebelum benar-benar mereka memindahkan usaha dagangnya, terlebih dulu melakukan semacam eksplorasi awal untuk mengetahui dengan jelas adanya peluang pasar di kota lain. Penggunaan metode yang demikian ini, seperti yang dilakukan oleh H. Yusuf dan kelompoknya sesama pedagang Gu-Lakudo. Sebelum mereka mulai berdagang

---

<sup>14</sup>Menurut informasi dari salah seorang pejabat Bappeda kota Bau-Bau, menyatakan bahwa “harga tanah” di kotanya bukan hanya yang tertinggi di banding kota-kota lain di Sulawesi Tenggara, tetapi bahkan sudah sebanding dengan harga tanah di kota Makassar (M. Zain, Wawanacara di Bau-bau, 2 September 2008).

secara menetap di pasar Raha, tahun 1995 mereka melakukan penjejakan awal untuk mengetahui persis tentang adanya peluang pasar di kota tersebut. Demikian juga halnya di kota Kendari.

### ***1. Pedagang Gu-Lakudo di Kota Raha***

Sekelompok kecil pedagang Gu-Lakudo yang sebelumnya berdagang di Bau-Bau, mulai melakukan penjejakan awal ke kota Raha. Ini berlangsung sekitar tahun 1995-an. Pada dekade ini, pemerintah kabupaten Muna membangun pasar sentral yang letaknya di tengah kota dan dekat pelabuhan laut yang menghubungkan antar-kota di Sulawesi Tenggara (Kendari, Raha, dan Bau-Bau). Karena itu, setelah mereka mengetahui dengan jelas tentang adanya peluang pasar dan mendapatkan tempat untuk berdagang, mereka mulai mengembangkan usaha dagangnya secara menetap di pasar sentral Raha. Dalam perkembangannya, diikuti oleh para pedagang Gu-Lakudo lainnya, yang datang secara bergelombang dari Bau-Bau.

Untuk mendukung mobilitas perdagangannya, maka mereka juga mulai membeli tanah-tanah kosong yang ada di sekitar pasar untuk membangun rumah tempat tinggal. Selain itu, mereka pun ikut membantu pembangunan masjid yang lokasinya berdekatan dengan pasar. Karena sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan mereka sebagai *kaum muslim*, bahwa *pasar* dan *masjid* merupakan dua institusi yang secara fungsional saling terintegrasi, tanpa harus terjadi dikotomis antara keduanya.

Namun, setelah para pedagang Gu-Lakudo berdagang beberapa tahun di pasar sentral Raha, justru pasar tersebut mengalami kebakaran hingga dua kali. Yang tentu saja, dengan kejadian ini merugikan para pedagang, termasuk *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo. Karena itu, pemerintah kabupaten Muna membangun kembali pasar sentral, meskipun tempatnya dipindahkan di Laino, yang letaknya berada di pesisir pantai timur kota Raha. Dengan demikian, maka mendorong para pedagang untuk ikut pindah ke pasar yang baru dibangun oleh pemerintah kabupaten Muna tersebut.

Sementara itu, bagi kebanyakan pedagang orang Gu-Lakudo sendiri memerlukan penyesuaian kembali dengan kondisi yang ada. *Pertama*, mereka harus membeli tanah-tanah kosong yang ada di sekitar pasar untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Sebab, dengan upaya tersebut memudahkan akses mereka pada aktivitas perdagangan di pasar. *Kedua*, mereka juga perlu membangun *masjid* yang baru di tengah kompleks permukiman yang mereka tempati di bagian barat pasar Laino, kota Raha. Hal ini dilakukan oleh para pedagang Gu-Lakudo, adalah sebagaimana halnya di tiga pasar utama di kota Bau-Bau, untuk mendukung aktivitas

peribadatan mereka dan perdagangan yang mereka geluti. Karena bagi orang Gu-Lakudo, keberadaan masjid yang berdekatan dengan pasar, merupakan suatu hal yang urgen terkait dengan orientasi kehidupan mereka sebagai pelaku ekonomi perdagangan.

*Gambar. 8. 7.*

**Pedagang Gu-Lakudo di pasar Laino, Raha.**



**Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian di Raha (2008).**

Dengan berdasarkan data-data kuantitatif yang dapat diakses dalam penelitian lapangan, maka melalui tabel berikut ini setidaknya dapat memberikan suatu gambaran terhadap komposisi pedagang menurut etnisitas di pasar Laino. Oleh karena yang melakukan perdagangan di pasar tersebut, adalah mereka yang berasal dari: orang Muna, Bugis-Makassar, Gu-Lakudo, Baruta, Minang, Bugis-Muna, dan Jawa-Muna.

*Tabel 7.7*

Komposisi pedagang menurut kategori *Etnik* dan *variasi* barang dagangan

di Pasar Sentral Laino, Kota Raha.

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Etnis</b>	<b>Frekwensi (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pakaian Jadi / tas	Muna, Bugis-Makassar, Gu-Lakudo, Baruta, Jawa - Muna	208	66.03
Sembako / Beras	Muna	17	5.40
Sendal / Sepatu	Muna, Bugis – Maksar, Gu - Lakudo	24	7.62
Pecah Belah	Muna, Gu – Lakudo, Baruta, Minang	21	6.67
Kosmetik	Gu/Lakudo	7	2.22
Barang Imitasi	Muna	5	1.59
Aksesoris	Muna, Bugis – Maksar, Bugis - Muna	13	4.13
Alat Olahraga	Muna, Gu - Lakudo	2	0.63
Meja - Kursi	Minang	2	0.63
Poster	Bugis - Maksar	1	0.32
Alat Ruma Tangga	Muna	10	3.17
Alat Tulis	Muna, Bugis - Maksar	5	1.59
<b>Total</b>		<b>315</b>	<b>100</b>

*Sumber:* Diolah dari data lapangan, 2007/2008.

Dari komposisi pedagang yang ada di pasar Laino, yang berjumlah 305 orang adalah dapat dirinci: pedagang Muna 211 orang, Bugis-Makassar 12 orang, Gu-Lakudo 67 orang, Baruta 6 orang, Minang 3 orang, Bugis-Muna 5 orang, dan juga Jawa-Muna 1 orang. Berdasarkan data kuantitatif yang ditampilkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa para pedagang dari etnik Muna dengan jumlah 211 orang mendominasi aktivitas perdagangan di pasar

sentral Laino kota Raha, bila dibandingkan dengan etnik-etnik lain, termasuk pedagang Gu-Lakudo yang hanya berjumlah 67 orang.

Secara sosio-ekonomik, fenomena mobilitas perdagangan masyarakat di kota Raha berbeda dengan di Bau-Bau dan Kendari. Kalau di dua kota yang disebutkan terakhir ini, perkembangan usaha perdagangan cenderung dinamis. Sebaliknya di Muna, perdagangan masyarakatnya justru stagnan. Berkaitan dengan hal ini, adalah bahwa kota Raha sebagai ibu kota kabupaten Muna tidak berkembang menjadi “kota dagang” seperti halnya kota Bau-Bau. Karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini para pedagang Gu-Lakudo sudah banyak yang memindahkan usaha dagang mereka ke kota lain, khususnya Kendari. Menurut H. Yusuf, yang juga sebagai pedagang Gu-Lakudo di pasar Laino Raha, bahwa usaha dagang mereka sangat lamban perkembangannya, bila dibandingkan dengan yang ada di kota Bau-Bau. Dalam pengakuannya, H. Yusuf hanya berupaya mempertahankan usaha dagangnya yang sudah dibangunnya puluhan tahun, termasuk yang digelutinya di pasar Laino Raha hingga sekarang ini.<sup>15</sup>

## **2. Pedagang Gu-Lakudo di Kota Kendari**

Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkembangannya sekitar sepuluh tahun terakhir ini (1997—2007) menunjukkan fenomena perkembangannya menjadi “kota dagang” sebagaimana halnya kota Bau-Bau. Dengan kecenderungan yang demikian ini, maka menarik minat dari berbagai etnik lokalnya untuk melakukan *migrasi* ke kota

---

<sup>15</sup>Di pasar tradisional Laino sebagai tempat pengembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo dan pedagang lainnya di kota Raha, sekitar 5 tahun terakhir ini mobilitas perdagangannya tampak mengalami kelesuan, dalam arti aktivitas perdagangan tidak berlangsung secara dinamis. Pada -3 memasuki hari raya *idul fitri* 2008 misalnya, peneliti melakukan pengamatan langsung di pasar tradisional ini untuk menangetahui dengan lebih jelas bagaimana maraknya transaksi jual-beli antara pedagang dengan pembeli ketika mendekati hari lebaran, ternyata tidak seperti yang diharapkan, dan justru kebanyakan para pedagang mengeluhkan kondisi ini. Menurut informasi yang didapat oleh peneliti dari pedagang Gu-Lakudo, bahwa kerabat mereka sudah banyak yang tinggalkan pasar Laino-Raha, kalau mereka tidak kembali ke Bau-Bau, pindah ke Kendari. Dari analisis peneliti, terciptanya kondisi kelesuan perdagangan di pasar tradisional kota Raha, disebabkan oleh dua hal mendasar. *Pertama*, di level makro terkait dengan garis kebijakan politik pembangunan daerah kabupaten Muna yang belum berorientasi pada penguatan ekonomi perdagangan masyarakat. Akibatnya, mobilitas ekonomi masyarakat desa-kota menjadi stagnan. *Kedua*, pada level mikro pendapatan individu dan keluarga tergolong rendah. Kondisi ini berimplikasi pada daya beli kebutuhan konsumsi barang di pasar-pasar juga lemah. *Ketiga*, kebutuhan belanja barang elite masyarakat menengah ke atas, misalnya: pejabat pemerintah, anggota DPRD, dan pengusaha, lebih banyak dilakukan di kota-kota besar, seperti Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Hal ini berakibat pada kelesuan dinamika perdagangan di kota itu, karena perputaran modal finansial para pedagang di pasar cukup kecil; sementara itu kebutuhan belanja barang dan jasa lebih banyak beredar ke luar daerah.

Kendari, termasuk orang Gu-Lakudo. Tentu saja sebagai tujuannya adalah untuk berkiprah dalam pengembangan usaha perdagangan di kota itu, yang juga sebelumnya didominasi oleh etnik China dan Bugis Makassar. Dan sebagaimana awal kedatangan mereka di kota Raha, maka sekitar tahun 1995 mereka juga melakukan penjajakan agar bisa berdagang di kota Kendari.

Sebagaimana keberadaan para *migran* desa-kota dari etnik lokal lain, maka terbuka kesempatan bagi orang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha dagangnya di ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara itu. Dengan demikian, mereka mulai mengembangkan aktivitas perdagangan di pasar Baru Wua-Wua Kendari. Dalam perkembangannya, keberlangsungan datangnya para pedagang Gu-Lakudo di kota tersebut terus berlanjut, terutama setelah selesainya pembangunan Mal Mandonga sebagai pasar modern di kota itu.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dari sekian banyak pasar yang ada di kota Kendari, yang menjadi basis pengembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo adalah di pasar Baru Wua-Wua dan Mal Mandonga.

Namun, dari aspek pemukiman warga kota, agaknya mereka pun mengalami kesulitan tersendiri untuk membangun satu kompleks area tempat tinggal di sekitar pasar, seperti halnya di Bau-Bau atau pun Raha. Meskipun mereka cukup memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli tanah-tanah yang letaknya strategis di kota Kendari. Hal ini terkait dengan perkembangan wilayah perkotaannya yang telah mengalami kepadatan penduduk, yang disertai dengan penguasaan area pemukiman dari berbagai etnik lain, misalnya orang Muna dan Bugis-Makassar. Oleh karena itu, maka bagi orang Gu-Lakudo yang melakukan *migrasi* ke kota Kendari, mereka membangun tempat tinggal di sela-sela warga kota dari berbagai etnik lain. Dengan demikian, maka para pedagang Gu-Lakudo di kota itu, tidak terkonsentrasi dalam suatu area pemukiman yang berada di sekitar pasar dengan keberadaan masjid yang mereka bangun sendiri. Artinya, sebagai *kaum urban* yang belakangan datang di kota Kendari, mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi ruang fisik dan konteks sosial budaya dan perkembangan ekonomi masyarakat perkotaan yang telah berlangsung lama.

### **2. 1. Pasar Sentral Baru Wua-Wua**

Salah satu pasar yang ada di kota Kendari yang menjadi basis pengembangan usaha ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo, adalah di pasar sentral Wua-Wua. Mereka mulai

---

<sup>16</sup>Arus *migrasi* para pedagang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Kendari mengalami peningkatan ketika terjadi kerusuhan Ambon 1998. Tahun 1999—2000 mereka banyak yang pulang kampung, kemudian mencari kota lain untuk tetap berdagang dan mereka mendapat peluang di pasar Wua-Wua dan Mal Mandonga kota Kendari.



menjejak kemungkinan untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Kendari, sejak tahun 1990-an. Dan intensitas orang Gu-Lakudo yang datang untuk berdagang di pasar tersebut, setelah memasuki decade 2000-an, sebagai akibat dari kerusuhan Ambon tahun 1998. Keadaan ini juga diakui oleh kepala pasar sentral Wua-Wua, Kendari. Menurutnya, bahwa sarana pengembangan usaha perdagangan masyarakat ini, adalah dibangun oleh pemerintah kota Kendari, dengan konstruksi bangunannya yang berbentuk semi-modern. Namun, dengan kesiapan los-los pasar tempat berdagang yang berjumlah 600-an lebih, yang terisi hanya sekitar 500-an lebih pedagang.

Dengan kecenderungan tersebut, tentu saja berkaitan dengan minat para pedagang untuk mengembangkan aktivitas perdagangan mereka di pasar. Selain itu, terkait juga dengan kemampuan modal financial yang dimiliki elemen masyarakat pelaku ekonomi perdagangan. Namun, dengan kondisi yang demikian itu, justru membuka peluang bagi pedagang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha perdagangan di pasar Wua-Wua, Kendari. Dalam suatu perbincangan bebas peneliti dengan salah seorang pedagang Gu-Lakudo, menyatakan bahwa untuk membeli satu los-tempat berdagang di pasar Wua-Wua, harganya berkisar Rp. 70 juta hingga Rp. 100 juta. Bagi mereka dengan harga tersebut dapat terjangkau jika dibandingkan dengan di kota Bau-Bau, mulai dari 150 jutaan hingga mencapai 200 jutaan ke atas.

*Gambar. 9. 7.*

**Pedagang Gu-Lakudo di pasar sentral Wua-Wua, Kendari.**



*Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Kendari (2008).*

Sementara itu, bagi orang Tolaki sendiri sebagai etnik yang memang berasal dari daerah itu, justru tidak berperan dalam aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Dari tabel berikut ini, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana komposisi pedagang dan variasi barang dagangan mereka. Adapun para pedagang yang telah berdagang di pasar itu, adalah orang Bugis-Makassar, Gu-Lakudo, Buton, Muna, Jawa, dan Manado, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 8.7

Komposisi pedagang menurut kategori *Etnik* dan *variasi* barang dagangan di Pasar Baru Wua-Wua, Kendari.

Jenis Usaha	Etnis	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
Pakaian Jadi / tas	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa	197	33.56
Sembako / Beras	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna	11	1.87
Sendal / Sepatu	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna	165	28.11
Elektronik	Bugis-Makassar	3	0.51
Pecah Belah	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Manado	132	22.49
Salon	Muna	3	0.51
Kosmetik	Bugis-Makassar	25	4.26
Jamu	Jawa	1	0.17
Emas	Bugis-Makassar	30	5.11
Alat-alat Rumah Tangga	Gu/Lakudo	3	0.51
Aksesoris	Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa	17	2.90
<b>Total</b>		<b>587</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari data lapangan 2007/2008.

Dengan tampilan data kuantitatif pada tabel di atas, menunjukkan bahwa yang berdagang di pasar Wua-Wua Kendari berjumlah 514 orang. Secara etnisitas dapat dirinci: pedagang Bugis-Makassar 227 orang, Buton 148 orang, Gu-Lakudo 121 orang, Muna 10 orang, Jawa 6 orang, dan Manado 2 orang. Oleh karenanya, dengan komposisi di atas menunjukkan bahwa dari para pedagang Bugis-Makassar masih tetap mendominasi aktivitas perdagangan di pasar sentral Wua-Wua. Karena memang secara demografis dapat dijelaskan, sejak awal kota Kendari mengalami perkembangan dalam struktur ekonomi perdagangan, mereka sudah mengembangkan berbagai bentuk usaha dagang, sebagaimana halnya para pedagang Tionghoa.

### **3. 2. Mall Mandonga Kendari**

Pasar modern ini selesai dibangun pada tahun 2004 oleh kalangan swasta dengan konstruksi bangunan empat lantai. Sebagai salah satu pusat perdagangan yang ada di kota Kendari, dengan memiliki standar kualitas pasar modern, seperti keberadaan Mal, Plaza, dan Carrefour di berbagai kota besar pada umumnya, memiliki letak yang cukup strategis. Selain berada di poros jalan utama perkotaan, juga dikelilingi oleh pemukiman masyarakat, kompleks pertokoan, dan pasar tradisional serta semi-modern.

*Gambar. 10. 7.*

**Pedagang Gu-Lakudo di Mall Mandonga, Kendari.**



*Sumber: Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Kendari (2008).*

Oleh karenanya, bagi para pedagang yang menggunakan fasilitas tempat untuk berdagang di pasar modern atau Mall Mandonga tersebut, maka mereka sudah harus lebih dulu mengerluarkan modal awal berkisar Rp. 250 juta hingga Rp. 350 juta. Belum lagi modal yang diperlukan untuk pengadaan barang-barang dagangan yang tempat berbelanja mereka seperti di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Dengan demikian, maka bagi seorang pedagang yang berkeinginan untuk berdagang di pasar modern tersebut, memerlukan kemampuan permodalan yang cukup besar. Apalagi kalau barang-barang dagangannya—misalnya pakaian jadi dalam jenis yang bervariasi—adalah membutuhkan modal finansial yang besar bagi ukuran pedagang menengah ke bawah.

Namun demikian, secara etnisitas ada beberapa kelompok etnik yang berdagang di Mall Mandonga sebagai salah satu pasar modern di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Komposisi para pedagangnya, adalah: orang Bugis-Makassar, Gu-Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Manado, Ambon, Tolaki, Cina, Padang, Toraja, Bali, Wanci, Batak, Wawonii, Morunene, dan Menui. Dan tabel berikut ini, dapat memberikan gambaran terhadap komposisi pedagang yang beraktivitas dalam perdagangan di Mall Mandonga Kendari.

Tabel 9.7

Komposisi pedagang menurut kategori *Etnik* dengan *variasi* barang dagangan di Mall Mandonga Kota Kendari.

Jenis Usaha	Etnis	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
Pakain Jadi / tas	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Manado, Ambon, Tolaki, Cina, Padang, Toraja, Bali, Wanci, Batak, Wawonii, Menui	217	41.97
Sembako / Beras	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Muna	10	1.93
Sendal / Sepatu	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Manado	109	21.08

Elektronik	Bugis-Makassar, Muna	7	1.35
Pecah Belah	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Manado	31	6.01
Jamu	Jawa	1	0.19
Kosmetik	Bugis-Makassar, Muna, Ambon	19	3.68
Salon	Bugis-Makassar, Muna	5	0.97
Penjahit	Bugis-Makassar	2	0.39
Emas	Bugis-Makassar	13	2.51
Aksesoris	Bugis-Makassar, Gu/Lakudo, Buton, Muna, Jawa, Cina, Toraja, Bali	103	19.92
<b>Total</b>		<b>517</b>	<b>100</b>

*Sumber:* Data diolah dari data lapangan 2007/2008

Merujuk dari rangkaian data kuantitatif yang ditampilkan pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa begitu bervariasinya kelompok *etnisitas* yang berdagang di Mal Mandonga kota Kendari. Sejumlah 517 orang pedagang, justru terdiri dari 17 etnik sebagai *kaum urban* dan *migran* yang datang di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Komposisinya adalah: pedagang Bugis-Makassar 214 orang, Gu-Lakudo 138 orang, Buton 94 orang, Muna 40 orang, Jawa 7 orang, Manado 2 orang, Ambon 2 orang, Tolaki 7 orang, China 1 orang, Padang 2 orang, Toraja 2 orang, Bali 2 orang, Wanci 1 orang, Batak 1 orang, Wawonii 1 orang, Menui 1 orang, dan Morunene 1 orang.

Dengan komposisi para pedagang yang berdasarkan kategori *etnisitas* tersebut memberikan gambaran, bahwa keberadaan pedagang Bugis-Makassar yang berjumlah 214 orang cukup dominan dalam pengembangan usaha dagang di Mall Mandonga Kendari. Sementara itu, para pedagang Gu-Lakudo yang hanya sejumlah 138 orang, justru berada pada urutan kedua menurut kategori *etnisitas*. Memang maraknya kaum urban dan migran Gu-Lakudo, mengembangkan usaha perdagangan mereka di kota Kendari, adalah setelah terjadinya “konflik etnik” Ambon tahun 1998. Agaknya mereka lebih tertarik untuk kembali membangun basis-basis usaha perdagangan di ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut, ketimbang di kota Bau-Bau. Kecenderungan ini, tentu saja terkait dengan adanya peluang pasar pedagang yang mereka

tangkap di kota itu. Karenanya, sejak Mall Mandonga selesai dibangun (2005) hingga peneliti melakukan penelitian lapangan (2007/2008), pembelian tempat berdagang di pasar modern itu yang dilakukan pedagang Gu-Lakudo, masih terus berlangsung.

## **G. Jaringan Perdagangan Orang Gu-Lakudo**

Berkaitan dengan urgennya jaringan atau hubungan-hubungan sosial pada konteks pengembangan ekonomi perdagangan, agaknya memang merupakan suatu hal yang tidak harus dinafikan. Karenanya, maka konsep pemikiran teoretik Mark Granovetter (1985) tentang adanya kelekatan sosial (*embeddedness*) dalam setiap tindakan ekonomi, seakan membuka tabir lama terkait dengan pemikiran ekonomi *neo-klasik* yang bersifat formalis. Yang kecenderungannya mengabaikan hubungan-hubungan sosial dalam aktivitas kehidupan perekonomian masyarakat. Adanya kelekatan sosial tersebut, mengambil bentuk pada tindakan ekonomi individu dan kelompok dalam konteks tradisional atau modern, baik formal maupun informal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan jaringan sosial kemasyarakatan dalam kegiatan pengembangan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi pengetahuan yang membentuk perilaku ekonomi individu dan kelompok masyarakat.

Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh para pemikir sosial ekonomi *substantivis*, bahwa tindakan ekonomi dipengaruhi nilai-nilai sosial budaya dan agama, yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, maka “perilaku ekonomi” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Yang keberadaannya terkonstruksi dengan kuat dalam kehidupan sosial dan mengakar pada hubungan-hubungan kemasyarakatan. Terkait dengan hal ini maka pada konteks masyarakat tertentu, jaringan bisa menjadi instrumen yang kuat bagi pengembangan usaha ekonomi. Di negeri matahari terbit (Jepang), misalnya, para pengusaha—sebagai pelaku utama perdagangan dan industri—sejak di perguruan tinggi mereka sudah mulai membangun jaringan usaha yang kemudian dilanjutkan setelah terjun ke dunia bisnis (Robert W. Hefner, 1999).

Urgennya jaringan sosial berkaitan dengan kehidupan ekonomi, dalam fenomena empiriknya menguat mulai dari level institusi terkecil (*informal*) seperti keluarga, hingga institusi besar (*formal*), misalnya negara. Menurut Rochman Achwan (2004), pentingnya jaringan sosial pada level keluarga, misalnya dapat diamati bagaimana perkembangan kelompok ekonomi China perantauan. Sedangkan dalam konteks kenegaraan, seperti yang pernah

berkembang di Mexico, bahwa institusi akademik (*universitas*) difungsikan sebagai basis penguatan jaringan bagi penyebaran paham *neo-liberalisme* di negara itu.

Kembali pada urgennya jaringan sosial yang berbasis pada keluarga, adalah juga misalnya dapat dirujuk dari hasil studi Drajat Tri Kartono (2004) tentang kecenderungan orang Bawean yang merantau ke Malaysia. Gerakan perantau mereka ke negeri Jiran itu justru terkonstruksi dalam “jaringan keluarga”. Merantau bagi orang Bawean, tidak lagi hanya berorientasi pada perbaikan kehidupan ekonomi. Tetapi sudah terintegrasi dengan kuat dalam konstruksi budaya mereka. Menurut konsep Kartono sendiri, bahwa merantau adalah merupakan realitas sosial bagi kaum muda Bawean.

Fenomena lain yang cenderung menonjolkan kekuatan basis keluarga dalam membangun jaringan ekonomi adalah dari kalangan China perantauan. Menurut Robert Hefner (1999), setidaknya ada dua elemen mendasar yang mendukung terbangunnya jaringan perdagangan dari orang China perantauan. *Pertama*, jalinan hubungan keluarga yang bersifat *hierarkis*, baik pada basis “kekuatan keluarga inti” maupun dari “garis keturunan ayah” (*patrilineal*), sebagai bentuk sumber daya keluarga dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan. *Kedua*, jalinan hubungan kekerabatan yang cenderung melebar ke samping, yang diartikulasikan sebagai *guanxi*. Bentuk hubungan yang demikian ini, adalah suatu konstruksi jaringan dalam pengembangan bisnis China, yang berbasis pada ikatan kekerabatan yang bersifat egaliter dan timbal-balik. Sebagaimana pada keluarga inti dan garis keturunan ayah, jaringan bisnis yang berbasis pada *guanxi* adalah dibangun berdasarkan nilai-nilai kekerabatan. Namun, yang menjadi tujuan konstruktifnya untuk menguatkan basis pengembangan usaha ekonomi perdagangan.

Adapun mereka yang terlibat dalam jaringan dagang *guanxi*, adalah kerabat jauh, para tetangga, bekas teman sekolah, dari asal-usul keluarga yang sama, atau dari wilayah yang sama dan dialek bahasa yang sama setelah bertemu diperantauan. Dengan jaringan *guanxi* tersebut, kemudian diaktualisasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pengaturan produksi dan distribusi barang-barang dagangan. Namun, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai adalah berlangsungnya aktivitas ekonomi secara dinamis dengan akumulasi modal yang terus bertambah, sebagaimana tuntutan dalam bisnis modern.

Karena itu, bagi para ilmuwan sosial yang melakukan kajian terhadap fenomena sosial ekonomi China perantauan, kaitannya dengan perkembangan kapitalisme Asia Timur dan

Asia Tenggara, dikonsepsikan sebagai bentuk “kapitalisme jaringan”. Yang dibangun di atas kekuatan hubungan-hubungan kepercayaan yang lebih bersifat pribadi. Dan tidak berdasarkan kontrak-kontrak hukum serta otoritas pengawasan dan kontrol dari negara (Hefner, 1999 : h. 19). Inilah sebabnya, dalam berbagai kasus perkembangan ekonomi dari etnik China perantauan—khususnya di Indonesia—dapat diasumsikan cenderung membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk “ekonomi bawah tanah” (*underground economy*).

Dalam perkembangan usaha ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo, tentu saja tidak secanggih jaringan bisnis orang China perantauan. Namun demikian, kepercayaan dan jaringan menjadi salah satu faktor yang juga urgen bagi mereka. Misalnya, ketika mereka pertama kali melakukan migrasi di kota Bau-Bau tahun 1960-an dan 1970-an, dengan penuh perjuangan mereka harus “mengumpulkan modal finansial” untuk mengembangkan usaha perdagangan.

Secara empirik, hal ini mereka lakukan dengan cara membangun *trust* terhadap pihak lain, khususnya para pedagang China di Bau-Bau. Karena itu, bagi *kaum urban* orang Gu-Lakudo yang tidak memiliki dukungan modal awal untuk berdagang, mereka mengambil barang-barang dagangan dari toko-toko China untuk didagangkan secara berkeliling di kampung-kampung. Hasilnya mereka mendapat komisi dari penjualan barang-barang tersebut. Inilah sebabnya bentuk perdagangan model yang demikian ini, orang Gu-Lakudo menyebutnya sebagai “barang komisi”.

Karena itu, basis pengembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo, pada awalnya dapat dikategorikan masih dalam jangkauan (*scope*) wilayah yang sempit (*desa-kota*). Artinya, konstelasi dan jaringan perdagangan yang mereka bangun hanya sebatas kota Bau-Bau dan berbagai kampung yang ada di sekitar daerah asal mereka. Hal ini didukung dengan penguatan jaringan, baik pada jalur *internal* maupun *eksternal*.

Secara *internal*, mereka memperkuat basis solidaritas sosial Islam (*ashabiyyah*), seperti yang dikonsepsikan oleh ilmuwan sosial Muslim Ibnu Khaldun. Dengan semangat tersebut dapat menguatkan eksistensi mereka sebagai *kaum urban* dan sekaligus pelaku ekonomi perdagangan. Misalnya, ketika mereka mulai kekuarangan persediaan barang dagangan, para pedagang Gu-Lakudo tidak harus berangkat sendiri-sendiri ke Makassar, Surabaya, atau Jakarta. Tetapi mereka membentuk kelompok-kelompok untuk belanja barang dagangan, dengan jadwal keberangkatan dilakukan secara bergilir.



Dengan upaya mereka dalam penguatan jaringan pada jalur *eksternal*, adalah menciptakan hubungan kepercayaan dengan para pedagang lain, pihak Bank, dan juga para pelanggan mereka. Sebagai akibat positifnya, setelah memasuki dekade 1990-an, perkembangan usaha perdagangan dari komunitas *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, dinamikanya semakin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Oleh karena itu, maka dalam fenomena perkembangannya, mereka sudah mulai melakukan *difersivikasi* segmen usaha perdagangan. Selain itu, mereka juga sudah berorientasi pada perluasan pasar perdagangan ke kota lain di Sulawesi Tenggara, misalnya kota Raha dan Kendari.

Bahkan menurut H. Abas Mustafa dan H. Muchsin, dari kerabat mereka pedagang Gu-Lakudo sudah ada yang membuka usaha perdagangan barang dan jasa *expedisi*, serta penginapan di kebun kacang Tanah Abang, Jakarta. Dengan demikian, maka pengiriman barang belanjaan para pedagang Gu-Lakudo, misalnya dari Mangga Dua, Tanah Abang, atau pasar Anyar Bogor, yang nantinya akan diperdagangkan kembali di kota Bau-Bau, Raha, dan Kendari, mereka sudah menggunakan jasa *expedisi* orang Gu-Lakudo sendiri.

Apa yang bisa disimpulkan dari proses perkembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara, adalah mereka juga mengandalkan basis keluarga dengan jaringan kekerabatan yang dibingkai oleh nilai-nilai kepercayaan. Namun, dari aspek kemampuan pengembangan “jaringan usaha perdagangan”, mereka dapat dikategorikan masih berada pada level lokal. Yang tentu saja, kalau dibandingkan dengan kemampuan jangkauan jaringan perdagangan orang Bugis-Makassar, masih sangat jauh untuk menyamainya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekuatan jaringan perdagangan orang China, bukan hanya di level lokal dan regional, tetapi juga di level nasional dan internasional. Tetapi, sebagai salah satu etnik lokal yang ada di Sulawesi Tenggara, usaha ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo telah memperlihatkan suatu fenomena yang cukup dinamis. Mobilitas perdagangan mereka di level lokal berkembang dengan pesat, yang dimulai dari Bau-Bau, kemudian ke kota Raha dan Kendari, bahkan kota-kota lain di luar Sulawesi Tenggara.

## **H. Penguatan Modal Perdagangan**

Orang Gu-Lakudo dalam berupaya mengembangkan perdagangan, tidak hanya mengandalkan kemampuan modal *finansial* sebagai sesuatu yang *esensial* dalam ekonomi konvensional. Mereka pun tetap mengakui pentingnya kebutuhan modal *material* dalam kegiatan

ekonomi perdagangan. Namun, yang lebih *urgen* bagi mereka, adalah penguatan modal *non-material*, yang mengambil bentuk pada *spiritualitas agama*, yang merujuk pada sistem nilai ajaran Islam. Selain itu, melalui penguatan modal *non-material* juga menempatkan hubungan kekerabatan dan jaringan sosial sebagai katalisator untuk memperluas jangkauan usaha perdagangan mereka, baik dari variasi barang dagangan maupun pasar perdagangan.

Dengan sinergisitas modal *non-material* dan modal *material* tersebut, agaknya yang mendorong perkembangan keberhasilan kaum *urban* dan *migran* Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha perdagangan pada wilayah perkotaan di Sulawesi Tenggara, yang pada awalnya dimulai di kota Bau-Bau. Sinergisitas modal *non-material* dengan modal *material* tersebut, meliputi tiga bentuk permodalan yang masing-masing mengandung “nilai kemanfaatan” terhadap pengembangan ekonomi perdagangan: (1) modal *spiritualitas agama*; (2) modal *sosial*; dan (3) modal *finansial*.

Oleh karena itu, kesuksesan yang dicapai orang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha perdagangan di level lokal, adalah mensinergiskan ketiga bentuk modal tersebut. Karena telah menggerakkan usaha ekonomi perdagangan mereka sepanjang rentang waktu 30 tahun lebih ini (1970—2007). Namun dalam fenomena empiriknya, bagi pedagang Gu-Lakudo menempatkan ketiga bentuk permodalan itu dengan pemahaman bahwa keberadaan modal *spiritualitas agama* menjadi sesuatu hal yang mendasar. Dalam konteks ini, dengan menguatnya modal *spiritualitas agama* bagi seseorang dapat munculkan kepercayaan (*trust*) dari pihak lain, termasuk membaiknya jaringan sosial (*social network*). Sedangkan dengan menguatnya kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pihak lain, yang dibingkai oleh *spiritualitas agama*, dapat memudahkan munculnya modal *finansial*.

Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan orang Gu-Lakudo, ketika mereka melakukan *migrasi* ke kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Bagi mereka yang tidak memiliki modal *finansial* awal untuk berdagang, membangun kepercayaan dan kerja sama dengan pedagang Tionghoa. Mereka mengambil barang dagangan dari toko Tionghoa untuk diperdagangkan di kampung-kampung dan desa. Oleh karena itu, orang Gu-Lakudo menyebut model perdagangan seperti ini sebagai “barang komisi”. Selain itu, mereka membangun kepercayaan dengan lembaga keuangan yang ada di kota Bau-Bau, terutama dengan BRI dan BNI. Akibatnya, mereka mendapatkan pinjaman modal finansial untuk mengembangkan usaha perdagangan, seperti yang diungkapkan H. Harun, salah seorang pedagang *meubel* di Bau-Bau.

Selama 7 tahun saya merantau ke Malaysia (1959—1966), saya putuskan untuk pulang kampung. Karena selama di sana, walaupun saya berpindah-pindah tempat kerja, saya tidak bisa mengumpulkan uang sebagai modal awal untuk berdagang. Sehingga, setelah saya pulang kampung (Lakudo) dan kemudian mulai menetap kembali di Bau-Bau ini, saya menjalin hubungan kepercayaan dengan pedagang China untuk berdagang barang-barang komisi ke kampung-kampung. Ini saya jalani sekitar 3 tahun. Kemudian, saya juga menjalin kepercayaan dengan BRI. Makanya saya mendapat pinjaman tambahan modal dengan waktu pengembalian selama 5 tahun. Hasil selama saya berdagang barang komisi dan pinjaman dari BRI, saya jadikan modal untuk berdagang pakaian jadi (H. Harun, Wawancara di Bau-Bau, 2 Pebruari 2008).

Demikian juga pengalaman H. Muhsin, sebelum mulai membangun basis usaha dagangnya di kota Bau-Bau, terlebih dulu merantau ke Ambon, hingga menamatkan SMA di kota penghasil rempah-rempah itu. Muchsin bercerita tentang pengalamannya setelah pulang dari Ambon, kemudian mulai terobsesi mngembangkan usaha perdagangan pakaian jadi dan jasa ekspedisi.

Pada tahun 1979 saya dari Ambon pulang ke Bau-Bau, tanpa memiliki modal sedikit pun untuk mulai berdagang. Pekerjaan yang saya lakukan menjadi agen perbelanjaan pakaian jadi ke Makassar, Surabaya, atau Jakarta, bagi kerabat saya para pedagang Gu-Lakudo yang berdagang di pasar sentral Bau-Bau. Kemudian saya menjalin hubungan kepercayaan dengan pegawai Bank. Tahun 1981 saya mendapatkan pinjaman modal dari BNI. Maka saya pun mulai berdagang pakaian jadi di pasar sentral Bau-Bau. Namun saya juga menjalin hubungan baik dengan pegawai Pelni dan Kapten Kapal Rinjani. Atas dukungan mereka, maka tahun 1987 saya mulai merintis usaha jasa ekspedisi, yang kemudian terus berkembang sampai sekarang ini. Sehingga saya bisa naik haji dan membangun toko sendiri untuk menjadi kantor ekspedisi dan tempat berdagang (H. Muchsin, Wawancara di Bau-Bau 10 Pebruari 2008).

### ***1. Modal Spiritual Islam***

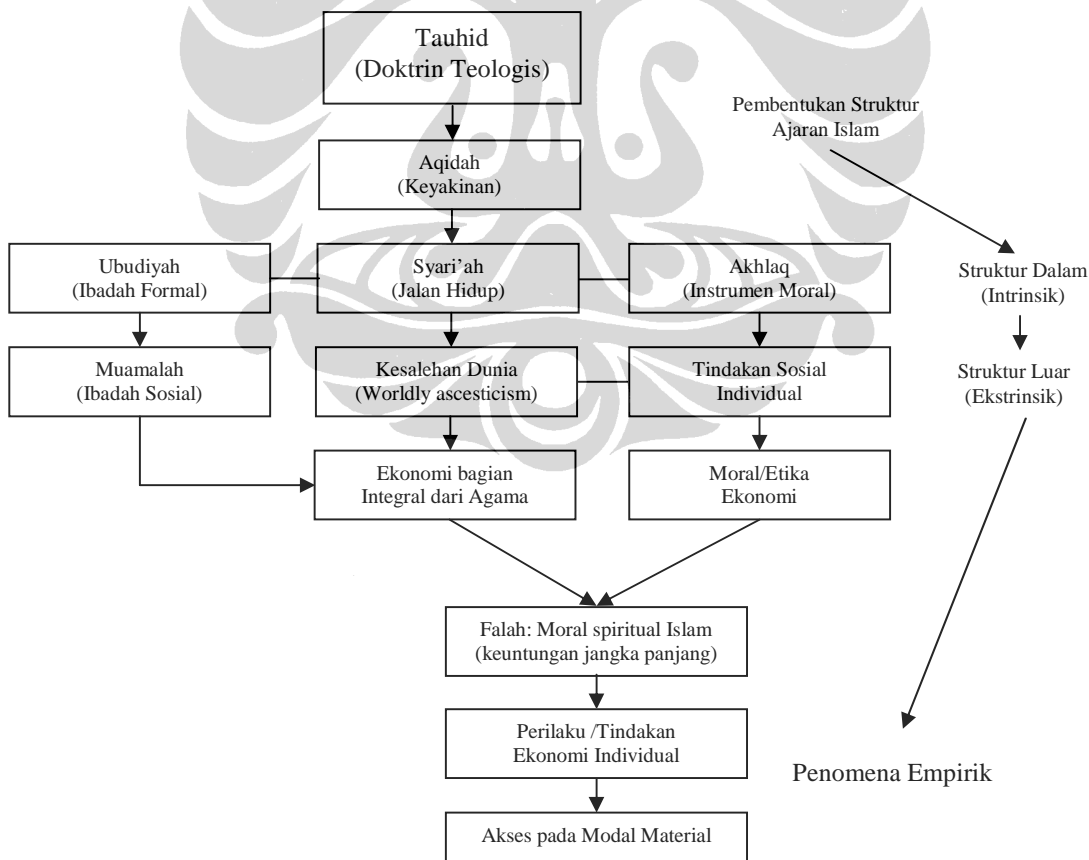
Sebagaimana dalam perkembangan studi yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan sosial tentang berbagai bentuk atau kategorisasi permodalan dalam pengembangan ekonomi, agaknya belum menempatkan *spiritual agama* sebagai bentuk *kapital* atau *modal* yang sifatnya cukup *urgen*. Menurut hasil studi Robert M.Z. Lawang, misalnya, ada beberapa jenis *kapital* yang direpresentasikan untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, misalnya: *kapital finansial*, *kapital manusia*, dan *kapital fisik*. Selain itu, tiga jenis *kapital* lainnya yang juga dapat

diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu: *kapital personal*, *kapital budaya*, dan *kapital politik* (Lawang, 2005 : h 9-25).

Dalam kaitannya dengan studi ini, keberadaan berbagai jenis *kapital* di atas, tidak diporsikan untuk diuraikan secara lebih mendalam sebagai rujukan konseptual terhadap perkembangan ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo. Namun, terkait dengan fenomena empirik yang cukup menonjol pada aktivitas perdagangan mereka, maka suatu kerangka pemikiran yang bersifat asumtif dapat dikemukakan, bahwa setiap ajaran agama yang di dalamnya mengandung nilai-nilai *spiritualitas* agaknya juga memungkinkan untuk menjadi *kapital*, meskipun bersifat abstrak. Atau, bisa diperhitungkan untuk menjadi *kapital* seperti halnya *kapital personal*, *budaya*, dan *politik*. Terbentuknya modal *spiritual Islam*, dapat digambarkan demikian.

Bagan 7.7

Keterkaitan elemen-elemen ajaran Islam yang membentuk Modal Spiritual Agama



*Sumber:* Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2008).

Kerangka pemikiran tersebut, secara teoretik bisa menjelaskan bahwa pengaruh spiritualitas keyakinan beragama adalah menjadi suatu hal yang cukup mendasar dalam mendorong perkembangan ekonomi pada masyarakat tertentu. Dengan merujuk pada gambar di atas, memberikan penjelasan bahwa dalam Islam yang berorientasi pada keseimbangan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat, memiliki keterkaitan (*inter-connectedness*) dari semua unsur yang terkandung di dalam ajarannya. Konsep *tauhid* misalnya, yang diaktualisasikan dalam bentuk keyakinan (*aqidah*), mempunyai kekuatan *spirit* untuk membentuk “struktur terdalam” dari ajaran Islam. Lalu menyusul konsep ibadah, akhlaq, hukum, dan muamalah, sebagai *deep structure*. Dan yang dipermukaan adalah: aktualisasi *aqidah*, ibadah wajib (*mahdah*), *moral* dan *etika*, tindakan *normatif*, dan tindakan sosial (*muamalah*). Dengan demikian, maka sebagai *out come* dari proses tersebut, membentuk kesalehan personal dan juga sosial, yang di dalamnya tertambat modal *spiritualitas agama*, sebagai bentuk *etos ekonomi*.

Pembentukan dan penguatan modal *spiritualitas agama* dalam Islam bagi orang Gu-Lakudo, adalah dilakukan oleh Abdul Syukur sekitar 20 tahun lebih (1942—1968) di daerah asal mereka, sebelum melakukan *urbanisasi* ke kota Bau-Bau. Dengan konsep ajaran Islam yang bernuansa *modernis-rasional* dan *transformatif*, membebaskan orang Gu-Lakudo dari paham *mistik* agama tradisi leluhur mereka dan sekaligus membentuk etos ekonomi perdagangan mereka. Yang kemudian menjadi basis tumbuhnya modal *spiritualitas agama* dan modal manusia (*human capital*) dalam perdagangan.

Dari hasil studi Samdin (2007)<sup>17</sup> misalnya, terkait dengan praktek perdagangan orang Gu-Lakudo, mengkonseptikan bahwa “modal agama” sebagai sesuatu yang paling *esensial* dalam perkembangan usaha dagang mereka. Dalam hal ini menurut Samdin, kekuatan modal agama (*religious capital*) sebagai elemen dasar dari modal *non-material*, adalah berdimensi teologis (*hablumminallah*) dan juga sosial (*hablumminannas*). Yang jika dijadikan instrumen, memungkinkan bagi terbentuknya modal *material*. Dengan konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa melalui penguatan modal agama—seperti yang diperlihatkan oleh para

---

<sup>17</sup>Karenanya, Samdin membuat kategori dua bentuk modal yang mendorong mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo, yaitu “modal non-material” (*religious*) dan juga “modal material” seperti: *uang* dan *barang*. Samdin, *Pemahaman Modal dalam Praktek Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara (Disertasi)*, Universitas Brawijaya Malang, 2007.

pedagang Gu-Lakudo—dapat menghasilkan modal *material* yang menggerakkan mobilitas perdagangan. Karenanya, posisi modal *non-material* yang berbasis pada agama (*religious capital*), menurut Samdin (2007), merupakan suatu hal yang mendasar dan berada pada strata yang paling tinggi, dalam aktivitas perdagangan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, dari berbagai hasil studi yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan sosial, setidaknya dapat memberikan fakta-fakta empirik tentang kecenderungan tersebut.

- (1). Tesis monumental Max Weber (1904/1905), menurut Coleman (1987) dan Liska (1990), pengaruh doktrin agama Protestan telah membentuk sistem nilai kehidupan bagi masyarakat Barat. Sebagai konsekuensi logisnya, maka mengarahkan orientasi perilaku ekonomi mereka, selanjutnya mendorong perkembangan kapitalisme. Menurut konsepsi Max Weber, bahwa terjalin hubungan yang kuat antara nilai-nilai keagamaan dan budaya dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Pada konteks ini, Weber menunjuk etika Protestanisme Eropa Barat abad ke 17 M yang memiliki pertautan dengan berkembangnya budaya rasional masyarakatnya. Hal ini menjadi pendorong yang kuat dalam tindakan ekonomi individu, sehingga merangsang perkembangan kapitalisme di dunia Barat.
- (2). Terbangunnya jaringan perekonomian China—terutama di Asia Tenggara—adalah berbasis pada keluarga, kekerabatan, dan pertemanan (*guanxi*). Menurut Ampelas (1999), Redding (1990), Hefner (1993), dan Tu Wei-Ming (1984), termotivasi oleh nilai-nilai budaya dan agama Confusian. Keberhasilan ekonomi perdagangan orang China di Asia Tenggara, menurut Jamie Mackie (2000), adalah termotivasi pada proses transformasi kehidupan dari konteks nilai-nilai budaya dan agama Confusian pada konteks struktur sosial kemodernan. Yang kemudian membentuk karakteristik mereka dalam membangun basis usaha ekonomi, seperti: kerja keras, hidup hemat, menguatkan solidaritas keluarga, dan meningkatkan semangat kewirausahaan.
- (3). Transformasi dan mobilitas perdagangan dari kalangan pelaku ekonomi informal di Peru, Amerika Latin. Menurut Hernado De Soto (1991), kesuksesan mereka adalah termotivasi oleh nilai-nilai spiritualitas teologi pembebasan. Yang mengajarkan (a) kondisi ekonomi berfungsi sebagai elemen dasar moral kemanusiaan; (b) tatanan sosial yang bermoral dan berkeadilan sulit tercapai tanpa perubahan fundamental; dan (c) strategi aksionernya adalah pemberdayaan (*empowerment*) bagi kalangan orang miskin (*grassroot*) dari bawah ke atas.

- (4). Pengaruh doktrin Protestan-Calvinis dan budaya rasional pada masyarakat Barat, ditemukan pula pada komunitas muslim reformis-puritan di Jawa. Dari hasil studi para ilmuwan sosial, seperti: Clifford Geertz (1963), W.F. Wertheim (1969), James L. Peacock (1978), Lance Castle (1982), dan Mitsuo Nakamura (1983), menemukan fakta-fakta yang menjelaskan kecenderungan tersebut. Muslim reformis-puritan di Indonesia, adalah Muhammadiyah. Karena itu, Sukidi Mulyadi (2005), mencitrakan H. Ahmad Dahlan sebagai muslim-Calvinis ketika melakukan pembaharuan Islam di Jawa. Sedangkan menurut konsepsi Wertheim (1969), menjadi momentum yang kuat bagi munculnya “kaum saudagar urban” di akhir abad ke-20 M.
- (5). Telah terjadi pergeseran dalam perkembangan etika bisnis di Amerika. Kebanyakan dari para pengelola perusahaan besar mulai memasukkan nilai-nilai spiritualitas yang lebih bersifat universal dan perenial dalam pengembangan bisnis mereka. Kecenderungan tersebut, menurut hasil studi Gay Hendricks dan Kate Ludeman (1996), merupakan suatu fenomena yang kuat dari munculnya *The Corporate Mystic*, yang di dalamnya beraktivitas para “mistikus korporat”.

Dengan hasil studi para ilmuwan sosial tersebut, agaknya memberikan gambaran bahwa “modal spiritualitas agama” menjadi suatu hal yang cukup urgen dalam kaitannya dengan penguatan basis-basis ekonomi individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat. Bagi komunitas *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara, misalnya, mereka juga memiliki kekuatan “modal spiritual agama”. Karena nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh H. Abdul Syukur selama 30 puluh tahun lebih, adalah juga membentuk “etos ekonomi” mereka. Selanjutnya, mendorong mereka untuk melakukan *urbanisasi* dan *migrasi*, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi perdagangan di wilayah perkotaan, yang pada awalnya di kota Bau-Bau.

Namun, seiring dengan proses perjalanan waktu, mereka juga berhasil melakukan ekspansi pasar di kota lain, seperti Raha dan Kendari. Dalam konteks ini bahwa yang menjadi motif utama keberhasilan orang Gu-Lakudo ketika mengembangkan usaha ekonomi perdagangan, selain didukung oleh kekuatan modal material (*finansial*), tetapi yang lebih mendasar dari hal itu adalah modal *non-material* (*sosial budaya* dan *agama*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Bahkan menurut Samdin, orang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha perdagangan, cenderung lebih mementingkan keberadaan “modal non-material” yang bersumber dari nilai-nilai agama dan sosial budaya,

Oleh karena itu, maka yang menjadi tesis utama dalam studi ini adalah “urgency modal spiritualitas Islam” terhadap proses penguatan dan pengembangan basis ekonomi masyarakat. Dalam fenomena empiriknya dapat diamati dari realitas kehidupan sosial ekonomi perdagangan komunitas urban orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara. Modal spiritualitas agama yang mereka miliki, secara riil termanifestasi dalam kehidupan keagamaan mereka di masjid dan aktivitas perdagangan mereka di pasar. Kecenderungan seperti ini, kemudian mendorong mobilitas usaha ekonomi perdagangan mereka sehingga mencapai tingkat kesuksesan yang cukup faktual. Dengan modal spiritualitas agama yang terintegrasi dan mengakar dalam kehidupan sosial budaya mereka, agaknya telah menjadi penggerak dalam pengembangan ekonomi perdagangan di perkotaan.

Ini tidak berarti bahwa sistem nilai keagamaan yang dianut oleh orang Gu-Lakudo, menghambat kecenderungan pertimbangan rasionalitas mereka dalam pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan. Sebagaimana tuntutan kehidupan masyarakat modern, antara nilai-nilai sosial budaya keagamaan dan rasionalitas, justru saling memposisikan perannya secara proporsional. Boleh jadi pada momen tertentu yang ditonjolkan adalah pertimbangan rasional, misalnya ketika mereka di pasar dan berkaitan dengan perhitungan untung dan rugi dalam perdagangan. Sebaliknya pada momen yang lain seperti di masjid, yang ditonjolkan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Urgency modal spiritual agama, tentu saja perlu digali dari substansi ajaran Islam itu sendiri. Menurut Kuntowijoyo (2001), semua elemen ajarannya saling terkait antara satu dengan lainnya (*inter-connectedness*). Misalnya, keterkaitan antara hubungan *vertikal* terhadap Tuhan dengan hubungan *horizontal* sesama manusia dalam konteks sosial kemasyarakatan.

## **2. Ketertambatan Modal Sosial**

Modal sosial, baik pada tataran konseptual maupun dalam fenomena empiriknya, adalah tidak muncul dengan sendirinya dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Tetapi tertambat dengan kuat dalam struktur sosial, yang memungkinkan berlangsungnya hubungan-hubungan personal dan terbentuknya berbagai jaringan sosial yang di dalamnya mengandung kepercayaan dan harapan-harapan (Granovetter, 1985). Demikian juga modal sosial

---

ketimbang “modal material” dalam bentuk “kapital fisik”. Karena, jika modal non-material telah dimiliki, maka dengan mudah untuk mendapatkan modal material. Namun sebaliknya, jika hanya berorientasi pada pengumpulan modal material dalam berdagang, maka belum tentu bisa mendapatkan modal non-material, seperti “kepercayaan” dari para pembeli. Samdin, *Pemahaman Modal dalam Praktek Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara (Disertasi)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, h. 332.



tertambat pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan, misalnya: keluarga, ekonomi, pendidikan, agama, dan pemerintahan (Lawang, 2005).

Terkait dengan bagaimana proses penguatan basis modal sosial *komunitas migran* orang Gu-Lakudo, adalah tertambat pada institusi keluarga dan kekerabatan, serta institusi sosial ekonomi perdagangan (*pasar*), yang diperkuat oleh institusi sosial keagamaan dalam Islam (*masjid*). Oleh karena itu, maka penguatan modal sosial mereka dapat dikonsepsikan berlangsung secara *internal* dan *eksternal*.<sup>19</sup>

Pada konteks yang *internal* adalah bersifat *bonding* dan mengakar dalam keluarga dan hubungan kekerabatan. Yang diaktualisasikan dalam bentuk hubungan antara *patron* dengan *clien* dalam proses pengembangan usaha perdagangan. Sebagai contoh konkritnya, seseorang dari komunitas *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo, yang belum memiliki modal usaha dagang, maka terlebih dulu melakukan *magang* pada keluarga atau kerabat yang sudah mapan usaha perdagangannya. Manfaatnya bagi seorang *clien*, adalah setelah memiliki pengetahuan tentang perdagangan, maka dapat dilepaskan oleh *patron*-nya dan diberikan bantuan modal awal agar bisa berusaha sendiri. Adik ipar H. Harun, misalnya, sebelum mengembangkan usaha dagang secara mandiri, hingga berhasil membangun toko *meubel* sendiri, terlebih dulu membantu saudara iparnya dalam perdagangan *meubel*.

Menguatnya modal sosial secara *internal* dan bersifat *bonding* tersebut, membuka akses bagi terbentuknya hubungan atau jaringan koneksitas dalam pengembangan usaha perdagangan. Karenanya, modal sosial *komunitas urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo yang muncul pada konteks *eksternal* ini, adalah yang bersifat *bridging*. Dengan bentuk modal sosial tersebut, maka memungkinkan bagi mereka untuk menjalin hubungan kepercayaan dan kerja

---

<sup>19</sup>Studi Djainal Abidin S, misalnya, menemukan pola kerja modal sosial, modal fisik, dan modal manusia pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Perkampungan Industri Kecil Jakarta. Kelompok UMK tersebut pada awalnya memiliki *bonding* modal sosial (*internal*) yang menguat pada keluarga dan kerabat. Selanjutnya, ketika berlangsung inter-aksi dengan mitra usaha mereka berkembang menjadi *bridging* modal sosial yang menghasilkan modal manusia, seperti: penambahan pengetahuan usaha, penambahan keterampilan, *supply* tenaga kerja yang berketerampilan khusus. Selain itu, UMK juga memiliki *linking* modal sosial, khususnya hasil inter-aksi dengan pemerintah dan *patron* mereka sebagai pemberi *order*. Dengan *linking* modal sosial ini, menghasilkan modal fisik, misalnya: pembayaran bahan di muka, peminjaman modal untuk pembelian bahan baku, penundaan pembayaran, dan *supply* bahan baku untuk produksi. Dari hasil studi Djainal ini, menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial tidak muncul secara kebetulan, melainkan tertambat dengan kuat pada struktur dan institusi-institusi sosial masyarakat, seperti keluarga dan hubungan kekerabatan, ekonomi, dan juga pemerintah. Lihat Djainal Abidin S., *Modal Sosial dan Dinamika Usaha Mikro Kecil (UMK): Suatu Studi Sosiologi Ekonomi di Perkampungan Industri Kecil di Jakarta*, Disertasi dalam Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2007.

sama dengan pihak lain sebagai relasi dagang mereka, termasuk dengan para pembeli (*konsumen*).

Adapun contoh konkritnya terkait dengan urgennya modal sosial yang berbentuk *bridging* tersebut, misalnya dapat ditunjuk kasus H. Harun dan saudara iparnya dalam perdagangan *meubel*, serta usaha jasa ekspedisi H. Muchsin. Dalam pengakuannya, bahwa yang mendukung perkembangan usaha dagang *meubel* yang digelutinya bersama saudara iparnya, karena mereka menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan *olimpic* di Makassar. Mereka dengan mudah mendapatkan kiriman barang kapan saja jika diminta, meskipun pembayarannya dilakukan kemudian melalui rekening Bank. Demikian juga yang mendukung perkembangan usaha jasa *ekspedisi* H. Muchsin yang mulai dirintisnya sejak tahun 1987, lantaran membangun kerja sama dengan perusahaan *ekspedisi* yang lain di Surabaya dan Jakarta.

Dengan contoh-contoh kasus yang dijelaskan di atas, maka dapat memberikan gambaran bahwa *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo dalam membangun kekuatan basis usaha ekonomi perdagangan mereka, adalah juga didukung dengan *modal sosial*, baik yang bersifat *bonding* maupun *bridging*. Adapun yang *bonding* adalah mengakar dalam institusi keluarga dan kekerabatan mereka. Sedangkan yang *bridging* membentuk hubungan relasional dengan berbagai mitra usaha dagang mereka, lembaga keuangan formal seperti Bank, termasuk dengan para pembeli sebagai konsumen.

Terbangunnya hubungan kepercayaan dan relasional dengan para pembeli atau konsumen, adalah berkaitan dengan misalnya: jaminan kualitas barang dagangan, harga yang pantas untuk diperjual-belikan, boleh-tidaknya untuk dikredit oleh pembeli, dan juga termasuk proses pendistribusian barang pada konsumen. Hal tersebut bertujuan, agar dapat memaksimalkan pelayanan terhadap pembeli. Yang sekaligus dapat memperluas jaringan pelanggan mereka dalam berbagai elemen masyarakat, seperti di kota Bau-Bau. Sehingga, menjadi salah satu faktor pendorong bagi perkembangan usaha ekonomi perdagangan yang mereka geluti.

### **3. Dukungan Modal Finansial**

Komunitas *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo sebagai salah satu etnik lokal yang mengembangkan usaha ekonomi perdagangan di Sulawesi Tenggara, meskipun mereka menempatkan modal *spiritualitas agama* menjadi sesuatu yang urgen; tetapi juga mereka tetap membutuhkan dukungan modal *finansial* atau *material*. Namun demikian, menurut pandangan

mereka *uang* atau *material*, bukan segala-galanya sebagai faktor yang menentukan keberhasilan untuk pengembangan usaha perdagangan. Karena itu, modal *uang* atau *materi* bagi para pedagang Gu-Lakudo hanya merupakan ikutan dari terbentuknya modal *non-materi* (*spiritualitas agama* dan *jaringan sosial*).

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam suatu perbincangan yang agak bebas pada waktu yang tidak bersamaan dengan beberapa orang informan (*pedagang*), meskipun mereka menggunakan formulasi pernyataan yang berbeda-beda, tetapi memiliki persamaan makna terkait dengan bagaimana posisi modal finansial dalam usaha dagang. Mereka mengakui bahwa, modal *uang* atau *materi* tetap diperlukan dalam menjalankan usaha perdagangan, tetapi bukan menjadi prioritas utama. Bagi mereka yang lebih penting dari itu, adalah modal yang tidak berwujud *uang* atau *materi*, seperti ketaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Karena seseorang yang cenderung memiliki komitmen moral yang tinggi dalam kehidupan beragama, akan senantiasa bersikap *amanah* atau mempertahankan *kejujuran*. Hal seperti ini, menurut Iman Supriono (2008), sebagai suatu bentuk “kecerdasan spiritual finansial” (Financial Spiritual Quotient) untuk keunggulan diri, perusahaan, dan masyarakat.

Dengan demikian, ketika mulai mengembangkan usaha perdagangan atau pun berprofesi sebagai pedagang, maka dapat dipercaya oleh pihak lain atau para pedagang lain. Sehingga, terjalin hubungan kepercayaan dengan sesama pedagang, Bank sebagai pemberi pinjaman modal usaha untuk berdagang, dan termasuk dengan para pembeli atau konsumen.

Konsepsi pemikiran para pedagang Gu-Lakudo tersebut, pada dasarnya adalah merujuk dari pemahaman teologis keagamaan mereka yang bersumber pada Al-Qur'an, yang menempatkan materi hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan sosial ekonomi (QS. 3:14; 104:2-3). Sedangkan secara empirik, mereka bertolak dari pengalaman pribadi masing-masing. Ketika mereka melakukan perantauan (*urbanisasi* dan *migrasi*), justru mereka tidak memiliki modal material untuk mulai berdagang. Yang mereka miliki hanya ketaatan menjalankan ajaran agama dan etos ekonomi yang diaplikasikan dalam bentuk kerja keras, ulet, sabar, dapat dipercaya, dan hidup hemat. Fenomena yang demikian ini, pada umumnya yang dimiliki oleh para pedagang Gu-Lakudo, ketika mereka mulai terobsesi mengembangkan usaha perdagangan. Dan hal tersebut, seperti yang dialami oleh H. Harun, H. Abas Mustafa, H. Radeni, H. Muchsin, H. Yusuf, dan kaum urban orang Gu-Lakudo lainnya, baik yang datang ke Bau-Bau maupun ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Terkait dengan dukungan modal finansial yang dibutuhkan dalam perdagangan, orang Gu-Lakudo mendapatkannya dari beberapa sumber, yaitu: (1) hasil perdagangan barang komisi; (2) bantuan dari *patron*, (3) arisan kelompok; (4) lembaga koperasi; dan (5) perbankan (BRI dan BNI). Dukungan modal material yang bersumber dari berbagai pihak tersebut, maka orang Gu-Lakudo dapat mengembangkan usaha perdagangan, khususnya di kota Bau-Bau. Karena memang kota ini menjadi tujuan awal dari *urbanisasi* mereka dan sekaligus merupakan basis pengembangan usaha dagang yang mereka geluti.

Modal usaha dagang yang bersumber dari hasil perdagangan barang komisi—seperti yang sudah jelaskan sebelumnya—adalah mereka yang menjalin hubungan kepercayaan dengan pedagang China untuk mengambil barang-barang dagangan, kemudian diperdagangkan di kampung-kampung. Setelah laku terjual, mereka mendapatkan komisi dari hasil penjualannya. Dengan penghasilan yang didapat dari perdagangan barang komisi yang dijalani—misalnya 2 atau 3 tahun—mereka bisa menyimpan untuk dijadikan modal berdagang secara mandiri.

Sedangkan modal yang bersumber dari *patron* mereka adalah masih dalam satu ikatan keluarga/kekerabatan. Misalnya, H. Harun memberikan bantuan modal pada saudara iparnya, agar bisa berdagang secara mandiri; karena sudah membantunya selama bertahun-tahun berdagang *meubel*. Sehingga, saudara iparnya pun menjadi pedagang *meubel* yang cukup berhasil di kota Bau-Bau. Demikian juga H. Radeni membelikan tanah untuk tempat berdagang bagi kemanakannya.

Adapun modal usaha dagang yang bersumber dari arisan kelompok, dilakukan oleh para pedagang Gu-Lakudo yang sudah terlibat dalam perdagangan, tetapi belum didukung dengan kemampuan permodalan yang cukup memadai. Oleh karena itu, untuk membantu kebutuhan penambahan modal usaha dagang, mereka membentuk arisan kelompok, misalnya sebanyak 10 atau 12 orang.

Kecuali itu, modal yang bersumber dari koperasi, yang dibentuk oleh kalangan orang Gu-Lakudo sendiri. Misalnya, H. Muchsin membentuk lembaga koperasi simpan-pinjam dengan jumlah anggota awal 30 orang, kemudian mulai berkembang hingga 100 orang. Selain itu, modal yang bersumber dari pinjaman Bank,<sup>20</sup> terutama BRI dan BNI Bau-Bau. Mereka yang mendapat

---

<sup>20</sup>KH. Abdul Syukur sendiri, sebenarnya tidak respek dengan kredit Bank bagi para pedagang yang sedang mengalami kesulitan modal keuangan. Karena menurutnya, keberadaan lembaga finansial konvensional ini tidak sesuai dengan petunjuk syari'ah Islam dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi perdagangan. Dalam Islam, hubungan antara pemilik modal seperti Bank dengan pelaku usaha dagang, adalah terbangun jalinan "kesetaraan",

bantuan permodalan dari lembaga finansial tersebut, adalah para pedagang yang memang sudah menjalin hubungan kepercayaan dengan pihak perbankan. Dengan kisaran pinjaman sudah dalam ratusan juta hingga milyaran rupiah. Hal ini dilakukan secara berkala, misalnya untuk 5 tahun dan setelah lunas dilanjutkan kembali jika mereka masih tetap membutuhkan modal tambahan.

Oleh karena itu, di kota Bau-Bau sendiri sejak tahun 1972—2008 sudah berdiri dan beroperasi, setidaknya 9 lembaga finansial yang turut berperan sebagai pendukung terhadap proses mobilitas ekonomi perdagangan masyarakat di kota itu. Berkaitan dengan keberadaan berbagai lembaga finansial tersebut, adalah dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini. Namun, yang secara intens memberikan bantuan pinjaman modal usaha dagang terhadap para pedagang orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau, adalah pihak BRI dan BNI.

*Tabel 10.7*  
Lembaga-lembaga finansial yang ada di kota Bau-Bau.

No	Bank dan Non-Bank	Mulai Beroperasi
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1972
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	1993
3	Bank Danamon	1993
4	Bank Negara Indonesia 46 (BNI)	1996
5	Bank Muamalat	2007
6	Panik Bank	2008
7	Bank Perkreditan Keraton	2005
8	Koperasi Simpan Pinjam	1999
9	Asuransi Jiwasraya	2000

sehingga ketika terjadi resiko kerugian misalnya, maka harus ditanggung bersama. Sementara itu, posisi Bank konvensional lebih tinggi dan kuat terhadap para kreditur. *Pertama*, Bank hanya menarik keuntungan dari setiap pinjaman yang dikeluarkan, tanpa menanggung resiko. *Kedua*, jika terjadi resiko kerugian bagi pedagang yang melakukan pinjaman, maka resiko tersebut hanya menjadi tanggungan pedagang sendiri tanpa melibatkan pihak Bank. Karena itu, Bank bisa mendapatkan keuntungan berganda dalam perputaran bunga-kredit; sedangkan pedagang sebagai peminjam boleh jadi mengalami kerugian dan resiko kebangkrutan. Tetapi, Abdul Syukur tidak sampai mencegah orang Gu-Lakudo yang baru memulai usaha perdagangan mereka (1970-an) di Bau-Bau untuk mendapatkan bantuan modal finansial dari Bank, karena mereka dalam kondisi keterpaksaan (H. Ahmad Hamzah, Wawancara di Lakudo, 8 Pebruari 2008).

*Sumber: Diolah dari data lapangan (2007/2008).*

Merujuk pada tabel di atas dan sebagaimana pengakuan dari beberapa orang pedagang Gu-Lakudo sendiri, bahwa selama ini mereka lebih dominan mendapatkan pinjaman modal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kecenderungan ini, tentu saja terkait dengan hubungan kepercayaan antara para pedagang Gu-Lakudo dengan lembaga finansial tersebut yang sudah terjalin sejak lama dan berlangsung dengan baik. Walaupun juga setelah BNI 46 Bau-Bau beroperasi tahun 1996, mulai ikut memberikan kredit kepada para pedagang Gu-Lakudo, seperti H. Muchsin.

Bagaimana jalinan hubungan kepercayaan yang terbangun antara BRI Bau-Bau dengan pedagang Gu-Lakudo, agaknya dapat disimak dari pernyataan salah seorang pegawai kantor cabang lembaga finansial itu. Menurut rekaman pengakuannya, bahwa pedagang Gu-Lakudo memiliki konsistensi yang cukup baik terhadap proses pengembalian kredit mereka, sehingga dari pihak Bank pun menaruh kepercayaan terhadap mereka. Artinya, ketika mengajukan permohonan pinjaman, Bank memberikan pelayanan seperti yang diharapkan.

... Untuk cicilan Bank, mereka tidak pernah menunggak, sehingga berapa pun yang diminta secara ideal, kami dari pihak BRI tidak ragu memberikannya (Hasanuddin Buro dalam Samdin 2007, h. 124).

Namun demikian, ketika mereka mengembangkan usaha perdagangan tidak hanya menjadikan modal *material* (*uang* dan *barang*) menjadi suatu hal yang begitu *urgen*, sebagaimana dalam konteks ekonomi konvensional. Tetapi, mereka mensinergiskan penguatan dari ketiga bentuk modal tersebut (*spiritualitas Islam*, *sosial*, dan *finansial*), dinamika perkembangan usaha perdagangan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara, menunjukkan tingkat mobilitasnya yang cukup tinggi. Meskipun juga dalam fenomena empiriknya, mereka menempatkan modal *non-material*—seperti nilai-nilai spiritualitas keagamaan dalam Islam dan jalinan hubungan sosial—sebagai bentuk permodalan yang cukup menentukan dalam mendorong mobilitas ekonomi perdagangan mereka.

Menurut Samdin (2007), apa yang dikonsepsikan sebagai bentuk “modal agama” (*religious capital*) yang bersifat *non-material* justru lebih memainkan peran sentral dalam aktivitas ekonomi perdagangan bagi komunitas *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo di Sulawesi

Tenggara. Dalam pengertian, bahwa walaupun mereka juga tidak menafikan pentingnya keberadaan modal *material* (*uang* dan *barang*) terhadap pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Tetapi, yang lebih urgen dari peranan modal *material* itu adalah modal *agama* (*religious capital*).

Karena dengan memperkuat keberadaan modal agama tersebut, selain berdimensi *teologis* yang lebih bersifat *non-material*, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan (*lingkungan sosial* dan *materi*). Pada dimensi *teologis*, misalnya, *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo terpatri suatu keyakinan yang kuat bahwa manusia hanya sebatas berusaha dan berikhtiar mencari rizqi. Namun, yang menentukan keberhasilan atau tidaknya usaha itu adalah Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, telah membentuk kualitas moral individual mereka sebagai pelaku ekonomi pasar, seperti dalam berdagang harus *ulet* dan *sabar*, tidak mengurangi takaran (*jujur*), dan bersikap hemat.

## **I. Integrasi Kehidupan Ekonomi dan Agama**

### ***1. Konstruksi Sosial: Rumah, Pasar dan Masjid***

Dalam perspektif *sosio-ekonomik* Islam, secara *ideal* adalah mempertautkan terciptanya keserasian hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, menurut Al-Ghazali<sup>21</sup> ada lima hal yang menjadi dasar kehidupan manusia yang perlu dijaga: (1) jiwa (*nafs*), (2) keluarga (*nasl*), (3) harta kekayaan (*mal*), (4) intelektual (*aql*), dan (5) agama (*dien*). Karena itu, demi pencapaian kelima elemen kehidupan itu, dapat direfleksikan pada bagaimana pertautan yang kuat atau terjadinya sinergisitas antara tiga institusi sosial dalam masyarakat muslim, yaitu: keluarga (*rumah*), ekonomi (*pasar*), dan keagamaan (*masjid*).

Bagi *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo yang memang dalam fenomena empiriknya mereka dapat dikategorikan sebagai muslim yang taat mengamalkan ajaran agamanya, adalah mengintegrasikan antara kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan.

---

<sup>21</sup>Al-Ghazali membahas permasalahan sosial ekonomi masyarakat, dalam salah satu kitabnya yang cukup monumental yang berjudul: *Ihya 'Ulumuddin*, Beirut, Dar al-Nadwah, t.t. Dari berbagai tema bahasan yang dilakukannya adalah berpijak dari satu konsep kunci pemikiran sosial ekonomi keagamaan dalam Islam, yaitu "fungsi kesejahteraan sosial ekonomi Islami" (*maslahat*) yang mempertautkan kepentingan individu dan berbagai elemen sosial masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Lihat juga misalnya, Al-Ghazali dalam Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Kecenderungan seperti ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang generasi awal *kaum urban* orang Gu-Lakudo, yakni H. Sabirin.

Sebelum kami pindah ke Bau-Bau, H. Abdul Syukur selalu mengingatkan pada kami bahwa: “Agama tanpa ekonomi, sulit untuk berkembang. Sehingga, orang Islam diajarkan untuk bekerja keras mencari rizqi, agar terhindar dari kondisi kemiskinan. Karena dengan kemiskinan, dapat mendekati kekafiran. Sebaliknya, ekonomi tanpa tuntunan dan kendali ajaran agama, maka bisa menjerumuskan manusia pada keserakahan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Makanya, agama perlu diperkuat dengan ekonomi, dan juga ekonomi perlu mendapatkan tuntunan dari ajaran agama” (H. Sabirin, Wawancara di PP Syekh Abdul Wahid, Bau-Bau 6 Pebruari 2008).

Dengan etos ekonomi perdagangan yang dibentuk oleh nilai-nilai *modernis* dan *transformatif* Islam sebagaimana yang diajarkan oleh H. Abdul Syukur, menciptakan hubungan yang bersifat fungsional antara: *rumah*, *pasar* dan *masjid*. Teraplikasinya konsep hidup mereka tersebut, seperti yang dapat disimak dari pernyataan salah seorang *kaum urban* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau.

Lingkaran kehidupan keseharian kami orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau ini, adalah lebih berorientasi pada pertautan antara aktivitas sosial ekonomi dan agama. Karena itu, *rumah*, *pasar* dan *masjid*, bagi kami merupakan tiga tempat yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. *Rumah* sebagai tempat pembinaan keluarga; *pasar* adalah menjadi tempat untuk mencari uang (*rezqi*) dan pengembangan usaha perdagangan; *masjid*, sebagai tempat yang sakral untuk kami kembali bermunajat kepada Allah SWT. Hubungan timbale-balik dari ketiga tempat tersebut, menjadi suatu hal yang mendasar dalam membentuk rutinitas dan sekaligus merupakan kenyataan hidup kami bagi orang Gu-Lakudo (H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau, 17 Pebruari 2008).

Karenanya, dengan perkembangan usaha ekonomi perdagangan yang mereka geluti selama 30 tahun lebih (1970-an—2000-an), *kaum urban* dan *migran* Gu-Lakudo bersama para migran China dan Bugis-Makassar, mereka berhasil mendominasi area-area pemukiman yang strategis di pusat kota Bau-Bau. Mengikuti proses evolusi kehidupan kota yang cenderung bersifat *penetratif-kapitalistik* dalam perkembangan hunian wilayah perkotaan. Kondisi ini semakin memungkinkan bagi orang Gu-Lakudo untuk menempati kawasan pemukiman kota Bau-Bau yang letaknya cukup strategis untuk pengembangan usaha ekonomi perdagangan. Dalam pengertian, keberhasilan mereka pada aspek perdagangan telah membuka kesempatan



bagi mereka untuk membeli tanah-tanah pemukiman warga kota yang justru secara struktur sosial ekonomi perkotaan berada dalam posisi yang lemah.

Terkait dengan konteks “ruang fisik” dan “ruang sosial” perkotaan, konsentrasi pemukiman *kaum urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo di pusat kota Bau-Bau, berada pada 3 wilayah kelurahan: *Wale, Tomba, dan Bataraguru* di kecamatan Wolio. Pada tiga wilayah pemukiman kota ini, mereka membangun rumah tinggal, ruko, atau pertokoan yang dapat menunjang aktivitas ekonomi perdagangan yang mereka geluti. Demikian juga keberadaan tiga pasar utama di kota Bau-Bau sebagai basis pengembangan usaha perdagangan masyarakatnya, berada di tiga kelurahan tersebut. Adapun yang menjadi pasar utamanya, adalah: *La Elangi, Karya Nugraha, dan Mall Umna Rijoli*. Dalam pengembangan usaha ekonomi perdagangan barang dan jasa di tiga pasar tersebut, didominasi oleh para pedagang Gu-Lakudo. Karena memang, secara geografis ketiga pasar tersebut berada di tengah-tengah pemukiman mereka.

Demikian juga keberadaan masjid-masjid utamanya sebagai sarana peribadatan bagi *kaum muslim* di pusat kota Bau-Bau, secara geografis berada di tengah pemukiman *komunitas urban* orang Gu-Lakudo. Ada empat buah masjid yang sejak dari proses pembangunan sarana fisiknya hingga pengelolaannya, yang memang didanai oleh komunitas urban orang Gu-Lakudo: (1) Masjid Agung di pusat kota Bau-Bau; (2) Masjid Tomba; (3) Masjid Bataraguru; dan (4) Masjid Pesantren Syekh Abdul Wahid. Keempat buah *masjid* tersebut, dibangun dan dikelola oleh *komunitas urban* orang Gu-Lakudo. Karena memang keberadaannya terletak di tengah pemukiman mereka. Masjid Agung kota Bau-Bau, misalnya, untuk menyelesaikan pembangunan sarana fisiknya membutuhkan biaya sekitar hampir Rp. 10 M. Yang pembiayaannya, justru kebanyakan ditanggung oleh para pedagang Gu-Lakudo. Selain itu, keberadaan masjid-masjid lain yang ada di kota Bau-Bau, yang juga mereka bangun atau renovasi.

Karena itu, terkait dengan seperti apa bangunan dasar kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara—dan khususnya di kota Bau-Bau—secara spesifik menciptakan hubungan yang fungsional antara: *rumah, pasar* dan *masjid*. Sebagaimana ungkapan H. Radeni di atas, bahwa bagi mereka ketiga tempat tersebut memiliki keterkaitan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Dari segi waktu, misalnya, justru mereka lebih banyak menggunakan waktunya di *pasar* dan *masjid*, ketimbang di *rumah*. Inilah sebabnya, ketika mereka membangun perumahan sebagai tempat tinggal, selalu berupaya untuk mendekati

*pasar* dan *masjid*. Meskipun sebagai konsekwensinya, mereka melibatkan diri dalam proses perbaikan atau pembangunan masjid yang baru di sekitar tempat tinggal mereka.

## **2. Hubungan Fungsional Pasar dan Masjid**

Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2002), bahwa dalam perkembangan kota-kota di Indonesia mencitrakan begitu pesatnya pertumbuhan “simbol-simbol urban” yang tampak di ranah-ranah publik. Dari sekian banyak simbol urban yang dominan menonjol pada berbagai kota di Indonesia, adalah *pasar* dan *masjid*. Bangunan *pasar* mencitrakan sebagai tempat yang mendorong berlangsungnya proses inter-aksi sosial dalam sistem ekonomi modern yang bersifat kapitalistik. Sedangkan masjid sebagai tempat peribadatan dan inter-aksi sosial keagamaan bagi *kaum muslim*.

Keberhasilan orang Gu-Lakudo dalam hal mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam, memang secara empirik dapat dibuktikan. Dalam konteks ini, mereka menciptakan hubungan relasional antara *masjid* dan *pasar*. Bagi orang Gu-Lakudo, *pasar* bukan hanya difungsikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual-beli barang dan jasa semata. Melainkan merupakan sebuah institusi sosial ekonomi dalam konteks perdagangan yang menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Secara fungsional, *pasar* bukan hanya menghimpun barang ekonomi, tetapi juga sebuah tempat yang menjadi pusat berlangsungnya aktivitas sosial kemasyarakatan.

Dalam proses pertukaran tersebut, bukan hanya menunjuk pada kelangsungan transaksi ekonomi semata. Namun juga sebagai salah satu institusi sosial masyarakat yang terkonsruksi secara *sosio-kultural* yang dapat mendorong proses berlangsungnya inter-aksi sosial antar-sesama individu atau pun kelompok masyarakat melalui mekanisme *pasar*. Karenanya, keberadaan *pasar* tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi jual-beli atau pertukaran barang dan jasa. Tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya transformasi nilai-nilai sosial budaya pada konteks masyarakat tertentu, seperti yang tampak pada komunitas *migran* orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Sedangkan *masjid*, tidak hanya sekedar difungsikan sebagai tempat peribadatan secara formal, tetapi juga menjadi sebuah institusi sosial keagamaan yang melangsungkan proses transformasi nilai-nilai keislaman terhadap umatnya. Bagi orang Gu-Lakudo, dengan rutinitas kehidupan beragama mereka—seperti kebiasaan shalat berjama’ah pada setiap waktu di *masjid*—dapat berfungsi ganda. Karena *masjid*, menjadi tempat melakukan inter-aksi bagi kaum

muslim. Sebagai institusi keagamaan, secara internal justru menguatkan “kohesi sosial” mereka sebagai komunitas *migran-muslim* perkotaan, yang kemudian diimplementasikan dalam aktivitas perdagangan di *pasar*. Misalnya, ketika seorang pedagang yang sementara meninggalkan tempat dagangannya, jika ada pembeli yang datang, maka tetangga di sebelahnya yang akan menjualkan barangnya. Melalui *masjid*, dapat mendorong mobilitas ekonomi perdagangan mereka di *pasar*. Sebaliknya, aktivitas perdagangan mereka di *pasar* berimplikasi pada maraknya kehidupan beragama di *masjid*. Misalnya, *pasar* La Elangi dan Mall Umna Rijoli berdekatan dengan masjid Agung, maka setiap waktu shalat, memungkinkan bagi mereka untuk shalat berjama’ah di masjid.

Gambar 11.7

Pasar La Elangi dan Mall Umna berdekatan dengan Masjid Agung kota Bau-Bau.



penelitian

Masjid Agung kota Bau-Bau yang direnovasi para pedagang Gu-Lakudo



*Sumber:* Foto peneliti ketika melakukan penelitian lapangan di Bau-Bau (2008)

Dengan aktivitas ekonomi perdagangan yang mereka geluti dan kembangkan di *pasar*, yang kemudian disertai oleh ketaatan menjalankan ibadah shalat berjama'ah di *masjid*, agaknya secara empirik bahwa orang Gu-Lakudo memfungsionalisasikan institusi sosial ekonomi tersebut sebagai wilayah atau area pengaktualisasian eksistensi etnisitas mereka. Lalu didukung oleh persamaan dari keyakinan beragama yang memang sudah terjalin dengan kuat di masjid, memungkinkan bagi mereka untuk “membuka akses baru” untuk pengembangan usaha perdagangan dalam skala yang lebih luas dari sebelumnya. Seiring dengan proses perjalanan waktu, maka dengan instrumen yang demikian ini justru telah mendorong mobilitas dan keberhasilan pengembangan ekonomi perdagangan mereka pada beberapa kota di Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, menangkap bagaimana fenomena sosial ekonomi perdagangan komunitas *urban* orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara—terutama di kota Bau-Bau—agaknya memang memerlukan kerangka pemikiran analitis yang lebih bersifat multi-dimensional. Memang secara empirik mencitrakan konsep pemikiran substantivis Max Weber, Karl Polanyi, Mark Granovetter, dan Victor Nee. Namun, berkaitan dengan konteks pemikiran tentang perkembangan peradaban Islam, adalah seperti yang dikonsepsikan oleh Ibnu Khaldun.

Misalnya, tentang adanya kelekatan sosial (*embeddedness*) dalam setiap tindakan ekonomi individu atau kolektivitas masyarakat. Ketika mulai terbentuknya lembaga ekonomi seperti pasar, yang kemudian disertai dengan berlangsungnya tindakan ekonomi individu dalam melakukan kalkulasi untung-rugi, pada hakikatnya sebagai bentuk ekspresi yang riil terhadap “ketertambatan sosial” yang sebelumnya telah berakar dalam sistem nilai budaya masyarakat. Dengan demikian, maka fenomena aktivitas ekonomi yang berlangsung di *pasar* menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan begitu saja dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama pada suatu masyarakat. Ekspresi kehidupan sosial ekonomi seperti inilah yang telah menonjol dalam perkembangan usaha ekonomi perdagangan *kaum urban* orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Sedangkan berkaitan dengan cikal-bakal terbangunnya peradaban Islam, secara *socio-historis* juga berawal di *masjid*. Terbentuknya masyarakat Madinah, misalnya, yang

dibimbing kepemimpinan Nabi Muhammad, *masjid* memiliki fungsi yang multi-dimensi, bukan hanya sekedar tempat *ibadah shalat*. Menurut Ibnu Khaldun, *masjid* berfungsi sebagai basis penguatan *sosio-kultural* yang membentuk persaudaraan dalam Islam (*asshabiyah*), atau solidaritas sosial dalam konsep teoretik Emile Durkheim. Oleh karena itu, dengan menguatnya *asshabiyah* dalam suatu komunitas masyarakat *muslim*—seperti yang tampak pada kaum *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo—maka semakin mendorong intensitas “kerja sama mereka” dalam hal pencapaian tujuan bersama. Yang selanjutnya, menciptakan suatu bentuk “harmoni sosial” yang dapat menggerakkan kekuatan bersama untuk membangun kebudayaan Islam.

Namun demikian, realitas kehidupan sosial ekonomi perdagangan dan keagamaan mereka adalah mengintegrasikan fungsi *pasar* dan *masjid*, yang pada hakekatnya tidak terbentuk dengan sendirinya. Kecuali secara *teologis-normatif* dibimbing oleh nilai-nilai ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan hidup yang berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal ini, orang Gu-Lakudo memaknai ayat al-Qur’an yang menyatakan: *Wahai orang-orang yang beriman. Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS. 62:9-10).*

Merujuk pada petunjuk Al-Qur’an ini, orang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha ekonomi perdagangan, tidak hanya sekedar mengejar keberuntungan dunia dalam bentuk kecukupan dan kelimpahan material; tetapi lebih dari itu adalah juga mendapatkan keberuntungan akhirat. Karena itu, mereka menerapkan pola hidup keseimbangan antara kepentingan dunia (*material*) dan akhirat (*spiritual*), menurut ajaran Islam dikonsepsikan sebagai *falah*. Dengan demikian, maka *falah* merupakan konsepsi kehidupan bagi kaum muslim, yang berorientasi jangka panjang (*dunia* dan *akhirat*); yang membawa implikasi perilaku atau pun tindakan individu (*mikro*) dan kolektivitas umat Islam (*makro*). Terkait dengan kehidupan keduniaan, *falah* memiliki pengertian: kelangsungan hidup, kebebasan dalam hal mewujudkan keinginan secara pragmatis, pencapaian kehormatan individu, dan terciptanya *cita-ideal* dalam masyarakat muslim. Dan dalam kaitannya dengan kehidupan keakhiratan, *falah* menunjuk pada pengertian kesejahteraan hidup yang abadi, dan bukan yang bersifat temporer seperti ketika di dunia. Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi pedoman hidup orang

Gu-Lakudo, adalah: “*Tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya; dan tuntutanlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok*”.

Dengan konsepsi al-Qur'an tersebut, menjadi instrumen moralitas dan juga rasionalitas keagamaan bagi orang Gu-Lakudo untuk tidak hanya terfokus pada pengumpulan modal finansial dalam pengembangan ekonomi perdagangan. Namun juga hasil yang mereka dapatkan digunakan untuk mendukung kehidupan beragama mereka, misalnya membangun masjid dan berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.

### **3. Motif Naik Haji Orang Gu-Lakudo**

Pelaksanaan *ibadah haji* bagi kaum muslim adalah suatu perjalanan panjang dari negeri asalnya ke tanah suci Mekkah. Dengan demikian, maka kaum muslim yang termotivasi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut, membutuhkan suatu pemahaman yang paripurna bahwa *naik haji* tidak hanya bernuansa pemenuhan perjalanan *fisik-material* dan *spiritualitas* keagamaan, tetapi juga berorientasi pada proses transformasi sosial-budaya. Karena itu, dari aspek *fisik-material*, misalnya, melaksanakan ibadah *haji* ke Mekkah memerlukan dukungan kemampuan finansial yang sudah cukup memadai sesuai dengan standar biaya (*ongkos naik haji*) yang setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah.

Orang Gu-Lakudo, sebagai salah satu *etnik lokal* dan juga *kaum urban-muslim* perkotaan yang sukses mengembangkan usaha ekonomi perdagangan pada beberapa kota di Sulawesi Tenggara, menunjukkan tingkat kecenderungan *naik haji* mereka yang cukup tinggi. Motivasi mereka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini pada setiap tahun, setidaknya dapat disejajarkan dengan orang Buton, Wakatobi, atau *kaum migran* Bugis-Makassar. Artinya, dengan makin menguatnya tradisi keagamaan untuk *naik haji* orang Gu-Lakudo, memberikan gambaran bahwa mereka sudah memiliki keunggulan finansial yang cukup memadai. Kemampuan finansial mereka, baik untuk membiayai perjalanan pergi-pulang mereka dari daerah asalnya ke tanah suci Mekkah maupun untuk tetap mengembangkan usaha ekonomi perdagangan yang mereka geluti sebelumnya.

Berdasarkan rangkaian data lapangan (2003—2007) yang diperoleh peneliti pada Kantor Departemen Agama kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa persentase *naik haji* orang Gu-Lakudo setiap tahunnya, melampaui etnik lokal yang lain pada dua wilayah pemerintahan tersebut. Dalam realitasnya, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kecenderungan naik haji orang Gu-Lakudo.

*Pertama*, adalah terkait dengan tingkat kesadaran keagamaan yang mereka miliki dan telah membentuk karakter kepribadian mereka sebagai *kaum muslim* yang senantiasa menunjukkan ketaatan dalam hal menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam. Dengan demikian, maka sebagai konsekwensinya bagi setiap muslim yang telah memiliki kemampuan—baik dari aspek *fisik-material* maupun *spiritualitas* keagamaan—menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kaum *urban-muslim* orang Gu-Lakudo, dengan tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan mereka yang cukup tinggi menjadi dorongan yang kuat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima.

*Kedua*, berkaitan dengan kemampuan finansial yang mereka miliki. Oleh karena dengan kemampuan finansial tersebut, merupakan bentuk kesiapan secara material untuk menunaikan ibadah haji. Bagi kaum *urban* dan *migran* orang Gu-Lakudo, kemampuan finansial yang mereka miliki, juga terkait dengan keberhasilan mereka dalam mengembangkan usaha ekonomi perdagangan. Artinya, salah satu faktor yang cukup mendasar yang mempengaruhi orang Gu-Lakudo untuk memiliki kecenderungan yang tinggi dalam melaksanakan ibadah haji adalah keberhasilan mereka dalam usaha perdagangan.

Lalu apa yang menjadi motif utama orang Gu-Lakudo naik haji? Apa hanya karena terdorong oleh pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, atau juga terobsesi oleh motif lain terkait dengan konteks kehidupan sosial mereka sebagai *kaum urban* dan *migran*? Dari hasil studi lapangan yang dilakukan peneliti—berdasarkan penjelasan salah seorang informan orang Gu-Lakudo—ternyata motif naik haji mereka bukan hanya sekedar menjalankan ritual atau bentuk peribadatan dalam Islam dengan cara menunaikan ibadah haji; tetapi juga berkaitan dengan prestise sosial ekonomi yang mereka capai, yang selanjutnya justru “menguatkan jaringan usaha perdagangan” yang mereka kembangkan sebelumnya.

*Status haji* bagi kami orang Gu-Lakudo, selain menjadi simbol ketaatan terhadap kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, sekaligus berorientasi pada penguatan posisi sosial ekonomi yang kami geluti selama ini. Seseorang yang telah menyandang *predikat haji* dapat menjadi panutan dalam menjalankan perintah agama dan juga berada pada posisi sosial ekonomi yang terpandang di masyarakat, karena sudah mampu menunaikan *ibadah haji* ke tanah suci Mekkah (H. Radeni, Wawancara di Bau-Bau, 17 Pebruari 2008).

Dari kutipan hasil wawancara tersebut, setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa motif *naik haji* orang Gu-Lakudo, adalah selain untuk memenuhi perintah agama atau rukun Islam kelima, tetapi juga bernuansa pada peningkatan *prestise* sosial dan ekonomi bagi mereka yang telah menyandang *predikat haji*. Terkait dengan konteks kehidupan sosial dan ekonomi mereka, seseorang yang telah menunaikan *ibadah haji*, maka sama artinya dengan memiliki status sosial yang terpendang. Sehingga, terposisikan sebagai panutan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Melalui penguatan status sosial keagamaan sebagai seorang haji, maka selain menjadi panutan dalam kehidupan kolektivitas sosial mereka; namun juga makin memperkuat jaringan usaha perdagangan yang mereka kembangkan sebelumnya.

Karena itu, *status haji* bagi orang Gu-Lakudo tidak hanya benuansa ritualisme keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan status sosial ekonomi mereka. Yang dapat memberikan refrensi bahwa mereka sebagai pedagang yang ulet, jujur, dan taat dalam mengamalkan ajaran agamanya. Melalui tabel berikut ini, dapat menggambarkan bagaimana kecenderungan naik haji orang Gu-Lakudo, baik yang berada di daerah asal mereka di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dan juga Kota Bau-Bau.

Tabel 11.7

Profil Haji Kabupaten Buton/Orang Gu-Lakudo dari Tahun 2003 – 2007.

Tahun	Kabupaten Buton	Kecamatan Lakudo	Persentase Naik Haji Orang Lakudo
2003	206	25	
2004	161	16	
2005	176	18	
2006	96	4	
2007	41	12	

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton (2008).

Tabel 12.7

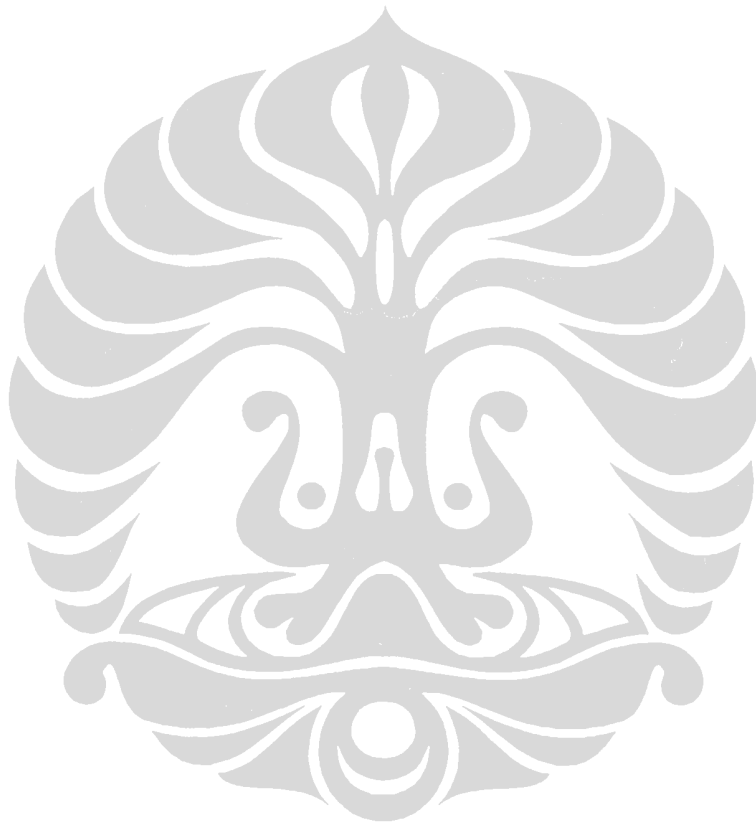
Profil Haji Kota Bau-Bau/Orang Gu-Lakudo dari Tahun 2003 – 2007.

Tahun	Jumlah Haji Kota Bau-Bau	Jumlah Haji Orang Gu-Lakudo	Jumlah Haji Pedagang Gu-Lakudo
2003	190	30	22
2004	343	65	45



2005	203	49	40
2006	167	33	24
2007	201	42	33

*Sumber* : Kantor Departemen Agama Kota Bau-Bau (2008).



Filename: BAB VII  
Directory: D:\Lutfi\Lutfi  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 3:43:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 3:43:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 2 Minutes  
Last Printed On: 7/12/2010 4:07:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 81  
Number of Words: 27,489 (approx.)  
Number of Characters: 156,688 (approx.)

